

Kebijakan Pembangunan Pariwisata Kabupaten Luwu Tahun 2021-2036

Buku ini diilhami oleh kondisi kekinian daerah di wilayah Indonesia khususnya Kabupaten Luwu yang memiliki potensi atau sumber daya pariwisata yang patut menjadi bahan perhatian bersama agar dapat dikelola dan memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakatnya. Mayoritas pemerintah daerah memiliki argumen positif bahwa daerah mereka layak menjadi destinasi wisata unggulan dan karenanya, menjadikan pariwisata sebagai sektor penting pengembangan daerah. Berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata dilaksanakan untuk menarik wisatawan datang ke destinasi. Manfaat positif pariwisata telah mendorong pemerintah daerah untuk semakin mengelolah potensi daerah mereka dengan harapan masyarakatnya semakin menyadari pentingnya pariwisata dalam kehidupan mereka.

Melalui kerjasama antara Dinas Pariwisata Kabupaten Luwu dengan Politeknik Pariwisata Makassar dalam kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengembangan Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Luwu sebagai salah satu strategi yang menghasilkan arahan kebijakan pengembangan kepariwisataan kabupaten Luwu dengan fokus pada potensi wisata bahari, budaya dan minat khusus sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan survey, diskusi kelompok terfokus dan serangkaian pembahasan bersama stakeholders kepariwisataan Kabupaten Luwu telah dilakukan untuk menyepakati dan menyempurnakan sebagai dokumen publik yang dijadikan pedoman dan rujukan bagi pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata, dan masyarakat dalam mengembangkan kepariwisataan daerah Kabupaten Luwu.

Buku ini diperuntukkan untuk mengetahui arah strategi "Kebijakan Pengembangan dan Perencanaan Kepariwisata Kabupaten Luwu" dengan segala sumber daya pariwisata pendukungnya. Menawarkan konsep pariwisata dengan paket lengkap yang terdiri dari wisata bahari, wisata kuliner, wisata religi dan wisata budaya. Jika pengelolaan pariwisata ini ditangani dengan baik, maka, tentu saja akan memberikan dampak yang positif terhadap perekonomian masyarakat di Kabupaten Luwu.



Wonocolo Utara V/18 Surabaya
+628977416123
globalaksarapers@gmail.com



Drs. Muhammad Arifin, M.Pd., CHE,dkk

Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Daerah
Kabupaten Luwu Tahun 2021-2036



Kebijakan Pembangunan Pariwisata Kabupaten Luwu Tahun 2021-2036



Drs. Muhammad Arifin, M.Pd., CHE
Muhammad Arifin Muh. Salim, M.Pd., PhD., CHE
Masri Ridwan, S.Pd., M.Pd
Jasman, ST., M.Si

**KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN KABUPATEN LUWU
TAHUN 2021-2036**

**Drs. Muhammad Arifin, M.Pd., CHE
Muhammad Arfin Muh. Salim, M.Pd., P.hD., CHE
Masri Ridwan, S.Pd., M.Pd
Jasman, ST., M.Si**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

**PASAL 113
KETENTUAN PIDANA
SANKSI PELANGGARAN**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Drs. Muhammad Arifin, M.Pd., CHE
Muhammad Arfin Muh. Salim, M.Pd., P.hD., CHE
Masri Ridwan, S.Pd., M.Pd
Jasman, ST., M.Si

**KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN KABUPATEN LUWU
TAHUN 2021-2036**



Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Luwu tahun 2021-2036

*Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia
oleh Politeknik Pariwisata Makassar*

ISBN: 978-623-99486-4-1

xvii + 255 hal; 18,2 x 25,7 cm

Cetakan Pertama, Juni 2022

copyright © Juni 2022 Politeknik Pariwisata Makassar

- Penulis** : Drs. Muhammad Arifin, M.Pd., CHE
Muhammad Arfin Muh. Salim, M.Pd., P.hD., CHE
Masri Ridwan, S.Pd., M.Pd
Jasman, ST., M.Si
- Penyunting** : Muh. Zainuddin Badollahi, S.Sos., M.Si
- Desain Sampul** : Arum Nur Laili
- Layouter** : Ilil Ni'matul M

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan bentuk dan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

Dicetak oleh:



CV. Global Aksara Pers

Anggota IKAPI, Jawa Timur, 2021, No. 282/JTI/2021

Jl. Wonocolo Utara V/18 Surabaya

+628977416123/+628573269334

globalaksarapers@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas ridho dan izinnya atas penyelesaian buku ini. Buku ini diilhami oleh kondisi kekinian daerah di wilayah Indonesia khususnya Kabupaten Luwu yang memiliki potensi atau sumber daya pariwisata yang patut menjadi bahan perhatian bersama agar dapat dikelola dan memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakatnya. Mayoritas pemerintah daerah memiliki argumen positif bahwa daerah mereka layak menjadi destinasi wisata unggulan dan karenanya, menjadikan pariwisata sebagai sektor penting pengembangan daerah. Berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata dilaksanakan untuk menarik wisatawan datang ke destinasi. Manfaat positif pariwisata telah mendorong pemerintah daerah untuk semakin mengelolah potensi daerah mereka dengan harapan masyarakatnya semakin menyadari pentingnya pariwisata dalam kehidupan mereka.

Melalui kerjasama antara Dinas Pariwisata Kabupaten Luwu dengan Politeknik Pariwisata Makassar dalam kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengembangan Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Luwu sebagai salah satu strategi yang menghasilkan arahan kebijakan pengembangan kepariwisataan kabupaten Luwu dengan fokus pada potensi wisata bahari, budaya dan minat khusus sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan survey, diskusi kelompok terfokus dan serangkaian pembahasan bersama stakeholders kepariwisataan Kabupaten Luwu telah dilakukan untuk menyepakati dan menyempurnakan sebagai dokumen publik yang dijadikan pedoman dan rujukan bagi pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata, dan masyarakat dalam mengembangkan kepariwisataan daerah Kabupaten Luwu.

Buku ini diperuntukkan untuk mengetahui arah strategi "**Kebijakan Pengembangan dan Perencanaan Kepariwisata Kabupaten Luwu**" dengan segala sumber daya pariwisata pendukungnya. Menawarkan konsep pariwisata dengan paket lengkap yang terdiri dari wisata bahari, wisata kuliner, wisata religi dan wisata budaya. Jika pengelolaan pariwisata ini ditangani dengan baik, maka, tentu saja akan memberikan dampak yang positif terhadap perekonomian masyarakat di Kabupaten Luwu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan ini, oleh karena itu segala saran dan kritikan yang membangun akan penulis terima dengan senang hati demi kemajuan industri kepariwisataan lebih khusus di daerah Kabupaten Luwu. Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Drs. Muhammad Arifin, M.Pd., CHE. (Direktur Politeknik Pariwisata Makassar), menyampaikan terima kasih kepada Politeknik Pariwisata Makassar atas bantuannya untuk penerbitan buku ini. Kami mengharapkan buku ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pembaca. Ucapan terimakasih pula disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu sehingga buku ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT menjadikan ibadah untuk kita semua.

Kota Makassar, 10 Maret 2022

Tim Penulis

SAMBUTAN BUPATI KABUPATEN LUWU



Segala Puji dan rasa syukur senantiasa kita persembahkan kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam yang menguasai bumi dan langit serta yang ada didalamnya, atas terbitan buku ini yang berjudul **“Kebijakan Pengembangan dan Perencanaan Kepariwisata Kabupaten Luwu”**. Buku ini hasil kajian Tim Penulis yang dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa Kabupaten Luwu memiliki potensi yang sangat besar dalam Pariwisata.

Sejak bergesernya Ibu Kota Kabupaten Luwu ke Belopa, pasca berdirinya Kota Palopo sebagai otonomi baru. Kabupaten Luwu telah berkomitmen untuk membangun daerah ini dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Kabupaten Luwu sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan bertekad menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor andalan perekonomian daerah serta menjadi media pelestarian alam dan budaya sekaligus memperkenalkan potensi keindahan alam, letak strategis, kemudahan akses, keramahan penduduk serta sistem nilai masyarakat yang ramah dan religius. Kita sadari sepenuhnya bahwa salah satu variabel penting dalam oembangunan sebuah daerah adalah menjadikan budaya, alam dan sumber pariwisata lainnya sebagai bagian dalam mengubah dan membangun masyarakat untuk mencapai visi dan misi serta program kerja pembangunan perubahan untuk mewujudkan masyarakat maju dan sejahtera. Sebuah komitmen untuk mewujudkan Kabupaten Luwu agar lebih berkembang dan sejajar dengan Kabupaten lainnya di Indonesia yang didukung oleh konektivitas wisayah dan daya saing yang tinggi seta berorientasi terhadap lingkungan dan berkomitmen untk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good Government*) yang berlandaskan pada kearifan lokal (*loxal wisdom*) di dukung elemen masyarakat yang berpengatahuan, berkerampilan, bekebudayaan dan mempunyai sifat religius yang tinggi.

Terkait dengan buku ini yang disusun oleh Bapak Drs. Muhammad Arifin, M.Pd., CHE, dkk yang berjudul **“Kebijakan Pengembangan dan Perencanaan Kepariwisata Kabupaten Luwu”**. Kami selaku pimpinan daerah di Kabupaten Luwu menyambut dengan baik penerbitan buku ini, sejalan dengan misi keempat yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inovatif dan berdaya saing tinggi dengan mengoptimalkan potensi yang ada dalam pemanfaatan keunikan alam, atraksi budaya serta kehidupan dan kearifan lokal masyarakat Luwu dan strategi yang menghasilkan arahan kebijakan pengembangan kepariwisataan Kabupaten Luwu dengan fokus pada potensi wisata bahari, budaya dan minat khusus sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Upaya memperkenalkan pariwisata melalui buku ini diharapkan dapat berpengaruh pada peningkatan jumlah kunjungan (*number of visit*), lama tinggal wisatawan (*long of stay*) serta pengeluaran wisatawan (*tourist expenditure*) di Kabupaten Luwu. Dengan demikian partisipasi masyarakat, para pengusaha semakin meningkay dan mendapatkan manfaat dengan bertambahnya pendapatan bagi masyarakat dan daerah, bertambah pula pemasukan PAD yang digunakan untuk membangun daerah menuju masyarakat sejahtera, maju, berkembang dan berkelanjutan.

Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala aktivitas kita dalam membangun daerah menjadi salah satu terkemuka di Indonesia. Amiin Ya Rabbal Alamin.



Belopa, 10 Maret 2022
Bupati Luwu
DR. Drs. H. Basim Mattayang M.Pd

SAMBUTAN

KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN LUWU



Kabupaten Luwu sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan bertekad menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor andalan perekonomian daerah serta menjadi media pelestarian alam dan budaya sekaligus memperkenalkan potensi keindahan alam, letak strategis, kemudahan akses, keramahan penduduk serta sistem nilai masyarakat yang ramah dan religius. Dengan potensi wisata alam dan budaya, keunikan dan keaslian daya tarik ini merupakan eksotisme alam mulai dari gugusan pengunungannya hingga alam bahari pesisirnya, eksotisme budaya yang telah lama

hidup ratusan tahun tumbuh dan berkembang sampai saat ini mewariskan artefak budaya benda maupun tak benda tak terhingga jumlahnya kearifan lokal masyarakat yang dilahirkan masyarakat Luwu.

Dinas Pariwisata Kabupaten Luwu bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri Pariwisata naungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Baparekraf Kampus Politeknik Pariwisata Makassar sebagai langkah dalam melaksanakan kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengembangan Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Luwu sebagai salah satu strategi yang menghasilkan arahan kebijakan pengembangan kepariwisataan Kabupaten Luwu dengan fokus pada potensi wisata bahari, budaya dan minat khusus sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan survey, diskusi kelompok terfokus dan serangkaian pembahasan bersama stakeholders kepariwisataan kabupaten Luwu telah dilakukan untuk menyepakati dan menyempurnakan sebagai dokumen publik yang dijadikan pedoman dan rujukan bagi pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata, dan masyarakat dalam mengembangkan kepariwisataan daerah kabupaten Luwu.

Kearifan lokal dengan berbagai dimensinya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dalam kurun waktu yang lama, mewujudkan menjadi daya tarik wisata budaya yang dapat menarik kunjungan wisatawan, sebab memiliki keunikan dari tradisi masyarakat, baik tarian dan musik, tata cara berpakaian, penggunaan teknologi hingga jenis makanan dan kebiasaan makan yang menjadi atraksi terendiri yang dapat menjadi produk pariwisata. Dalam upaya dan kepedulian yang dilakukan oleh Bapak **Drs. Muhammad Arifin, M.Pd., CHE**, dkk, untuk mengeksplorasi pengembangan dan perencanaan kepariwisataan Kabupaten Luwu patut diberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi.

Terima kasih kami sampaikan kepada Tim Penulis Dosen Politeknik Pariwisata Makassar yang telah menginisiasi penulisan kajian **Kebijakan Pengembangan dan Perencanaan Kepariwisata Kabupaten Luwu**. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala aktivitas kita dalam membangun daerah menjadi salah satu terkemuka di Indonesia. Amiin Ya Rabbal Alamin.



SAMBUTAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR



Politeknik Pariwisata Makassar sebagai Perguruan Tinggi Negeri Pariwisata di bawah naungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Baparekras terus menerus dan berkelanjutan mendorong peningkatan kualitas perguruan tinggi, termasuk mendorong publikasi ilmiah melalui penerbitan buku sehingga dapat memperkaya dialektika dan pemahaman tentang kebijakan pengembangan dan perencanaan kepariwisataan daerah. Karya ini diharapkan dapat memperkaya informasi tentang menghasilkan arahan kebijakan pengembangan kepariwisataan Kabupaten Luwu dengan fokus pada potensi wisata bahari, budaya dan minat khusus sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang ada di beberapa daerah di Indonesia, salah satunya yakni Kabupaten Luwu yang merupakan anugerah bagi bangsa Indonesia dengan kekayaan hasil budaya yang berkontribusi dalam mewujudkan tujuan kepariwisataan nasional yaitu melestarikan kebudayaan daerah dan nasional serta merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Republik Indonesia melalui pemahaman kebijakan pengembangan dan perencanaan kepariwisataan dan sekaligus menjadi daya tarik wisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daerah dan Negara.

Semoga dengan karya ini dapat mendorong civitas akademik Politeknik Pariwisata Makassar untuk lebih Produktif lagi dalam melakukan kajian ilmiah dan menuangkan buah fikiran melalui publikasi ilmiah. Selain itu, buku ini juga diharapkan dapat menjadi acuan pembelajaran bagi mahasiswa dalam pengembangan dan perencanaan kepariwisataan hingga melestarikan potensi yang ada di suatu daerah sebagai daya tarik wisata

Kota Makassar, 10 Maret 2022
Direktur Politeknik Pariwisata Makassar




Dr. Muhammad Arifin, M.Pd., CHE.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
SAMBUTAN BUPATI KABUPATEN LUWU	vi
SAMBUTAN KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN LUWU	viii
SAMBUTAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv

BAB - 1

PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran	3
1.3. Keluaran	5
1.4. Ruang Lingkup	5
1.5. Metodologi	8
1.6. Jangka Waktu Perencanaan	14
1.7. Sistematika Pelaporan	15

BAB - 2

KEPARIWISATAAN KABUPATEN LUWU	17
2.1. Kepariwisata Kabupaten Luwu Dalam Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Nasional	17
2.2. Kepariwisata Kabupaten Luwu Dalam Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan	20
2.3. Kepariwisata Dalam Kebijakan Pembangunan Wilayah Kabupaten Luwu	25

BAB - 3

KONDISI WILAYAH KABUPATEN LUWU	32
3.1. Sejarah Kabupaten Luwu	32
3.2. Lambang Kabupaten Luwu	33
3.3. Kondisi Fisik Kabupaten Luwu	39
3.4. Potensi Pariwisata Kabupaten Luwu	43
3.5. Perekonomian Kabupaten Luwu	48

BAB - 4

KABUPATEN LUWU SEBAGAI DESTINASI PARIWISATA	51
4.1. Daya Tarik dan Sumber Daya Wisata Kab. Luwu	51
4.2. Fasilitas Pariwisata Kabupaten Luwu	75
4.3. Aksesibilitas Pendukung Pariwisata Kab. Luwu	78

BAB - 5

INDUSTRI PARIWISATA KABUPATEN LUWU	80
5.1. Usaha Pariwisata Kabupaten Luwu	80
5.2. Usaha Kecil dan Menengah Pendukung Pariwisata	87

BAB - 6

PASAR DAN PEMASARAN PARIWISATA KABUPATEN LUWU	88
6.1. Kinerja Pariwisata Indonesia	88
6.2. Perkembangan Wisatawan Kabupaten Luwu	92
6.3. Karakteristik Pasar Wisatawan Kabupaten Luwu	101
6.4. Pemasaran Pariwisata Kabupaten Luwu	105

BAB - 7

KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN LUWU	109
7.1. Unsur Akademisi (<i>Academician</i>)	109
7.2. Unsur Birokrasi (<i>Government</i>).....	110
7.3. Unsur Masyarakat (<i>Community</i>).....	111
7.4. Unsur Pengusaha (<i>Business</i>).....	112
7.5. Unsur Media (<i>Media</i>).....	112

BAB - 8

PRINSIP DAN KONSEP KEPARIWISATAAN KABUPATEN LUWU	114
8.1. Capaian Penyelenggaraan Pembangunan Kepariwisataa.....	114
8.2. Tantangan dan Isu Strategis Pembangunan Kepariwisataa	131
8.3. Prinsip Pembangunan Kepariwisataa	134
8.4. Konsep Pembangunan Kepariwisataa	142
8.5. Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan Kepariwisataa	144

BAB - 9

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN LUWU	148
9.1. Kebijakan Pembangunan Kepariwisataa.....	148
9.2. Strategi Pembangunan Kepariwisataa	149
9.3. Sistem Jaringan Prasarana Utama	154
9.4. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya	155
9.5. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Luwu	158
9.6. Kawasan Strategis Kabupaten Luwu	163

BAB - 10

RENCANA PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN PARIWISATA KABUPATEN LUWU	165
10.1. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD)	165
10.2. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD)	167
10.3. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD).....	180

BAB - 11

PROGRAM DAN INDIKASI PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN

KABUPATEN LUWU	214
11.1. Arahana dan Strategi dalam Pengwilayahan Destinasi	214
11.2. Arahana dan Strategi Pengembangan Produk Pariwisata	221
11.3. Arahana dan Strategi Pengembangan Industri dan Investasi	225
11.4. Arahana dan Strategi Pengembangan Pasar dan Pemasaran	229
11.5. Arahana dan Strategi Pengelolaan Lingkungan	232
11.6. Arahana dan Strategi Pengelolaan Kelembagaan dan SDM	233

DAFTAR PUSTAKA.....	252
----------------------------	------------

PROFIL PENULIS	255
-----------------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Bagan Kerangka Penyusunan Ripparkab Kabupaten Luwu.....	6
Tabel 2.1	Perwilayahan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Palopo dan Sekitarnya.....	24
Tabel 3.1	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Tahun 2020	42
Tabel 3.2	Potensi Wisata Alam Kabupaten Luwu Tahun 2021	43
Tabel 3.3	Potensi Wisata Sejarah dan Budaya Kabupaten Luwu Tahun 2021 ...	46
Tabel 3.4	Potensi Wisata Buatan Manusia dan Minat Khusus Kabupaten Luwu Tahun 2021	48
Tabel 3.5	Distribusi Prosentase PDRB Kabupaten Luwu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 – 2019	49
Tabel 4.1	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Luwu Tahun 2019 – 2020	75
Tabel 4.2	Data Jalan Menurut kondisi Jalan di Kabupaten Luwu (km) Tahun 2019 – 2020.....	76
Tabel 4.3	Daya Terpasang Listrik PT. PLN (Persero) Pada Cabang/Ranting Menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu, 2020	76
Tabel 4.4	Jumlah Pelanggan dan Air Minum Disalurkan oleh PDAM Kabupaten Luwu Menurut Kecamatan Tahun 2020	77
Tabel 4.5	Jumlah Bank, Koperasi dan Lembaga Keuangan di Kabupaten Luwu Tahun 2018	78
Tabel 4.6	Jumlah Angkutan Umum Menurut Jenis Angkutan di Kabupaten Luwu Tahun 2018 – 2020.....	79
Tabel 5.1	Jumlah Kamar dan Tempat Tidur Menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Tahun 2021.....	83
Tabel 5.2	Jumlah Restoran, Rumah Makan, Café, dan Usaha Lainnya Menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Tahun 2019 – 2020.....	85
Tabel 10.1	Kondisi Aktual Daya Tarik Wisata KSPD Larompong Selatan dan Sekitarnya.....	182
Tabel 10.2	Kondisi Aktual Daya Tarik Wisata KSPD Larompong dan Sekitarnya ..	183
Tabel 10.3	Kondisi Aktual Daya Tarik Wisata KSPD Suli dan Sekitarnya	185
Tabel 10.4	Kondisi Aktual Daya Tarik Wisata KSPD Suli Barat dan Sekitarnya ...	186
Tabel 10.5	Kondisi Aktual Daya Tarik Wisata KSPD Belopa dan Sekitarnya	188
Tabel 10.6	Kondisi Aktual Daya Tarik Wisata KSPD Belopa Utara dan Sekitarnya.....	190
Tabel 10.7	Kondisi Aktual Daya Tarik Wisata KSPD Bajo dan Sekitarnya.....	191
Tabel 10.8	Kondisi Aktual Daya Tarik Wisata KSPD Bajo Barat dan Sekitarnya ..	192
Tabel 10.9	Kondisi Aktual Daya Tarik Wisata KSPD Baseesangtempe dan Sekitarnya.....	194
Tabel 10.10	Kondisi Aktual Daya Tarik Wisata KSPD Latimojong dan Sekitarnya ..	196
Tabel 10.11	Kondisi Aktual Daya Tarik Wisata KSPD Basesangtempe Utara dan Sekitarnya.....	197
Tabel 10.12	Kondisi Aktual Daya Tarik Wisata KSPD Kamanre dan Sekitarnya	199
Tabel 10.13	Kondisi Aktual Daya Tarik Wisata KSPD Ponrang dan Sekitarnya	200
Tabel 10.14	Kondisi Aktual Daya Tarik Wisata KSPD Ponrang Selatan dan Sekitarnya.....	202

Tabel 10.15	Kondisi Aktual Daya Tarik Wisata KSPD Bupon dan Sekitarnya.....	203
Tabel 10.16	Kondisi Aktual Daya Tarik Wisata KSPD Bua dan Sekitarnya.....	205
Tabel 10.17	Kondisi Aktual Daya Tarik Wisata KSPD Walenrang dan Sekitarnya..	206
Tabel 10.18	Kondisi Aktual Daya Tarik Wisata KSPD Walenrang Timur dan Sekitarnya.....	207
Tabel 10.19	Kondisi Aktual Daya Tarik Wisata KSPD Walenrang Barat dan Sekitarnya.....	209
Tabel 10.20	Kondisi Aktual Daya Tarik Wisata KSPD Walenrang Utara dan Sekitarnya.....	210
Tabel 10.21	Kondisi Aktual Daya Tarik Wisata KSPD Lamasi dan Sekitarnya.....	212
Tabel 10.22	Kondisi Aktual Daya Tarik Wisata KSPD Lamasi Timur dan Sekitarnya.....	213

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Pendekatan Pengembangan Berkelanjutan	10
Gambar 1.2	Pengembangan Berbasis Masyarakat (<i>Community Based Development</i>).....	11
Gambar 1.3	Pendekatan Kesesuaian Antara Aspek Produk dan Pasar	12
Gambar 1.4	Konsep Klaster Destinasi Pariwisata	13
Gambar 1.5	Jangka Waktu Kebijakan Kabupaten Luwu	15
Gambar 2.1	Sistem Kepariwisata Nasional	18
Gambar 2.2	Peta Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Palopo dan Sekitarnya	23
Gambar 3.1	Lambang Kabupaten Luwu.....	38
Gambar 3.2	Peta Wilayah Administratif Kabupaten Luwu.....	41
Gambar 4.1	Pantai Pannori	51
Gambar 4.2	Hutan Penelitian Simoma	52
Gambar 4.3	Pantai Buntu Mata'bing.....	53
Gambar 4.4	Sarambu Masiang.....	53
Gambar 4.5	Sarambu Paburru.....	54
Gambar 4.6	Sarambu Biqcu	54
Gambar 4.7	Sarambu Pong Ma'ga	55
Gambar 4.8	Sarambu Daun Bunga	55
Gambar 4.9	Sarambu Balendo	56
Gambar 4.10	Bendung Tomatope	56
Gambar 4.11	Air Terjun Sarassa	58
Gambar 4.12	Kawasan Rante Lajang.....	59
Gambar 4.13	Air Terjun Bungalo	59
Gambar 4.14	Air Terjun Puraposoang.....	60
Gambar 4.15	Wisata Alam Pakalolo.....	61
Gambar 4.16	Wisata Alam Wai Tiddo	61
Gambar 4.17	Air Terjun Toga	62
Gambar 4.18	Air Terjun Ma'gandang	62
Gambar 4.19	Air Terjun Andulan	63
Gambar 4.20	Tari Balendo.....	64
Gambar 4.21	Ritual Mappacekke Wanua.....	65
Gambar 4.22	Ritual Rambu Solo'	55
Gambar 4.23	Liang Andulan.....	66
Gambar 4.24	Gua Illan Batu (Lo'ko Pa'kapanan).....	67
Gambar 4.25	Situs Buntu Lebani.....	68
Gambar 4.26	Liang 1 Situs Buntu Lebani.....	68
Gambar 4.27	Tinggalan Arkeologis Berupa Fragmen Gerabah dan Cangkang Molosca Pada Ceruk 1 Situs Buntu Lebani	69
Gambar 4.28	Gerabah dan Alat Batu pada Ceruk 2 Situs Buntu Lebani	69
Gambar 4.29	Gerabah pada Ceruk 3 Situs Buntu Lebani.....	70
Gambar 4.30	Fragmen Gerabah dan Tulang pada Ceruk 4 Situs Buntu Lebani ...	71
Gambar 4.31	Lumpang pada Situs Buntu Lebani.....	71
Gambar 6.1	Pengeluaran Pariwisata Mancanegara dan Pariwisata Domestik di Indonesia, 2016 – 2019 (Triliun Rupiah)	89
Gambar 6.2	Pengeluaran Pariwisata Mancanegara Menurut Produk Pariwisata di Indonesia (%).....	90

Gambar 6.3	Pengeluaran Pariwisata Nusantara Menurut Produk Pariwisata di Indonesia, 2019 (%).....	90
Gambar 6.4	Struktur Konsumsi Pariwisata Internal Indonesia, 2016 – 2019 (Triliun Rupiah).....	91
Gambar 6.5	Perbandingan GVATI, TDGVA, TDGDP, 2016 – 2019 (%).....	92
Gambar 6.6	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara (Wisnus) dan Total Pengeluaran Tahun 2010 – 2017	94
Gambar 6.7	Distribusi Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Menurut Provinsi Asal, Tahun 2017 (Persen)	95
Gambar 6.8	Distribusi Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Menurut Provinsi Tujuan, Tahun 2017 (Persen)	95
Gambar 6.9	Distribusi Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Menurut Aktivitas Wisata yang Dilakukan Tahun 2017	96
Gambar 6.10	Distribusi Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Menurut Akomodasi yang Digunakan Tahun 2016 – 2017 (Persen).....	97
Gambar 6.11	Distribusi Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Menurut Maksud Kunjungan Tahun 2016 – 2017 (Persen).....	98
Gambar 6.12	Rata-rata Lama Bepergian Wisatawan Nusantara Tahun 2016 – 2017 (Hari)	99
Gambar 6.13	Rata-rata Pengeluaran Per Perjalanan Wisatawan Nusantara Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2016 – 2017 (000 Rupiah).....	100
Gambar 6.14	Matriks Mc. Kinsey	106
Gambar 6.15	Prinsip dan Langkah Stratejik Pengembangan Daya Saing Pariwisata.....	108
Gambar 8.1	Target dan Capaian Pariwisata Nasional 2015 – 2019	114
Gambar 8.2	Capaian Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) Indonesia Tahun 2019	115
Gambar 10.1	Peta Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Kabupaten Luwu	167
Gambar 10.2	Peta KPPD Zona Selatan	168
Gambar 10.3	Peta KPPD Zona Timur	171
Gambar 10.4	Peta KPPD Zona Tengah	173
Gambar 10.5	Peta KPPD Zona Barat	176
Gambar 10.6	Peta KPPD Zona Utara.....	178
Gambar 10.7	Peta KSPD Larompong Selatan dan Sekitarnya	181
Gambar 10.8	Peta KSPD Larompong dan Sekitarnya	183
Gambar 10.9	Peta KSPD Suli dan Sekitarnya.....	184
Gambar 10.10	Peta KSPD Suli Barat dan Sekitarnya	186
Gambar 10.11	Peta KSPD Belopa dan Sekitarnya.....	188
Gambar 10.12	Peta KSPD Belopa Utara dan Sekitarnya.....	189
Gambar 10.13	Peta KSPD Bajo dan Sekitarnya.....	190
Gambar 10.14	Peta KSPD Bajo Barat dan Sekitarnya.....	192
Gambar 10.15	Peta KSPD Bessesangtempe dan Sekitarnya.....	193
Gambar 10.16	Peta KSPD Latimojong dan Sekitarnya	195
Gambar 10.17	Peta KSPD Bessesangtempe Utara dan Sekitarnya	197
Gambar 10.18	Peta KSPD Kamanre dan Sekitarnya	198
Gambar 10.19	Peta KSPD Ponrang dan Sekitarnya	200
Gambar 10.20	Peta KSPD Ponrang Selatan dan Sekitarnya	201
Gambar 10.21	Peta KSPD Bupon dan Sekitarnya	202
Gambar 10.22	Peta KSPD Bua dan Sekitarnya	204
Gambar 10.23	Peta KSPD Walenrang dan Sekitarnya	205
Gambar 10.24	Peta KSPD Walenrang Timur dan Sekitarnya	207
Gambar 10.25	Peta KSPD Walenrang Barat dan Sekitarnya.....	208
Gambar 10.26	Peta KSPD Walenrang Utara dan Sekitarnya	209

Gambar 10.27	Peta KSPD Lamasi dan Sekitarnya	211
Gambar 10.27	Peta KSPD Lamasi Timur dan Sekitarnya.....	212

BAB - 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sinkronisasi sektor-sektor pembangunan merupakan modal dasar bagi tercapainya pembangunan pariwisata yang terpadu baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Pembangunan pariwisata terpadu (*integrated tourism development*) terkait erat dengan berbagai sektor dan aspek yang tidak terlepas dari pola dan sistem perencanaan pembangunan daerah.

Dalam upaya memaksimalkan keterkaitan antar sektor pembangunan tersebut, Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan merupakan salah satu jawaban yang dapat mengakomodasi konstelasi tersebut, serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan kepariwisataan sesuai dengan perubahan kondisi saat ini.

Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan diperlukan untuk menghindari pembangunan yang bersifat sektoral, tumpang tindih atau terbengkalai karena saling mengharap; menghindari pembangunan pariwisata yang tidak terencana (bongkar pasang); dan meminimalisasi dampak negatif pariwisata yang mungkin timbul dan memaksimalkan dampak positif pariwisata terhadap pembangunan nasional, regional dan daerah.

Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Luwu dapat menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pariwisata sekaligus memberikan arah pengembangan yang jelas di dalam memposisikan kepariwisataan Kabupaten Luwu pada tingkat provinsi maupun nasional dan yang tidak kalah pentingnya agar dapat bersinergi secara positif, dan menghindarkan benturan antar daerah.

Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Luwu juga dapat memberikan tatanan yang jelas dalam pelaksanaan pengembangan kepariwisataan daerah, termasuk dalam mekanisme kerjasama antar berbagai pihak yang terkait : siapa berbuat apa, baik untuk instansi tingkat provinsi, maupun tingkat kabupaten, dan kaitan antar sektor dalam kabupaten.

Pengembangan pariwisata Kabupaten Luwu sebagai destinasi unggulan Provinsi Sulawesi Selatan tidak terlepas dari kepopuleran potensi alam, sejarah dan budaya yang cukup dikenal sehingga dalam pengembangannya membutuhkan adanya suatu perhatian khusus dari seluruh *stakeholders* untuk saling berinteraksi dan bersinergi satu sama lainnya.

Pelibatan berbagai sektor dalam pengembangan pariwisata menjadi suatu keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar mengingat pembangunan pariwisata tidak dapat berdiri sendiri dan bersinggungan dengan sektor-sektor pembangunan lainnya, seperti penyediaan jaringan listrik, penyediaan jalan, penyediaan air bersih dan penyediaan sarana telekomunikasi.

Di samping hal tersebut di atas, juga dipertimbangkan perubahan paradigma pembangunan yang sebelumnya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi menjadi pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dengan menyerasikan dengan sumber daya manusia dalam pembangunan. Dari konsep ini dapat disimpulkan :

- Pertama : Proses pembangunan berlangsung secara berlanjut ditopang oleh sumber daya alam, kualitas lingkungan dan manusia yang berkembang secara berkelanjutan.
- Kedua : Sumber daya alam terutama udara, air dan tanah memiliki ambang batas yang penggunaannya akan menciutkan kuantitas dan kualitas yang berakibat berkurangnya kemampuan lingkungan menopang pembangunan secara berkelanjutan dan akan menimbulkan gangguan pada keserasian sumber daya alam dengan sumber daya manusia.
- Ketiga : Kualitas lingkungan berkorelasi langsung dengan kualitas hidup, semakin baik mutu kualitas lingkungan, semakin positif pengaruhnya pada kualitas hidup, yang antara lain tercermin pada meningkatnya harapan usia hidup dan turunnya tingkat kematian.
- Keempat : Pola pembangunan sumber daya alam yang baik tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan pilihan lain di masa depan dalam penggunaan sumber daya alam.
- Kelima : Pembangunan ini memungkinkan generasi sekarang meningkatkan kesejahteraannya tanpa mengurangi kemungkinan bagi generasi mendatang.

Khusus mengenai pembangunan kepariwisataan berkelanjutan sekurang kurangnya harus berbasis pada enam hal yaitu :

1. Kehati-hatian dalam menggunakan sumber daya alam sampai pada batas daya dukung lingkungan;
2. Pengambilan keputusan *bottom-up* dengan mengikut sertakan berbagai *stakeholders*;
3. Menghapus kemiskinan, isu gender dan tetap menghormati hak asasi manusia;
4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
5. Pelestarian keanekaragaman hayati dan sistem perlindungan kehidupan; dan
6. Pelestarian pengetahuan dan cara hidup kelokalan dengan tetap menghargai perbedaan.

Beberapa akibat negatif yang dapat ditimbulkan apabila daerah tidak memiliki Kebijakan atau memiliki Kebijakan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dalam pengembangan kepariwisataan antara lain adalah :

1. Pembangunan kepariwisataan tidak memiliki dasar hukum yang kuat sehingga tidak ada kepastian dalam pembangunan kepariwisataan. Kepastian hukum ini sangat penting terutama bagi investor yang akan menanamkan modalnya pada bidang kepariwisataan di daerah. Investor sangat penting dalam pembangunan kepariwisataan mengingat kemampuan pemerintah terutama dalam bidang pembiayaan masih relatif sangat kurang. Investor sangat membutuhkan kepastian hukum karena dengan demikian akan menjamin bahwa investasi yang telah ditanamkan akan kembali dan selanjutnya akan memberi keuntungan.
2. Pembangunan kepariwisataan tidak berkelanjutan. Pembangunan kepariwisataan tidaklah mungkin dilakukan sekaligus sebab kepariwisataan merupakan fenomena yang terus berkembang mengikuti perkembangan masyarakat, disamping itu pembangunan kepariwisataan juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit sehingga pembangunan kepariwisataan dilakukan secara bertahap. Untuk menjamin keberlanjutan pembangunan kepariwisataan, dibutuhkan perencanaan yang matang. Pembangunan kepariwisataan yang dilakukan tanpa perencanaan yang matang akan terkesan bongkar pasang atau kemungkinan terjadi bila pemerintahan di daerah itu berganti maka berubah pula kebijakan pembangunan kepariwisataan. Artinya apa yang telah dibangun oleh pemerintahan daerah sebelumnya dapat saja dibongkar oleh pemerintahan daerah berikutnya. Bila suatu daerah telah memiliki Kebijakan yang baik hal ini dapat dihindari sebab

walaupun pemerintahannya berganti namun pembangunan kepariwisataan akan dapat terus berlanjut berdasarkan Kebijakan yang telah ada.

3. Pembangunan kepariwisataan yang tidak terarah, hal ini dapat terjadi karena tidak adanya pedoman yang jelas dalam pembangunan kepariwisataan. Rippar tingkat kabupaten/ kota disusun berdasarkan Rippar tingkat provinsi dan Rippar tingkat provinsi disusun berdasarkan Ripparnas dengan demikian pembangunan kepariwisataan secara nasional akan terarah, karena Kebijakan disusun secara hirarki, sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara pembangunan kepariwisataan yang satu dengan yang lainnya.
4. Pembangunan kepariwisataan tidak terkoordinir dengan baik. Kepariwisataan merupakan pembangunan multi sektoral dan multi dimensional artinya pembangunan kepariwisataan tidak dapat berdiri sendiri melainkan melibatkan banyak sektor dan bidang oleh karena itu dibutuhkan kordinasi tingkat tinggi dalam pelaksanaan pembangunannya. Dengan adanya Kebijakan yang baik, sehingga ada dua hal yang dapat dihindari berkenaan dengan kordinasi yaitu pertama : terjadi saling mengaharapkan antara sektor atau bidang sehingga dapat menyebabkan pembangunan kepariwisataan justru terbengkalai (tidak terlaksana) dan yang kedua adalah antara satu sektor atau bidang melaksanakan pembangunan kepariwisataan yang berbeda (tumpang tindih) sehingga justru menyebabkan pembangunan kepariwisataan yang tidak efisien dan efektif. Dalam Kebijakan yang baik, telah terdapat perencanaan yang matang termasuk keterlibatan sektor-sektor dan bidang-bidang yang terkait sehingga tiap sektor atau bidang sudah jelas apa yang harus dilakukan untuk pembangunan kepariwisataan.

Secara umum perencanaan pariwisata diperlukan dengan berbagai alasan di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Pariwisata modern merupakan suatu kegiatan yang relatif baru bagi sebagian besar daerah, dan umumnya tidak memiliki pengalaman untuk mengembangkan dengan baik dan tepat. Sebuah Kebijakan yang menyeluruh dan terpadu dapat memberikan arahan kepada daerah untuk melakukan langkah-langkah pengembangan.
2. Pariwisata adalah sangat kompleks, multi-sektor dan melibatkan berbagai kegiatan seperti pertanian, kehutanan, industri, perikanan, kelautan, komponen rekreasi dan lain-lain. Perencanaan pariwisata mengorganisasi komponen-komponen tersebut sehingga dalam pengembangan yang dilakukan dapat terintegrasi dengan baik, bukan sebagai bagian yang terpisah atau parsial.
3. Pariwisata akan menimbulkan dampak ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga membutuhkan perencanaan yang terintegrasi.

1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran

a. Maksud Penyusunan Kebijakan

Adapun maksud dari penyusunan Rippar Kabupaten Luwu antara lain adalah sebagai berikut :

1. Visi, misi dan kebijakan pemerintah kabupaten Luwu merupakan pedoman bagi seluruh kegiatan pembangunan yang dilakukan sehingga agar dapat sejalan dengan visi, misi dan kebijakan daerah, maka perlu menyusun kebijakan pembangunan pariwisata.
2. Untuk mewujudkan keselarasan pembangunan, termasuk pembangunan kepariwisataan daerah kabupaten Luwu, dibutuhkan penyesuaian dengan Ripparnas dan Rippar provinsi Sulawesi Selatan.
3. Perubahan data potensi Kabupaten Luwu. Perubahan perubahan tersebut antara lain :
 - a. Perubahan demografi, wilayah, dan pemerintahan;

- b. Perubahan aksesibilitas dari dan menuju ke Kabupaten Luwu dan khususnya dari dan menuju ke daya tarik wisata yang dimiliki;
 - c. Perubahan daya tarik wisata potensial dan yang telah dikembangkan;
 - d. Perubahan usaha pariwisata yang telah dimiliki baik hotel (penginapan) maupun restoran (rumah makan) serta usaha pariwisata lainnya; dan
 - e. Perubahan amenities atau fasilitas penunjang lainnya seperti Pos dan Telekomunikasi, Air bersih, Listrik, Bank, Sarana kesehatan, Pendidikan, Pos keamanan dan lain lain.
4. Analisa data yang digunakan dalam penyusunan Kebijakan ini yaitu dengan menggunakan 3 (tiga) teknik analisis yaitu analisa SWOT untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada, analisa *Point Rating System* yaitu dipergunakan untuk menentukan urutan prioritas pengembangan pembangunan pariwisata dan analisis tata ruang yaitu analisis yang digunakan untuk menentukan kawasan wisata unggulan.
 5. Penentuan kawasan wisata unggulan yang penting dilakukan untuk menentukan kawasan-kawasan yang menjadi unggulan pariwisata Kabupaten Luwu.
 6. Penentuan sasaran pengembangan yang dilakukan agar pembangunan pariwisata mempunyai tujuan dan sasaran yang jelas.
 7. Kebijakan, strategi dan indikasi pengembangan dibuat secara lebih mendalam dan terinci sehingga mudah untuk dilaksanakan.

b. Tujuan Penyusunan Kebijakan

Tujuan penyusunan Kebijakan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut :

1. Tujuan Umum

Tujuan umum adalah tujuan yang memuat tujuan pengembangan pariwisata daerah dikaitkan dengan visi dan misi serta kebijakan pemerintah daerah. Tujuan pengembangan pariwisata daerah secara umum adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan perekonomian daerah, serta pelestarian budaya dan lingkungan alam daerah.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus adalah tujuan yang ingin dicapai dengan menyusun kebijakan pengembangan pariwisata sebagai berikut :

- a) Mewujudkan Kabupaten Luwu sebagai destinasi pariwisata;
- b) Sebagai penjabaran kebijakan pembangunan spasial khususnya sektor pariwisata di Kabupaten Luwu yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP SulSel), serta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu (RTRW Kabupaten Luwu);
- c) Merupakan wujud pengejawantahan visi dan misi pembangunan Kabupaten Luwu khususnya dalam sektor pariwisata sebagai destinasi wisata andalan Sulawesi Selatan;
- d) Mengidentifikasi dan menggali pengembangan tempat-tempat atau kawasan-kawasan yang berpotensi untuk dijadikan destinasi wisata di wilayah Kabupaten Luwu.;
- e) Mengintegrasikan dan mensinergikan pengembangan pariwisata Kabupaten Luwu dengan pariwisata regional, nasional, dan global;
- f) Sebagai pedoman utama bagi berbagai *stakeholders* pariwisata Kabupaten Luwu, yang meliputi unsur pentahelix yaitu : Akademisi, Birokrasi, Komunitas Masyarakat, Pengusaha, dan Media dalam pengembangan pariwisata Kabupaten Luwu;

- g) Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan/ pemanfaatan sumber daya alam dan sumberdaya buatan dalam sektor pariwisata dengan tetap memperhatikan sumberdaya manusia dan ekosistemnya; dan
- h) Diharapkan dengan berkembangnya sektor pariwisata Kabupaten Luwu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan melalui peningkatan nilai ekonomi sektor wisata serta berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

c. Sasaran Penyusunan Kebijakan

Sasaran dari kegiatan pengembangan pariwisata daerah secara rinci dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Tersusunnya konsep pengembangan kepariwisataan Kabupaten Luwu yang dilandasi pendekatan perencanaan pariwisata dan isu-isu strategis yang terkait dengan sektor-sektor pembangunan lainnya;
2. Teridentifikasinya prioritas pengembangan daya tarik wisata yang dapat diunggulkan dan atau diandalkan di Kabupaten Luwu; dan
3. Tersusunnya arahan kebijakan pengembangan pariwisata, strategi pengembangan pariwisata, dan indikasi program pengembangan pariwisata Kabupaten Luwu;

1.3 Keluaran

Keluaran dari Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Luwu ini adalah dokumen acuan dalam pengembangan potensi pariwisata sehingga pembangunan kepariwisataan Kabupaten Luwu menjadi lebih terarah dan terintegrasi dengan pembangunan kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan serta kepariwisataan nasional, serta menjadi acuan dari sektor pendukung lainnya dalam meningkatkan sinergitas pembangunan daerah.

1.4 Ruang Lingkup

Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten merupakan perencanaan pariwisata daerah pada tingkatan sub-DTW sehingga dalam proses penyusunan Rippar Kabupaten Luwu, mengacu pada dokumen rencana yang berada pada hirarki yang lebih tinggi, yaitu Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS) dan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (Rippar) Provinsi Sulawesi Selatan.

Sebagai bagian dari pengembangan salah satu sektor potensi di daerah, maka penyusunan dokumen Kebijakan Pembangunan Pariwisata ini harus mengacu dan sinergis pula dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten Luwu sehingga dengan memperhatikan dan mengaitkan pada hirarki tersebut, pembangunan pariwisata yang dilakukan di kabupaten Luwu merupakan sebuah pengembangan yang terintegrasi dan saling mendukung.

Adapun ruang lingkup kajian dalam Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Luwu ini terdiri atas lingkup wilayah studi, lingkup materi, dan lingkup kegiatan, dengan uraian sebagai berikut :

1.4.1 Lingkup Wilayah

Lingkup wilayah studi dalam Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Luwu adalah pada seluruh wilayah administratif Kabupaten Luwu luas wilayah administrasi kurang lebih 3.000,25 km² dan terdiri dari 22 kecamatan yang dibagi menjadi 227 desa/ kelurahan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Luwu Utara dan Kota Palopo
- b. Sebelah Selatan : Kota Palopo dan Kabupaten Wajo.
- c. Sebelah Timur : Teluk Bone.

d. Sebelah Barat : Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Enrekang.

1.4.2 Lingkup Materi

Lingkup materi dari Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut :

1. Gambaran dan kajian terhadap sumber daya pariwisata dan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pariwisata Kabupaten Luwu, yang mencakup aspek;
 - a. Aspek Pemasaran,
 - b. Aspek Pengembangan Produk Wisata,
 - c. Aspek Pemanfaatan Ruang untuk Pengembangan Pariwisata,
 - d. Aspek Pengelolaan Lingkungan,
 - e. Aspek Pengembangan Sumber Daya Manusia,
 - f. Aspek Pemberdayaan Masyarakat,
 - g. Aspek Investasi.
2. Pengkajian terhadap prospek pengembangan dan pemanfaatan sumber daya yang ada termasuk di dalamnya aspek kelembagaan dan sumber daya manusia.
3. Perumusan rencana pengembangan pariwisata bergantung pada sasaran pengembangan pariwisata yang akan dicapai, sumber daya yang dimiliki, serta kebijakan daerah.
4. Perumusan kebijakan pengembangan pariwisata, strategi pengembangan pariwisata dan indikasi program pengembangan pariwisata.

1.4.3 Lingkup Kegiatan

Agar penyusunan Kebijakan dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif, maka lingkup kegiatan penyusunan Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Luwu sebagai berikut :

Tabel 1.1
Bagan Kerangka Penyusunan Kebijakan Kabupaten Luwu

NO	KEGIATAN	TUJUAN	OUTPUT	INDIKATOR
1	Pengumpulan data	Mengungkapkan potensi yang dimiliki dan permasalahan yang dihadapi oleh kegiatan kepariwisataan sebagai suatu sektor kegiatan ekonomi, maupun sebagai bagian kegiatan pengembangan wilayah	Gambaran potensi dan permasalahan pengembangan pariwisata	Kebijakan Pembangunan Karakteristik daerah Ketersediaan produk wisata Aspek Pasar
2	Analisis	Menilai keadaan masa kini, menilai kecenderungan perkembangan, menghitung kapasitas pengembangan, memperkirakan kebutuhan masa datang	Teridentifikasi-nya prospek pengembangan dan pemanfaatan potensi	Kebijakan pembangunan wilayah, ketersediaan produk wisata & penunjang pasar dan proyeksi wisatawan, pola kunjungan wisatawan makro
3	Perumusan	Menentukan sasaran	Sasaran Jangka	Jumlah Kunjungan

	Sasaran Pembangunan Pariwisata	jangka panjang 10-15 tahun Menentukan sasaran jangka pendek 5 tahun (merupakan bagian integral dari sasaran jangka panjang)	Panjang Sasaran jangka pendek	Wisatawan Aspek Ekonomi Aspek Sosial Budaya Aspek fisik/ lingkungan Hidup
4	Perumusan Rencana Pengembangan	Menyusun rencana pengembangan berdasarkan sasaran yg telah ditetapkan	Rencana pengembangan	Intensitas pemda Tingkat/ kecepatan pertumbuhan pariwisata Jangka waktu penyusunan rencana
5	Perumusan Kebijakan Pengembangan	Memberikan jawaban atas permasalahan/ isu-isu strategis yang dihadapi Menetapkan arahan, sebagai landasan bagi perumusan langkah- langkah pengembangan operanasional	Kebijakan pengembangan yang meliputi kebijakan pemasaran, pengembangan produk, pemanfaatan ruang, pengolaan lingkungan pengembangan SDM, pemberdayaan masyarakat & kebijakan investasi	Program Pemasaran Produk wisata Pengelolaan SDM Masyarakat
6	Perumusan Strategi Pengembangan	Menjelaskan langkah-langkah dasar yang akan dilakukan oleh daerah, sebagai penjabaran dari kebijakan dan arahan pengembangan	Strategi Pengembangan produk Strategi pemasaran	Perbedaan karakteristik daerah Pendekatan perencanaan yang berbeda Pengembangan ODTW Pengembangan sarana pariwisata Pengembangan aksesibilitas & infrastruktur Pengembangan Pasar Promosi Positioning Masyarakat
7	Indikasi Program Pengembangan	Menjabarkan secara rinci dari setiap strategi kedalam program yang akan dilakukan pada jangka waktu tertentu	Program jangka panjang Program jangka pendek	Program utama Program Pendukung

1.5 Metodologi

1.5.1 Kerangka Pendekatan

Dalam pengembangan kepariwisataan, destinasi pariwisata merupakan unsur vital sekaligus penggerak utama bagi wisatawan dalam memutuskan perjalanan dan kunjungan ke suatu daerah atau negara. Destinasi pariwisata yang dibentuk oleh serangkaian komponen produk wisata, wilayah dan citra atau karakteristik atraksi menjadi fokus penting dalam pengembangan kepariwisataan, khususnya dalam mengembangkan keunggulan banding (*Comparative Advantages*) dan keunggulan saing (*Competitive Advantages*) dalam berkompetisi untuk menarik pasar wisatawan regional maupun internasional.

Pemahaman terhadap Destinasi Pariwisata yang operasional perlu dijabarkan dalam pendekatan perencanaan pariwisata mengingat terdapat banyak rujukan yang dapat digunakan oleh karena itu definisi di bawah ini dijadikan dasar dalam perencanaan pengembangan pariwisata, sebagai berikut

Destinasi pariwisata merupakan gabungan komponen produk wisata (atraksi, amenitas dan akses) yang menawarkan pengalaman utuh/ terpadu bagi konsumen atau wisatawan. Secara Tradisional, destinasi sering dikaitkan dengan suatu area dengan batasan geografis yang jelas, misalnya negara, pulau atau sebuah kota (Hall, 2000, Davidson and Maitland, 1997).

Lebih lanjut, dalam kerangka pengembangannya, Kelly & Nankervis (2001) menegaskan bahwa pengembangan destinasi pariwisata minimal mencakup lima komponen utama, yaitu ;

1. **Atraksi** (*attractions*) yang mencakup alam, budaya, buatan (*artificial*), *event* dan sebagainya.
2. **Aksesibilitas** (*accessibility*) yang mencakup dukungan sistem transportasi meliputi rute atau jalur transportasi, fasilitas terminal, bandara, pelabuhan dan moda transportasi.
3. **Amenitas** (*amenities*) yang mencakup fasilitas pendukung yang meliputi ketersediaan air bersih, listrik, telekomunikasi, pembuangan limbah, Bank, pemadam kebakaran, keamanan, Rumah sakit dan sebagainya. Dan fasilitas penunjang yang meliputi retail, toko cinderamata, fasilitas penukaran uang, biro perjalanan, pusat informasi pariwisata dan sebagainya.
4. **Akomodasi** (*accommodation*) yang mencakup ketersediaan sarana penginapan berupa hotel, pondok wisata, wisma dan sebagainya.
5. **Aktifitas** (*activities*) yang mencakup keseluruhan kegiatan yang dapat dilakukan di destinasi yang dapat diikuti atau dilakukan oleh wisatawan dalam kunjungannya ke lokasi tersebut.

Destinasi pariwisata dalam hal ini tidak hanya merupakan sekumpulan daya tarik wisata dengan suatu tema dominan, namun lebih dari itu adalah keterkaitan objek dengan unsur-unsur pendukung seperti amenitas, aksesibilitas dan unsur penunjang lain yang bekerja secara sinergis dalam suatu kesatuan sistem yang saling menunjang.

Berdasarkan tren, indikator dan motivasi wisatawan, World Tourism Organization (2004) Mengklasifikasikan bahwa destinasi pariwisata terdiri dari 17 jenis, yaitu :

1. Kawasan Perairan/Bahari (*coastal zone*)
2. Kawasan Pantai (*beach destination and sites*)
3. Gugusan Kepulauan (*small island*)
4. Kawasan Gurun (*destination in desert and arid areas*)
5. Kawasan Pegunungan (*mountain destination*)
6. Kawasan Taman Nasional (*natural and sensitive ecological areas*)
7. Kawasan Ekowisata (*ecotourism destinations*)
8. Kawasan Cagar Alam (*park and protected areas*)

9. Komunitas disekitar Kawasan Lindung/Konservasi (*communities within or adjacent to protected area*)
10. Jalur atau Rute Perjalanan (*trail and routes*)
11. Situs Peninggalan Sejarah (*built heritages sites*)
12. Kawasan Pemukiman Tradisional (*small and traditional communities*)
13. Kawasan Wisata Kota (*urban tourism*)
14. Pusat Kegiatan MICE dan Konvensi (*MICE and convention centre*)
15. Kawasan Taman Bertema (*theme park*)
16. Kawasan Taman Air (*water park*)
17. Kapal Pesiar dan Simpul-simpul perjalanannya (*cruise ship and their destinations*)

Selain itu perencanaan pariwisata dilakukan dengan pendekatan yang berkelanjutan, berorientasi sistem, komprehensif, terintegrasi dan memperhatikan lingkungan dengan fokus untuk pencapaian pembangunan berkelanjutan dan keterlibatan masyarakat.

Pendekatan perencanaan pariwisata yang dilakukan secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan

Pengembangan pariwisata di Kabupaten Luwu mengacu pada konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism development*). Hal ini dilakukan karena di dalamnya terkandung makna pengembangan pariwisata yang tanggap terhadap kebutuhan wisatawan dan masyarakat setempat dengan tetap menekankan upaya perlindungan dan pengelolaannya yang berorientasi jangka panjang. Konsep pengembangan pariwisata secara berkelanjutan pada intinya menekankan 4 (empat) prinsip, yaitu :

a. Layak secara ekonomi (*economically viable*).

Bahwa proses pembangunan harus layak secara ekonomi dan efisien untuk dapat memberikan manfaat ekonomi bagi pembangunan wilayah maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

b. Berwawasan lingkungan (*enviromental viable*).

Bahwa proses pembangunan harus tanggap dan memperhatikan upaya-upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan (alam maupun budaya) dan menghindarkan dampak negatif yang dapat menurunkan kualitas lingkungan serta mengganggu keseimbangan ekologi.

c. Diterima secara sosial (*socially acceptance*).

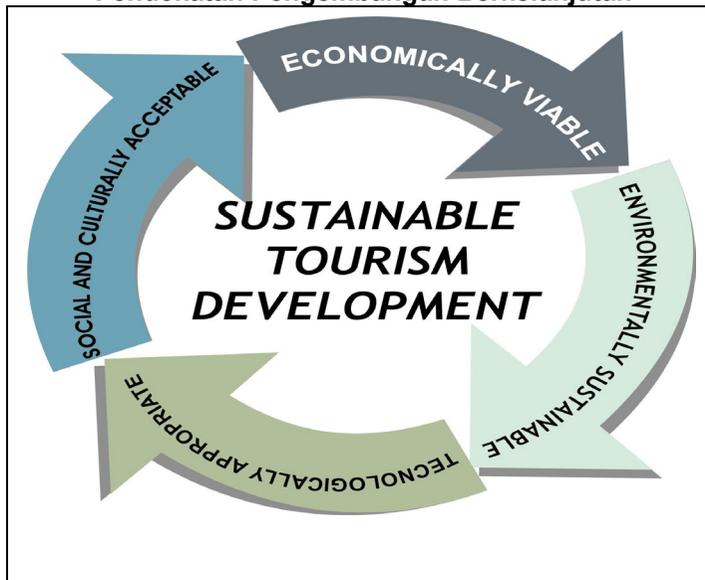
Bahwa proses pembangunan dapat diterima secara sosial dan memperhatikan nilai-nilai budaya dan nilai-nilai yang ada di masyarakat serta tidak merusak tatanan dan nilai-nilai budaya yang mendasar dimasyarakat.

d. Dapat diterapkan secara teknologis (*technologically appropriate*).

Bahwa proses pembangunan yang dilaksanakan secara teknis dapat diterapkan, efisien dan memanfaatkan sumber daya lokal dan dapat diadopsi masyarakat setempat secara mudah untuk proses pengelolaan yang berorientasi jangka panjang.

Secara skematis konsep tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1
Pendekatan Pengembangan Berkelanjutan



Sumber : Blue Print Pengembangan Destinasi Pariwisata, 2006

Pendekatan perencanaan pembangunan berkelanjutan, secara rinci dijabarkan sebagai berikut ;

- 1) Prinsip pembangunan yang berpijak pada aspek pelestarian dan berorientasi jangka panjang.
- 2) Penekanan pada nilai manfaat bagi masyarakat lokal.
- 3) Prinsip pengelolaan aset sumber daya yang lestari.
- 4) Kesesuaian antara kegiatan pengembangan dengan skala, kondisi dan karakter daerah.
- 5) Antisipasi yang tepat dan pemantauan terhadap perubahan
- 6) Keselarasan yang sinergis antara kebutuhan pengembangan, lingkungan hidup dan masyarakat lokal.

2. Pendekatan Pengembangan Berbasis Masyarakat

Pengembangan pariwisata di Kabupaten Luwu mengacu pada Konsep Pemberdayaan Masyarakat atau Komunitas Lokal dengan memperhatikan kearifan lokal dan memberdayakan *local genuine*.

Pendekatan ini menegaskan bahwa pengembangan sumber daya budaya dan pariwisata harus sensitif dan responsif terhadap keberadaan dan kebutuhan komunitas lokal dan bahwa dukungan dari seluruh komunitas amat sangat diperlukan bagi keberhasilan pengembangan dan pengelolaan sumber daya budaya dan pariwisata di tingkat lokal.

Pemberdayaan masyarakat lokal selanjutnya didasarkan pada kriteria sebagai berikut :

- a. Memajukan taraf hidup masyarakat sekaligus melestarikan identitas budaya dan tradisi lokal.
- b. Meningkatkan tingkat pendapatan secara ekonomis sekaligus mendistribusikan merata kepada penduduk lokal.

- c. Berorientasi pada pengembangan usaha berskala kecil dan menengah dengan daya serap besar dalam hal tenaga kerja dan berorientasi pada teknologi tepat guna.
- d. Mengembangkan semangat kompetisi sekaligus kooperatif.
- e. Memanfaatkan pariwisata seoptimal mungkin sebagai agen penyumbang tradisi budaya dengan dampak seminimal mungkin.

Pendekatan pengembangan berbasis masyarakat bertumpu pada penguatan masyarakat setempat sehingga sejak dalam tahapan perencanaan, pengelolaan hingga pelestarian sumber daya pariwisata pada setiap destinasi yang dikembangkan akan bersinergi dengan kearifan lokal masyarakat disekitar destinasi tersebut. Lebih jelasnya mengenai pendekatan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.2
Pengembangan Berbasis Masyarakat
(Community Based Development)



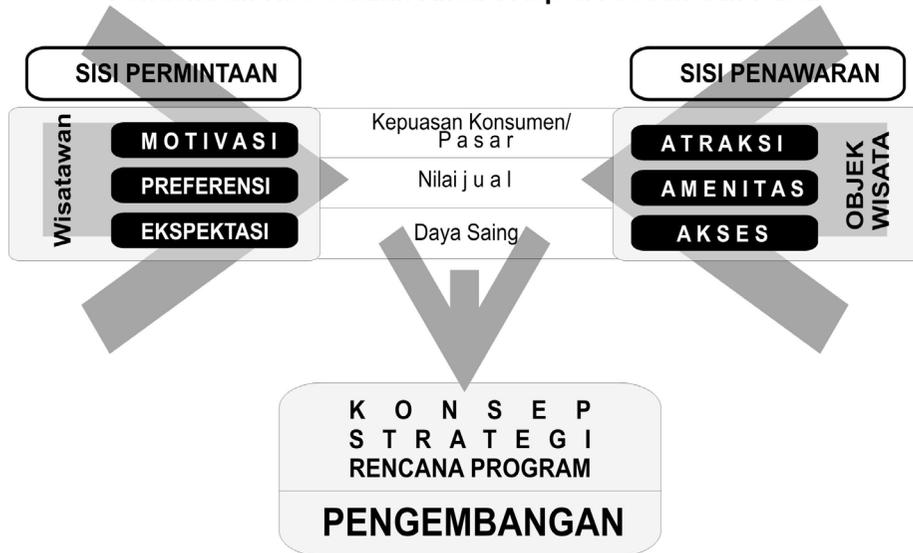
Sumber : Blue Print Pengembangan Destinasi Pariwisata, 2006

Untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat lebih jauh dalam pembangunan pariwisata diperlukan upaya memberdayakan atau memperkuat posisi masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, pengelolaan dan pengendalian pengembangan pariwisata.

3. Pendekatan Kesesuaian Aspek Produk dan Pasar

Perencanaan pengembangan pariwisata pada dasarnya mencari titik temu antara permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) yang dapat ditampilkan sebagai berikut :

Gambar 1.3
Pendekatan Kesesuaian Antara Aspek Produk dan Pasar



Sumber : Blue Print Pengembangan Destinasi Pariwisata, 2006

Konsep pengembangan pariwisata Kabupaten Luwu pada dasarnya merupakan perpaduan pengembangan 2 (dua) aspek utama, yaitu aspek produk dan aspek pasar. Aspek produk terkait dengan penyediaan unsur penawaran (*supply side*) yang mencakup; atraksi, amenitas, aksesibilitas, sumber daya manusia dan unsur penunjang lainnya. Sedangkan aspek pasar berkaitan dengan unsur permintaan (*demand side*) yang mencakup demografi dan psikografi pasar (persepsi, motivasi, ekspektasi).

4. Pendekatan *Borderless*

Konsep pariwisata lintas batas atau tanpa batas (*borderless*), merupakan salah satu implikasi dari dampak globalisasi. Pendekatan perencanaan Kabupaten Luwu didasarkan pada konsep tersebut mengingat kegiatan pariwisata tidak mengenal batas ruang dan wilayah, dan pergerakan wisatawan tidak bisa dibatasi atau dihambat oleh batasan-batasan administratif wilayah atau keharusan-keharusan yang membatasi akses atau pilihan terhadap produk, amenitas, aksesibilitas dan sebagainya.

Oleh karena itu pengembangan pariwisata Kabupaten Luwu harus mempertimbangkan konteks regional dengan membangun semangat kerjasama secara sinergis dengan daerah/kabupaten/ propinsi bahkan negara lain dengan mengaitkan produk-produk yang dikembangkan oleh daerah lain. Jaringan keterpaduan tersebut dapat membentuk daya tarik kolektif yang kuat dan sangat efektif dalam menarik arus kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun nusantara.

5. Pendekatan *Cluster*

Pendekatan *cluster* banyak diterapkan dalam pengembangan usaha di sektor industri. Pendekatan tersebut menggambarkan sekelompok sektor usaha yang memiliki mata rantai atau keterkaitan fungsi yang saling mendukung dan dikembangkan secara terintegrasi pada suatu lokasi untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan daya saing usaha yang tinggi.

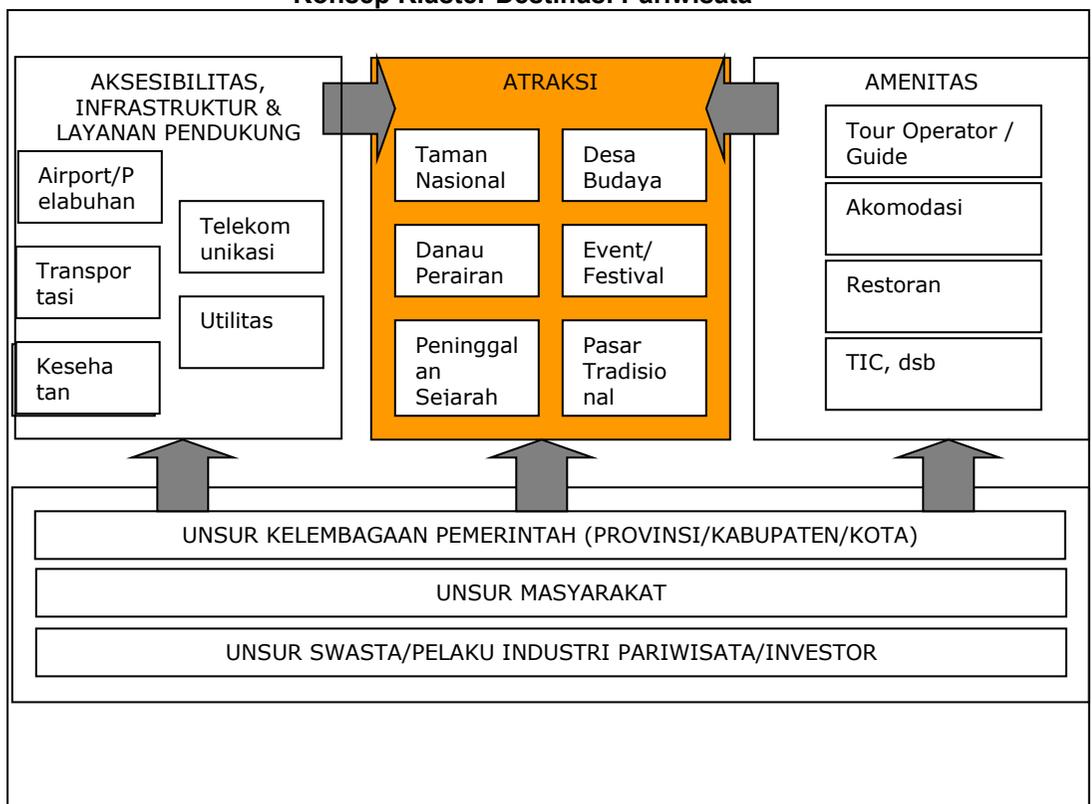
Pendekatan *cluster* dalam pengembangan destinasi dalam kaitan perencanaan pariwisata berorientasi pada fokus dan penguatan kualitas kinerja hubungan mata rantai usaha yang terkait dan sistem pendukung lainnya sehingga dapat meningkatkan

efektifitas dan daya saing destinasi. Dalam konteks pengembangan pariwisata, komponen *cluster* pariwisata dapat mencakup unsur-unsur;

- a. Atraksi/ daya tarik wisata (alam, budaya, buatan/ khusus)
- b. Amenitas dan infrastruktur pendukung pariwisata (hotel, fasilitas hiburan, fasilitas perbelanjaan, *tour operator* dan maskapai penerbangan, rumah makan dan bar, pemasok produk pariwisata)
- c. Institusi di bidang penyiapan sumber daya manusia, misalnya perguruan tinggi, sekolah tinggi pariwisata, sekolah menengah pariwisata, lembaga pelatihan dan sebagainya.
- d. Kelembagaan di sektor publik di tingkat daerah/lokal.

Komponen *cluster* pariwisata tersebut secara skematis dapat digambarkan konfigurasi dan keterkaitannya sebagai berikut :

Gambar 1.4
Konsep Klaster Destinasi Pariwisata



Sumber : Blue Print Pengembangan Destinasi Pariwisata, 2006

6. Pendekatan Menyeluruh dan Terintegrasi

Seluruh aspek dalam pengembangan pariwisata Kabupaten Luwu, termasuk elemen-elemen yang bersifat kelembagaan serta implikasi-implikasinya terhadap lingkungan hidup dan sosial budaya, ekonomi, dianalisis, direncanakan, dan dikembangkan. Pendekatan perencanaan pariwisata yang menyeluruh dan terpadu dilakukan berdasarkan pada potensi dan permasalahan yang ada di wilayah tersebut, baik dalam wilayah perencanaan maupun dalam kaitan regional.

Pendekatan menyeluruh dalam pengembangan pariwisata memberi arti bahwa peninjauan permasalahan bukan hanya didasarkan pada kepentingan kawasan atau

daerah dalam arti sempit, tetapi ditinjau dan dikaji pula dalam kepentingan yang lebih luas. Selain itu, penyelesaian permasalahan pengembangan pariwisata tidak hanya dipecahkan pada sektor pariwisata saja, tetapi didasarkan pada kerangka perencanaan terpadu antar sektor yang dalam perwujudannya berbentuk koordinasi dan sinkronisasi antarsektor.

Selain mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, dalam penyusunan Kebijakan juga perlu memperhatikan antara lain :

- a. Kepentingan nasional dan daerah.
- b. Arah dan kebijakan pengembangan kepariwisataan nasional dan provinsi
- c. Arah dan kebijakan penataan ruang wilayah tingkat nasional dan provinsi.
- d. Pokok permasalahan daerah dan mengutamakan kepentingan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
- e. Keselarasan dengan aspirasi masyarakat.
- f. Persediaan dan peruntukan tanah, air dan sumber daya.
- g. Daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- h. Kebijakan Kabupaten lain yang berdekatan.

1.5.2 Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan

Tahapan Kegiatan penyusunan Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Luwu ini dilakukan sesuai pedoman yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/ Kota, sebagai berikut :

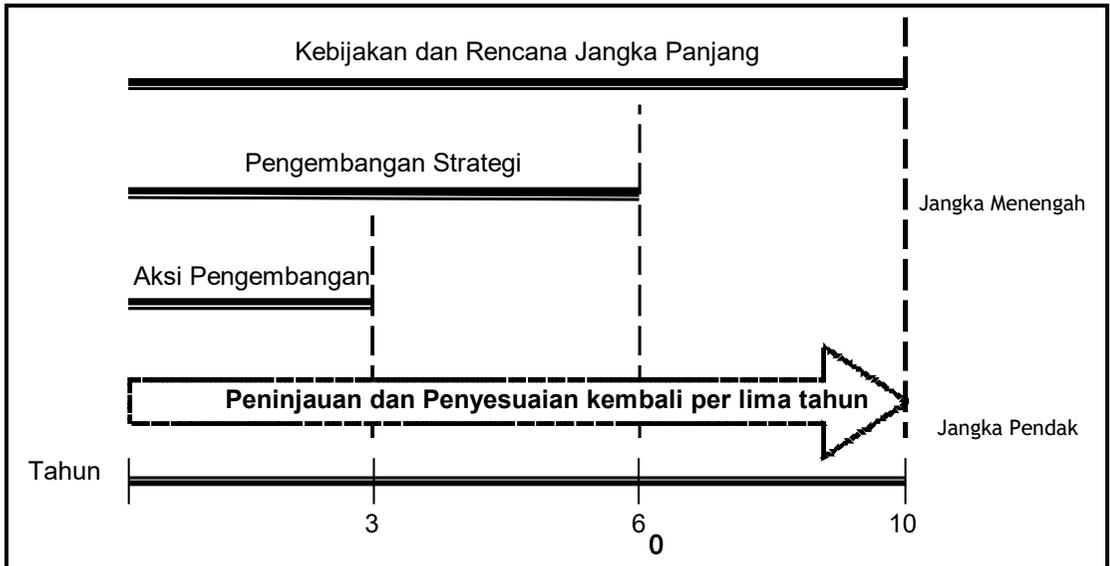
1. Pembentukan Kelompok Kerja melalui nota kesepahaman antara Direktur Politeknik Pariwisata Makassar dengan Bupati Kabupaten Luwu, yang selanjutnya dibentuk tim teknis yang ditetapkan oleh Direktur Politeknik Pariwisata Makassar.
2. Pengumpulan Data, dilakukan melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui penyebaran kuesioner, wawancara maupun *focus group discussion* serta peninjauan lapangan secara langsung untuk mengenali kondisi fisik, sosial dan ekonomi. Data sekunder dilakukan melalui data pustaka terkait karakteristik wilayah dan aspek-aspek dalam pengembangan kepariwisataan.
3. Penyusunan Rancangan Kebijakan pengembangan pariwisata kabupaten Luwu, dilakukan setelah data primer dan sekunder dianalisis dan selanjutnya dirumuskan sesuai dengan sistematika penulisan.
4. Uji Publik dilaksanakan untuk meminta tanggapan, masukan, dan saran dari para pemangku kepentingan pariwisata.
5. Penetapan kebijakan pengembangan pariwisata kabupaten Luwu yang telah disusun dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

1.6 Jangka Waktu Perencanaan

Jangka waktu perencanaan Kebijakan Pembangunan Kepariwisata kabupaten Luwu ini disusun berdasarkan amanah yang tertuang dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan pengembangan pariwisata disusun untuk jangka panjang 15 tahun sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu, sebagai landasan perumusan rencana tingkat dibawahnya
2. Perumusan strategi pengembangan, disusun dalam kurun waktu 10 tahun yang dibagi atas strategi pengembangan 5 tahun pertama dan 5 tahun kedua.
3. Indikasi program pengembangan disusun untuk jangka waktu tahunan pada periode 5 tahun pertama.

Gambar 1.5
Jangka Waktu Kebijakan Kabupaten Luwu



1.7 Sistematika Pelaporan

Untuk memberikan gambaran yang lebih terarah dari Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Luwu disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan meliputi latar belakang; maksud, tujuan dan sasaran; keluaran; ruang lingkup (lingkup wilayah, lingkup materi, dan lingkup kegiatan); metodologi; kerangka pendekatan; tahapan pelaksanaan pekerjaan; jangka waktu perencanaan; dan sistematika pelaporan.

Bab II Kepariwisata Kabupaten Luwu Dalam Kebijakan Pembangunan Kepariwisata, meliputi Kepariwisata Kabupaten Luwu dalam Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Nasional; Kepariwisata Kabupaten Luwu dalam Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan; dan Kepariwisata Kabupaten Luwu dalam Kebijakan dan Pembangunan Wilayah Kabupaten Luwu.

Bab III Kondisi Wilayah Kabupaten Luwu Dalam Mendukung Pembangunan Kepariwisata, meliputi Kondisi Fisik; Sejarah Sebagai Potensi Pariwisata; Kekayaan Ekologis Sebagai Potensi Pariwisata; Kondisi Sosial Budaya Sebagai Potensi Pariwisata; dan Perekonomian Kabupaten Luwu.

Bab IV Kabupaten Luwu Sebagai Destinasi Pariwisata, meliputi Daya Tarik Dan Sumber Daya Wisata Kabupaten Luwu; Fasilitas Pariwisata; Fasilitas Umum Pendukung Pariwisata; Aksesibilitas Pendukung Pariwisata; Prasarana Umum Pendukung Pariwisata; Penduduk Sebagai Potensi Sumber Daya Manusia Pariwisata Kabupaten Luwu.

Bab V Industri Pariwisata Kabupaten Luwu meliputi Usaha Wisata; dan Usaha Kecil Dan Menengah Pendukung Pariwisata Kabupaten Luwu.

Bab VI Pasar Pariwisata Dan Upaya Pemasaran Pariwisata Kabupaten Luwu, meliputi Jumlah Dan Perkembangan Pasar Wisatawan; Karakteristik Pasar Wisatawan; Upaya Pemasaran Yang Dilakukan Pemerintah Kabupaten Luwu

Bab VII Kelembagaan Kepariwisata Kabupaten Luwu, meliputi Sumber Daya Manusia Pariwisata; Asosiasi Pariwisata; Kelembagaan Pemerintah Terkait Pariwisata; dan Kelembagaan Lain Terkait Pariwisata Kabupaten Luwu.

Bab VIII Prinsip Dan Konsep Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Luwu, meliputi Tantangan Dan Isu Strategis Pembangunan Kepariwisata; Prinsip Pembangunan Kepariwisata; Konsep Pembangunan Kepariwisata; Visi; Misi; dan Tujuan Pembangunan Pariwisata Kabupaten Luwu.

Bab IX Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Luwu, meliputi Kebijakan Pembangunan Kepariwisata; dan Strategi Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Luwu.

Bab X Rencana Pengembangan Perwilayahan Pariwisata Kabupaten Luwu, meliputi Rencana Struktur Perwilayahan Pariwisata; dan Rencana Kawasan Pengembangan Pariwisata Dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Luwu

Bab XI Program Dan Indikasi Kegiatan Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Luwu.

2.1. Kepariwisata Kab. Luwu Dalam Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Nasional

Nilai penting dan kontribusi pariwisata memiliki dimensi yang luas, tidak hanya secara ekonomi, namun juga secara sosial politik, budaya, kewilayahan dan lingkungan. Secara ekonomi, sektor pariwisata memberikan kontribusi nyata dalam perolehan devisa negara, pendapatan asli daerah dan juga pendapatan masyarakat yang tercipta dari usaha-usaha kepariwisataan yang dikembangkan. Karakter kepariwisataan yang mampu menciptakan beragam mata rantai kegiatan ekonomi, juga terbukti menciptakan lapangan kerja yang luas dan penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Secara sosio- politik, pengembangan pariwisata menumbuhkan kebanggaan tentang kekayaan alam dan budaya bangsa dan melalui tumbuhnya perjalanan wisata nusantara, kepariwisataan juga efektif dalam menumbuhkan dan memperkuat rasa cinta tanah air, serta persatuan dan kesatuan bangsa.

Secara sosio-budaya, tumbuhnya pengakuan dunia terhadap kekayaan alam dan budaya Indonesia juga telah membangkitkan kebanggaan nasional dan sekaligus menjadi alat diplomasi budaya yang efektif untuk memperkuat pencitraan Indonesia di kancah internasional. Selanjutnya secara kewilayahan, kepariwisataan yang memiliki karakter multi-sektor dan lintas regional, secara konkret dan efektif mampu mendorong pembangunan infrastruktur dan fasilitas kepariwisataan yang pada gilirannya menggerakkan arus investasi dan pengembangan wilayah.

Kontribusi nyata sektor pariwisata tersebut menjadikan sektor ini memiliki posisi yang strategis dalam berbagai kebijakan pembangunan, khususnya bagi negara Indonesia yang memiliki asset kepariwisataan untuk diperkuat dan diberdayakan sebagai pilar ekonomi negara. Perekonomian nasional ke depan tidak lagi dapat mengandalkan sektor minyak dan gas sebagai andalan penyumbang devisa yang menopang perekonomian, karena cadangan minyak dan gas pada saatnya akan habis dan tidak dapat tergantikan lagi, oleh karenanya sektor pariwisata menjadi sektor kunci yang diharapkan mampu menyandang fungsi penyumbang devisa terbesar menggantikan sektor minyak dan gas.

Upaya memposisikan peran strategis sektor pariwisata dalam perekonomian nasional telah dirintis sejak 2 dekade yang lalu melalui program Visit Indonesia Year 1991. Dukungan yang konsisten untuk menjadikan pariwisata sebagai pilar ekonomi strategis masa depan semakin menunjukkan hasil yang positif dari tahun ke tahun. Apabila dibandingkan dengan kekayaan aset sumber daya wisata alam dan budaya yang dimiliki negara Indonesia, maka kontribusi tersebut masih memiliki peluang yang sangat besar untuk ditingkatkan di waktu-waktu mendatang.

Pencapaian kinerja tersebut tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan seperti penataan destinasi dan pengembangan produk wisata, promosi pariwisata, pembinaan industri pariwisata, dan penataan kelembagaan sebagai aspek-aspek dalam pembangunan kepariwisataan Indonesia. Penataan destinasi dilakukan melalui penyusunan Rencana Induk dan Rencana Detail Enam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dan memfasilitasi tata kelola destinasi di 16 KSPN, serta

pengembangan pariwisata berkelanjutan di kawasan wisata, pengembangan masyarakat lokal dengan pendekatan *Community Based Tourism*, Pengembangan Daya Tarik Wisata, Pengembangan Sistem Informasi Daya Tarik Wisata Nasional, Pembangunan Fasilitas Pariwisata, Pengembangan Manajemen Kunjungan Wisata.

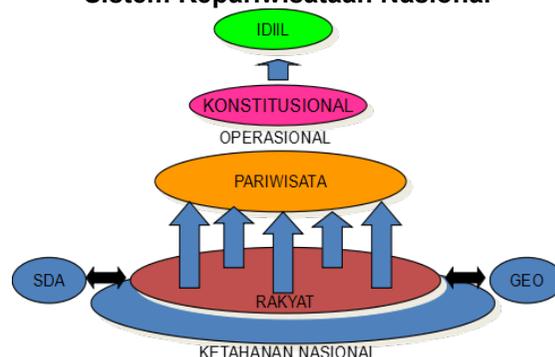
Upaya pengembangan produk wisata dilakukan melalui penyusunan Pola Perjalanan Wisata Tematik (Minat Khusus) Alam dan Buatan, Sejarah dan Budaya serta Ekowisata, implementasi Kebijakan Nasional Pengembangan Wisata Kapal (*Yacht*) Asing, Pengembangan Wisata Kapal Pesiar (*Cruise*), Pengembangan dan Pemutakhiran *Database* Situs Selam (*Dive Site*) Indonesia, Fasilitas Pengembangan *Geopark* Global dan Nasional, Pengembangan Even Wisata Olahraga Rekreasi (*Sport Tourism Event*), Pengenalan Produk Kuliner dan Spa Tradisional melalui Penetrasi Kuliner dan Spa Indonesia ke Mancanegara, Pemetaan Destinasi Wisata Belanja, Pengembangan dan Penataan 16 Destinasi MICE di Indonesia melalui Pemetaan dan Pengklasifikasian 16 Destinasi MICE Nasional, Penyusunan Strategi dan *Action Plan* Pengembangan Destinasi MICE Nasional dan Pengembangan Produk *Special Event Carnival Indonesia*.

Terkait dengan upaya untuk meningkatkan potensi ekonomi dan kapasitas sertaantisipasi dampak negatif pariwisata terhadap masyarakat dilakukan melalui Fasilitas Pengembangan Desa Wisata, Kampanye Sapta Pesona, Gerakan Nasional Sadar Wisata di Kalangan Pramuka, Polisi Pariwisata, Lanjut Usia dan Remaja, Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak dan Perempuan serta Pencegahan HIV dan AIDS dan penerapan CHSE dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Kekayaan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan aset penting dalam pengembangan pariwisata, dimana pariwisata sebagai alat pelestari kebudayaan, yang dapat berperan secara aktif memperkenalkan hasil-hasil budaya Indonesia. Falsafah pengembangan kepariwisataan nasional dilandasi oleh konsep hidup bangsa Indonesia yang berkeselimbangan yaitu hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara sesama manusia dan manusia dengan lingkungan alam, baik yang berupa Lingkungan sumber daya alam maupun lingkungan geografis.

Pengembangan kepariwisataan nasional mengacu pada landasan idiil (Nilai-nilai Agama dan Pancasila) dan landasan konstitusional (UUD 1945 dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009) secara operasional dilaksanakan oleh para pelaku pariwisata. Para pelaku utama tersebut menggerakkan kegiatan pariwisata yang bertumpu pada pergerakan aspek-aspek ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan yang secara dinamis mendukung kepariwisataan nasional. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar sistem kepariwisataan nasional berikut :

Gambar 2.1
Sistem Kepariwisataan Nasional



Pelaku utama yang menggerakkan roda pembangunan pariwisata adalah unsur Dunia Usaha, Masyarakat (termasuk Pers, LSM, Akademisi) dan Pemerintah. Namun demikian pemerintah lebih berperan sebagai fasilitator. Sedangkan usaha pariwisata dan masyarakat merupakan pelaku-pelaku langsung dari kegiatan pariwisata. Kepariwisataan nasional yang dilaksanakan dalam konsepsi tersebut di atas bersifat multi dimensi, interdisipliner dan partisipatoris dalam suatu sistem yang utuh dan terpadu.

Melalui pembangunan pariwisata yang dilakukan secara komprehensif dan integral dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam dan kondisi geografis Indonesia secara arif, maka akan tercipta kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia, yang pada akhirnya akan menciptakan ketahanan nasional yang tangguh. Kondisi yang diharapkan dari aspek-aspek yang memberikan pengaruh dan sekaligus dipengaruhi oleh pengembangan pariwisata adalah sebagai berikut:

1. Ketahanan Ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan untuk menangkai penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa.
2. Ketahanan Politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa yang berlandaskan demokrasi yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas politik yang sehat dan dinamis serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif.
3. Ketahanan Ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan ekonomi kerakyatan, yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi, kemampuan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata.
4. Ketahanan Sosial Budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila, yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, rukun, bersatu dalam kehidupan yang serba selaras, serasi seimbang serta kemampuan menangkai penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional.
5. Ketahanan Pertahanan Keamanan adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang dalam memelihara stabilitas keamanan, mengamankan pembangunan dan hasil - hasilnya, mempertahankan kedaulatan negara dan menangkai segala bentuk ancaman.

Untuk meningkatkan daya saing kepariwisataan serta meningkatkan angka kunjungan wisatawan ke Indonesia, maka pemerintah pusat terus memacu potensi pariwisata daerah, melalui penetapan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN), Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP), dan Kawasan Strategis Pariwisata (KSP). Strategi tersebut mampu memacu pemerataan angka kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi yang ada sekaligus memberikan keanekaragaman pilihan yang menarik dan memanjakan wisatawan dalam berkunjung sekaligus meningkatkan pendapatan dari pengeluaran wisatawan pada setiap destinasi.

Dalam mendorong pembangunan kepariwisataan, pemerintah pusat telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010–2025 dan menetapkan peta perwilayahan pembangunan 222 (dua ratus dua puluh dua) kawasan pengembangan pariwisata nasional (KPPN) pada 50 (lima puluh) Destinasi

Pariwisata Nasional dan 88 (delapan puluh delapan) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Salah satu Destinasi Pariwisata Nasional yang ditetapkan dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional adalah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) ke 38 yaitu “Makassar-Takabonerate dan sekitarnya” dengan Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional yang terdiri dari KPPN Makassar Kota dan sekitarnya, KPPN Maros Karst dan sekitarnya, KPPN Bulukumba dan sekitarnya, KPPN Wajo dan sekitarnya, dan KPPN Takabonerate dan sekitarnya. Sedangkan 3 (tiga) KPPN lainnya yaitu KPPN Sengkang dan sekitarnya, KPPN Toraja dan sekitarnya serta KPPN Palopo dan sekitarnya bergabung dengan provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah dalam DPN Toraja–Lorelindu dan sekitarnya.

2.2. Kepariwisataan Kab. Luwu Dalam Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan Prov. Sulawesi Selatan

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu destinasi utama pariwisata nasional dengan potensi pariwisata yang sangat beragam dan menarik, baik wisata alam, budaya, sejarah, religius, dan wisata tematik. Visi Pembangunan Kepariwisataan Daerah Sulawesi Selatan adalah **“Sulawesi Selatan Sebagai Tujuan Wisata Yang Berdaya Saing Di Indonesia dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat”**.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi pembangunan kepariwisataan provinsi Sulawesi Selatan dijabarkan sebagai berikut:

- a. Mewujudkan destinasi wisata yang aman, nyaman, menarik, mudah terjangkau, berwawasan lingkungan serta berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat;
- b. Mewujudkan pemasaran pariwisata yang efektif meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
- c. Mewujudkan kemitraan pengelolaan pariwisata yang mendorong berkembangnya industri pariwisata yang berdaya saing dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan kehidupan masyarakat;
- d. Mengembangkan kekayaan dan keragaman budaya serta merevitalisasi budaya maritim sebagai karakteristik entitas daerah; dan
- e. Mendorong perkembangan ekonomi kreatif berbasis media, desain dan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya.

Berdasarkan PP 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, terdapat kawasan andalan yang berfungsi sebagai; tempat aglomerasi permukiman perkotaan, pusat kegiatan produksi dan atau pusat pengumpulan/ pengolahan komoditas wilayahnya dan wilayah sekitarnya, dan kawasan yang memiliki sektor-sektor unggulan berdasarkan potensi sumber daya alam kawasan. Adapun kawasan andalan di wilayah provinsi Sulawesi Selatan adalah:

- a. Mamminasata dan sekitarnya (Makassar, Maros, Gowa, Takalar, Pangkep) dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, perikanan, industri umum, dan agroindustri serta perdagangan;
- b. Palopo dan sekitarnya dengan sektor unggulan pariwisata, perkebunan, pertanian, dan perikanan;
- c. Bulukumba – Watampone dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, pariwisata, perikanan, dan perdagangan;
- d. Parepare dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, perikanan, agroindustri, dan perdagangan;
- e. Kawasan laut Kapoposang dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata;

- f. Kawasan laut Teluk Bone dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata, dan pertambangan;
- g. Kawasan laut Takabonerate dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata;
- h. Kawasan laut Selat Makassar dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata.

Terdapat kawasan yang diarahkan sebagai wilayah yang dapat dibudidayakan dan difungsikan untuk kepentingan pembangunan dalam bentuk kegiatan usaha berbagai sektor dan atau sub sektor pembangunan. Sektor pariwisata, berbagai aspek seperti daya tarik keindahan alam darat maupun laut, budaya, sejarah, olahraga, Konvensi, dan belanja bisa dijadikan tujuan.

Secara umum Objek wisata budaya dan alam Tana Toraja merupakan ikon pariwisata Sulawesi Selatan yang sudah dikenal mendunia. Taman laut Takabonerate sangat potensial untuk menjadi ikon wisata bahari dengan mengembangkan faktor aksesibilitas, akomodasi, dan perlindungan terumbu karang dan anak-anak ikan. Selain itu, banyak ragam obyek wisata dengan daya tarik regional, nasional maupun lokal yang lokasinya tersebar di kabupaten dan kota di wilayah Sulawesi Selatan yang dapat dikembangkan secara aktif sehingga tumbuh berkembangnya lapangan kerja pemandu wisata, jasa transportasi, perhotelan, restoran, informasi pariwisata, komunikasi, cinderamata, kesenian, perdagangan jasa maupun produk lainnya yang bermuara pada peningkatan ragam sumber dan volume pendapat masyarakat lokal. Pengembangan pariwisata ini diharapkan tidak menurunkan kualitas lingkungan dan terganggunya habitat berbagai flora dan fauna.

Pengembangan strategi spasial pembangunan pariwisata dapat memberikan arahan yang lebih jelas dan mampu mengakomodir kegiatan dalam setiap wilayah pengembangan kepariwisataan. Strategi ini diharapkan mampu meningkatkan arus kunjungan wisata sehingga memberikan pengaruh bagi kegiatan wisata yang ada dan dapat meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat.

Tujuan dari analisis penentuan Satuan Kawasan Pengembangan Pariwisata (SKPP) adalah untuk memberikan pelayanan dan informasi tentang keberadaan objek dan daya tarik wisata dalam suatu DTW, sehingga wisatawan mendapatkan gambaran tentang DTW yang dikunjungi. Dalam penentuan SKPP di Provinsi Sulawesi Selatan didasarkan pada jenis Daya Tarik Wisata (DTW), dari aspek: karakteristik daya tarik wisata dan ragam jenis daya tarik wisata.

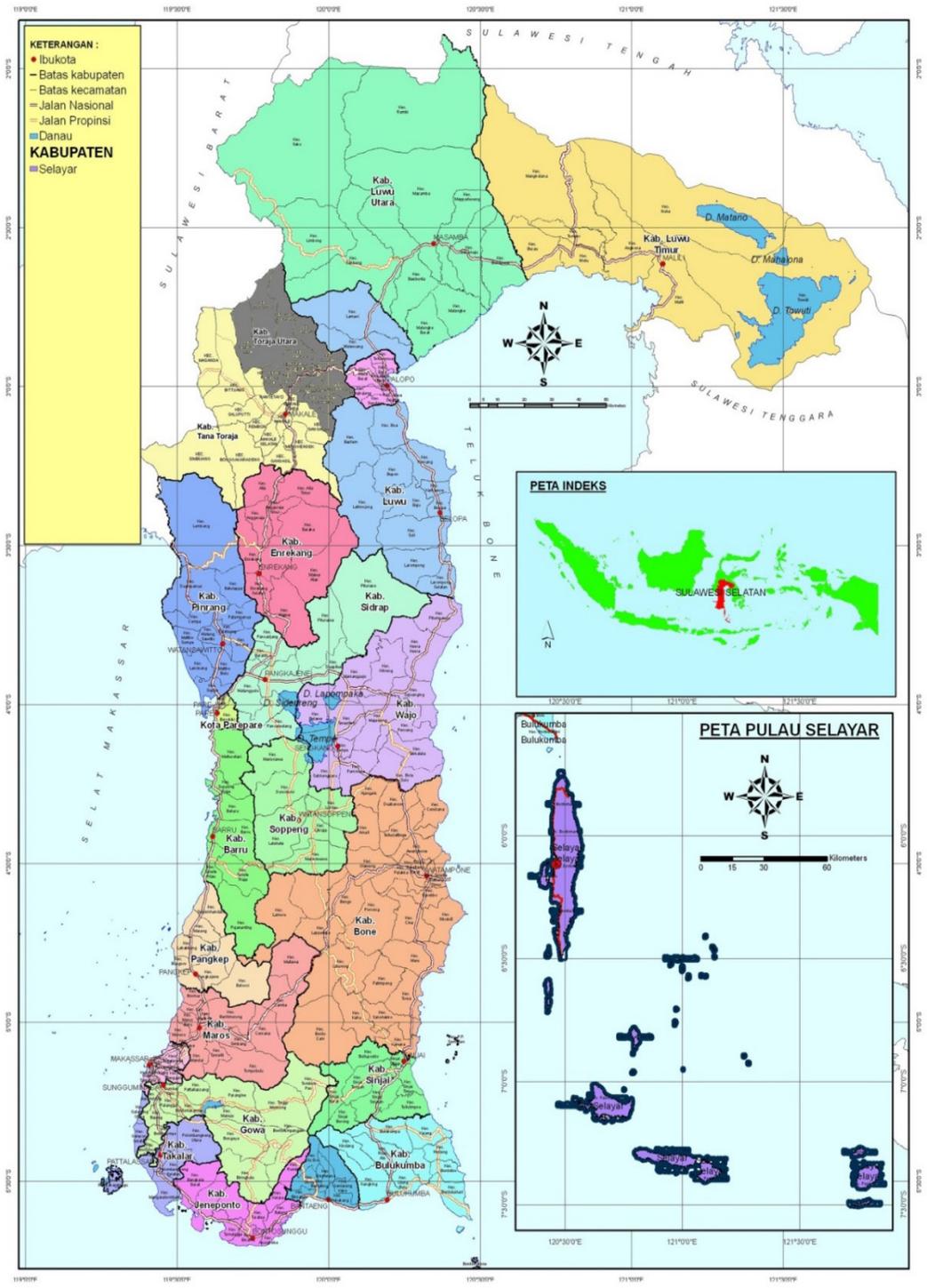
Rencana pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Sulawesi Selatan juga dibagi berdasarkan kelompok paket wisata dengan pertimbangan arah perjalanan wisata yang efektif dan efisien dengan tetap menikmati beberapa jenis daya tarik wisata dalam perwilayahan yang dikembangkan, dengan tetap mempertimbangkan aksesibilitas dan karakter budaya yang menyebar di Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan kriteria dan pertimbangan-pertimbangan internal karakter wilayah provinsi tersebut, maka Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Sulawesi Selatan meliputi:

- a. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Makassar dan sekitarnya dengan pusat pelayanan terletak di Kota Makassar, yang terdiri wilayah Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto. Jenis daya tarik yang dikembangkan pada koridor ini diantaranya adalah DTW Alam, DTW Tirta, DTW Sejarah, DTW Budaya, DTW Agro.
- b. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Bulukumba dan sekitarnya, dengan pusat pelayanan terletak di Kabupaten Bulukumba. KSPD ini meliputi wilayah Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Sinjai, Kabupaten dan Kabupaten Bantaeng. Jenis daya tarik yang dikembangkan pada kawasan ini diantaranya adalah DTW Tirta, DTW Budaya, Alam, DTW, Agro, dan DTW Alam.

- c. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Kepulauan Selayar dan sekitarnya dengan pusat pelayanan di Kota Benteng. Pada kawasan ini dikhususkan dalam Kawasan Strategis Pariwisata Daerah karena selain pertimbangan letak geografis juga pertimbangan potensi Sumber Daya Alam yang khas dengan Daya Tarik Wisata Tirta.
- d. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Wajo dan sekitarnya dengan pusat pelayanan di Kabupaten Bone. Pada kawasan ini terdiri Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, dan Kabupaten Sidrap. Jenis Daya Tarik Wisata yang dapat dikemas dalam satu paket perjalanan wisata yang menjadi unggulan pada koridor tersebut yaitu terdiri dari DTW Alam, DTW Budaya, DTW Sejarah, DTW Tirta, dan DTW Agro, serta pengembangan daya tarik wisata minat khusus atau wisata penelitian yaitu pada kawasan industri Kerajinan dan pengolahan.
- e. Kawasan Strategis Pariwisata daerah (KSPD) Pare-Pare dan sekitarnya dengan pusat pelayanan di Kota Pare-pare. Pada kawasan ini terdiri dari wilayah Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Barru, Kabupaten Pinrang, dan Kota Parepare. Jenis daya tarik yang dikembangkan pada koridor ini diantaranya adalah DTW Alam, DTW, Tirta, DTW Sejarah, DTW Budaya, DTW Agro dan Wisata Minat Khusus.
- f. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Palopo dan sekitarnya dengan pusat pelayanan di Kota Palopo. Pada kawasan ini terdiri dari Daya Tarik Wisata di Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Luwu Utara.
- g. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Toraja dan sekitarnya dengan pusat pelayanan di Kabupaten Tana Toraja. Pada kawasan ini terdiri dari Daya Tarik Wisata di Kabupaten Enrekang, Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara.

Posisi kepariwisataan kabupaten Luwu dalam kebijakan pembangunan pariwisata provinsi Sulawesi Selatan ditempatkan sebagai destinasi pariwisata daerah dengan potensi utama wisata alam (pantai, laut, dan panorama), wisata budaya dan tinggalan sejarah, serta wisata minat khusus lainnya. Adapun posisi kepariwisataan kabupaten Luwu dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.2
Peta Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Palopo dan Sekitarnya



Sumber : Ripparda Provinsi Sulawesi Selatan, 2015

Adapun daya Tarik wisata kabupaten Luwu yang telah dituangkan dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perwilayahan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Palopo dan Sekitarnya

No.	Nama Objek	Jenis Objek	Lokasi Obyek	Keterangan
1	Air Terjun Salu Sabeng, Belopa	Tirta	Kecamatan Belopa	Belum dikembangkan
2	Pantai Pannori	Tirta	Kecamatan Larompong Selatan	Belum dikembangkan
3	Pantai Buntu Mata'bing	Tirta	Kecamatan Larompong	Belum dikembangkan
4	Gua Liang Andulan	Alam	Kecamatan Walenrang Utara	Belum dikembangkan
5	Air Terjun Bungalo	Alam	Kecamatan Ponrang	Belum dikembangkan
6	Pantai Bone Pute	Tirta	Kec. Larompong Selatan	Belum dikembangkan
7	Pantai Lare-Lare	Tirta	Kec. Larompong Selatan	Belum dikembangkan
8	Pantai Talumae	Tirta	Kecamatan Belopa	Belum dikembangkan
9	Pantai Sallolo	Tirta	Kecamatan Ponrang	Belum dikembangkan
10	Pantai Mamonta	Tirta	Kecamatan Belopa	Belum dikembangkan
11	Pantai Batu Killong	Tirta	Kecamatan Suli	Belum dikembangkan
12	Hutan Mangro Ongko	Alam	Kec. Larompong Selatan	Belum dikembangkan
13	Air Terjun Bontolle	Alam	Kecamatan Walenrang	Belum dikembangkan
14	Gua Pompessak	Alam	Kecamatan Walenrang Utara	Belum dikembangkan
15	Air Terjun Magadang	Alam	Kecamatan Walenrang Utara	Belum dikembangkan
16	Air Terjun Toga	Alam	Kecamatan Walenrang Utara	Belum dikembangkan
17	Air Terjun Tipayo	Alam	Kecamatan Walenrang Utara	Belum dikembangkan
18	Air Terjun Salonso	Alam	Kecamatan Walenrang Utara	Belum dikembangkan
19	Gua Ilang Batu	Alam	Kecamatan Walenrang	Belum dikembangkan
20	Air Terjun Paraposoang	Alam	Kecamatan Bua	Belum dikembangkan
21	Air Terjun Karang Titale	Alam	Kecamatan Bua	Belum dikembangkan
22	Gua Libani	Alam	Desa Libani Seppong	Belum dikembangkan
23	Air Terjun Sarassa	Alam	Desa Tumbu Bara	Belum

No.	Nama Objek	Jenis Objek	Lokasi Obyek	Keterangan
	Jambong		Kec. Bajo	dikembangkan
24	Gua Palar	Alam	Desa Bukit Sutra Kec. Larompong	Belum dikembangkan
25	Air Terjun Buntu Sawa	Alam	Desa Binturu Kec. Larompong	Belum dikembangkan
26	Air Terjun Bilante	Alam	Kecamatan Bupon	Belum dikembangkan
27	Gua Buntu Sawa	Alam	Desa Bukit Sutra Kec. Larompong	Belum dikembangkan
28	Permandian Supuangirat	Alam	Desa Kaili	Belum dikembangkan
29	Air Terjun Sarambu Masiang	Alam	Desa Kaladi Kec. Suli Barat	Belum dikembangkan
30	Makam Tandipau	Sejarah	Desa Assallangnge Kec. Bua	Belum dikembangkan
31	Lapandoso	Sejarah	Desa Barua Kec. Bua	Belum dikembangkan
32	Meriam Kuno	Sejarah	Desa Suli Kec. Suli	Belum dikembangkan
33	Air Terjun Assallangnge	Sejarah	Desa Tiro Manda Kec. Bua	Belum dikembangkan
34	Air Bubung Datu	Sejarah	Desa Lurah Kec. Bua	Belum dikembangkan
35	Ayam Puang Ridate	Sejarah	Desa Tede Kec. Bastem	Belum dikembangkan
36	Bubung Lamu	Sejarah	Desa Tede Kec. Bastem	Belum dikembangkan
37	Benteng Tajajok	Sejarah	Desa Uraso Kec. Bastem	Belum dikembangkan
38	Awa' Tondong	Sejarah	Desa Pantilang Kec. Bastem	Belum dikembangkan
39	Kawasan Pantilang	Sejarah	Desa Pantilang Kec. Bastem	Belum dikembangkan
40	Loko' Maindo	Sejarah	Desa Maindo Kec. Bastem	Belum dikembangkan
41	Bukit Kamanre	Sejarah	Desa Cilallang Kec. Kamanre	Belum dikembangkan
42	Kuburan Tua Noling	Sejarah	Kec. Suli	Belum dikembangkan
43	Kawasan Kaili	Sejarah	Desa Kaili	Belum dikembangkan

Sumber : Ripparda Provinsi Sulawesi Selatan, 2015

2.3. Kepariwisataan Dalam Kebijakan Pembangunan Wilayah Kabupaten Luwu

Pengembangan pariwisata di kabupaten Luwu tidak terlepas pada visi dan misi kabupaten Luwu yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu tahun 2019-2024, yaitu "**Luwu Sebagai Daerah Yang Maju, Mandiri Dan Sejahtera Dalam Nuansa Religi**".

Untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut, maka misi pemerintah kabupaten Luwu, adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan, dan akuntabel;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat;
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan;
- d. Pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan koperasi, usaha mikro kecil menengah dan perluasan lapangan kerja;
- e. Mewujudkan pangan dan perekonomian daerah yang tangguh berbasis agribisnis;
- f. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam mewujudkan masyarakat kabupaten Luwu yang religius;
- g. Optimalisasi otonomi desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
- h. Menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif berwawasan lingkungan;
- i. Penegakan supremasi hukum, hak asasi manusia, untuk mendorong partisipasi publik;
- j. Mewujudkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta penanggulangan bencana.

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, pembangunan kepariwisataan Kabupaten Luwu mengacu pada pembangunan kepariwisataan nasional yang tetap menjunjung ciri khas bangsa Indonesia, seperti yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian, pembangunan kepariwisataan Kabupaten Luwu merujuk pada norma-norma agama dan nilai-nilai budaya dalam setiap segi kehidupan. Falsafah pembangunan kepariwisataan Kabupaten Luwu menyangkut hubungan kehidupan yang berkeseimbangan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara sesama manusia, dan hubungan antara manusia dengan lingkungan alam. Segala bentuk kegiatan kepariwisataan sejalan dengan nilai-nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral, dan etika.

Pengembangan pariwisata Kabupaten Luwu juga tidak mengenal perbedaan ras, suku, bangsa, agama, jenis kelamin, bahasa, seperti pengakuan atas prinsip dasar hak asasi manusia (HAM). Pemanfaatan lingkungan bagi pengembangan pariwisata Kabupaten Luwu menerapkan keseimbangan mikro (manusia) dan makro (alam) untuk mencegah ketidakadilan, keserakahan, dan pengrusakan terhadap budaya dan alam Kabupaten Luwu.

Selain itu, beberapa isu strategis utama pembangunan Kabupaten Luwu juga bisa menjadi landasan pengembangan pariwisata Kabupaten Luwu. Isu-isu strategis utama pembangunan Kabupaten Luwu tersebut adalah:

- a. Pariwisata sebagai sektor prioritas pembangunan daerah.
Berdasarkan analisis potensi alam, sejarah, budaya, minat khusus, dan buatan manusia di kabupaten Luwu, maka pemerintah daerah menetapkan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor andalan penggerak perekonomian daerah. Hal ini dilihat dari pertumbuhan yang cukup signifikan dari kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB kabupaten Luwu.
- b. Degradasi lingkungan dan vandalisme.
Sebagai kawasan wilayah pegunungan dan pulau dimana kondisi geografis wilayah kabupaten Luwu dengan kabupaten lain di sekitarnya dalam wilayah provinsi Sulawesi Selatan selama ini telah banyak mengalami degradasi lingkungan akibat pola hidup masyarakat yang tidak bertanggungjawab dan ramah terhadap lingkungan dalam melakukan eksploitasi potensi alam sebagai sumber mata pencaharian utama keluarga dan masyarakat.
Pola pembukaan lahan pada wilayah-wilayah konservasi telah menurunkan dan merusak kualitas lingkungan khususnya ekosistem hutan sehingga menurunkan

kualitas destinasi kabupaten Luwu dengan kabupaten lain di sekitarnya dalam wilayah provinsi Sulawesi Selatan.

Pengrusakan ekosistem hutan dengan pembukaan areal hutan sebagai lahan pertanian dan perkebunan dengan cara membakar, menebang pohon dan melakukan alih fungsi lahan secara tidak bertanggungjawab telah menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, udara, air, dan memperluas daerah rawan bencana di kabupaten Luwu.

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan perluasan wilayah pemukiman, menjadikan kawasan penyangga dan pelindung seperti kawasan hutan ikut terdegradasi dan berubah fungsi.

Faktor lain yang turut berkontribusi terhadap degradasi lingkungan adalah masalah sampah khususnya sampah plastik dan sampah lain yang timbul akibat pertumbuhan penduduk dan pemukiman. Untuk kabupaten Luwu, selain sampah penduduk lokal juga pada waktu-waktu tertentu terdapat sampah kiriman di sungai dan danau dari kawasan lain dari luar wilayah kabupaten Luwu sehingga jika pengembangan pariwisata tidak dilakukan secara terencana, maka akan menimbulkan kerusakan lingkungan yang lebih parah dan menjadikan kabupaten Luwu sebagai destinasi yang tidak menarik.

c. Koordinasi lintas sektoral yang masih rendah

Pembangunan sektor pariwisata dikenal sebagai pembangunan multi-sektor yang melibatkan banyak pihak, baik pemerintah pusat maupun provinsi Sulawesi Selatan, serta lintas sektor yang tidak hanya melibatkan instansi pemerintah namun juga sektor swasta, bahkan masyarakat dan wisatawan secara umum.

Sampai saat ini, koordinasi antar OPD dalam pemerintahan daerah kabupaten Luwu, kabupaten Luwu dengan kabupaten lain di sekitarnya di dalam wilayah provinsi Sulawesi Selatan, kabupaten Luwu dengan kabupaten lain di sekitarnya di luar wilayah provinsi Sulawesi Selatan, kabupaten Luwu dengan pemerintah pusat, serta para pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata kabupaten Luwu dengan kabupaten lain di sekitarnya dalam wilayah provinsi Sulawesi Selatan belum bersinergi dengan baik.

d. Regulasi yang kontraproduktif.

Regulasi merupakan salah satu masalah klasik yang dihadapi khususnya dalam hal relevansi dan tumpang tindihnya kebijakan dalam pengelolaan dan pengembangan sektor pariwisata.

Selain tumpang tindih kebijakan, juga terdapat banyak kebijakan yang tidak relevan dalam mendorong pembangunan pariwisata daerah seperti kebijakan investasi, pengelolaan kawasan konservasi, pengelolaan wilayah laut, pantai dan pesisir, dan sebagainya.

Masih banyak ditemukan regulasi yang tidak sinkron dengan regulasi lainnya atau regulasi yang secara operasional menimbulkan resistensi pada masyarakat ataupun regulasi yang tidak dapat diimplementasikan.

e. Infrastruktur pendukung pariwisata yang masih sangat terbatas

Sebagai wilayah dengan kondisi geografis yang cukup unik dengan variasi daerah dataran tinggi pada pegunungan dan daerah dataran rendah di pesisir pantai menjadikan kabupaten Luwu sebagai salah satu wilayah di provinsi Sulawesi Selatan yang masih cukup tertinggal dalam pembangunan infrastruktur jika dibandingkan dengan wilayah lain yang telah menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor andalan ekonomi daerah dan masyarakat di Sulawesi Selatan.

Ketersediaan infrastruktur jalan, jembatan, bangunan, dan transportasi serta hampir seluruh jenis infrastruktur utama dalam pembangunan kepariwisataan masih sangat terbatas dari sisi jumlah dan kualitas.

Selain itu, infrastruktur dasar yang menghubungkan antara daya tarik wisata baik antar wilayah juga belum tersedia dengan baik. Hal ini berdampak pada kenyamanan dan keamanan wisatawan saat berkunjung ke kabupaten Luwu.

- f. Kualitas sumberdaya manusia pariwisata yang masih rendah.
Kualitas sumberdaya manusia pariwisata baik pada sektor pemerintahan maupun industri masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan oleh pola rekrutmen dan pengembangan karir pada sektor pemerintahan masih belum berjalan dengan optimal.
Pada sektor swasta khususnya pada usaha/ industri pariwisata, rendahnya kualitas sumberdaya manusia lebih banyak disebabkan oleh kualitas industri pariwisata yang masih berskala kecil sehingga belum menarik minat tenaga kerja profesional untuk bekerja pada industri pariwisata di kabupaten Luwu.
Keberadaan SMK pariwisata yang menyelenggarakan program dan jenjang pendidikan pariwisata, belum ada sehingga kontribusinya dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia pariwisata belum optimal.
Di sisi lain, putra-putri terbaik kabupaten Luwu yang menimba ilmu pada pendidikan tinggi dan vokasi di luar kabupaten Luwu, selanjutnya enggan kembali untuk bekerja di kabupaten Luwu karena pertimbangan kualitas industri dan usaha yang masih kecil serta pendapatan yang relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan pendapatan mereka pada industri yang lebih besar dan daerah yang lebih maju dalam pembangunan pariwisatanya termasuk jika dibandingkan dengan pendapatan pada kapal pesiar.
- g. Investasi pariwisata yang masih terbatas
Investasi pariwisata yang ada di kabupaten Luwu saat ini hampir sepenuhnya merupakan investasi dari pengusaha lokal yang dalam penyediaan usaha/ industri pariwisata dilakukan melalui pengalihan dan atau penambahan fungsi dari rumah mereka menjadi usaha hotel atau restoran serta usaha pariwisata lainnya.
Hal ini mengakibatkan rendah kualitas industri/ usaha pariwisata yang ada. Bentuk dan desain bangunan yang tidak sesuai, ketersediaan fasilitas yang sangat terbatas, serta desain interior yang kurang menarik.
Untuk itu diperlukan sebuah kebijakan investasi yang dapat menarik minat investor dalam menanamkan modal dan membangun usaha pariwisata di kabupaten Luwu sehingga akan meningkatkan daya saing destinasi sekaligus mendorong minat kunjungan wisatawan ke kabupaten Luwu.
- h. Pasar dan pemasaran pariwisata konvensional
Pengembangan pasar dan pola pemasaran pariwisata kabupaten Luwu dilaksanakan masih cenderung konvensional melalui berbagai media namun pada tempat dan waktu yang kurang sesuai.
Mengacu pada prinsip promosi *Destination-Origin-Timeline* (DOT), sejatinya kabupaten Luwu mampu mengidentifikasi segmentasi pasar yang sesuai dengan sediaan produk yang dimiliki saat ini. Pintu masuk utama wisatawan ke kabupaten Luwu adalah kota Makassar, maka sebaiknya kabupaten Luwu melakukan *branding* dan promosi di bandara dan tempat-tempat strategis di kota Makassar atau kota-kota lain yang menjadi pintu masuk wisatawan ke kabupaten Luwu.
Digitalisasi pemasaran pariwisata juga belum dilakukan secara optimal serta melibatkan masyarakat untuk ikut mempromosikan potensi kabupaten Luwu melalui media sosial belum dilaksanakan secara optimal. Hal lain yang perlu menjadi prioritas adalah pembuatan *branding* dan *tag-line* promosi dan pemasaran pariwisata kabupaten Luwu sehingga lebih mudah diingat, dikenal dan menarik untuk dikunjungi. Pembuatan *branding* dan *tag-line* pariwisata harus dibuat bersesuaian dengan visi dan misi pembangunan serta sistem nilai masyarakat Luwu.

Isu-isu utama ini merupakan isu yang saling terkait dan harus dipecahkan bersama. Kualitas dan kesejahteraan masyarakat tersebut tidak cukup terjadi di beberapa tempat saja, namun harus merata di seluruh wilayah Kabupaten Luwu. Peningkatan kualitas dalam segala aspek secara merata diharapkan akan meningkatkan juga produktivitas dan kualitas masyarakat Kabupaten Luwu dalam mengembangkan dan mengelola sumber daya yang ada sehingga diharapkan daya saing semakin meningkat hingga Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pengembangan Pariwisata ke tingkat yang paling tinggi. Kesejahteraan yang merata diharapkan dapat berlangsung secara terus menerus dan berkelanjutan. Untuk itu, penerapan pendekatan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan harus dilakukan secara disiplin dan dengan penuh kesadaran.

Sebagai salah satu sektor pembangunan daerah, visi dan misi pengembangan pariwisata Kabupaten Luwu adalah **“Terwujudnya Kabupaten Luwu Sebagai Destinasi Pariwisata Unggulan di Provinsi Sulawesi Selatan Yang Maju, Mandiri Dan Sejahtera Dalam Nuansa Religi”**.

Dari tatanan tersebut, menunjukkan bahwa dalam membangun kepariwisataan kabupaten Luwu terdapat 4 prinsip utama yang harus diwujudkan, yaitu :

a. Mengembangkan pariwisata yang unggul;

Dalam mengembangkan dan membangun kepariwisataan kabupaten Luwu, dimana gabungan potensi alam sebagai karunia Tuhan YME yang terdiri dari wilayah sungai, wilayah pegunungan, hutan, air terjun, gua, sawah, kebun, flora dan fauna serta potensi sejarah dan budaya pada akhirnya memposisikan kabupaten Luwu sebagai destinasi yang unggul dan berdaya saing pada potensi wisata alam berbasis alam, sejarah, budaya dan minat khusus berbasis ekologi dan edukasi.

Berdasarkan potensi alam tersebut, masyarakat kabupaten Luwu menempatkan sumber ekonomi utama dari perkebunan dan pertanian sehingga pola dan cara hidup masyarakat ini yang harus dioptimalkan dengan mengintegrasikannya sebagai daya tarik wisata.

Beberapa konteks kehidupan masyarakat maritim yang menarik untuk menjadi daya tarik wisata adalah pengembangan desa wisata, area bumi perkemahan (*camping ground*), kuliner tradisional, keterampilan kerajinan, kearifan lokal dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan, serta pengembangan destinasi wisata sungai.

b. Berorientasi pada pelestarian alam, lingkungan, dan kebudayaan.

Pengembangan pariwisata kabupaten Luwu yang sarat dengan kekayaan sumberdaya alam, sejarah dan budaya sehingga peran pariwisata sebagai media pelestarian alam, lingkungan serta sejarah dan budaya harus diwujudkan.

Keuntungan ekonomis yang diperoleh dari penerimaan sektor pariwisata yang tidak berorientasi pada pelestarian alam, lingkungan, sejarah dan akar budaya masyarakat Luwu, tentu saja tidak sebanding dengan kerusakan alam dan karakter budaya masyarakat Luwu. Untuk itu dibutuhkan peran serta dan kepedulian dari seluruh komponen masyarakat untuk memelihara dan menjaga kelestariannya.

Kabupaten Luwu juga sarat dengan tinggalan sejarah dan nilai budaya luhur masyarakat sehingga pengembangan pariwisata harus menjamin tumbuh dan lestariannya budaya masyarakat dalam pengemasan paket dan atraksi wisata.

Berbagai jenis artefak dan tinggalan sejarah serta kebudayaan masyarakat masa lampau yang masih terpelihara dalam hidup dan kehidupan masyarakat kabupaten Luwu saat ini harus memperoleh ruang untuk dikembangkan dan dilestarikan sekaligus menjadi daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung ke kabupaten Luwu

c. Berorientasi pada perwujudan kesejahteraan masyarakat;

Pengembangan pariwisata kabupaten Luwu yang berorientasi pada kesejahteraan

masyarakat diwujudkan melalui pola keseimbangan antara eksploitasi dan konservasi dengan mengedepankan sebesar-besarnya untuk kepentingan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Pariwisata yang dibangun harus ramah lingkungan dan membuka akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat kabupaten Luwu untuk terlibat dalam pengelolaan, pengembangan dan perlindungannya melalui pembentukan kelompok sadar wisata.

Eksplorasi lingkungan alam, sosial dan budaya yang berlebihan serta berpotensi menimbulkan kerusakan harus dicegah dan dihindari. Untuk itu, 2 (dua) prinsip utama dalam pengembangan pariwisata yaitu pembangunan pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism development*) dan pariwisata berkelanjutan (*sustainability tourism development*) menjadi mutlak untuk diintegrasikan dan menjadi dasar pengembangan pariwisata kabupaten Luwu.

d. Berlandaskan pada nilai religius;

Masyarakat kabupaten Luwu dikenal sebagai masyarakat yang religius dan melandaskan hidup dan kehidupannya pada nilai-nilai agamis yang dianut. Mayoritas penduduk kabupaten Luwu adalah penganut agama Islam sehingga pembangunan pariwisata harus direncanakan dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai agama dan kepercayaan masyarakat.

Pembangunan pariwisata tidak boleh bertentangan apa lagi berpotensi merusak sendi-sendi agama dan kepercayaan masyarakat. Interaksi antara masyarakat lokal dengan wisatawan harus menjamin terpeliharanya nilai moralitas masyarakat sehingga asosiasi dan asimilasi budaya dari luar harus mampu memperkuat aspek agama dan kepercayaan.

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sehubungan sistem nilai masyarakat kabupaten Luwu antara lain adalah :

- 1) Pengwilayahan kawasan sungai, hutan, dan kawasan pegunungan beserta sumber mata air alam sesuai peruntukan wisatawan, karena karakteristik dan gaya hidup wisatawan asing dengan masyarakat lokal sangat berbeda.
- 2) Pengembangan produk kuliner dan minuman yang disediakan untuk wisatawan harus diyakini bersesuaian dengan kehidupan masyarakat religius sehingga harus halal dan bebas alkohol.
- 3) Penataan desa wisata atau *homestay* yang dapat menjamin perlindungan masyarakat (khususnya anak-anak dan perempuan) dari dampak negatif pengembangan pariwisata yang tidak bertanggungjawab.

Untuk mewujudkan visi pengembangan pariwisata kabupaten Luwu tersebut di atas, maka rumusan misi pengembangan pariwisata disusun bersesuaian dengan komponen utama dalam pembangunan pariwisata, yaitu :

- a. Mengembangkan Produk Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif;
- b. Membangun Infrastruktur Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif;
- c. Meningkatkan Pemasaran Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif;
- d. Melestarikan nilai, Kekayaan dan Keragaman Budaya Dalam Rangka Memperkuat Karakter dan Jatidiri Masyarakat Luwu; dan
- e. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia bidang Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif.

Berdasarkan visi dan misi pembangunan kepariwisataan kabupaten Luwu tersebut, ditetapkanlah tujuan pembangunan pariwisata kabupaten Luwu sebagai berikut :

- a. Mengembangkan destinasi di Kabupaten Luwu yang berdaya saing;
- b. Mengembangkan Seni dan Budaya Tradisional Kabupaten Luwu sebagai daya tarik Destinasi Pariwisata Budaya berbasis ekologi;

- c. Membangun Obyek Wisata Sejarah/ Arkeologi dan Wisata Agro sebagai daya tarik Destinasi Pariwisata Alam, sejarah, dan Minat Khusus berbasis edukasi;
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pariwisata, antara lain dengan menyediakan lapangan pekerjaan, dan menyediakan kesempatan investasi bagi masyarakat;
- e. Meningkatkan keterlibatan komunitas lokal dalam penyediaan prasarana dan sarana pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif;
- f. Meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas koordinasi antara instansi dan sektor-sektor pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif;
- g. Meningkatkan arus perjalanan wisata ke Kabupaten Luwu;
- h. Meningkatkan penyediaan data dan informasi bagi wisatawan, serta pemasaran dan promosi pariwisata kabupaten Luwu ke segmentasi pasar wisatawan yang tepat dan terarah;
- i. Mewujudkan iklim investasi yang harmonis dan menguntungkan bagi masyarakat Kabupaten Luwu;
- j. Mempertimbangkan daya dukung lingkungan hidup dalam pengelolaan sumber daya alam dan budaya untuk pariwisata dalam rangka menciptakan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan; dan
- k. Membangun jaringan Promosi dan Pemasaran Pariwisata Kabupaten Luwu.

Secara operasional, sasaran Pengembangan Pariwisata Kabupaten Luwu diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Luwu, dengan penetapan sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan manca negara melalui peningkatan kualitas dan kuantitas daya tarik dan atraksi wisata dan kebudayaan, pengembangan aksesibilitas pariwisata, pengembangan promosi dan pemasaran pariwisata, serta peningkatan citra pariwisata;
- b. Meningkatkan lama tinggal wisatawan melalui pelaksanaan berbagai jenis even dan festival, pengembangan usaha akomodasi, dan pengembangan amenities pariwisata;
- c. Meningkatkan pendapatan dari belanja wisatawan melalui pemberdayaan potensi kreatif masyarakat serta penganekaragaman produk serta atraksi wisata dan budaya;
- d. Meningkatkan perlindungan, pengelolaan dan pengembangan warisan budaya melalui pemberdayaan potensi budaya masyarakat, pengembangan sanggar seni dan budaya, pelestarian nilai-nilai sejarah dan budaya, serta pelestarian benda cagar budaya;
- e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pariwisata melalui pendidikan dan pelatihan serta kerjasama dan alih teknologi bersama perguruan tinggi, usaha pariwisata, asosiasi profesi, dan pemerintah.
- f. Meningkatkan perlindungan, pengelolaan dan pengembangan potensi alam sebagai daya tarik pariwisata melalui perencanaan, pengawasan, dan konsistensi penegakan hukum yang adil dan bermartabat.

KONDISI WILAYAH KABUPATEN LUWU

3.1. Sejarah Kabupaten Luwu

Kabupaten Luwu merupakan kabupaten yang terbentuk dari salah satu kerajaan yang dianggap kerajaan tertua di Sulawesi Selatan, yang telah melewati babakan sejarah panjang hingga terbentuknya kabupaten Luwu dengan ibukota Belopa saat ini. Adapun perjalanan sejarah tersebut diuraikan sebagai berikut :

3.1.1. Masa Kerajaan Luwu

Belopa merupakan bagian Integral dari “Kerajaan Luwu” yang awalnya berkedudukan di Ussu Malili (saat ini masuk wilayah kabupaten Luwu Timur) sebagai pusat pengendalian pemerintahan yang dipimpin oleh Payung Luwu Pertama.

Dalam dinamika perkembangan sejarah Kedatuan Luwu, *Were’ (Watampare)* atau ibukota sebagai pusat pengendalian pemerintahan kedatuan Luwu telah berpindah tempat beberapa kali antara lain pertama di Manjapai (sekarang wilayah kabupaten Kolaka Utara); kedua di Cilallang Kamanre kecamatan Kamanre; ketiga di Patimang kecamatan Malangke; dan keempat berpindah ke Palopo.

Pada saat ibukota pemerintahan Kedatuan Luwu berkedudukan di Kamanre, Datu menempatkan petugas Kedatuan, (*Pabbate-bate rilaleng pare*) di Bajo dengan gelar *Sanggaria Bajo*, yang bertugas mengawasi dan mengontrol keamanan lalu lintas perdagangan di Belopa dan Lamunre melalu pelabuhan Ulo-Ulo. Karena tuntutan kebutuhan pemerintahan Kedatuan Luwu, maka sebelum abad ke-16 Masehi, diadakan reorganisasi sistem pemerintahan Kedatuan Luwu yang membentuk tiga wilayah besar yang dipimpin oleh *anak Tellue* yaitu :

- a. Wilayah *Makkole Baebunta* dipimpin oleh *Opu Makkole Baebunta* meliputi kabupaten Luwu Utara, kabupaten Luwu Timur sampai Kabupaten Marowali dan kabupaten Poso di provinsi Sulawesi Tengah;
- b. Wilayah *Maddika Bua* dipimpin oleh *Opu Maddika Bua* meliputi kecamatan Bua, Bastem, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Kolaka Utara, dan Walenrang-Lamasi.
- c. Wilayah *Maddika Ponrang* dipimpin oleh *Opu Maddika Ponrang* meliputi kecamatan Ponrang, Bupon, Latimojong, Kamanre, Bajo, Belopa, Suli, Suli Barat, Larompong dan Larompong Selatan.

Dalam fase ini Belopa berada pada wilayah Kemadikaan Ponrang, dalam momentum penting lainnya, wilayah Belopa tepatnya dikampung Senga di bentuk salah satu “*Lili Passiajengeng*” atau wilayah kekerabatan dalam Kedatuan Luwu, sehingga mulai saat itu Belopa berada dalam wilayah “*Lili Passiajengeng*” *Opu Arung Senga* atau wilayah yang berlangsung berada dibawa koordinasi Datu Luwu karena berada diluar koordinasi dari salah satu *anak Tellue* (sejenis daerah khusus istimewa). Perkembangan tersebut diatas tidak diketahui secara pasti keadaannya, sampai masuknya islam dan penjajah Hindia Belanda di wilayah kerajaan Luwu.

3.1.2. Masa Pemerintahan Hindia Belanda

Pada zaman kolonial, hasil bumi kerajaan Luwu dipasarkan di pelabuhan Pallime yang merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Bone yang kemudian memicu ketegangan antara kerajaan Bone dan pemerintah Hindia-Belanda karena keinginan menepoli hasil bumi kerajaan Luwu. Keinginan pemerintah Hindia-Belanda untuk menguasai hasil bumi kerajaan Luwu terus diupayakan dengan membujuk raja Luwu untuk bekerjasama namun tidak berhasil meyakinkan raja Luwu, akhirnya untuk menaklukkan kerajaan ini dilakukan melalui tindakan militer untuk memaksakan *Korte Verklaring* (perjanjian pendek), kepada raja Luwu pada tanggal 14 Juni 1905 yang isinya, adalah :

- a. Luwu harus melepaskan Poso dan sebagai imbalannya Luwu diberi ganti Rugi oleh Belanda;
- b. Raja dan dewan hadat Luwu harus menandatangani *Korte Verklaring*;
- c. Raja dan hadat Luwu harus melepaskan hak-haknya atas bea cukai barang-barang yang keluar masuk di Luwu dan diserahkan kepada gubernur Belanda
- d. Membayar denda f.6.000 karena terlambat membalas permintaan gubernurmen.

Karena tuntutan pemerintah Hindia-Belanda tidak dihiraukan, maka pasukan ekspedisi yang berpusat di Makassar dikirim ke Luwu, pasukan dan berlabuh di pelabuhan Palopo pada tanggal 19 September 1905. Kehadiran pasukan Belanda yang bermarkas di Palopo menjadi pemicu munculnya pertentangan dikalangan petinggi di kerajaan Luwu, karena takut kerajaan Luwu dihancurkan sebagian dari petinggi Luwu mengisyaratkan agar raja Luwu memenuhi tuntutan pemerintah Hindia-Belanda. Namun, Andi Tadda Opu Tosangji tidak setuju untuk tunduk kepada pemerintah Hindia-Belanda.

Belanda mengerahkan pasukan dan mengepung kota Palopo, serta memblokade jalan menuju Masamba agar raja tidak dapat melarikan diri pada saat terjadi perang. Rencana tersebut diketahui dan akhirnya raja Luwu dapat meloloskan diri menuju daerah Baramamase. Dalam pelarian tersebut raja Luwu didampingi beberapa petinggi hadat yang masih setia kepadanya sedangkan yang lain masih bertahan di Luwu untuk menahan serangan pasukan Belanda yang terus bergerak untuk menangkap raja Luwu.

Pasukan Kerajaan Luwu yang dipimpin oleh Andi Tadda melakukan penyerangan terhadap pasukan Belanda disekitar Kampung PunjalaE dan dibalas oleh armada angkatan laut Belanda. Dalam perang yang tidak seimbang dalam persenjataan tersebut, akhirnya pasukan kerajaan Luwu dapat dipukul mundur dan Andi Tadda tertembak mati sedangkan sebagian besar petinggi hadat Luwu menjadi tawanan perang.

Selain pertempuran di Kampung PunjalaE, pada saat yang sama pertempuran yang cukup sengit juga terjadi di kampung Balandai sebagai garis pertahanan terakhir bagi pasukan Kerajaan Luwu dalam mempertahankan serbuan pasukan militer Belanda agar tidak menduduki ibu kota Kerajaan Luwu yang dipimpin oleh Andi Pangu dan saudaranya Toijo. Dalam pertempuran tersebut, Toijo gugur dan pasukan Belanda dapat menguasai kerajaan Luwu.

Pasukan Belanda terus bergerak menuju kampung Baramamase yang merupakan tempat persembunyian raja Luwu. Pasukan Belanda berhasil menangkap raja Luwu beserta pengikutnya dan membawanya ke Palopo dan didesak untuk menandatangani *Korte Verklaring* serta menyerahkan kerajaan Luwu kepada pemerintah Hindia-Belanda.

Selanjutnya, di Bajo ditempatkan seseorang pejabat Hindia Belanda yang disebut "Tuan Petoero Kecil" dengan wilayah kekuasaan yang disebut distrik dari wilayah kekuasaan Kedatuan Luwu bagian Selatan, yang sebelumnya secara *de facto*

menjadi wilayah *Opu Sanggaria Bajo*, yang terdiri dari Belopa dan pelabuhan Ulo-Ulo, beserta daerah-daerah lainnya di wilayah Kedatuan Luwu bagian Selatan.

Pemerintah Hindia-Belanda terus berupaya untuk menghapus pengaruh kerajaan Luwu di daerah yang pernah dikuasainya sebagai usaha untuk mengendalikan wilayah sekaligus mencegah munculnya pemberontakan kepada pemerintah Belanda yang berada di Palopo. Pernyataan pelepasan wilayah Poso atas pengaruh Kerajaan Luwu baru ditandatangani pada 25 Februari 1907, diikuti wilayah Bada pada 18 Oktober 1909. Pemisahan wilayah Poso dan Bada menandakan bahwa pemerintah Belanda membuat langkah politik untuk menghapus kedudukan kedatuan serta hak atas kedatuan. Wilayah kekuasaan kerajaan Luwu terus dipecah-pecah menjadi unit-unit kecil agar mudah dikontrol serta mencegah munculnya pemberontakan.

Kuatnya pengaruh pemerintah Hindia-Belanda di Kerajaan Luwu berdampak pada perubahan struktur masyarakat Luwu. Kerabat raja Luwu, para bangsawan serta ulama yang memiliki pengaruh di kalangan masyarakat berada dalam kontrol pemerintah Belanda, sehingga mereka tidak dapat bergerak secara leluasa.

Keterlibatan pemerintah Hindia-Belanda dalam urusan agama membuat kekesalan ulama terhadap peraturan pemerintah Belanda yang membatasi kegiatan keagamaan di Luwu. Puncak dari ketegangan antara pemerintah Hindia-Belanda dengan penganut agama Islam bermula pada tokoh ulama yakni Haji Hasan dan Tojabi yang menolak pengakuan atas hukum pemerintah Belanda di Luwu.

Gerakan perlawanan Haji Hasan tidak hanya mendapat dukungan dari masyarakat Luwu saja, tetapi gema perlawanan ini serta dukungan dengan cepat menyebar sampai ke Wajo hingga di daerah Kolaka. Gerakan Haji Hasan tidak hanya mendapat dukungan dari kalangan masyarakat saja, secara diam-diam para bangsawan yang selama ini menaruh dendam kepada pemerintah Belanda mendukung gerakan perlawanan yang direncanakan oleh Haji Hasan beserta pengikutnya dengan menggunakan taktik gerilya dimulai pada tahun 1907.

Letak geografis Belopa dan dukungan pelabuhan Ulo-ulo, yang dapat memperlancar perdagangan rakyat antara pulau, maka pemerintah Hindia Belanda, memberi posisi penting kepada Belopa sebagai daerah agraris dan sentra perdagangan hasil bumi di bagian selatan. Tetapi, pada sisi lainnya ruang gerak masyarakat itu di batasi kebebasannya, menjadi salah satu pemicu munculnya gerak nasionalisme dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk "Srikandi Luwu Dari Belopa" yaitu "Opu Dg Risaju" pada masa pendudukan Jepang.

Dinamika politik di Sulawesi bagian selatan di awal abad ke-20 di bawah pengaruh Pemerintah Belanda kearah perubahan politik di wilayah kekuasaan khususnya di Sulawesi bagian selatan. Keadaan ini ditandai dengan adanya pergantian Gubernur Jenderal, Gubernur Jenderal Johaness Benedictus van Heutsz menggantikan Gubernur Jenderal W. Rooseboom (1889-1904) pada tahun 1904. Setelah Johaness Benedictus van Heutsz (1904-1908) resmi menjadi Gubernur Jenderal, dan melaksanakan kebijakan baru ke arah penguasa wilayah jajahan untuk mencapai tujuan pokok menguasai secara langsung seluruh wilayah jajahannya.

Reorganisasi besar-besaran terhadap wilayah yang ada di Sulawesi bagian Selatan dan Tenggara dijadikan satu wilayah yang dikenal dengan Pemerintah Sulawesi dan Daerah Bawahannya (*Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden*). Wilayah itu dibagi ke dalam tujuh *Afdeeling* (bagian pemerintahan) yaitu: *Afdeeling* Makassar, *Afdeeling* Bonthain, *Afdeeling* Bone, *Afdeeling* Pare-Pare, *Afdeeling* Luwu, *Afdeeling* Mandar dan Buton dan Pesisir Timur Sulawesi (*Boeton Oostkust Celebes*) secara resmi pada tahun 1911. Kepala pemerintahan diberikan kepada seorang pejabat pemerintahan yang disebut Gubernur (*gouverneur*), kemudian di wilayah *Afdeeling* di tempatkan seorang Asisten Residen (*Assisten Resident*) yang berkedudukan sebagai pimpinan pemerintahan di wilayah tersebut.

Tiap-tiap *afdeling* membawahi beberapa *Onderafdeling* yang dikepalai oleh *Controleur* atau *Gezahebber* dengan jabatan *Hoofd van Plaatselijk Bestuur* yang kemudian hari dinamai Kepala Pemerintah Negeri (KPN). Ada dua bentuk pemerintahan yang dilaksanakan di Sulawesi Selatan pada waktu itu yaitu :1) Daerah-daerah yang diperintah langsung oleh pemerintah Hindia Belanda, dan 2) Daerah-daerah yang tidak diperintah langsung.

Daerah yang diperintah secara langsung mempergunakan anggaran pemerintah pusat, peraturan-peraturan pusat, polisi dan pengadilan pusat, kecuali pemerintah desa yang berdasarkan I.G.O.S (*Inlandsche Gemente Ordonnatie buiten Gewesten*). Dalam struktur organisasi pemerintahan, dibawah *Controleur (Onderafdeling)* dipekerjakan adat *gemeenschapshoofd* yang terdiri dari kepala-kepala adat setempat yang umumnya bergelar Karaeng. Daerah-daerah yang dimaksud adalah daerah-daerah yang termasuk *afdeling* Makassar dan *afdeling* Bonthain atau daerah-daerah yang sekarang termasuk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Maros, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai dan Selayar. Kerajaan Gowa (sekarang Kabupaten Gowa), dijadikan daerah yang diperintah langsung, dan nanti pada tahun 1936 dikembalikan menjadi kerajaan yang berpemerintahan sendiri (Swapraja).

Daerah-daerah yang tidak diperintah langsung, ialah kerajaan-kerajaan asli (Swapraja) yang diikat dengan *Korte Vorklaring* (pernyataan pendek). Kerajaan-kerajaan itu diberikan hak otonomi yang luas, yaitu mempunyai keuangan/ kas sendiri, pengadilan adat sendiri, polisi sendiri dan menjalankan pendidikan rakyat yang terbatas pada pendidikan dasar (*volkschool*).

Dari keswaprajaan tersebut dalam lapangan legislatif dan pengurusan keuangan ada yang bekerja sendiri-sendiri dan ada yang bekerja bersama-sama sesuai dengan adat setempat. Yang bekerja sendiri adalah : Bone, Wajo, Soppeng, Luwu (termasuk Tana Toraja), dan Gowa setelah kembali menjadi swapraja. Sedangkan daerah yang bekerja bersama-sama adalah :Mandar (sekarang Kabupaten Polewali Mamasa, Majene dan Mamuju) terdiri dari swapraja-swapraja Balanipa, Sendana, Majene, Pamboang, Tappalang, Mamuju dan Binuang; Ajatappaparang (sekarang Kabupaten Pinrang, Sidereng Rappang dan Kota Pare-pare) terdiri atas swapraja Sawitto, Sidenreng, Suppa, Rappang, Mallusetasi dan Batulappa; Massenrepulu (sekarang Kabupaten Enrekang) terdiri dari swapraja-swapraja Alla, Buntu Batu, Kassa, Maiwa, Maluwa, dan Enrekang; Barru (sekarang Kabupten Barru), terdiri dari swapraja-swapraja Tanete, Barru dan Soppeng Riaja; serta Buton dan Laiwui (sekarang propinsi Sulawesi Tenggara).

3.1.3. Masa Pendudukan Jepang

Setelah pendudukan Belanda, Sulawesi Selatan selanjutnya dikuasai oleh Jepang. Jepang berusaha memutuskan semua hubungan dengan zaman kolonial Belanda secara simbolis. Sifat turun temurun raja-raja yang swapraja tidak diterima. Hubungan-hubungan perjanjian Belanda dengan mereka semuanya dibatalkan. Gerakan yang aktif pada zaman Belanda juga dibubarkan. Dengan pengecualian penting, perkumpulan Islam yang berpengaruh.

Keadaan tersebut diatas member suasana baru bagi masyarakat yang mendiami Bajo-Belopa dan sekitarnya, sehingga hasil-bumi masyarakat Belopa dan sekitarnya yang dikenal dengan nama *Tana Manai* lebih meningkat, dan inilah yang member motivasi sehingga Belopa dan sekitarnya, diberi julukan "*Pabbarasanna Tana Luwu*" (Lumbung Pangan Tana Luwu)

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda jabatan Gubernur yang mengepalai sebuah wilayah yang merupakan pusat pemerintahan seperti Sulawesi Selatan diberi nama Gubernur Jenderal pada masa Jepang kepala pusat pemerintahan berubah menjadi *Minseibu*. Pada dasarnya struktur organisasi pemerintahan daerah Barru dimasa itu tidak mengalami perubahan, demikian pula bentuk pemerintahan masih

tetap berpegang pada dasar Kolonial Belanda yang lama, yaitu *Zelfbestuur Regelan* 1938. Tetapi baik nama jabatan maupun pemangku jabatan diganti dengan istilah dari bahasa Jepang dan orang-orang sendiri.

Pada masa pemerintahan Jepang, Sulawesi Selatan dibagi menjadi enam daerah kecil yang masing-masing disebut *kanriken* yakni (1) Makassar *Ken Karikan* dengan ibu kota Makassar meliputi Gowa, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Takalar, dan Jeneponto, (2) Parepare *Ken Karikan* dengan ibukota Parepare meliputi Barru, Sidenreng Rappang, Enrekang dan Pinrang. (3) Luwu *Ken Karikan* dengan ibu kota Palopo meliputi, Palopo, Masamba, Malili, Makale dan Rantepao. (4) Bone *Ken Karikan* meliputi Bone, Soppeng dan Wajo. (5) Mandar *Ken Karikan* meliputi Majene, Polewali, Mamasa dan Mamuju, (6) Bonthain *Ken Karikan* meliputi Bonthain, Bulukumba, Sinjai dan Selayar.

Awal pemerintahan Hindia Belanda di Sulawesi Selatan dikenal dengan Kontrak Panjang dan Pernyataan Pendek hingga pemerintahan diambil alih oleh pihak Jepang dengan mengganti pemerintahan sipil Belanda menjadi pemerintahan militer Jepang. Kedudukan yang ditinggalkan oleh Belanda dirubah nama pada setiap bagian-bagian daerah dan sebutan pejabat pimpinan dalam bahasa Jepang. Pada saat perang dunia ke-2 dimana Jepang kalah atas sekutu yang membawa kemerdekaan Indonesia, namun Indonesia belum bisa menikmati kemerdekaannya sebab sekutu kembali ke Indonesia dengan membonceng NICA untuk memulihkan pemerintahan sipil Hindia Belanda di Indonesia. Bekas *Gouvernement Groote Oost* yang meliputi Indonesia Bagian Timur dijadikan negara yang dikenal dengan nama Negara Indonesia Timur (NIT). Setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia pada 27 Desember 1949, pemerintahan NIT dibubarkan pada tahun 1950 dan selanjutnya diberlakukan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 yang menggantikan konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949.

3.1.4. Masa Kemerdekaan

Dengan berlakunya Undang-Undang Sementara, hal penting dalam pemerintahan di Sulawesi Selatan adalah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka terbentuk pula Provinsi administratif Sulawesi sesuai dengan peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Serikat No. 21 Tahun 1950.

Sejak 1952, tindakan protes dan tuntutan agar Luwu dijadikan Kabupaten terus dilakukan oleh Komite Nasional Indonesia (KNI). Sementara itu, Partai Bangsawan Nasional Indonesia (PBNI) justru menentang pembentukan Kabupaten dan berkeinginan untuk tetap mempertahankan pemerintahan swapraja yang mewarnai politik pemerintahan di Sulawesi Selatan khususnya kabupaten Luwu.

Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.34/1952 tentang Pembubaran Daerah Sulawesi Selatan bentuk Belanda/ Jepang termasuk daerah yang berstatus Kerajaan. Peraturan Pemerintah No.56/1951 tentang Pembentukan Gabungan Sulawesi Selatan dan wilayahnya dibagi menjadi 7 tujuh daerah swatantra yang salah satu di antaranya adalah daerah swatantra Luwu yang mewilayahi seluruh daerah Luwu dan Tana Toraja dengan pusat Pemerintahan berada di Kota Palopo.

Dengan berlakunya Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1957 tentang penghapusan sistem pemerintahan swapraja dan terpisahnya Tana Toraja dari Kabupaten Luwu, maka berakhir pula pemerintahan sistem kerajaan Luwu. Datu Luwu Andi Djemma menjadi Bupati/ Datu Luwu pada saat itu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang terbentuknya daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, dan wilayah Kabupaten Dati II Luwu di bentuk 16 Kecamatan yang salah satu diantaranya adalah Kecamatan Bajo dengan ibukotanya Belopa, sesuai keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk I Sulawesi Selatan Tenggara Nomor: 2067 A Tahun 1961 Tanggal 19 Desember 1961. Sesuai perkembangannya, Belopa mengalami pertumbuhan pesat pada berbagai bidang, yang pada akhirnya

Belopa ditingkatkan statusnya menjadi kecamatan pada tahun 1983, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1983, pada perkembangan selanjutnya dibentuk pembantu Bupati wilayah III yang berkedudukan di Belopa pada Tahun 1993.

Memasuki otonomi daerah dengan lahirnya Undang-Undang nomor: 12 Tahun 1999, kabupaten Luwu dimekarkan menjadi kabupaten Luwu Utara dengan ibukota Masamba berdasarkan Undang-Undang nomor: 13 Tahun 1999. Selanjutnya kota Palopo sebagai ibukota kabupaten Luwu ditingkatkan statusnya menjadi kota otonom melalui Undang-Undang nomor: 11 Tahun 2002. Pada saat itu kota Palopo berfungsi ganda di samping sebagai ibukota induk (kabupaten Luwu) juga sebagai ibukota otonom Palopo.

Dengan berpedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka diupayakan pemindahan ibu kota Kab. Luwu dari Palopo ke Belopa dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Pada tahap pertama pemerintahan kabupaten Luwu melakukan penjarangan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat kabupaten Luwu, pada umumnya menghendaki ibu kota Kabupaten Luwu di tempatkan di kota Belopa, mengingat letak geografis, aksesibilitas dan faktor pendukung lainnya yang di nilai sangat strategis.

Sebagai penguatan dan respon pemerintahan daerah dan DPRD kabupaten Luwu atas aspirasi masyarakat tersebut, sehingga pelantikan Bupati dan Wakil Bupati periode 2004 – 2009 pada tanggal 13 Februari 2004 ditempatkan dikota Belopa. Dengan demikian Drs, H. Basmin Mattayang, M.Pd dan Ir. Bahrum Daido merupakan Bupati Luwu dan Wakil Bupati Luwu yang pertama dilantik di kota Belopa.

- b. Pada tahap kedua, Pemda Kabupaten Luwu meminta persetujuan DPRD Kabupaten Luwu atas usul pemindahan ibukota Kab.Luwu dari Kota Palopo ke Belopa sesuai surat Bupati Luwu Nomor : 180 / 46/HUK/2004 Tanggal 1 April 2004, DPRD Kab. Luwu menindak lanjuti dengan keluarnya surat keputusan DPRD Kabupaten Luwu Nomor : 18 Tahun 2004 Tanggal 15 April 2004. Pada tahap kedua ini pula, kembali pemerintah daerah dan DPRD menunjukkan keseriusannya dengan peresmian pengangkatan anggota DPRD kabupaten Luwu masa jabatan 2004-2009 dikota Belopa pada tanggal 28 Oktober 2004.
- c. Tahap ketiga mengusulkan ke Gubernur Sulawesi Selatan mengenai Belopa sebagi ibukota Kabupaten Luwu sesuai surat Bupati Luwu Nomor : 135 / 81/ HUK/ 2004 Tanggal 15 Mei 2004, selanjutnya Gubernur Sulawesi Selatan melanjutkan usulan tersebut ke Menteri Dalam Negeri melalui suratnya Nomor : 135/2317/OTDA Tanggal 9 Juni 2004 yang di susul Surat Gubernur Sulawesi Selatan yang kedua dengan Nomor : 135/3902/OTDA Tanggal 14 September 2004, dan juga Surat Bupati Luwu ke Menteri Dalam Negeri dengan Nomor : 135/83 /HUK / 2004 Tanggal 17 Mei 2004.
- d. Tahap keempat adalah melakukan kajian akademik sesuai petunjuk Menteri Dalam Negeri melalui surat beliau Nomor : 134/1279/OTDA Tanggal 19 Oktober 2004 dan dengan keputusan Bupati Nomor : 302/XI / 2004 Tanggal 23 Desember 2004, dibentuklah Tim pengkajian pemindahan ibukota Kabupaten Luwu dari kota Palopo ke kota Belopa, hasilnya di kirim ke Menteri Dalam Negeri untuk menjadi dasar melakukan observasi yang melakukan pada bulan Mei Tahun 2005
- e. Tahap kelima adalah penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan pemerintah pada bulan Juni sampai Oktober 2005, yang pembahasannya melibatkan instansi antar Departemen, melalui beberapa kali tahapan pembahasan sampai rancangan peraturan pemerintah tersebut menjadi final dan siap dikirim ke Presiden Republik Indonesia.

- f. Tahap keenam adalah penyampaian rancangan peraturan pemerintah oleh Menteri Dalam Negeri ke Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Sekretaris Negara. Pada tanggal 30 Desember 2005 Peraturan Pemerintah tentang pemindahan ibukota Kabupaten Luwu dari kota Palopo ke kota Belopa, di tanda tangani oleh Presiden Republik Indonesia dengan Nomor : 80 Tahun 2005 akhirnya pada tanggal 13 Februari 2006 kota Belopa di resmikan jadi ibu kota Kabupaten Luwu oleh Gubernur Sulawesi Selatan.

3.2. Lambang Kabupaten Luwu

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang dan sistem nilai yang berakar di masyarakat kabupaten Luwu, sekaligus menjadi landasan filosofis masyarakat dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat termasuk menerima wisatawan yang berkunjung ke kabupaten Luwu, berikut digambarkan lambang dan makna dari lambang kabupaten Luwu sebagai berikut :

Gambar 3.1
Lambang Kabupaten Luwu



Sumber : Pemerintah Daerah Kab. Luwu, 2021

Lambang daerah itu di buat sekitar tahun 1946. Saat itu, Indonesia baru saja lepas dari penjajahan Jepang. Pada masa itu, Luwu belum merupakan wilayah kabupaten. Namanya masih menggunakan istilah Swapraja Luwu (pemerintahan awal daerah yang ada di Luwu). Swapraja Luwu saat itu dipimpin oleh Andi Djemma. Adapun makna simbolik dari lambang tersebut, diuraikan sebagai berikut :

1. *Tangrasula* yang terpatri pada puncak payung merupakan bentuk ikonik dari bunga mahkota yang melambangkan kepemimpinan berkesinambungan. Maknanya wibawa *Topoatae Manurungnge* senantiasa menjelma pada *Datu/ Pajung Luwu*. Ujung berbentuk bunga mekar menghadap ke langit sebagai perlambangan doa dan tawakkal kepada Tuhan Yang Maha Kuasa;
2. Rumbai *pajung* berwarna kuning berbentuk pucuk waru berjumlah 12 yang menghadap ke bawah, menjadi simbol '*ade seppulo dua*' sebagai sendi kepemimpinan *Datu/ Pajung Luwu*. Maknanya, ke-12 Dewan Adat senantiasa proaktif mengayomi segenap rakyat Luwu dibawah kepemimpinan *Datu Luwu*;
3. Ikon pusaka *bassi pakkae* yang terhunus dari warangkanya, melambangkan, telah tiba masanya Kedatuan Luwu membuka diri melibatkan masyarakat melestarikan adat tradisi dalam keluhuran *pangadereng*. Terhunusnya *bassi pakkae* bermakna kesiagaan Kedatuan Luwu menanggulangi segala bentuk abrasi nilai luhur Tana Luwu dengan tetap dalam kerangka NKRI
4. Simbol keris yang ada di bagian tengah lambang itu menandakan ke sakralan kerajaan Luwu. Keris itu sebenarnya bernama keris *Bungawaru*. Keris ini diyakini adalah keris pemberian dari langit, keris titipan dari Langit.lambang payung

berwarna putih tersebut adalah lambang kerajaan Luwu sejak awal. Maknanya adalah kerajaan Luwu sangat melindungi seluruharganya.

5. Ikon Sayap besar 12 lembar, melambangkan Luwu melingkupi 12 anak suku. Sayap teratas memegang kedua sisi payung bermakna ke-12 anak suku senantiasa menjaga dan menopang kemuliaan dan keagungan *Datu* Luwu
6. Lingkaran *tulu parajo* yang melingkari *singkerru mulajajji* adalah ikon yang melambangkan kesatuan Tana Luwu dan *Wija* Luwu yang senantiasa bersatu melestarikan adat dan budaya Luwu.

3.3. Kondisi Fisik Kabupaten Luwu

3.3.1. Aspek Fisik Dasar

Kabupaten Luwu memiliki luas wilayah administrasi kurang lebih 3.000,25 km² dan terdiri dari 22 kecamatan yang dibagi menjadi 227 desa/kelurahan. Kecamatan Latimojong adalah kecamatan terluas di Kabupaten Luwu, luas Kecamatan Latimojong tercatat sekitar 467,75 km² atau sekitar 15,59 persen dari luas Kabupaten Luwu, menyusul kemudian Kecamatan Walenrang Utara dan Walenrang Barat dengan luas masing-masing sekitar 259,77 km² dan 247,13 km² atau 8,66 persen dan 8,24 persen. Sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Belopa Utara dengan luas kurang lebih 34,73 km² atau hanya sekitar 1,16 persen.

Ibukota Kabupaten Luwu adalah Kecamatan Belopa. Kecamatan yang memiliki jarak terjauh ke Ibukota Kabupaten Luwu adalah kecamatan Bassesangtempe dengan jarak 110 km, kecamatan Lamasi Timur dengan jarak 96 km, dan kecamatan Walenrang Barat dengan jarak 93 km.

Secara astronomis Kabupaten Luwu terletak antara 2° 34'45" - 3° 30'30" Lintang Selatan dan 120° 21'15" - 121° 43'11" Bujur Timur, posisi Kabupaten Luwu berada pada bagian timur laut Provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak sekitar 300 km dari Kota Makassar. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Luwu dibatasi oleh Kabupaten Luwu Utara dan Kota Palopo di sebelah utara, Teluk Bone di sebelah timur, Kota Palopo dan Kabupaten Wajo di sebelah selatan, dan Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Enrekang di sebelah barat.

Daerah Kabupaten Luwu terbagi dua wilayah sebagai akibat dari pemekaran Kota Palopo, yaitu wilayah Kabupaten Luwu bagian selatan dan bagian utara dari Kota Palopo. Kabupaten Luwu terdiri dari 22 Kecamatan dan 227 Desa/ Kelurahan. Sebanyak 9 kecamatan berbatasan langsung dengan Teluk Bone di sebelah timurnya. Adapun 9 kecamatan tersebut adalah Larompong, Larompong Selatan, Suli, Belopa, Kamanre, Belopa Utara, Ponrang, Ponrang Selatan, dan Bua. Dari 9 kecamatan yang berbatasan dengan Teluk Bone tersebut terdapat sebanyak 37 desa/ kelurahan yang diklasifikasikan sebagai daerah pantai, selebihnya sebanyak 190 desa/ kelurahan adalah desa/kelurahan bukan pantai.

Kabupaten Luwu dialiri oleh 40 buah sungai yang tersebar pada 13 buah wilayah kecamatan, sebagai berikut :

1. Sungai La'loa, dengan panjang 5 kilometer dan lebar 15 meter terletak di kecamatan Larompong Selatan.
2. Sungai Temboe, dengan panjang 10 kilometer dan lebar 15 meter, terletak di Kecamatan Larompong Selatan.
3. Sungai Salusana, dengan panjang lima kilometer dan lebar 15 meter, terletak di Kecamatan Larompong Selatan.
4. Sungai Sampano, panjang dua kilometer, lebar 12 meter, terletak di Kecamatan Larompong Selatan.
5. Sungai Malewong, dengan panjang 20 kilometer dan lebar delapan meter, terletak di Kecamatan Larompong Selatan.
6. Sungai Keppe, dengan panjang 3 kilometer terletak di Kecamatan Larompong.

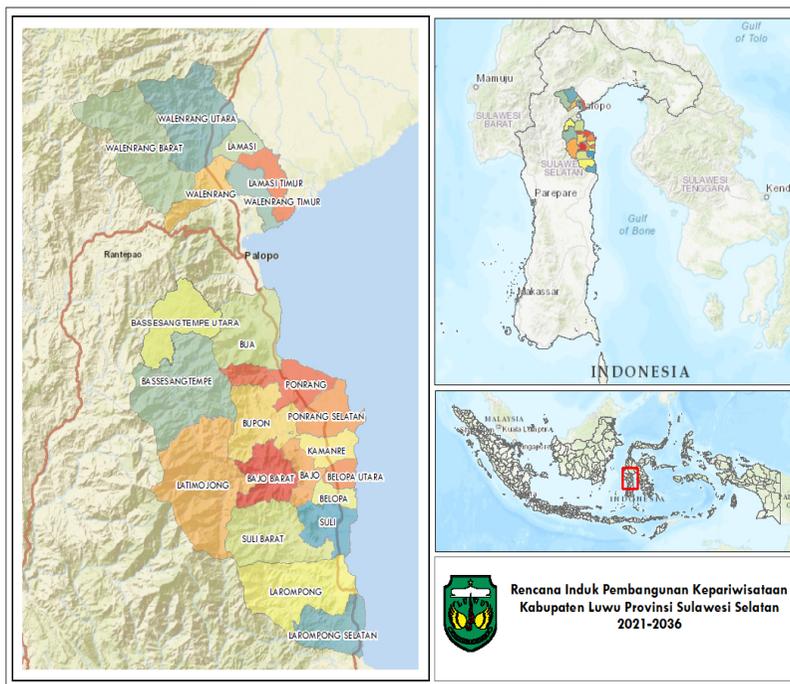
7. Sungai Riwang, dengan panjang 4 kilometer dan lebar 10 meter terletak di Kecamatan Larompong.
8. Sungai Rante Belu, dengan panjang 4,5 kilometer dan lebar 15 kilometer terletak di Kecamatan Larompong.
9. Sungai Minanga, dengan panjang 3,2 kilometer dan lebar 10 meter terletak di Kecamatan Larompong.
10. Sungai Komba, dengan panjang 23,37 kilometer dan lebar 15 meter terletak di Kecamatan Larompong.
11. Sungai Lalento, dengan panjang 7,6 kilometer dan lebar 15 meter terletak di Kecamatan Larompong.
12. Sungai Larompong, dengan panjang 4,6 kilometer dan lebar 16 meter terletak di Kecamatan Larompong.
13. Sungai Binturu, dengan panjang sembilan kilometer dan lebar 12 meter terletak di Kecamatan Larompong.
14. Sungai Redo, dengan panjang 10,52 kilometer dan lebar 9 meter terletak di Kecamatan Larompong.
15. Sungai Buntu Sawa, dengan panjang 3 kilometer dan lebar 8 meter terletak di Kecamatan Larompong.
16. Sungai Liang, dengan panjang 2 kilometer dan lebar 8 meter terletak di Kecamatan Larompong.
17. Sungai Lamaring, dengan panjang 13,82 kilometer dan lebar 12 meter terletak di Kecamatan Larompong.
18. Sungai Garegge, dengan panjang 3 kilometer dan lebar 8 delapan meter terletak di Kecamatan Larompong.
19. Sungai Suli, dengan panjang 19 kilometer dan lebar 20 meter terletak di Kecamatan Suli.
20. Sungai Lempopacci, dengan panjang 1 kilometer dan lebar 20 meter terletak di Kecamatan Suli.
21. Sungai Bone, dengan panjang 17,2 kilometer dan lebar 15 meter terletak di Kecamatan Bajo Barat.
22. Sungai Suso, dengan panjang 44,35 kilometer dan lebar 50 meter terletak di Kecamatan Bajo Barat.
23. Sungai Kompi, dengan panjang 9,62 kilometer dan lebar 30 meter terletak di Kecamatan Bajo Barat.
24. Sungai Tallang Bulawang, dengan panjang 4,41 kilometer dan lebar delapan meter terletak di Kecamatan Bajo.
25. Sungai Noling/Salu Paremang, dengan panjang 63 kilometer dan lebar 40 meter, terletak di Kecamatan Bua, Ponrang dan Ponrang Selatan.
26. Sungai Matarin, dengan panjang 5 kilometer dan lebar 8 meter terletak di Kecamatan Basse Sangtempe (Bastem).
27. Sungai Ojo, dengan panjang 3 kilometer dan lebar 15 meter terletak di Kecamatan Bastem.
28. Sungai To'long, dengan panjang tiga kilometer dan lebar 15 meter terletak di Kecamatan Bastem.
29. Sungai Bolu, dengan panjang 6 kilometer dan lebar 10 meter terletak di Kecamatan Bastem.
30. Sungai Pantai, dengan panjang 3 kilometer dan lebar 10 meter terletak di Kecamatan Bastem Utara.
31. Sungai Pancobe, dengan panjang lima kilometer dan lebar lima meter terletak di Kecamatan Ponrang Selatan.
32. Sungai Laminanga-nanga, dengan panjang 1 kilometer dan lebar 5 meter terletak di Kecamatan Ponrang Selatan.

33. Sungai Bassiang, dengan panjang satu kilometer dan lebar 6 meter terletak di Kecamatan Ponrang Selatan.
34. Sungai Kaiyang, dengan panjang 18 kilometer dan lebar 15 meter terletak di Kecamatan Ponrang.
35. Sungai Kamburi, dengan panjang 6 kilometer dan lebar 8 meter terletak di Kecamatan Kamanre.
36. Sungai Tanjong, dengan panjang 3 kilometer dan lebar lima meter terletak di Kecamatan Ponrang.
37. Sungai Mamumba, dengan panjang 7 kilometer dan lebar 12 meter terletak di Kecamatan Bua Ponrang.
38. Sungai Kandoa, dengan panjang 12 kilometer dan lebar 15 meter terletak di Kecamatan Bua.
39. Sungai Bua, dengan panjang 13 kilometer dan lebar 15 meter terletak di Kecamatan Bua.
40. Sungai Battang, dengan panjang 45 kilometer dan lebar 20 meter terletak di Kecamatan Walenrang.

Gunung yang ada di kabupaten Luwu sebanyak 6 buah yang merupakan gugusan dari pegunungan Latimojong yaitu gunung Rantemario, gunung Latimojong, gunung Bajaja, gunung Balease, gunung Katapu, dan gunung Ambesu. Gunung Latimojong merupakan gunung yang tertinggi di Sulawesi Selatan dengan ketinggian 3.478 mdpl, yang membentang dari selatan ke utara. Di sebelah barat Gunung Latimojong adalah kabupaten Enrekang, sebelah utara kabupaten Tana Toraja, sebelah selatan adalah daerah kabupaten Sidenreng Rappang dan area sebelah timur seluruhnya wilayah kabupaten Luwu.

Untuk lebih jelasnya gambaran mengenai wilayah administratif Kabupaten Luwu dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.2
Peta Wilayah Administratif Kabupaten Luwu



Sumber : Hasil Penelitian, 2021

Kombinasi antara gunung, sungai, hamparan sawah hingga ke wilayah pesisir pantai teluk Bone yang menyediakan daya tarik yang variatif. Dengan perpaduan budaya dan tinggalan sejarah pada masyarakat sehingga merupakan potensi yang sangat besar dalam pengembangan pariwisata kabupaten Luwu.

3.3.2. Aspek Kependudukan

Pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah sangat ditentukan oleh jumlah penduduknya. Berdasarkan data statistik tahun 2020, jumlah penduduk kabupaten Luwu tahun 2019 sebanyak 370.680 jiwa dengan rasio jenis kelamin penduduk berjumlah 101,34, terdiri dari 186.580 jiwa penduduk laki-laki dan 184.100 ribu jiwa penduduk perempuan. Kepadatan penduduk mencapai 124 jiwa/km. Penyebaran penduduk berdasarkan wilayah kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Jumlah Dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Luwu Tahun 2020

No.	Kecamatan	Luas/ Area km ²	Jumlah Penduduk (Ribu)	Kepadatan Penduduk Per km ²
1.	Larompong	225,25	22,8	101
2.	Larompong Selatan	131	18,4	140
3.	Suli	81,75	21,86	267
4.	Suli Barat	153,5	10,13	66
5.	Belopa	59,26	19,05	321
6.	Kamanre	52,44	12,52	239
7.	Belopa Utara	34,73	17,89	515
8.	Bajo	68,52	16,49	241
9	Bajo Barat	66,3	10,42	157
10	Bassesangtempe	178,12	6,24	35
11	Latimojong	467,75	6,12	13
12	Bastem Utara	122,88	7,8	63
13	Bupon	182,67	15,74	86
14	Ponrang	107,09	27,83	260
15	Ponrang Selatan	99,98	26,03	260
16	Bua	204,01	32,81	161
17	Walenrang	94,6	18,61	197
18	Walenrang Timur	63,65	16,15	254
19	Lamasi	42,2	22,71	538
20	Walenrang Utara	259,77	18,81	72
21	Walenrang Barat	247,13	8,81	36
22	Lamasi Timur	57,65	13,48	234
Jumlah		3.000,25	370,68	124

Sumber : Kantor BPS Kabupaten Luwu, Tahun 2021

Kepadatan penduduk pada 22 wilayah kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Lamasi dengan kepadatan sebesar 538 jiwa/ km² dan yang terendah di kecamatan Latimojong yang hanya sebesar 13 jiwa/km².

Jumlah angkatan kerja yang ada di Kabupaten Luwu sebanyak 159.605 jiwa dimana sebanyak 152.159 penduduk bekerja sedangkan sisanya yaitu sekitar 7.436 penduduk merupakan pengangguran atau dapat dikatakan bahwa 11,79 penduduk usia

produktif merupakan pengangguran. Jika dilihat dari pendidikan tertinggi, penduduk yang menganggur paling banyak merupakan lulusan SMA dan Perguruan Tinggi, yaitu sebanyak 3.667 dan 2.686 jiwa.

3.4. Potensi Pariwisata Kabupaten Luwu

Daya tarik wisata Kabupaten Luwu sangat dipengaruhi oleh karakteristik geografis yang sangat variatif, dimana pada wilayah pegunungan hingga pantai dan laut yang didominasi oleh daya tarik wisata alam seperti goa, air terjun, permandian alam, dan panorama, wisata sejarah berupa situs dan benda tinggalan serta wisata budaya berupa ritual dan kebudayaan masyarakat lainnya termasuk kuliner tradisional maupun *events* (peristiwa pariwisata).

3.4.1. Potensi Wisata Alam

Kekayaan dan keindahan alam sebagai salah satu daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke kabupaten Luwu. Data dan sebaran potensi wisata alam kabupaten Luwu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Potensi Wisata Alam Kabupaten Luwu Tahun 2021

No	Nama Daya Tarik Wisata Alam	Daya Tarik	Lokasi
1	Pantai Bonepute	1. Panorama pantai 2. Rekreasi keluarga	Kec. Larompong Selatan
2	Pantai Pannori/ Ponnori	1. Panorama pantai 2. Rekreasi keluarga	Kec. Larompong Selatan
3	Hutan Penelitian Simoma	Wisata edukasi (flora dan fauna)	Kec. Larompong Selatan
4	Pantai Babana Tembo'E	1. Hutan Mangrove 2. Panorama pantai 3. Rekreasi keluarga	Kec. Larompong Selatan
5	Air Terjun Buntu Sawa	1. Wisata tirta 2. Panorama alam	Kec. Larompong
6	Pantai Buntu Mata'bing	1. Panorama pantai 2. Rekreasi keluarga	Kec. Larompong
7	Goa Palar	1. Panorama alam 2. Wisata edukasi	Kec. Larompong
8	Pantai Batu Killong	1. Panorama pantai 2. Rekreasi keluarga	Kec. Suli
9	Hutan Mangrove Pulangasa Towondu	1. Hutan Mangrove 2. Rekreasi keluarga 3. Wisata Edukasi	Kec. Suli
10	Pantai Morante	1. Panorama pantai 2. Rekreasi keluarga	Kec. Suli
11	Pantai Suli	1. Panorama pantai 2. Rekreasi keluarga	Kec. Suli
12	Pantai Pasir Putih Cerekang	1. Panorama pantai 2. Rekreasi keluarga	Kec. Suli
13	Air Terjun Salotodang	1. Wisata tirta 2. Panorama alam	Kec. Suli Barat
14	Sarambu Masiang	1. Wisata tirta 2. Panorama alam	Kec. Suli Barat
15	Air Terjun Tombanbai	1. Wisata tirta 2. Panorama Alam	Kec. Suli Barat

No	Nama Daya Tarik Wisata Alam	Daya Tarik	Lokasi
16	Permandian alam Sapuangirat	3. Wisata tirta 4. Rekreasi Keluarga	Kec. Suli Barat
17	Air Terjun Lindajang	1. Wisata tirta 2. Panorama alam	Kec. Suli Barat
18	Sarambu Paburru	1. Wisata tirta 2. Panorama alam	Kec. Suli Barat
19	Sarambu Daun Banga	1. Wisata tirta 2. Panorama alam	Kec. Suli Barat
20	Air Terjun Bollae	1. Wisata tirta 2. Panorama alam	Kec. Suli Barat
21	Sarambu Biqcu	1. Wisata tirta 2. Panorama alam	Kec. Suli Barat
22	Sarambu Balendo	1. Wisata tirta 2. Panorama alam	Kec. Suli Barat
23	Sarambu Pong Ma'ga	1. Wisata tirta 2. Panorama alam	Kec. Suli Barat
24	Sungai Likuraja	1. Wisata tirta 2. Panorama alam	Kec. Suli Barat
25	Pantai Talumae	1. Panorama pantai 2. Rekreasi keluarga	Kec. Belopa
26	Pantai Mamonta	1. Panorama pantai 2. Rekreasi keluarga	Kec. Belopa Utara
27	Air Terjun Tumbubara	1. Wisata tirta 2. Panorama alam	Kec. Bajo Barat
28	Permandian Batu Alang	1. Wisata tirta 2. Panorama alam	Kec. Bajo Barat
29	Salu Suso	1. Wisata tirta 2. Panorama alam	Kec. Bajo Barat
30	Saruran Toke	1. Wisata tirta 2. Panorama alam 3. Rafting/ River Tubing	Kec. Bajo Barat
31	Air Terjun Sarasa Katapuk	1. Wisata tirta 2. Panorama alam	Kec. Latimojong
32	Wisata Rante Lajang	1. Panorama Alam 2. Wisata minat khusus	Kec. Latimojong
33	Air terjun Podong Saratu'	1. Wisata tirta 2. Panorama alam	Kec. Basesang-tempe
34	Air terjun Topangangnga	1. Wisata tirta 2. Panorama alam	Kec. Basesang-tempe
35	Air terjun To Bettu	1. Wisata tirta 2. Panorama alam	Kec. Basesang-tempe
36	Air terjun To Ballan	1. Wisata tirta 2. Panorama alam	Kec. Basesang-tempe
37	Panorama Alam Buntu Sanik	1. Panorama Alam 2. Wisata minat khusus	Kec. Basesang-tempe
38	Panorama Alam Buntu Batu	1. Panorama Alam 2. Wisata minat khusus	Kec. Basesang-tempe
39	Air Terjun Tabi	1. Wisata tirta 2. Panorama alam	Kec. Basesang-tempe

No	Nama Daya Tarik Wisata Alam	Daya Tarik	Lokasi
40	Air Terjun Pollok Tondok	1. Wisata tirta 2. Panorama alam	Kec. Bessesang-tempe
41	Air Terjun Salo Sawa	1. Wisata tirta 2. Panorama alam	Kec. Bessesang-tempe Utara
42	Air Terjun Bungalo	1. Wisata tirta 2. Panorama alam	Kec. Ponrang
43	Air Terjun Papakaju	1. Wisata tirta 2. Panorama alam	Kec. Ponrang
44	Pantai Bone Pance	1. Panorama pantai 2. Rekreasi keluarga	Kec. Ponrang Selatan
45	Pantai Bone Jambong	1. Panorama pantai 2. Rekreasi keluarga	Kec. Ponrang Selatan
46	Pantai Salolo	1. Panorama pantai 2. Rekreasi keluarga	Kec. Ponrang Selatan
47	Air Terjun Arung Tobo Tampumea	1. Wisata tirta 2. Panorama alam	Kec. Bupon
48	Air Terjun Bilante	1. Wisata tirta 2. Panorama alam	Kec. Bupon
49	Air Terjun Puraposoang	1. Wisata tirta 2. Panorama alam	Kec. Bua
50	Air Terjun Karang Titale	1. Wisata tirta 2. Panorama alam	Kec. Bua
51	Pantai Lare-Lare	1. Panorama pantai 2. Rekreasi keluarga	Kec. Bua
52	Permandian alam Pakalolo	1. Wisata tirta 2. Panorama alam	Kec. Bua
53	Wisata Alam Garungga	1. Wisata tirta 2. Panorama alam	Kec. Bua
54	Permandian Alam Wai Tiddo	1. Wisata tirta 2. Panorama alam	Kec. Bua
55	Permandian Alam Bonto Tolle	1. Wisata tirta 2. Panorama alam	Kec. Walenrang
56	Wisata Alam Batupapan	1. Panorama alam 2. Wisata Minat Khusus	Kec. Walenrang Barat
57	Permandian Alam Batiok	1. Wisata tirta 2. Panorama alam	Kec. Walenrang Barat
58	Sungai Makun	1. Wisata tirta 2. Panorama alam	Kec. Walenrang Barat
59	Permandian Sungai Lomasi	1. Wisata tirta 2. Panorama alam	Kec. Walenrang Barat
60	Air Terjun Toga Tipayo	1. Wisata tirta 2. Panorama alam	Kec. Walenrang Utara
61	Permandian alam Makawa	1. Wisata tirta 2. Panorama alam	Kec. Walenrang Utara
62	Goa Pompessak	1. Panorama alam 2. Wisata edukasi	Kec. Walenrang Utara
63	Sarambu Ala	1. Wisata tirta 2. Panorama alam	Kec. Walenrang Utara
64	Air Terjun Andulan	1. Wisata tirta 2. Panorama alam	Kec. Walenrang Utara

No	Nama Daya Tarik Wisata Alam	Daya Tarik	Lokasi
65	Sarambu Ma'gandang	1. Wisata tirta 2. Panorama alam	Kec. Walenrang Utara
66	Air Terjun Waisuun	1. Wisata tirta 2. Panorama alam	Kec. Walenrang Utara
67	Kawasan Bukit Desa Se'pon	1. Panorama alam 2. Wisata minat khusus	Kec. Lamasi
68	Kawasan Sungai dan Muara Salu Taretti	1. Wisata tirta 2. Panorama alam	Kec. Lamasi Timur

Sumber : Hasil Olahan Penelitian, 2021

3.4.2. Potensi Wisata Sejarah dan Budaya

Selain potensi keindahan alam, kabupaten Luwu juga sangat kaya dengan tinggalan benda sejarah masa lampau yang memiliki keunikan tersendiri serta keterkaitan sejarah dengan berbagai masyarakat di berbagai belahan dunia masa lampau. Hal ini menunjukkan posisi dan peran strategis kabupaten Luwu dalam kehidupan dan peradaban masa lalu termasuk lintas sejarah yang menempatkan kabupaten Luwu menjadi salah satu bagian dari sejarah tersebut

Kabupaten Luwu juga memiliki berbagai jenis atraksi budaya sebagai tinggalan kebudayaan berbagai masyarakat yang mendiami dan bermukim serta melakukan hubungan sosial ekonomi di masa lalu. Adapun jenis daya tarik wisata sejarah budaya kabupaten Luwu terdiri dari benda tinggalan sejarah, tarian, ritual, permainan rakyat, benda pusaka, dan benda cagar budaya lainnya. Jenis daya tarik tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Potensi Wisata Sejarah dan Budaya Kabupaten Luwu Tahun 2021

No	Nama Daya Tarik Wisata Sejarah Budaya	Daya Tarik	Lokasi
1	Prosesi Perkawinan	1. Ritual budaya 2. Pakaian adat 3. Musik Tradisional 4. Tari Tradisional 5. Lagu Daerah	Seluruh wilayah kabupaten Luwu
2	Musik Tradisional	Alat musik tradisional	Seluruh wilayah kabupaten Luwu
3	Tari Tradisional	Pakaian adat dan jenis tarian tradisional	Seluruh wilayah kabupaten Luwu
4	Lagu daerah	Alat musik tradisional	Seluruh wilayah kabupaten Luwu
5	Upacara Penguburan Mayat	Ritual budaya	Kec. Bassesang-tempe
6	Kawasan Cagar Budaya Meriam Kuno	Cagar budaya	Kec. Suli
7	Liang Andulan	1. Panorama alam 2. Situs Purbakala	Kec. Walenrang Utara
8	Lo'ko Pa'kaparan (Iilanbatu)	1. Panorama alam 2. Situs Purbakala	Kec. Walenrang Barat
9	Museum Opu Dg Risaju	1. Museum 2. Tinggalan Sejarah	Kec. Belopa
10	Situs Buntu Lebani	1. Panorama alam	Kec. Belopa Utara

No	Nama Daya Tarik Wisata Sejarah Budaya	Daya Tarik	Lokasi
		2. Situs Purbakala	
11	Kawasan cagar budaya Batu Borrong (Puang Ri Sinaji)	1. Panorama alam 2. Situs Purbakala	Kec. Basesang-tempe
12	Komunitas adat terpencil Peraokan	1. Tradisi budaya 2. Komunitas adat	Kec. Basesang-tempe
13	Kawasan Adat Kongleilangi Kanna	1. Tradisi budaya 2. Komunitas adat	Kec. Basesang-tempe
14	Situs Erong Rilangi	1. Panorama alam 2. Situs sejarah	Kec. Basesang-tempe
15	Kawasan Cagar Budaya Ayam Puang Ritede	3. Panorama alam 4. Cagar Budaya	Kec. Basesang-tempe Utara
16	Kawasan Cagar Budaya Bubun Lamu	1. Panorama alam 2. Cagar Budaya	Kec. Basesang-tempe Utara
17	Kawasan Cagar Budaya Benteng Tajojok	1. Panorama alam 2. Cagar Budaya	Kec. Basesang-tempe Utara
18	Kawasan Cagar Budaya Awa'tondong	1. Panorama alam 2. Cagar Budaya	Kec. Basesang-tempe Utara
19	Kawasan Cagar Budaya Pantilang	1. Panorama alam 2. Cagar Budaya	Kec. Basesang-tempe Utara
20	Kawasan Cagar Budaya Loko Maindo	1. Panorama alam 2. Cagar Budaya	Kec. Basesang-tempe Utara
21	Situs Batu Borrong	1. Panorama alam 2. Situs Purbakala	Kec. Basesang-tempe Utara
22	Kawasan Cagar Budaya Bukit Kamanre	1. Panorama alam 2. Cagar Budaya	Kec. Kamanre
24	Kawasan Cagar Budaya Kuburan Tua Noling	1. Cagar Budaya	Kec. Bupon
23	Makam Maddika Bua Tandipau	1. Situs Sejarah 2. Cagar Budaya	Kec. Bua
24	Benteng Rumaju	1. Panorama alam 2. Situs Sejarah	Kec. Bajo
25	Bubun Datu	1. Mata air 2. Cagar Budaya	Kec. Bua
26	Bubun Parani	1. Mata air 2. Cagar Budaya	Kec. Belopa
27	Kawasan Cagar Budaya Lapandoso	1. Panorama alam 2. Situs sejarah Islam 3. Cagar Budaya	Kec. Bua
28	Kuburan Jarra	1. Situs Sejarah 2. Cagar Budaya	Kec. Suli Barat

Sumber : Olahan Penelitian, 2021

3.4.3. Potensi Wisata Buatan (*Manmade*) dan Minat Khusus

Selain potensi wisata alam, sejarah dan budaya, kabupaten Luwu juga memiliki potensi daya tarik wisata buatan manusia yang cukup menarik minat wisatawan pada saat melakukan kunjungan di kabupaten Luwu. Potensi wisata buatan merupakan segala bentuk daya tarik yang dibuat atau dibangun oleh manusia secara terencana sebagai sarana bagi wisatawan dalam melakukan aktivitas wisata,

Selain potensi wisata buatan manusia (*man-made*) dan potensi wisata minat khusus juga merupakan sarana atau aktivitas yang dibutuhkan oleh wisatawan pada saat melaksanakan kunjungan ke kabupaten Luwu. Potensi wisata buatan manusia di kabupaten Luwu didominasi oleh aktivitas wisata tirta, mengingat potensi alam kabupaten Luwu sangat didominasi oleh wilayah pegunungan yang kaya akan sumber air.

Selain itu, potensi minat khusus yang dimaksudkan dalam hal ini adalah aktivitas wisata petualangan (*adventure*) yang telah melekat secara operasional dengan daya tarik wisata alam, sejarah dan budaya yang telah di kemukakan pada tabel potensi tersebut di atas. Aktivitas wisata petualangan yang telah banyak dilakukan oleh wisatawan di kabupaten Luwu adalah *trail adventure* oleh berbagai komunitas motor petualangan dan *rafting*. Adapun Daya Tarik wisata buatan manusia dan minat khusus kabupaten Luwu adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Potensi Wisata Buatan Manusia dan Minat Khusus
Kabupaten Luwu Tahun 2021

No	Nama Destinasi	Daya Tarik	Lokasi
1	Kawasan Latimojong	1. <i>Adventure</i> 2. Panorama alam 3. Rafting 4. Trecking 5. <i>Climbing</i> 6. Olahraga dirgantara	Kec. Latimojong
2	Kawasan Puang Ri Sinaji	1. <i>Adventure</i> 2. Panorama 3. Trecking	Kec. Basesangtempe
3	Taman Hijau Andi Benni	1. Rekreasi keluarga 2. Wisata perkotaan	Kec. Belopa
4	Kawasan SJ Park	1. Minat khusus 2. Rekreasi keluarga	Kec. Larompong Selatan
5	Desa Bonelemo	Desa wisata berbasis edukasi	Kec. Bajo Barat
6	Bendung Tomatope	1. Panorama alam 2. Rekreasi keluarga	Kec. Bajo
7	Desa Wisata Seriti	1. Desa wisata 2. Wisata minat khusus	Kec. Lamasi Timur
8	Agrowisata Buah Desa Meppetajang	1. Agrowisata 2. Rekreasi keluarga	Kec. Basesangtempe
9	Waterboom Buntu Pasik	1. Wisata Tirta 2. Rekreasi Keluarga	Kec. Larompong
10	Desa Lamasi Pantai	1. Desa wisata 2. Wisata minat khusus	Kec. Walenrang Timur

Sumber : Olahan data penelitian, 2021

3.5. Perekonomian Kabupaten Luwu

Nilai PDRB kabupaten Luwu atas dasar harga kerlaku pada tahun 2019 mencapai 15,66 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 1,22 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai 14,44 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya harga komoditi di beberapa lapangan usaha (inflasi).

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB kabupaten Luwu juga mengalami peningkatan, dari 9,16 triliun rupiah pada tahun 2018 menjadi 9,73 triliun rupiah pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan selama tahun 2019 Kabupaten Luwu mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 6.26 persen, melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di sebagian besar lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi.

3.5.1. Struktur Ekonomi

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha.

Dalam empat tahun terakhir yaitu pada periode tahun 2016 sampai dengan 2019, struktur perekonomian kabupaten Luwu didominasi oleh 3 (sektor) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; dan Konstruksi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB kabupaten Luwu

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Luwu pada tahun 2019 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu mencapai 52,38 persen (angka ini menurun dari 53,88 persen di tahun 2018). Berikutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 10,14 persen naik dari 9,75 persen di tahun 2018). Selanjutnya lapangan usaha Konstruksi sebesar 8,62 persen (naik dari 8,10 persen di tahun 2018).

Sektor perdagangan merupakan salah satu lapangan usaha penggerak perekonomian di Kabupaten Luwu. Kontribusi sektor ini dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 12,06 persen menempati urutan kedua setelah lapangan usaha pertanian. Oleh karena itu, perkembangan sektor ini tentunya sangat berdampak pada perekonomian Kabupaten Luwu. Pada tahun 2019 jumlah sarana perdagangan di Kabupaten Luwu sebanyak 140 unit. Angka tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, utamanya sarana Kios. Pada tahun 2018 jumlah kios mencapai 154 unit dan menurun menjadi 105 unit pada tahun 2019. Adapun gambaran mengenai struktur ekonomi Kabupaten Luwu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5

Distribusi Prosentase PDRB Kabupaten Luwu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 - 2019 (dalam persen)

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019
1.	Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan	54,30	53,50	53,88	52,38
2.	Pertambangan Dan Penggalian	2,76	2,77	2,75	2,74
3.	Industri Pengolahan	4,02	4,16	4,12	4,27
4.	Pengadaan Listrik Dan Gas	0,07	0,08	0,08	0,08
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01
6.	Konstruksi	8,03	8,18	8,10	8,62
7.	Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor	9,91	9,78	9,75	10,14
8.	Transportasi Dan Pergudangan	0,82	0,80	0,84	0,87

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019
9.	Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	0,69	0,67	0,70	0,70
10.	Informasi Dan Komunikasi	2,11	2,10	2,09	2,14
11.	Jasa Keuangan Dan Asuransi	1,43	1,44	1,40	1,40
12.	Real Estate	5,76	5,83	5,69	5,63
13.	Jasa Perusahaan	0,02	0,03	0,03	0,03
14.	Adm. Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	4,64	4,53	4,35	4,64
15.	Jasa Pendidikan	3,38	3,34	3,41	3,48
16.	Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial	1,76	2,49	2,48	2,54
17.	Jasa Lainnya	0,29	0,29	0,31	0,32

Sumber : BPS Kabupaten Luwu, Tahun 2021

3.5.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator pertumbuhan suatu daerah dalam satu periode. Kabupaten Luwu memiliki pertumbuhan ekonomi 6,26 persen. Jika dibandingkan secara regional dengan wilayah Luwu Raya, maka Kota Palopo menempati posisi ketiga setelah Kabupaten Luwu Utara yang pertumbuhannya sebesar 7,11 persen dan Palopo sebesar 6,75 persen

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Luwu adalah 46,18 ribu jiwa. Jika dilihat trennya, selama empat tahun terakhir, tingkat kemiskinan di Kabupaten Luwu relatif menurun. Pada tahun 2016, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Luwu mencapai 50,58 ribu jiwa dan terus menurun hingga pada tahun 2019 mencapai 46,18 ribu jiwa atau 12,76% dari total jumlah penduduk Kabupaten Luwu, Meskipun demikian, angka ini masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB -4

KABUPATEN LUWU SEBAGAI DESTINASI PARIWISATA

4.1. Daya Tarik dan Sumber Daya Wisata Kab. Luwu

Kabupaten Luwu memiliki potensi pariwisata yang begitu beragam, khususnya dari sisi produk wisata. Dengan potensi alam dan budaya yang dimiliki, Kabupaten Luwu menawarkan berbagai daya tarik wisata. Keragaman produk wisata kabupaten Luwu berupa daya tarik wisata alam pada dataran tinggi yang terdiri panorama alam, gunung, sungai, hutan, air terjun, perkebunan dan sumber mata air, beserta keanekaragaman flora dan faunanya. Pada dataran rendah dengan pola kehidupan masyarakat agraris, areal persawah, bentangan laut dan pesisir pantai. Adapun jenis potensi daya tarik wisata yang dimiliki oleh kabupaten Luwu adalah sebagai berikut :

4.1.1. Daya Tarik Wisata Alam

1) Pantai Pannori

Pantai Pannori/ ponnori merupakan salah satu daya tarik wisata pantai kabupaten Luwu yang terletak di desa Temboe kecamatan Larompong Selatan. Pantai Pannori berlokasi sekitar satu kilometer dari Jalan Poros Belopa-Makassar yang awalnya hanya merupakan perkampungan nelayan

Kondisi akses menuju pantai Pannori sudah cukup memadai dengan ruas jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 hingga ke perkampungan masyarakat di sekitar bibir pantai. Fasilitas yang tersedia di pantai Pannori juga cukup memadai dengan adanya gazabo yang dapat disewa dari masyarakat sekitar pantai yang mengelola pantai Pannori selama ini.

Pantai ini merupakan favorit wisatawan di kabupaten Luwu untuk menikmati rekreasi pantai bersama keluarga dan teman-teman, karena selain lokasinya dekat dengan akses jalan poros, pantai ini juga ditumbuhi oleh berbagai jenis pohon sehingga suasana rindang dan hembusan angin pantai merupakan pemikat yang sangat kuat bagi wisatawan.

Aktivitas yang dapat dilakukan di pantai Pannori antara lain berenang, naik perahu dan banana boat, olah raga pantai, rekreasi keluarga sambil menikmati kuliner, berfoto, wisata edukasi dan menikmati panorama pantai.

Gambar 4.1
Pantai Pannori



Sumber : Olahan Penelitian, 2021

2) Hutan Penelitian Simoma

Hutan penelitian dan wisata kayu lara mempunyai panorama alam yang sejuk dan indah. Panorama alam yang ditawarkan yaitu panorama alam yang indah, tantangan medan hutan yang menjadi daya tarik tersendiri serta ekosistem hutan yang masih terjaga dan alami.

Kawasan hutan penelitian dan wisata kayu lara hingga saat ini masih digunakan sebagai lokasi penelitian oleh Balai Penelitian Kehutanan karena memiliki potensi flora dan fauna yang cukup tinggi. Pengelola Kawasan hutan penelitian dan wisata kayu lara adalah Balai Penelitian Kehutanan. Sejauh ini kegiatan kawasan hutan wisata kayu lara berupa penelitian dan monitoring pengusahaan hutan dalam hal pengamanan dan perlindungan kawasan yang bekerjasama dengan pemerintah desa dan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan

Aksesibilitas yang ada di desa tembo'e, khususnya pada kawasan wisata kayu lara tergolong sangat mudah dijangkau. Jarak antara Ibu Kota Kecamatan Desa Tembo'e sejauh 3 km dan 40km dari Ibu kota kabupaten Luwu yaitu Belopa. Untuk aksesibilitas Desa Tembo'e dapatdicapai atau dijangkau melalui jalan darat, dengan kondisi jalan aspal yang cukup baik, semuanya dapat ditempuh menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat. Waktu tempuh yang dibutuhkan menuju lokasi ini adalah 41 menit dari pusat Ibukota Kabupaten Luwu yaitu Belopa.

Flora langka dan endemik dapat menjadi obyek yang menarik bagi para pengunjung khususnya untuk tujuan pendidikan dan penelitian. Berdasarkan balai konserfasi sumberdaya alam (BKSDA) Sulawesi selatan, Flora yang menonjol dan sering ditemui pada hutan wisata kayu lara adalah, Kayu Lara (*Metrosideros lara*), Damar (*Agathis alba*), Nyamplung (*Calophyllum waworoentil*), Cemara (*Casuarina celebica*), Cengal Kampung (*Hopea celebica*), Sukun (*Parartocarpus sp*), Parinari (*Parianri corymbosa*), Kenanga (*Cananga odorata*), Kapas (*Heriteria sp*), Majegau (*Dysoxysylum densiflorum*), Berangan (*Castanosis buruana*), Sawo (*Palaqium obovatum*), Laurel (*Litsea firma*), Santiria (*Santiria laevigata*), Kayu Raden (*Ailanthus integrifolia*), dan (*Alseodaphne macrocarp*).

Spesies yang paling unik dan langka adalah Kayu Lara (*Metrosideros lara*) karena hanya terdapat di kawasan hutan wisata Desa Temboe sehingga sangat cocok untuk lokasi penelitian. Kayu lara ini termasuk famili *Myrtaceae* warna kayu lara kelabu kehitam-hitaman dengan garis-garis hitam gelap. Teksturnya halus dan arah seratnya bersilang. Kekerasanya sangat keras dan sifat pengerjaanya sukar dan berat.

Gambar 4.2
Hutan Penelitian Simoma



Sumber : Olan Penelitian, 2021

3) Pantai Buntu Mata'bing

Objek Wisata Buntu Matabing, adalah sebuah objek wisata yang secara geografis terletak di Kecamatan Larompong sekitar 27 km arah selatan dari kota Belopa, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.

Buntu Matabing memiliki ciri khas perpaduan panorama alam, pegunungan dan pantai, dengan luas area kurang lebih dua hektar yang dilengkapi dengan sarana wisata berupa villa, *cottage*, *gazebo* (galampang), balai pertemuan (baruga), menara pandang, *rest room* tempat bermain anak-anak, mushallah serta fasilitas olahraga air seperti jetski.

Gambar 4.3
Pantai Buntu Mata'bing



Sumber : Olahan Penelitian, 2021

4) Sarambu Masiang

Sarambu Masiang merupakan salah satu destinasi andalan kabupaten Luwu berupa air terjun yang berada di ketinggian 640 meter di atas permukaan laut. Sarambu Masiang memiliki ketinggian curah air sekitar 150 meter yang menawarkan suasana alam yang masih perawan dengan eksotisme hutan pinus serta air sungai yang terbentuk dari aliran air terjun tersebut.

Secara administratif, Sarambu Masiang terletak di desa Kaladi Darusalam, Kecamatan Suli Barat dengan lokasi yang berada di kaki gunung Latimojong. Akses menuju lokasi air terjun cukup menantang dengan medan ekstrim dengan jarak sekitar 35 km dari kota Belopa sehingga air terjun Sarambu Masiang sangat cocok bagi pencinta wisata alam petualangan (*adventure tour*).

Gambar 4.4
Sarambu Masiang



Sumber : Olahan Penelitian, 2021

Awal Mula Nama Sarambu Masiang Pada zaman penjajahan Belanda pada saat itu seorang laki-laki dengan seorang perempuan berjalan kaki sejauh 80 km. Nama dari seorang laki-laki *Pong Dondo* sedangkan yang perempuan bernama *Trisakne*. Dari perjalanan kaki selama 3 hari 3 malam maka tiba di salah satu tempat dengan cuaca yang begitu cerah dengan air yang begitu jernih dan putih. Pada saat itu Pong Dondo dan Trisakne pun takjub dengan keindahannya sehingga mereka pun memberikan nama sungai itu dengan Pong Dondo atau yang sekarang di kenal dengan nama Sarambu Masiang yang di artikan embun putih.

Pada tahun 1947 masyarakat desa Kaladi percaya bahwa air dari Sarambu Masiang dapat menyembuhkan segala penyakit di karenakan airnya yang jernih, menyegarkan dan bersih tidak tercemari. Sungai Pong Dondo atau Sarambu Masiang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit apabila mandi, meminum airnya dan memakai daun pitu-pitu yang dapat menyembuhkan penyakit didalam tubuh seperti, panas dingin, sesak nafas, batuk, pilek dan sebagainya.

Selain Sarambu Masiang, Pong Dondo dan Trisakne juga menemukan beberapa sarambu lain, diantaranya:

a. Sarambu Paburru

Sarambu Paburru yang artinya meniup orang dari kejauhan seperti di tiup angin yang dingin dan segar disaat terik. Sarambu Paburru memiliki kedalaman sekitar 1-3 meter.

Gambar 4.5
Sarambu Paburru



Sumber : Olahan Penelitian, 2021

b. Sarambu Biqcu

Sarambu Biqcu yang artinya sarambu yang kecil dan indah seperti kolam renang bidadari. Sarambu Biqcu memiliki kedalaman sekitar 1-4 meter

Gambar 4.6
Sarambu Biqcu



Sumber : Olahan Penelitian, 2021

c. Sarambu Pong Ma'ga.

Penemuan Sarambu Biqcu diawali dengan seseorang yang pernah tinggal di sekitaran sarambu bernama Pong Ma'ga yang menjadikan sarambu ini sebagai tempat permandiannya sehari-hari. Sarambu Pong Ma'ga mempunyai kedalaman sekitar 1-3 meter.

Gambar 4.7
Sarambu Pong Ma'ga



Sumber : Olahan Penelitian, 2021

d. Sarambu Daun Banga.

Pada zaman dahulu kala, ketika Pong Ma'ga menebang pohon banga sepanjang 50 meter dan daunnya saja, pada saat itu hingga detik ini terdapat banyak sekali pohon banga, sebuah pohon yang daunnya beduri mirip dengan pohon kelapa sehingga di namakan sarambu daun banga. Sarambu Daun Banga memiliki kedalaman sekitar 4 meter.

Gambar 4.8
Sarambu Daun Banga



Sumber : Olahan Penelitian, 2021

e. Sarambu Balendo

Sarambu ini dinamakan *balendo* dikarenakan seakan akan terdapat orang yang sedang *ma'balendo* di bawah sarambu tersebut. Kedalaman sarambu *balendo* sekitar 4 meter.

Gambar 4.9
Sarambu Balendo



Sumber : Olahan Penelitian, 2021

5) Bendung Tomatope

Bendung Tomatope berlokasi di Desa Rumaju Kecamatan Bajo dan jaringan irigasi Bajo terletak di Kecamatan Bajo, Belopa, Belopa Utara, Kamanre, dan Suli. Secara geografis daerah irigasi Bajo berada pada 03°23'15" LS sampai 03°20'45" LS dan 120°17'15" BT sampai 120°24'30" BT. Daerah Kawasan Bendung Tomatope beriklim tropis yang memiliki musim penghujan yang berlangsung pada bulan November sampai bulan Mei serta musim kemarau yang berlangsung pada bulan Juni sampai bulan Oktober. Sumber air utama untuk daerah irigasi Bajo adalah sungai Bajo (Sungai Suso), dengan beberapa anak sungai seperti Salu Ranteballa, Salu Bone, dan Salu Komi yang bersumber dari pegunungan Latimojong.

Bendung Tomatope telah beroperasi pada tahun 2010, sebelum dilakukan perbaikan, pengambilan air guna mengalir daerah sekitar ialah dengan menggunakan bendung yang terbuat dari bronjong. Bendung bronjong yang ada dari tahun ketahun mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh banjir sehingga fungsi bendung semakin menurun sehingga bendung bronjong yang ada digantikan dengan bendung tetap. Bendung Tomatope memiliki lebar sebesar 100,20 m dengan panjang saluran induk seluas 4.530.00 m, panjang saluran sekunder 64.220.00 m dan petak tersier 109 bh.

Bendung Tomatope dan kawasan disekitarnya sangat diminati oleh pengunjung untuk rekreasi wisata tirta dan keluarga sambil menikmati berbagai produk pertanian masyarakat seperti jagung rebus dan hasil panen tanaman hortikultura lainnya sesuai dengan musim tanam dan panen.

Gambar 4.10
Bendung Tomatope



Sumber : <https://www.youtube.com/watch?v=olzekEHdOtw>, 2021

6) Desa Bonelemo

Desa Bonelemo merupakan salah satu desa di kecamatan Bajo Barat yang menginisiasi potensi desa sebagai desa wisata berbasis edukasi yang bertujuan meningkatkan sumberdaya manusia unggul, berdayasaing dan meningkatkan perekonomian masyarakat Bonelemo. Konsep wisata edukasi dirancang dengan memilih fokus melalui keindahan alam antara lain : area konservasi dan lintas alam, area budidaya pertanian, sanggar tani, rumah belajar, area hortikultura, area budidaya peternakan, area bermain dan seni, *workshop* (alat belajar dan fasilitas pendukung), rumah warga sebagai *homestay*, kuliner, dan rekreasi sungai .

Akses menuju desa Boneleomo memiliki jarak tempuh sekitar 18 km dari ibu kota kabupaten. Beberapa daya tarik yang menjadi potensi pariwisata pada kawasan ini adalah sebagai berikut :

a. *Sarasa Salu Bolu*

Sarasa Salu Bolu adalah salah satu objek wisata terletak di Dusun Marangka Desa Bonelemo Barat. Penamaan *Sarasa Salu Bolu* menurut para tokoh masyarakat dahulu kala di sepanjang aliran sungai tersebut terdapat banyak daun sirih (dalam bahasa sehari-hari masyarakat desa Bonelemo Barat disebut daun *Bolu/ Leko* yang dicampur dengan buah pinang (*kalosi*), kapur, dan buah *bolu*. *Ma' Pangngan* dipercaya dapat menghilangkan bau mulut dan menguatkan gigi.

Daya tarik wisata *Sarasa Salu Bolu* terletak sekitar 1km dari Marangka Ibukota desa Bonelemo Barat yang dapat diakses dengan kendaraan roda dua dan mobil khusus untuk petualangan. Daya tarik wisata ini memberi kesenangan tersendiri bagi wisatawan yang senang dengan kondisi medan yang berbukit dengan akses jalan untuk wisata petualangan (*adventure*). Selain itu, daya tarik wisata *Sarasa Salu Bolu* juga menyuguhkan pemandangan alam yang asri dengan panorama perkebunan warga seperti cengkeh, durian, dan jagung serta persawahan.

b. *Permandian Batu Alang*

Daya tarik wisata permandian *Batu Alang* terletak di dusun Toko, desa Marinding yang memiliki akses jalan beton sekitar 30% dan sisanya masih status jalan kerikil. *Batu Alang* berasal dari kata *Batu Ala*, dimana pada era animisme dimana masyarakat sekitar menjadikan batu yang sakral sebagai arah perigatan atau petunjuk lokasi yang boleh atau yang tidak boleh turun ke sawah.

Secara geografis, *Batu Alang* berada di lembah bukit barisan situs penguburan anak keturunan *Maddika Marinding*, yang juga merupakan area tempat situs kediaman *Maddika Marinding* yang terletak pada ketinggian 750 mdpl.

c. *Salu Suso*

Daya tarik wisata *Salu Suso* merupakan sungai yang terbentang sepanjang kecamatan Bajo Barat-Bajo, yang melintasi desa *Kadong-kadong* dengan hamparan pasir yang bersih dan air yang jernih sehingga menjadi daya tarik bagi warga setempat untuk berwisata menikmati pemandangan alam.

Selain dijadikan sebagai objek wisata, *Salu Suso* juga merupakan sumber air minum bersih bagi penduduk desa *Kadong-kadong* sehingga *Salu Suso* memiliki posisi dan peran strategis bagi kehidupan masyarakat desa.

d. *Saruran Toke*

Daya tarik wisata *Saruran Toke* terletak di dusun Salumbu desa Saronda kecamatan Bajo Barat. Nama *Saruran Toke* konon menurut cerita tokoh masyarakat yang mengetahui sejarah tentang desa Saronda termasuk tokoh adat (*Ma'dika*) karena pada zaman dahulu aliran sungai Suso sangat sempit yang pada sisi kanan dan kirinya diapit oleh batu sehingga masyarakat pada zaman itu membuatkan

saluran air berupa pancuran air yang digantung untuk memperlancar arus air sehingga disebut *Saruran Toke*.

Saruran Toke tepat berada di pinggir jalan poros Bajo- Latimojong sekitar 2 kilometer dari desa Bonelemo ibu kota Kecamatan Bajo Barat. Wisata *Saruran Toke* sangat mudah dijangkau dengan berbagai moda transportasi. Aktivitas yang ditawarkan pada *Saruran Toke* pada saat debit air turun difungsikan sebagai tempat permandian dan pada saat debit air tinggi difungsikan sebagai arung jeram dari desa Kadundung ke desa Saronda.

Sepanjang aliran sungai Suso hingga lokasi *Saruran Toke* memiliki keindahan alam disamping sungai untuk aktivitas rekreasi dan berfoto. Daya tarik wisata *Saruran Toke* dilengkapi beberapa fasilitas pendukung yaitu gazebo, MCK, perahu karet khusus untuk permandian dan perahu karet khusus untuk arung jeram.

7) Air Terjun Sarassa

Kawasan gunung Latimojong terkenal dengan hutannya masih rimbun. Pada lokasi titik tertinggi di Sulawesi terdapat air terjun Sarassa yang menawarkan beragam keindahan bernuansa alam. Pesona keindahan Sarassa sudah cukup terkenal oleh masyarakat kabupaten Luwu yang kerap menjulukinya sebagai air terjun kembar.

Akses menuju air terjun Sarassa cukup mudah dijangkau karena kondisi jalan menuju lokasi sudah cukup bagus dan dapat dilalui kendaraan hingga ke desa Ulsalu. Selanjutnya pengunjung harus berjalan kaki kurang lebih 15 kilometer melewati jalan setapak. Sepanjang perjalanan, pengunjung dapat menikmati pemandangan alam dengan aneka flora dan fauna

Gambar 4.11
Air Terjun Sarassa



Sumber : <https://www.wisataoky.com/2018/11/wisata-latimojong-luwu-dan.html>,2021

8) Kawasan Rante Lajang

Kawasan Rante Lajang merupakan salah satu keindahan alam tersembunyi yang terletak kaki gunung Latimojong yaitu di dusun Rante Lajang, Desa Ulsalu, Kecamatan Latimojong. Akses menuju Rante Lajang dari kecamatan Belopa, ibu kota Kabupaten Luwu ditempuh dengan menggunakan motor *trail* atau kendaraan mobil *off-road* dengan waktu tempuh sekitar 2 jam melalui jalur yang cukup ekstrem dan menantang.

Daya tarik kawasan Rante Lajang adalah udara pegunungan yang sangat dingin, panorama alam, hutan dan pada saat pagi hari pengunjung dapat menikmati pemandangan matahari terbit yang sangat memukau. Pada malam hari pengunjung dapat menikmati kerlap-kerlip lampu-lampu Kota Belopa dari kejauhan serta nyanian-nyanyian hutan yang sangat memukau.

Pesona lain dari kawasan Rante Lajang adalah kabut yang membuat pengunjung serasa berada di negeri atas awan. Selain kabut yang mempesona, terdapat banyak spot foto *instagenic*, seperti rumah pohon hingga anjungan foto kapal yang dinamakan KM Sawerigading.

Gambar 4.12
Kawasan Rante Lajang



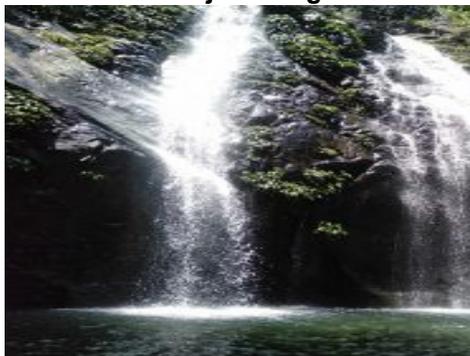
Sumber : <https://travelingyuk.com/rante-lajang-latimojong/225857>, 2021

Daya tarik wisata Rante Lajang juga sangat cocok untuk berbagai kegiatan outbound atau kegiatan outdoor lainnya berupa berbagai permainan yang akan menguji adrenalin sesuai fasilitas yang tersedia seperti *flying fox* dan jembatan gantung serta menikmati sensasi bermain catur di papan raksasa.

9) Air Terjun Bungalo

Permandian air terjun Bungalo merupakan satu air terjun di bumi Sawerigading yang terletak di dusun Pagerengan, desa Tampa, kecamatan Ponrang. Akses menuju ke lokasi air terjun sekitar 20 kilometer dari kecamatan Belopa .

Gambar 4.13
Air Terjun Bungalo



Sumber : <https://www.libasnews.co.id/budaya-dan-pariwisata/indahnyair-terjun-bunga-lao-desa-tampa-luwu/> 2021

Salah satu keunggulan lain dari daya tarik wisata permandian air terjun Bungalo adalah nuansa alamnya yang sejuk nan asri. Kesejukan air pegunungan dapat dirasakan pada saat pengunjung menceburkan diri ke dalam kolam alam di bawah guyuran air terjun.

10) Air Terjun *Puraposoang*

Air terjun *Puraposoang* merupakan salah satu potensi daya tarik wisata yang terletak di kecamatan Bua Kabupaten Luwu, berjarak sekitar 20 kilometer dari ibukota kabupaten yaitu kecamatan Belopa.

Gambar 4.14
Air Terjun Puraposoang



Sumber : detik.com, 2021

Untuk mencapai lokasi Air terjun *Puraposoang*, para pengunjung harus menempuh perjalanan kurang lebih 1,5 jam dengan menggunakan kendaraan bermotor dan dilanjutkan dengan berjalan kaki sekitar 1 kilometer.

Hamparan pepohonan dengan hawa pegunungan yang sejuk, air sungai yang jernih, serta udara yang segar merupakan eksotisme alam yang dapat dinikmati sambil memandang air yang jatuh dari ketinggian kurang lebih 80 meter

11) Permandian Alam Pakalolo

Wisata permandian alam Sungai Pakalolo terletak di desa Lengkong kecamatan Bua merupakan salah satu destinasi yang menawarkan keindahan alam sungai Pakalolo yang dikelilingi oleh wilayah perbukitan, menjadikan tempat ini ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah di sekitar kabupaten Luwu. Area wisata Sungai Pakalolo memanjang sekitar 3 kilometer yang berada pada ketinggian 200 meter diatas permukaan laut. Akses untuk menuju ke permandian alam Pakalolo ditempuh dengan kendaraan selama sekitar satu jam dari ibu kota kabupaten.

Aktivitas yang dapat dilakukan di daya tarik ini antara lain menikmati keindahan alam sungai, menyusuri sungai (*rafting*), dan berenang menikmati derasnya air yang jernih dan menyegarkan diantara bebatuan. Sungai Pakalolo memiliki hamparan bebatuan untuk berjemur mandi dan berenang di kolam alami dari yang dangkal hingga dalam sedalam 2,5 meter. Fasilitas yang tersedia pada Sungai Pakalolo antara lain *shelter*, mushollah, ban dan *gazebo* tempat istirahat selama berkunjung.

Gambar 4.15
Wisata Alam Pakalolo



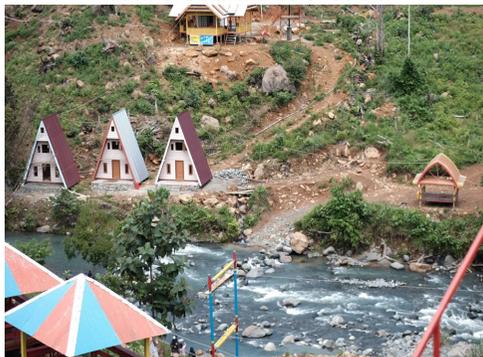
Sumber: Olahan Penelitian, 2021

12) Wisata Alam Wai Tiddo

Daya tarik wisata alam *Wai Tiddo* merupakan salah satu daya tarik wisata alam yang baru dibuka dan dikembangkan. Wisata alam *Wai Tiddo* terletak di desa Bukit Harapan kecamatan Bua menjadi salah satu destinasi rekreasi keluarga. Letak daya tarik wisata Wai Tiddo berdekatan dengan wisata alam sungai Pakalolo dan dapat diakses dengan mudah dengan kendaraan dengan kondisi jalan yang sangat memadai.

Aktivitas yang dapat dilakukan di daya tarik wisata alam *Wai Tiddo* antara lain menikmati keindahan alam sungai diantara wilayah perbukitan, menyusuri sungai (*rafting*), dan berenang menikmati derasnya air yang jernih dan menyegarkan diantara bebatuan Sungai Pakalolo.

Gambar 4.16
Wisata Alam Wai Tiddo



Sumber: Olahan Penelitian, 2021

Fasilitas yang tersedia pada permandian alam *Wai Tiddo* saat ini antara lain rumah/ kamar bertema Indian (*teewee*), restoran, fasilitas *out bound*, *flying fox* dan *gazebo* tempat istirahat selama berkunjung.

13) Air Terjun Toga

Air terjun *Toga* atau *Sarambu Toga* berada di dusun Makawa desa Siteba kecamatan Walenrang Utara dengan jarak tempuh air terjun dari jalan utama sekitar 8 kilometer. Sementara jarak air terjun ma'gandang batu sekira 12 km. Akses menuju lokasi ini dari jalan poros menjadi daya tarik tersendiri bagi penikmat wisata petualangan (*adventure*).

Daya tarik utama air terjun *sarambu Toga* adalah panorama alam pegunungan yang masih asri dengan pepohonan serta panorama alam menarik lainnya melingkapi pesona air terjun dengan ketinggian sekitar 100 meter.

Gambar 4.17
Air Terjun Toga



Sumber: Wisata Air Terjun Walmas Butuh Sentuhan Pemerintah - SPIRITKITA, 2021

14) Air Terjun *Ma'gandang*

Air terjun *Ma'gandang* berada di dusun Makawa desa Siteba kecamatan Walenrang Utara dengan jarak tempuh air terjun dari jalan utama sekitar 12 kilometer dengan kondisi jalan aspal dan kerikil sebahagian. Di sepanjang perjalanan, mata anda akan dimanjakan sejuknya suasana persawahan dengan model terasering sesuai dengan pekerjaan penduduk di desa yang mayoritas adalah petani.

Gambar 4.18
Air Terjun *Ma'gandang*



Sumber: tribunnews.com,2021

15) Air Terjun *Andulan*

Air terjun *Andulan* terletak di kecamatan Walenrang Utara dan memiliki keunikan karena berdekatan dengan gua *Andulan*. Untuk mencapai lokasi objek wisata gua dan air terjun *Andulan*, pengunjung harus menempuh jarak sekitar 20 kilometer dari pusat kota Walenrang Utara melalui akses jalan darat

Selain dijadikan sebagai objek wisata alam, gua *Andulan* juga dijadikan sebagai lokasi pelatihan pendidikan dasar para kelompok pencinta alam, serta lokasi perkemahan.

Sepanjang jalan menuju ke lokasi objek wisata alam *Andulan*, pengunjung disugahi panorama kehidupan masyarakat berupa pemukiman warga yang hidup dengan pola bercocok tanam serta melihat keunikan warga dalam mengolah batang pohon sagu jadi bahan makanan tepung sagu yang dikenal dengan

nama *ma'sambe tabaro*. Sagu atau *tabaro* merupakan salah satu bahan makanan khas masyarakat Luwu yang diolah menjadi berbagai jenis makanan termasuk makanan khas yang sangat terkenal dan digemari masyarakat Sulawesi Selatan yaitu *kapurung*.

Pada Gua Andulan, masih tersimpan kerangka manusia purba berukuran besar yang menjadi bukti sejarah akan adanya aktifitas kehidupan manusia di zaman dahulu kala di kawasan gua dan air terjun *Andulan*. Selain kerangka yang ukurannya mencapai tiga kali lipat dari ukuran normal manusia yang hidup di zaman sekarang, juga terdapat situs purbakala dan benda-benda peninggalan sejarah lainnya seperti mata tombak, parang, badik, pecahan-guci, dan uang logam serta peti jenazah dengan ornamen ukiran khas kerajaan.

Gambar 4.19
Air Terjun Andulan



Sumber: [Air Terjun Andulan Luwu yang Alami dan Eksotik \(fotosulawesi.blogspot.com\)](http://fotosulawesi.blogspot.com), 2021

4.1.2. Daya Tarik Wisata Sejarah dan Budaya

Potensi wisata sejarah tidak hanya mencakup budaya dan proses perkembangan peradaban suatu masyarakat, tetapi juga termasuk sejarah pembentukan alam. Sejarah budaya Kabupaten Luwu sebagai wilayah tempat bermukim berbagai masyarakat dengan latar belakang budaya berbeda merupakan potensi tidak kalah menariknya dengan sejarah alam, walaupun pembabakan sejarah budaya Luwu yang masih harus diteliti lebih jauh.

Kekayaan sejarah kabupaten Luwu beserta peninggalannya yang begitu beragam dan khas merupakan potensi yang besar bagi pariwisata kabupaten Luwu. Pengemasan cerita sejarah melalui interpretasi yang baik dan menarik dapat meningkatkan nilai tambah daya tarik wisata sejarah kabupaten Luwu dan tentu saja merupakan potensi untuk menjaring wisatawan dalam jumlah yang lebih banyak.

Masyarakat kabupaten Luwu yang religius dan memiliki aturan serta berbagai ciri warisan budaya khas dan nilai-nilai tradisional yang masih tetap dipertahankan merupakan potensi yang sangat besar bagi pengembangan pariwisata kabupaten Luwu. Kebudayaan Kabupaten Luwu lainnya yang dijumpai di masyarakat adalah alat musik tradisional, pertunjukan kesenian khas seperti berbagai jenis tarian tradisional, upacara keagamaan serta prosesi adat, merupakan warisan budaya yang bernilai tinggi bagi kepariwisataan kabupaten Luwu.

Kabupaten Luwu juga kaya akan event-event pariwisata yang diselenggarakan di beberapa kecamatan setiap tahun, baik yang termasuk dalam *core event*, *major event* maupun *supporting event*. Event-event lainnya yang juga dilaksanakan secara besar-besaran adalah peristiwa peringatan hari-hari besar keagamaan maupun upacara-upacara adat yang terkait dengan mata pencaharian penduduk, seperti pesta panen,

dan sebagainya. Adapun potensi daya tarik wisata sejarah dan budaya yang dimiliki oleh Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut :

1) Prosesi perkawinan

Prosesi perkawinan bagi masyarakat Luwu sebagaimana halnya dengan budaya pada etnis utama di provinsi Sulawesi Selatan merupakan hal yang sakral dan penuh dengan ritual dan atraksi budaya termasuk menggunakan pakaian adat/ tradisional. Upacara ini terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan yaitu prosesi lamaran, prosesi malam pacar, prosesi akad nikah, dan prosesi lainnya yang sangat menarik.

2) Tari tradisional

Tari tradisional merupakan kekayaan budaya Luwu yang sangat berakar di tengah masyarakat kabupaten Luwu. Berbagai jenis tari tradisional hanya dilakukan pada upacara ritual atau prosesi tertentu namun ada pula yang dipertunjukkan pada suasana yang tidak terikat dengan prosesi adat.

Gambar 4.20
Tari Balendo



Sumber: <http://makassar.tribunnews.com/2016/10/28/foto-tari-balendo-khas-kabupaten-luwu,2021>

Beberapa jenis tarian tradisional yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat kabupaten Luwu dalam beberapa jenis tarian rumpun etnis Luwu, namun khusus untuk beberapa tarian yang identik dengan kabupaten Luwu adalah Tari *Pajaga* dan tari *Balendo*.

3) Musik dan lagu tradisional

Sebagaimana halnya dengan tari tradisional maka musik tradisional yang dimiliki dan dipergunakan oleh masyarakat Luwu juga sangat beragam seperti alat musik tiup, gesek dan pukul pada kebudayaan masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya.

4) Ritual Adat dan Budaya

Sebagai wilayah kerajaan besar nusantara di masa lalu, kabupaten Luwu memiliki berbagai jenis ritual budaya yang masih terus bertahan dan dipelihara dalam kehidupan masyarakat kabupaten Luwu di zaman modern sekarang ini.

Berbagai ritual budaya tersebut yang setiap tahun dilaksanakan antara lain *Mappacekke Wanua*, *Mangaru*, *Maccera' Tasi'*, *Rambu Tuka*, *Rambu Solo*, dan *Sigaruang Telli*. Keseluruhan ritual dan prosesi budaya yang dilakukan masyarakat kabupaten Luwu merupakan upacara adat berwujud kesyukuran atas karunia yang Allah berikan, upacara kematian, dan penyelesaian konflik serta perselisihan yang terjadi di masyarakat.

Gambar 4.21
Ritual Mappacekke Wanua



Sumber: Portal Luwukab, 2021

5) Upacara Penguburan Mayat (*Rambu Solo'*)

Kabupaten Luwu secara geografis berbatasan dengan wilayah dengan berbagai etnik khususnya etnik Bugis di bagian selatan dan etnik Toraja di wilayah kecamatan Basesangtempe dan Basesangtempe Utara. Lintasan perbatasan wilayah geografis pada wilayah tersebut juga memberikan pengaruh terhadap kebudayaan masyarakat.

Salah satu bentuk ritual budaya yang ada di kecamatan Basesangtempe adalah upacara penguburan mayat (*rambu solo'*) yang selama ini hanya dikenal pada penganut *aluk todolo* dalam kebudayaan masyarakat Toraja. Dalam kepercayaan masyarakat Toraja, ritus-ritus terakhir yang paling megah adalah ritus kematian atau *rambu solo'* yaitu cara orang Toraja menguburkan jenazah.

Menurut kepercayaan *aluk todolo*, seseorang yang telah meninggal akan menuju ke tempat yang disebut *puyo* (dunia arwah tempat berkumpulnya semua roh) yang terletak di bagian selatan tempat tinggal manusia. Selanjutnya diyakini bahwa tidak semua arwah orang yang meninggal dapat langsung masuk ke *puyo* sehingga harus didahului dengan upacara pemakaman. Jika seseorang yang meninggal tidak diupacarakan atau upacara yang dilangsungkan tidak sempurna sesuai *aluk*, maka yang bersangkutan dipercaya tidak dapat mencapai *puyo* dan jiwanya akan tersesat.

Jika seseorang yang meninggal belum diupacarakan, maka ia akan menjadi arwah dalam wujud setengah dewa dan arwah tersebut diyakini tetap memperhatikan dari dekat kehidupan keturunannya. Oleh karena itu, upacara kematian menjadi penting dan semua *aluk* yang berkaitan dengan kematian harus dijalankan sesuai ketentuan.

Sebelum menetapkan dan menentukan tempat jenazah dimakamkan, seluruh pihak keluarga harus berkumpul dan menyiapkan hewan korban sesuai dengan ketentuan. Kepercayaan *Aluk Todolo* bahwa *puyo* adalah negeri yang kekal dan akhir dari perjalanan hidup yang sesungguhnya sehingga harus memberikan yang terbaik kepada orang yang meninggal dengan cara membekali jiwa/ roh orang yang meninggal dengan pematangan hewan berupa kerbau dan babi sebanyak mungkin karena roh binatang yang dikorbankan akan mengikuti arwah menuju *puyo*.

Gambar 4.22
Ritual Rambu Solo'



Sumber : mediakita.co, 2021

Dalam upacara *Rambu Solo'* ada beberapa fase yang dilakukan sebelum pemakaman, antara lain: *Ma'karudusan*, yaitu pemotongan dua ekor kerbau. Fase selanjutnya adalah *Ma'pasa'tedong*, yaitu semua kerbau yang telah disepakati untuk dikorbankan akan dikumpulkan di halaman *tongkonan* tempat jenazah disemayamkan, lalu kerbau itu diarak keliling *bala'kaan* sebanyak tiga kali. Keesokan harinya dilakukan pemindahan jenazah dari *tongkonan* ke lumbung. Setelah diadakan *Ma'pasonglo* jenazah dipindahkan lagi ke *lakkian*, suatu tempat terdekat dengan tempat pemakaman. Setiap pemindahan selalu diadakan arak-arakan. Puncak acara ialah semua kerbau yang akan korbankan dipotong dan dibagikan sesuai adat yang berlaku

6) Liang Andulan

Liang Andulan terletak di desa *Siteba* kecamatan *Lamasi* yang memiliki beragam *stalagmit* dan *stalaktit* yang beraneka warna. Untuk mencapai *Liang Andulan*, pengunjung harus melewati 480 anak tangga. Di dalam Gua *Liang Andulan* juga terdapat makam leluhur *To Tana Lalong*, yang terdiri dari *Liang kabongian*, *Liang Sugi*, dan *Liang Salikuku*. Di dalam gua juga terdapat peninggalan kerangka manusia purba berukuran besar yang masih tersimpan

Di Gua *Liang Andulan* juga terdapat situs purbakala dan benda-benda peninggalan sejarah lainnya seperti mata tombak, parang, badik, pecahan-guci, dan uang logam serta peti jenazah dengan ornamen ukiran khas kerajaan.

Gambar 4.23
Liang Andulan



Sumber: [Jelajah Tempat Wisata Indonesia](http://JelajahTempatWisataIndonesia.com), 2021

7) **Lo'ko Pa'kapan (Illan Batu)**

Gua *Illan Batu* terletak di wilayah pegunungan desa Ilan Batu kecamatan Walenrang Barat. Gua ini sebelumnya bernama *Lo'ko Pa'kapan* yang berarti tempat melangsungkan pernikahan. Gua ini menyimpan peninggalan kehidupan manusia zaman batu yang merupakan situs cagar budaya.

Gua *Illan Batu* menurut legenda, konon pertama kali didiami oleh *To Manurung* yang dipercaya sebagai orang pertama di bumi. *To Manurung* ini kemudian diangkat menjadi *Datu Tau* yang berarti raja manusia. Pada saat pemerintahan *Datu Tau*, semua masyarakat yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan *Datu Tau*, bertempat tinggal dan melangsungkan pernikahan di gua *Illan Batu*. Selain itu, gua *Illan Batu* juga dihuni mahluk lain yaitu *Datu Sirring* (raja semut), *Datu Seba* raja monyet, dan *Datu Bai* (raja babi).

Di dalam gua terdapat 13 ruang/ blik. Pada setiap bilik, terdapat batu yang menyerupai ranjang yang digunakan oleh para *datu* untuk beristirahat. Selain itu, pada bagian lain juga terdapat batu yang menyerupai meja dan kursi yang digunakan *datu* untuk makan dan minum. Beberapa peninggalan benda cagar budaya di dalam gua seperti peninggalan peralatan perang yang digunakan para *datu* untuk berperang seperti tombak, busur, parang, dan badik. sudah hilang satu persatu diambil oleh para wisatawan yang pernah datang berkunjung ke gua *Illan Batu*.

Masyarakat Ilan Batu masih percaya bahwa gua tersebut mengandung mistik yang jika ada orang pertama kali datang ke gua, maka orang tersebut akan diperlihatkan seekor ular sanca yang besar yang merupakan penjaga gua.

Gambar 4.24

Gua Illan Batu (Lo'ko Pa'kapan)



Sumber: <http://media.travelingyuk.com>, 2021

8) **Situs Buntu Lebani**

Situs *Buntu Lebani* berlokasi di kampung Tanete Sarangallo, kelurahan Seppon, kecamatan Belopa Utara berbatasan dengan kampung Sampa-Seppon di sebelah utara, kampung Lebani di sebelah selatan, kampung Sampadi di sebelah barat dan kampung Seppon di sebelah timur.

Vegetasi yang terdapat di kawasan ini terdiri dari tanaman jenis palma, jati, cabai, dan semak belukar. Situs tersebut diberi nama Buntu Lebani karena nama gunung di kawasan ini adalah Lebani, juga karena pada gunung ini ditemukan banyak tinggalan atau potensi arkeologis. Potensi arkeologis yang dimiliki berupa liang berisi tulang manusia, ceruk dan lumpang.

Gambar 4.25
Situs Buntu Lebani



Sumber: <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbmakassar,2021>

a. Liang 1

Secara astronomis, kawasan situs Buntu Lebani terletak pada S3 21 25.9 E120 20 51.0 dengan ketinggian 48 meter di atas permukaan laut, merupakan sebuah batu berukuran tinggi 728 cm dan lebar 11,2 cm, yang dijadikan pemakaman. Pemakaman tersebut dengan membuat lubang-lubang dengan cara dipahat. Pada bongkah besar, terdapat 3 buah lubang dengan ukuran lubang pertama lebar 62 cm, tinggi 90 cm, lubang kedua berukuran lebar 60 cm, tinggi 90 cm, sedangkan lubang ketiga berukuran lebar 70 cm, tinggi 92 cm. Ketiga lubang tersebut masing-masing berbentuk persegi dengan ukuran ruang di bagian dalam yang berbeda-beda. Pada masing-masing lubang terdapat tulang dan tengkorak manusia. Secara keseluruhan mirip dengan pemakaman yang terdapat di Toraja. Di sekitar liang banyak pula ditemukan *boulder-boulder* batu konglomerat maupun andesit.

Gambar 4.26
Liang 1 Situs Buntu Lebani



Sumber: <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbmakassar,2021>

b. Ceruk 1

Mulut ceruk menghadap arah 40°, merupakan bentukan alam yang tampaknya pernah disinggahi oleh manusia ditandai dengan sebaran fragmen gerabah berglasir merah dan polos serta cangkang molusca kelas gastropoda. Terletak pada titik S3 21 09.1 E120 20 49.1 dengan ketinggian 95 meter di atas permukaan laut. Ceruk berukuran panjang 3,87 meter, lebar 3,41 meter, dan tinggi ceruk 1,40 meter.

Beberapa fragmen gerabah yang ditemukan dapat diidentifikasi merupakan bagian bibir dan badan. Bagian bibir yang ditemukan berukuran panjang 8 cm, lebar 2,5 cm, tebal 1 cm. Sementara bagian badan yang ditemukan masing-masing berukuran panjang 4 cm, lebar 3 cm, tebal 0,5 cm dan panjang 3 cm, lebar 1,7 cm,

tebal 0,3 cm. Fragmen gerabah yang ditemukan secara keseluruhan berwarna merah kecoklatan.

Gambar 4.27
Tinggalan Arkeologis Berupa Fragmen Gerabah dan Cangkang Molosca Pada Ceruk 1 Situs Buntu Lebani



Sumber: <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbmakassar,2021>

c. Liang 2

Liang berada pada titik astronomis S3 21 09.5 E120 20 47.4 dengan ketinggian 126 meter di atas permukaan laut. Keberadaannya tepat dipinggir tebing dengan jurang yang dalam sehingga sangat menyulitkan dalam proses identifikasi temuan dan pembuatan dekripsinya. Diketahui bahwa liang ini berbentuk persegi dengan fungsi sebagai pemakaman, sehingga ditemukan tulang dan tengkorak manusia di dalamnya.

d. Ceruk 2

Pada ceruk yang menghadap ke arah timur dan berukuran panjang 1,92 meter, tinggi 2,42 meter dan kedalaman 3,76 meter ini juga ditemukan sebaran gerabah polos dan berhias. Fragmen gerabah berhias yang ditemukan memiliki motif bulat-bulat kecil yang dibuat dengan cara dicungkil, fragmen berukuran panjang 3 cm, lebar 2,5 cm, dan tebal 1 cm.

Gambar 4.28
Gerabah dan Alat Batu Pada Ceruk 2 Situs Buntu Lebani



Sumber: <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbmakassar, 2021>

Fragmen lainnya merupakan bagian tepian dan badan. Bagian tepian yang ditemukan berukuran panjang 4 cm, lebar 3 cm dan tebal 0,7 cm, sementara bagian badan ditemukan berukuran panjang 2 cm, lebar 2 cm, dan tebal 0,7 cm. Fragmen gerabah yang ditemukan terdiri atas warna merah kecoklatan, hitam, coklat kekuningan. Pada ceruk ini juga ditemukan batu sungai yang tampaknya sengaja dibawa dari tempat lain untuk keperluan tertentu, berbentuk lonjong, berwarna abu-abu dan berukuran panjang 12 cm, lebar 9 cm dan tebal 3 cm.

e. Ceruk 3

Ceruk ketiga ini terletak pada titik S3 21 09.1 E120 20 47.9 dengan ketinggian 120 meter di atas permukaan laut. Mulut ceruk menghadap 320°, dengan ukuran tinggi 83 cm, lebar 65 cm, dan kedalaman 221 cm. Pada ceruk ini ditemukan pula sebaran fragmen gerabah dengan berbagai bagian dan ukuran serta warna.

Gambar 4.29
Gerabah Pada Ceruk 3 Situs Buntu Lebani



Sumber: <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbmakassar,2021>

Fragmen bagian bawah atau alas berukuran panjang 6,5 cm, lebar 5 cm, dan tebal 0,5 cm. Fragmen bagian bibir/tepiannya berukuran panjang 6 cm, lebar 3,5 cm, dan tebal 1 cm. Sedangkan fragmen lain yang ditemukan merupakan bagian badan dengan ukuran masing-masing panjang 3,5 cm, lebar 3 cm, tebal 1 cm dan panjang 3,3 cm, lebar 2 cm, dan tebal 0,5 cm.

f. Ceruk 4

Ceruk ini merupakan ceruk dengan ukuran paling panjang di Buntu Lebani. Berada pada titik S3 21 09.1 E120 20 45.5 dengan ketinggian 150 meter di atas permukaan laut. Mulut ceruk menghadap ke timur dengan bagian ceruk memanjang dari utara ke selatan. Ceruk berukuran panjang 229 cm, kedalaman 21 cm dan tinggi 233 cm.

Temuan yang terdapat di lokasi ini berupa fragmen gerabah, moluska, serta fragmen tulang binatang. Salah satu gerabah yang ditemukan memiliki motif geometris berukuran panjang 5,5 cm, lebar 4,5 cm dan tebal 1,5 cm. Dua fragmen gerabah yang diidentifikasi sebagai bagian bibir masing-masing berukuran panjang 10 cm, lebar 9 cm, tebal 0,5 cm dan panjang 7 cm, lebar 4 cm, tebal 0,5 cm. Sementara fragmen tulang yang ditemukan berukuran panjang 4,5 cm, lebar 1,3 cm, tebal 0,5 cm dan panjang 2,5 cm, lebar 1 cm, tebal 0,3 cm.

Gambar 4.30
Fragmen Gerabah dan Tulang Pada Ceruk 4 Situs Buntu Lebani



Sumber: <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbmakassar>, 2021

g. Lumpang

Pada dasarnya banyak terdapat lumpang batu di Buntu Lebani ini, namun dikarenakan oleh padatnya semak belukar berduri dan kemiringan lereng yang terjal mengakibatkan kurangnya data yang terekam. Namun, masih terdapat 2 buah lumpang yang dapat dijumpai dalam posisi tidak membahayakan. Kedua lumpang ini berada dalam 1 batuan besar yang kemudian di pahat dengan ukuran masing-masing lubang berdiameter 50 cm, dalam lubang 39 cm, dan lubang satu lagi berdiameter 31 cm dengan kedalaman lubang 38 cm. Berada pada titik S3 21 09.0 E120 20 47.0 dengan ketinggian 130 meter diatas permukaan laut.

Terdapat sebanyak 2 buah gua yang menyimpan berbagai tinggalan arkeologis yang berada di Kampung Andulan, Desa Siteba, Kecamatan Walenrang Utara. Kedua gua tersebut berada di gugusan karst. Masyarakat setempat menyebut gua dengan istilah "Liang". Kedua gua tersebut bernama Liang Kabongiang, dan Liang Andulan. Lokasi ini berbatasan dengan Sungai Makawa di sebelah utara dan timur, Sungai Mekarai di sebelah selatan, dan Gunung Batu Tonga di sebelah barat. Vegetasi yang terdapat di lingkungan bukit karst ini berupa beringin, palm, semak belukar, jati, dan pohon bitti.

Gambar 4.31
Lumpang Pada Situs Buntu Lebani



Sumber: <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbmakassar>, 2021

9) Komunitas Adata Terpencil Sinaji

Komunitas adat terpencil di desa Sinaji memurapakan salah satu kekayaan budaya kabupaten Luwu. Masyarakat adat desa Sinaji memiliki sistem pengetahuan dan kepercayaan yang baik.. Menurut cerita orang sinaji, *kodong saratuq* (air terjun) adalah tempat orang mandi seperti raja pada jaman dahulu. Dahulu banyak kerbau di

Sinaji, sehingga orang-orangnya termasuk orang yang berada. Bahkan, untuk acara *rambu soloq*, biasanya disembelih 100 ekor kerbau.

Menurut kepercayaan orang Sinaji, terdapat harta karun di daerah gunung yang mana kalau ditemukan, maka penduduk akan kaya dan harta tersebut bisa digunakan membangun Sulawesi hingga maju seperti negara-negara besar. Harta tersebut milik orang Sinaji yang disimpan dalam sebuah peti.

Dahulunya, orang KAT memiliki kepercayaan terhadap animisme. seperti percaya kepada kerbau putih yang memiliki kemampuan berjalan sesuai dengan titah orang dahulu. Konon, kerbau ini sebagai penyampai bahan makanan kepada rakyat yang berada dalam kawasan Sinaji. kerbau tersebut adalah jenis tedong bulan (kerbau putih) digunakan untuk meminta garam (dengan memasukkan pasir ke dalam tempat penyimpanan yang akan diangkut), atau abu dapur jika ingin meminta sagu. Kerbau tersebut

akan mengantar ke Sanggaria Bajo, orang di sana akan tahu apa yang dibutuhkan. Ketika kerbau putih lewat, maka tidak ada yang boleh menegurnya. Ada pohon kelapa di depan rumah sebagai penanda bahwa zaman dahulu memang ada cerita tentang kerbau putih tersebut. Setelah islam datang, kepercayaan itu mulai hilang. Namun, tentang kerbau yang berjalan di area pemukiman penduduk adalah sesuatu yang sakral sehingga jika kerbau itu lewat, maka tidak boleh ada seorang pun yang berhak untuk menegurnya. Ada pula larangan di dalam hutan, yakni tidak boleh sembelih ayam, sembelih kerbau, intinya tidak boleh menumpahkan darah, karena dikhawatirkan akan terkena kayu. atau tersesat tidak tahu jalan pulang.

Menurut kepercayaan, makhluk halus yang bertanggung jawab terhadap semua itu. Makhluk halus itu berupa jin atau istilah lokalnya setang padang yang tinggal di hutan. Pernah ada kasus mertua informan yang disembunyikan dalam hutan selama 10 hari, orang-orang mencarinya di kawasan hutan pinus yang pohonnya agak jarang, tetapi tidak ditemukan dan tidak terlihat. Mereka sekarang tidak percaya lagi dengan arwah leluhur.

Menurut cerita orang dulu, Sinaji dijaga oleh Puang ri Sinaji, penguasa hutan dan gunung Sinaji. Selain Puang ri Sinaji, beberapa puncak gunung juga dijaga oleh beberapa makhluk, seperti Puang ri Tede, Puang ri Tangdu, Puang ri Tabang, dan beberapa Puang lain yang keseluruhannya berjumlah tujuh.

Warga KAT percaya bahwa di puncak Latimojong dan Sinaji terdapat lapangan luas untuk mendaratkan pesawat terbang yang hanya bisa dilihat oleh orang yang tersesat. Ada beberapa orang yang pernah tersesat di hutan, dalam sebuah kasus bahkan diceritakan seseorang yang membuat pesta di gunung dengan memasak banyak makanan namun makanan tersebut habis dengan sendirinya meskipun tidak ada seorang pun di sana.

Oleh karena itu, orang KAT percaya bahwa puncak Latimojong dan Sinaji sebetulnya ramai dan memiliki lapangan terbang namun semuanya gaib. Salah satu pantangan untuk masuk ke hutan adalah tidak boleh membawa telur apa saja. Ada sebuah kasus saat seorang pendaki yang memakan telur tiba-tiba di daerah Ulu Wae saja berada dalam bus Litha menuju Sudiang, Makassar. Banyak yang mencarinya ke atas namun ternyata kabarnya sudah di Makassar. Pantangan lain adalah tidak boleh membawa beras hitam ke dalam hutan karena bisa saja disesatkan.

Ada juga kasus ketika beberapa warga KAT pergi mencari kayu gaharu dan menemukan keanehan di hutan yakni terdengar suara seperti banyak orang menebang pohon, namun setelah dicek, tidak ada sama sekali bekas penebangan, yang ditemukan sebatang pohon yang baru saja ditebang, tapi tidak ada bekasnya, hanya bekas terpotong dan tidak ada orang-orang di sana, bahkan jejaknya pun tidak ada, warga pun ketakutan dan memutuskan untuk kembali ke pondok, masak, lalu menggulung tenda. Setelah itu, mereka memutuskan untuk pulang. Mereka menganggap, itu tanda-tanda dari makhluk halus bahwa mereka tidak akan

memberikan kayunya. Kalau mereka lanjutkan, bisa jadi mereka tersesat. Orang pun dilarang berbicara sembarangan di dalam hutan.

Dulu, ketika akan masuk ke hutan untuk ambil kayu, orang harus membelah pinang dan menabur kapur sirih (maqpangan), disimpan di dapur. Membakar tagiri sebagai ucapan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Tuhan, syukur dengan datangnya tamu (tamu dianggap sebagai pembawa rezeki), dan mengingat leluhur. Dalam kawasan KAT, orang-orang KAT biasanya bertani dengan menanam jagung, kopi, cengkeh di kebunnya masing-masing. Sebelum memulai menanam, hal yang pertama dilakukan adalah membuka lahan, yang dibabat (mambela) lalu dibakar (mantunu) jaraknya waktunya kadang 3 bulan jika lahan baru, kemudian dipasangkan kayu dan saat sekarang mulai dipasangkan setrum pada malam hari. Adapun fungsi dari strom adalah sebagai penjerat babi hutan. Dalam prosesi pembukaan lahan, orang KAT saling tolong menolong dalam prosesinya. Adapun ritual masih digunakan saat ini seperti dalam proses menanam padi: 1. Menanam benih (memotong ayam) 2. Jarak tanaman 30 cm (meruku) 3. Dahulunya, panen itu selama enam bulan namun sekarang memakai aturan pemerintah jadi panennya terkadang tiga atau empat bulan. 4. Ada sawah irigasi dan sawah ladang 5. Proses digunde (mengusir hama) 6. Setelah di panen, perempuan menjemur (maqriso) 7. Hasil panen selalu gurih dahulunya karena kulitnya tidak lepas namun sekarang berbeda. 8. Dahulu, harus membeli solar juga dan jaraknya sangat jauh 9. Jika pesta panen, lesung mulai berbunyi maka perempuan pun mulai berdatangan 10. Ada dua kali macam penumbukan, ada menggunakan alu panjang kemudian prosesinya setelahnya menggunakan alu bundar. 11. Jika menggunakan alu panjang, bisa banyak orang yang menggunakan, namun jika alu bunda hanya bisa dua sampai tiga orang. 12. Alunya terbuat dari kulit cengkeh namun juga kadang menggunakan kayu angka, kayu blungil. Dalam ritualnya, menggunakan ayam hitam yang terserah jenis apapun. Jika tidak dilaksanakan maka akan ada bala yang terjadi. Pun jika gabah akan dimasukkan ke dalam lumbung, maka harus memotong ayam terdahulu. Pertama, harus membuka saluran air, kemudian persemian, lalu pabbineang dan terakhir biangka (pattapi) Saat panen, perempuan-perempuan akan sibuk maqlambuk/maqriso (menumbuk dengan lesung), menurut mereka, padi yang ditumbuk lebih harum sebab kulit ari padi tidak lepas ketimbang dipabrik. Karena itu pula, beberapa tahun belakangan, beberapa warga di Sinaji pergi kota untuk memproses padi di pabrik ketimbang harus maqlambuk. Dulu orang-orang harus ke Enrekang atau ke Toraja untuk memperoleh minyak dan garam sehingga warga desa juga berkurang.

Saat pesta, perempuan-perempuan akan datang untuk menumbuk padi. Semuanya penuh inisiatif saat lesung (alu) sudah berbunyi (kode). Lesung ada dua macam, ada yang panjang, ada yang berdiri. Padi ditumbuk dua kali, pertama pada lesung yang panjang, kemudian pada lesung yang berdiri (tingginya sekira semeter). Sekarang masih biasa dipakai. Lesung terbuat dari kayu yang dilubangi, gabah dimasukkan lalu ditumbuk juga menggunakan kayu. Yang tumbuk bisa dua-tiga orang. Kalau lesung panjang, bisa ditumbuk oleh 10 orang. Kayu (kaju)-nya biasa dibuat dari kayu-kayu berat, seperti kayu cengkeh, kayu tarian, kayu buangin, kayu angka, kayu rengge, kayu tabi, kayu sulo, kayu surel. Namun yang paling bagus adalah kayu buangin, sebab tidak mudah rusak oleh padi.

Proses bertani dimulai dari maqpalenduwai, memasukkan air ke pengairan (membuka irigasi atau kaloq-kaloq) dan ditutup saat padi berbuah, dulu diupacarakan dengan memotong ayam dan maqpiong, yakni memasukkan beras ke dalam bambu lalu dibakar, makanan ini namanya paqpiong. Upacara ini dilakukan di ujung air (ulu wae), namun upacara ini sudah tidak dilakukan lagi. Kemudian, persiapan untuk membuka lahan dan membuka tempat benih (paqbinean), saat akan memasuki sawah itu kemudian dipotong lagi ayam. Selanjutnya menanam benih (tanak),

kemudian jarak sekira dua bulan tapi sawah kemudian dibajak, setelah dicabut (massisiq), Sawah tersebut dicaplak atau digaris (digogo) terlebih dahulu sehingga orang yang akan menanam sisa mengikuti garisnya., namun untuk sawah kecil sebab terasering (tangga-tangga), hanya menggunakan perasaan (taksiran) kemudian menanam (mentanan) dengan jarak padi 30 - 40 cm. Setelah itu, sekira sebulan, kemudian maqrukuq/ meqtorak atau membersihkan rumput sebab ada rumput liar yang tumbuh di sela-sela padi. Setelah dua bulan, kemudian maqtokon atau membersihkan lagi rumput terutama yang tumbuh di pematang, lalu diangkasan atau keadaan saat padi baru mau berisi (geaqtang), saat sudah berisi disebut mentaqbi. Namun sebelum masa penjagaan itu, orang harus melakukan maqkinande atau memotong ayam hitam (manuq bolong) di sawahnya, kalau tidak dilakukan maka buah padinya tidak berisi, namun itu sudah tidak dilakukan lagi. Setelah ada padi yang menguning, maka dilakukan maqrakan atau memetik beberapa padi yang menguning tersebut, dimasak dengan kulitnya, lalu ditaburkan ke seluruh pinggiran sawah (secara keliling) supaya padi yang lain cepat masak. Namun maqrakan ini sudah tidak dilakukan lagi, sebab beberapa orang sudah berpikir secara rasional bahwa hal tersebut tidak masuk akal. Selain itu, hal tersebut juga sudah susah dilakukan sekarang sebab padi yang ditanam berasal dari pemerintah yang masaknya serempak, berbeda dengan padi KAT yang masaknya tidak serempak. Setelah semua padi masak, selanjutnya adalah mangleq atau mengikat padi. Saat itu pula anggota KAT membakar tumbuhan tagari sebagai ungkapan rasa syukur karena sudah akan panen. Pula tagari ini dibakar dalam setiap sesuatu berupa syukuran, seperti masuk rumah baru, akan menanam, atau ketika ada tamu sebab tamu dianggap sebagai pembawa rezeki (saat kami datang pun ke lokasi, pemilik rumah yang kami tinggal membakar tagari di dapur, baunya harum) Kadang tagari ini dibakar bersama gula aren. Setelah potong padi, dilakukan maqpokoq atau mengumpulkan dan menyatukan ikatan padi lalu potong ayam lagi, dan menyediakan berraq puluq (beras ketan putih) atau pare mandoti, pare kasalle, dan pare balanda (jenis-jenis beras yang digunakan), setelah itu, padi di bawah pulang dan dihitung bagiannya, mana bagian pekerja sawah, mana bagian untuk orang yang punya hak untuk mengolah sawah. Setelah itu, gabah dimasukkan ke dalam lumbung (alang) atau disebut juga maqbelundak, di sini, potong ayam lagi dan menyediakan berasnya (pare kasalle), setelah diupacarakan, baru padi tersebut bisa dimasukkan ke lumbung. Itu saat gabah masih diikat, sekarang sudah dimasukkan ke dalam karung lalu dimasukkan lagi ke dalam lemba dan palipuq (anyaman bambu bundar yang muat untuk memasukkan karung, tingginya lebih satu meter lalu ditutup sebab karung masih bisa digigit tikus, tapi palipuq atau lemba tidak akan tertembus. Adapun lemba adalah bentuk sederhana dari alang, sebab alang itu penuh ukiran, lemba tidak. Yang bisa membuat lemba pun terbatas, hanya orang yang bisa membuat rumah yang mampu membuatnya, oleh karena itu, palipuq dulu menjadi alternatif anggota KAT yang tidak bisa membuat lemba. Ritual tentang lingkungan dahulu seperti membuat rumah, rumah orang besar (tongkonan) dulu masih animisme, harus memakai babi untuk rumah, kalau naik rumah sekarang naik rumah menggunakan ayam. Ketika ada anak dilahirkan, maka prosesnya secara Islami. Dalam proses acara pernikahan sebelum membuat balasuji, maka dibuat tangga terlebih dulu. Tidak semua balasuji ukurannya sama. Ukuran balasuji ada 60 cm, 70, dan satu meter. Tapi tidak semua orang diizinkan memakai balasuji, hanya orang bangsawan yang bisa menggunakannya.

Pesta dilaksanakan dua kali, dan jika lamming hendak dibongkar maka harus potong ayam. Dan lamming harus dibuka setelah tiga hari. Jika membuat balasuji maka harus memotong ayam, ketika dibongkar, maka harus dipotong juga. Acara pernikahan atau acara lain yang bernuansa syukuran (rambu tukkaq) dimulai pagi hingga siang, namun rambu solo dimulai jika memasuiki tengah hari sampai sore.

Jika selesai potong cengkeh, ada pesta panen. Dilaksanakan di masjid sebagai bentuk syukuran, diadakan dalam bentuk pengajian. Jika pesta panen, masing-masing orang membawa piong (nasi bambu yang dibakar), namun bisa juga membawa selain piong. kadang juga potong kambing, yang penting makanan halal. Dalam pesta panen, kadangkala, diadakan lelang untuk pembangunan masjid yang merupakan rangkaian dalam pesta panen.

4.2. Fasilitas Pariwisata Kabupaten Luwu

Selain keberadaan keanekaragaman potensi daya tarik wisata sebagai komponen utama yang dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke kabupaten Luwu, maka ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pariwisata memegang peran penting dalam memudahkan dan memberikan kenyamanan kepada wisatawan selama kunjungannya di kabupaten Luwu. Adapun jenis dan kondisi sarana prasarana pariwisata yang ada di kabupaten Luwu adalah sebagai berikut:

4.2.1. Fasilitas Jalan

Jalan merupakan salah satu fasilitas transportasi darat yang memegang peran penting dalam menghubungkan antar wilayah di Kabupaten Luwu serta antara kabupaten Luwu dengan kabupaten lainnya di provinsi Sulawesi Selatan.

Panjang jalan kabupaten di Kabupaten Luwu di sampai dengan tahun 2020 adalah 2.248,85 km, yang terdiri dari jalan negara sepanjang 115,50 km, jalan provinsi sepanjang 83,90 km dan jalan kabupaten sepanjang 2.049,45 km. Jalan tersebut terdiri dari permukaan jalan aspal sepanjang 602,74 km, permukaan jalan kerikil sepanjang 1.186,28 km, permukaan jalan tanah sepanjang 306,63 km, dan permukaan jalan lainnya sepanjang 153,2 km. Menurut kondisi jalan menunjukkan bahwa terdapat 21,29 persen dalam kondisi baik, 2,86 persen dalam kondisi sedang, 49,69 persen dalam kondisi rusak dan 35,16 persen dalam kondisi rusak berat.

Data mengenai panjang jalan menurut jenis permukaan jalan di kabupaten Luwu tahun 2020 adalah sebagai berikut

Tabel 4.1
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan
di Kabupaten Luwu Tahun 2019-2020

No	Jenis Permukaan Jalan	2019	2020
1	Diaspal/ <i>Asphalted</i>	591,01	602,74
2	Kerikil/ <i>Gravel</i>	1.173,89	1.186,28
3	Tanah/ <i>Soil</i>	336,17	306,63
4	Lainnya/ <i>Others</i>	147,78	153,2
	Total	2.248,85	2.248,85

Sumber : BPS Kabupaten Luwu, 2021

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa keberadaan akses jalan dalam menunjang kegiatan pariwisata di kabupaten Luwu secara umum cukup memadai, walaupun belum mampu menjangkau seluruh potensi daya tarik wisata yang ada dalam kondisi yang baik.

Selain ketersediaan panjang jalan, faktor kondisi jalan juga memegang peranan penting dalam memberikan kenyamanan bagi masyarakat termasuk wisatawan pada saat melakukan perjalanan di kabupaten Luwu. Data mengenai panjang jalan menurut kondisi jalan di Kabupaten Luwu pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Data Jalan Menurut kondisi Jalan
di Kabupaten Luwu (km) Tahun 2019-2020

No	Kondisi Jalan	2019	2020
1	Baik/ <i>Good</i>	527,87	558,02
2	Sedang/ <i>Moderate</i>	83,99	108,72
3	Rusak/ <i>Damage</i>	1.313,75	1.364,07
4	Rusak Berat/ <i>Severally Damage</i>	322,89	217,69
	Total	2.248.5	2.248.5

Sumber : BPS Kabupaten Luwu, 2021

4.2.2. Prasarana Listrik

Pelayanan kelistrikan di Kabupaten Luwu dilayani oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Jumlah pelanggan listrik di PLN Cabang Belopa sebanyak 26.544 rumah tangga. Kecamatan yang memiliki pelanggan listrik PLN paling banyak adalah pengelolaan kecamatan Ponrang dan Ponrang Selatan dengan jumlah pelanggan sebanyak 7.887 rumah tangga dan pengelolaan kecamatan Belopa, Belopa Utara, dan Kamanre dengan jumlah pelanggan sebanyak 6.362.

Data mengenai kelistrikan kabupaten Luwu tahun 2020 di PLN Kabupaten Luwu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3
Daya Terpasang Listrik PT. PLN (Persero) Pada Cabang/Ranting Menurut
Kecamatan di Kabupaten Luwu, 2020

Kecamatan	Daya Terpasang
Belopa, Belopa Utara, Kamanre	12.276.350
Bajo, Bajo Barat, Latimojong	3.042.150
Suli, Suli Barat	2.860.450
Larompong	2.236.500
Larompong Selatan	1.299.000
Ponrang, Ponrang Selatan	6.401.800
Bupon	1.798.900
Kabupaten Luwu	29.915.150

Sumber : BPS Kabupaten Luwu, 2021

4.2.3. Fasilitas Air Bersih

Pelayanan air bersih di Kabupaten Luwu dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Pada sektor air, jumlah pelanggan air di PDAM Kabupaten Luwu sebanyak 13.447 rumah tangga dengan pelanggan terbanyak yaitu di pengelolaan Belopa dan Belopa Utara sebanyak 3.663 rumah tangga. Total debit air yang disalurkan sebanyak 2.341.415 m³ dengan debit air terbanyak disalurkan di pengelolaan Belopa dan Belopa Utara sebanyak 380.479 m³.

Data mengenai jumlah pelanggan dan air minum yang disalurkan oleh PAM Kabupaten Luwu pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4
Jumlah Pelanggan dan Air Minum Disalurkan Oleh PDAM
Kabupaten Luwu Menurut Kecamatan Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah	
		Pelanggan	Air Yang Disalurkan
1.	Larompong	302	162.230
2.	Larompong Selatan	-	-
3.	Suli	1.164	14.360
4.	Suli Barat	-	-
5.	Belopa	3.820	50.258
6.	Kamanre	198	4.646
7.	Belopa Utara	-	-
8.	Bajo	636	10.335
9.	Bajo Barat	-	-
10.	Bassesangtempe	-	-
11.	Latimojong	-	-
12.	Bastem Utara	-	-
13.	Bupon	748	8.520
14.	Ponrang	2.652	45.180
15.	Ponrang Selatan	-	-
16.	Bua	1.718	4.646
17.	Walenrang	-	-
18.	Walenrang Timur	-	-
19.	Lamasi	-	-
20.	Walenrang Utara	-	-
21.	Walenrang Barat	-	-
22.	Lamasi Timur	-	-
	Jumlah	11.238	300.175

Sumber : BPS Kabupaten Luwu, 2021

4.2.4. Fasilitas Telekomunikasi

Fasilitas telekomunikasi yang telah dimiliki oleh kabupaten Luwu adalah fasilitas sambungan telepon PT. Telkom dan jaringan telepon seluler yang disediakan oleh berbagai operator jaringan seluler dan sudah dapat diakses sampai ke seluruh wilayah kecamatan. Seiring perkembangan teknologi informasi, maka terjadi pula perubahan struktur pengguna jaringan komunikasi dari konvensional menjadi nirkabel.

Hal ini dapat dilihat dari penurunan jumlah pelanggan telekomunikasi telepon konvensional di kabupaten Luwu sejak tahun 2015. Saat ini fokus bisnis PT. Telkom selaku pengelola telekomunikasi lebih berfokus dalam pengembangan produk berbasis nirkabel seperti pengembangan jaringan internet, jaringan TV digital, dan produk sejenisnya. Hal tersebut untuk mengantisipasi perubahan kebutuhan pelanggan pada berbagai kebutuhan berbasis teknologi digital yang berkembang sangat pesat pada seluruh aktivitas dan profesi pelanggan.

4.2.5. Fasilitas Perbankan dan Lembaga Keuangan

Salah satu prasarana pariwisata yang sangat berpengaruh dalam memberikan kenyamanan bagi wisatawan dan masyarakat dalam kegiatan kepariwisataan di kabupaten Luwu adalah ketersediaan lembaga perbankan dan lembaga keuangan lain non bank.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi saat ini yang sangat memberikan kemudahan dan memanjakan wisatawan melalui penyediaan dan layanan keuangan seperti penyediaan mesin anjungan tunai mandiri (ATM), kantor kas keliling, penukaran mata uang asing, serta layanan perbankan dan keuangan lainnya. Disisi lain, keberadaan dan ketersediaan bank dan lembaga keuangan non bank akan sangat mempengaruhi pertumbuhan investasi pariwisata di kabupaten Luwu.

Sampai saat ini terdapat 7 (tujuh) buah bank yang beroperasi di kabupaten Luwu yang dilengkapi dengan 22 buah Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, dan Kas Keliling, serta 41 buah mesin anjungan tunai mandiri (ATM) yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten Luwu.

Adapun jenis dan jumlah bank, koperasi serta lembaga keuangan lainnya yang ada di Kabupaten Luwu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.5
Jumlah Bank, Koperasi dan Lembaga Keuangan
di Kabupaten Luwu Tahun 2018

No.	Jenis Lembaga	Jumlah	Keterangan
1.	Bank	8	1 Kantor Cabang 10 Kantor Cabang Pembantu 14 Kantor Unit 11 Kantor Kas 24 ATM
2.	Koperasi	187	12 KUD 175 Non-KUD
3.	Pegadaian	9	1 CP 8 UPC

Sumber : Olahan Penelitian, 2021

Data pada tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa jumlah bank yang beroperasi di kabupaten Luwu sebanyak 8 buah yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mega, Bank Sulselbar, Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN), Bank Mandiri, Bank Danamon dan Bank Negara Indonesia (BNI).

Sementara untuk lembaga ekonomi yang terbesar adalah koperasi yaitu sebanyak 187 buah yang terdiri dari 12 unit Koperasi Unit Desa (KUD), 11 unit KPRI, 1 unit koperasi karyawan, 5 unit koperasi pasar, dan 158 unit koperasi lainnya. Untuk lembaga keuangan lainnya adalah Pegadaian sebanyak 9 buah yaitu PT. Pegadaian Persero yang terdiri dari 1 Kantor Cabang Pembantu dan 8 Kantor Unit Pembantu Cabang.

4.3. Aksesibilitas Pendukung Pariwisata Kab. Luwu

Untuk menjaring dan meningkatkan minat wisatawan melakukan perjalanan ke kabupaten Luwu sebagai destinasi berkualitas, dibutuhkan konektivitas yang terpadu. dan memadai. Konektivitas transportasi sangat memegang peranan penting bagi perkembangan dari suatu destinasi yang selanjutnya akan memberikan dampak pertumbuhan bagi angka kunjungan wisatawan sehingga dapat menciptakan sejumlah tantangan yang berhubungan dengan infrastuktur dan kapasitas transportasi. Pada sisi lain, jika suatu destinasi memiliki konektivitas yang tidak memadai maka destinasi tersebut tentunya akan sulit untuk dijangkau sehingga akan kurang wisatawan yang datang untuk berkunjung.

Sebagai salah satu strategi untuk menjaring wisatawan, maka konektivitas yang ada harus dapat menjangkau seluruh daya tarik yang ada di kabupaten Luwu dengan aman, nyaman dan mudah. Ketersediaan moda transportasi darat, laut dan udara dapat menjadi fokus dalam pengembangan aksesibilitas sehingga secara menyeluruh konektivitas dirancang untuk peningkatan kualitas perjalanan wisata.

Kemudahan aksesibilitas ini juga dapat memperpanjang lama tinggal dari wisatawan karena mereka dapat memiliki ketertarikan yang kuat untuk melakukan eksplorasi destinasi melalui perjalanan yang mereka dapat rancang lebih matang. Oleh karena itu konektivitas harus dapat mendukung pola perjalanan di kabupaten Luwu sehingga perlu pengembangan yang tepat.

Selain ketersediaan jalan darat yang memadai, maka untuk kemudahan aksesibilitas dan mobilitas ekonomi masyarakat sangat dipengaruhi oleh keberadaan sarana transportasi darat berupa bus angkutan dan jenis kendaraan lainnya yang dapat dipersewakan dan digunakan untuk kemudahan mobilitas oleh wisatawan menuju daya tarik wisata sehingga dapat meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke kabupaten Luwu.

Adapun data mengenai jenis dan jumlah transportasi dan angkutan serta kendaraan transportasi lainnya yang tersedia di kabupaten Luwu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.6
Jumlah Angkutan Umum Menurut Jenis Angkutan
di Kabupaten Luwu Tahun 2018-2020

No.	Jenis Angkutan Umum	Jumlah Kendaraan		
		2018	2019	2020
1.	Mobil Penumpang Umum	927	914	895
2.	Bus/ Mini Bus	36	31	25
3.	Becak	51	45	40
4.	Lainnya	-	-	-
Jumlah		1.014	990	960

Sumber : BPS Kabupaten Luwu, 2021

BAB -5

INDUSTRI PARIWISATA KABUPATEN LUWU

5.1. Usaha Pariwisata Kabupaten Luwu

Dalam pengembangan destinasi wisata, terdapat beberapa masalah utama yang harus dihadapi, yaitu perubahan iklim dan bencana alam, ketidaksiapan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat belum optimal, ketidaksiapan sarana, prasarana, dan infrastruktur, ketersediaan dan konektivitas infrastruktur, dan rendahnya nilai, jumlah dan pertumbuhan investasi, serta iklim usaha yang tidak kondusif. Untuk itu, destinasi dan industri pariwisata harus dikembangkan menjadi berkelas dunia, berdaya saing, dan berkelanjutan serta mampu mendorong pembangunan daerah agar dapat meningkatkan kontribusi ekonomi pariwisata dan meningkatkan daya saing melalui peningkatan citra dan terciptanya diversifikasi destinasi pariwisata.

Meningkatnya citra pariwisata dapat dikenali antara lain melalui jumlah destinasi pariwisata yang difasilitasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola destinasi yang difasilitasi dengan skema peningkatan gerakan kesadaran kolektif *stakeholders*, pengembangan manajemen destinasi, pengembangan bisnis, dan penguatan organisasi pengelolaan destinasi pariwisata sehingga akan semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam pengembangan destinasi wisata dengan tata kelola yang baik.

Dalam penciptaan diversifikasi destinasi pariwisata maka jumlah lokasi daya tarik yang dikembangkan menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) baik yang bersifat rintisan, pemeliharaan maupun revitalisasi dari daya tarik wisata yang ada, jumlah desa yang difasilitasi untuk dikembangkan sebagai desa wisata sebagai penerapan prinsip *community based tourism* untuk melibatkan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata setempat.

Semakin banyak desa yang difasilitasi maka diharapkan desa tersebut dapat menjadi alternatif tujuan wisata dan dapat meningkatkan lama tinggal, pengeluaran wisatawan serta pola perjalanan yang dikembangkan. Pola perjalanan pariwisata adalah struktur, kerangka, dan alur perjalanan wisata dari satu titik destinasi ke titik destinasi lainnya yang saling terkait yang berisi informasi tentang fasilitas, aktivitas, dan pelayanan yang memberikan berbagai pilihan perjalanan wisata bagi industri maupun individu wisatawan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dalam melakukan perjalanan wisata. Semakin bervariasi pola perjalanan yang ditawarkan maka diharapkan dapat meningkatkan minat wisatawan untuk berwisata.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan industri pariwisata yaitu Industri Pariwisata yang menggerakkan perekonomian, maka arah kebijakan dan strategi pengembangan destinasi dan industri Pariwisata dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional tahun 2010–2025 menekankan pembangunan kepariwisataan nasional yang meliputi 4 (empat) pilar

pembangunan yaitu destinasi Pariwisata; Industri Pariwisata; Pemasaran pariwisata; dan Kelembagaan Kepariwisata.

Dalam konteks arah kebijakan dan strategi untuk pengembangan destinasi dan industri pariwisata, maka pengembangan destinasi pariwisata meliputi perwilayahan pembangunan destinasi; pembangunan daya tarik wisata; pembangunan aksesibilitas pariwisata; pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata; pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan pengembangan investasi di bidang pariwisata.

Pembangunan industri pariwisata dilakukan melalui penguatan struktur industri pariwisata; peningkatan daya saing produk pariwisata; pengembangan kemitraan usaha pariwisata; penciptaan kredibilitas bisnis; dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Arah kebijakan dan strategi pengembangan industri pariwisata dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 yang digariskan dalam RPJMN 2020 - 2024, yaitu pembangunan industri pariwisata diarahkan untuk meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk/jasa pariwisata di setiap destinasi pariwisata yang menjadi fokus pemasaran melalui pembinaan usaha pariwisata bagi masyarakat lokal; fasilitasi investasi usaha sektor pariwisata; pengembangan standarisasi dan sertifikasi usaha dan produk pariwisata; serta pengembangan intergrasi ekosistem industri pariwisata.

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Pariwisata dalam mencapai sasaran-sasaran strategis tahun 2020 - 2024 untuk pengembangan industri pariwisata adalah pengembangan industri pariwisata diarahkan untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata, melalui pengembangan infrastruktur dan ekosistem kepariwisataan antara lain meliputi perancangan destinasi pariwisata, peningkatan aksesibilitas, atraksi, amenitas, dan ekosistem pariwisata; pengembangan destinasi wisata alam, budaya, dan buatan yang berdaya saing antara lain meliputi pengembangan wisata kuliner dan spa, wisata sejarah dan religi, wisata tradisi dan seni budaya, wisata pedesaan dan perkotaan, wisata bahari, wisata ekologi dan petualangan, kawasan wisata, serta wisata konvensi, olahraga dan rekreasi; peningkatan tata kelola destinasi pariwisata dan pemberdayaan masyarakat antara lain meliputi tata kelola destinasi pariwisata prioritas dan khusus, internalisasi dan pengembangan sadar wisata, dan pengembangan potensi masyarakat di bidang pariwisata; pengembangan industri pariwisata antara lain meliputi peningkatan kemitraan usaha pariwisata dan investasi pariwisata, pengembangan standar usaha pariwisata dan sertifikasi usaha pariwisata, peningkatan keragaman dan daya saing produk jasa pariwisata di setiap destinasi pariwisata, dan pembinaan usaha pariwisata bagi masyarakat lokal.

Menyikapi kondisi dampak pandemi terhadap sektor pariwisata khususnya pada industri pariwisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia melakukan analisis terhadap trend industri pariwisata 2021. Pada tahun 2021, sektor pariwisata menghadapi perubahan peta industri besar, bahkan mungkin terbesar dalam sejarah peradaban umat manusia. Covid-19 telah meluluhlantakkan sendi-sendi perekonomian, industri, dan bisnis yang memaksa kita memasuki dunia yang sama sekali baru (*a whole new world*).

Pada tahun 2021 kita akan menghadapi pergeseran industri maha dahsyat dan ekstrim, yang disebut sebagai *industry megashifts*. Bentuk peta pergeseran industri yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 secara sederhana dikelompokkan ke dalam tiga bagian besar yaitu pergeseran di tingkat *mega changes*, *macro competition*, dan *micro customer*.

Dalam tataran pergeseran di tingkat mega (*mega changes*) mencakup perubahan-perubahan besar di bidang teknologi, politik, regulasi, sosial, ekonomi, hingga lingkungan. Secara umum ada enam perubahan besar yang terjadi di tingkat

Mega ini yaitu : (1) penyebaran Covid-19 dan ketersediaan vaksin (*Covid-19 propagation and vaccine availability*); (2) akselerasi digitalisasi yang dipercepat (*accelerated digitalization*); (3) kecemasan sosial (*societal anxiety*); (4) gangguan rantai pasokan global (*global supply-chain disruption*); (5) kebangkitan nasionalisme (*the rise of nationalism*); dan (6) kepemimpinan pemerintahan (*government leadership*).

Pergeseran di tingkat Makro (*macro competition*) mencakup perubahan-perubahan besar yang menghasilkan peta kompetisi baru di era pandemi. Perubahan besar yang didorong oleh bencana dahsyat COVID-19 ini menghasilkan lanskap industri baru yang ditandai dengan empat karakteristik: kesehatan dan kebersihan (*hygiene*); intensitas pertemuan rendah (*low-touch*), potensi kerumunan rendah (*less-crowd*), dan mobilitas yang rendah (*low-mobility*). Perusahaan yang sukses di era pandemi adalah perusahaan-perusahaan yang bisa beradaptasi dengan empat karakteristik tersebut. Itulah sebabnya perusahaan di sektor industri digital misalnya, lebih *sustainable* di era pandemi.

Dalam perspektif *micro customer*, banyaknya korban jiwa akibat pandemi Covid-19 telah melahirkan masyarakat baru yang penuh empati, welas asih, dan sarat solidaritas sosial (*empathic society*). Mengacu ke piramida Maslow, konsumen saat ini dan ke depan bergeser kebutuhannya dari “puncak piramida” yaitu aktualisasi diri, ke “dasar piramida” yaitu makan, kesehatan, dan keamanan jiwa-raga (*back to the bottom of the pyramid*). Dengan adanya pandemi Covid-19, konsumen menghindari kontak fisik manusia, mereka beralih menggunakan medium virtual/ digital (*go virtual*). Gaya hidup baru tinggal di rumah dengan aktivitas *working-living-playing*, karena adanya pembatasan sosial (*stay at home lifestyle*).

Pengembangan industri pariwisata yang diharapkan adalah yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya yang diwujudkan melalui pengembangan 5 (lima) pilar industri pariwisata yaitu penguatan struktur industri pariwisata; daya saing produk wisata; kemitraan usaha pariwisata melalui skema kerjasama pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat; Kredibilitas bisnis melalui standarisasi dan sertifikasi usaha, regulasi dan fasilitasi jaminan usaha; serta tanggungjawab terhadap lingkungan yang berfokus pada 13 jenis usaha pariwisata yaitu : daya tarik wisata; kawasan pariwisata; jasa transportasi wisata; jasa perjalanan wisata; jasa makanan dan minuman; penyediaan akomodasi; penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; jasa informasi pariwisata; jasa konsultan pariwisata; jasa pramuwisata; wisata tirta; dan spa. Adapun potensi dan kondisi industri pariwisata yang dimiliki oleh kabupaten Luwu adalah sebagai berikut :

5.1.1. Usaha Akomodasi

Usaha akomodasi merupakan salah satu jenis usaha yang memegang peran penting dalam mendorong minat kunjungan wisatawan ke kabupaten Luwu karena salah satu pertimbangan wisatawan dalam memutuskan untuk berkunjung ke sebuah destinasi adalah ketersediaan akomodasi yang bersih, aman dan nyaman melalui ketersediaan fasilitas, kualitas produk dan pelayanan yang baik sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Menteri Pariwisata tentang Standar Usaha Pariwisata.

Pandemi Covid-19 menyebabkan negara-negara di dunia memberlakukan lockdown dan sampai saat ini, kasus Covid-19 masih terus berlanjut dengan mutasi ke beberapa varian baru yang menyebabkan status pandemi tersebut belum dapat berubah menjadi endemi walaupun di beberapa negara, aktivitas kehidupan dan perekonomian masyarakat secara berangsur-angsur menuju kondisi normal. Akses antarnegara ditutup dan dampaknya maskapai penerbangan internasional terpaksa menutup rute.

Kondisi ini menjadikan tantangan yang berat bagi industri pariwisata tak terkecuali bisnis perhotelan. Sebagai imbas dari berkurangnya wisatawan internasional, tingkat okupansi hotel di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan dari 56,73% menjadi 28,07% selama periode Juli 2019 – Juli 2020 atau turun sebesar 28,66 poin. Penurunan tertinggi pada destinasi wisata Bali sebesar 59,15 poin, Sulawesi Utara (Manado) sebesar 41,13 poin dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebesar 40,03 poin.

Indikator ekonomi pembangunan kepariwisataan secara umum dilihat dari pertumbuhan angka kunjungan wisatawan, lama tinggal wisatawan, dan distribusi pengeluaran wisatawan. Selanjutnya analisis strategi pengembangan dilakukan dengan menggunakan 4 (empat) pilar kepariwisataan nasional yaitu destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan.

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Sulawesi Selatan pada Oktober 2021 mencapai rata-rata 49,13 persen atau naik 7,51 poin dibandingkan dengan TPK September 2021 yang mencapai 41,62 persen. Dibandingkan dengan TPK Oktober 2020 yang sebesar 34,27 persen mengalami peningkatan 14,86 poin. Peningkatan secara signifikan dari Tingkat Penghunian Kamar pada hotel berbintang di Sulawesi Selatan ini dipengaruhi pelonggaran kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di berbagai kota di Sulawesi Selatan sehingga beberapa kegiatan masyarakat dan instansi pemerintahan dapat dilakukan di hotel.

Dampak Covid-19 yang masih terus berlangsung dan telah banyak memberikan pengaruh terhadap kunjungan wisatawan, khususnya wisatawan manca negara. Masih tingginya penyebaran virus Covid-19 yang menyebabkan lahirnya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) - *Community Activities Restriction Enforcement*, sebagai langkah strategis dalam memutus mata rantai penyebaran Virus Covid-19 juga berpengaruh terhadap sektor pariwisata Sulawesi Selatan.

Ketersediaan akomodasi di kabupaten Luwu sampai saat ini masih sangat terbatas dari sisi kuantitas dan kualitas. Sebahagian besar hotel yang ada masih dikelola secara tradisional dan peruntukan bangunan hotel tersebut belum direncanakan untuk dijadikan usaha komersil sehingga berpengaruh terhadap konstruksi dan penataan bangunan sebagai hotel yang layak.

Khususnya untuk kabupaten Luwu, hal yang masih menjadi tantangan dalam pengembangan sebagai destinasi yang menarik adalah ketersediaan fasilitas pendukung lain selain fasilitas kamar, seperti fasilitas makan minum, ruang rapat dan pertemuan, hiburan, akses internet, dan fasilitas pendukung lainnya.

Berdasarkan data statistik Kabupaten Luwu tahun 2020, menunjukkan bahwa ketersediaan kamar dari 5 buah usaha akomodasi tertelusur beroperasi, tersedia sebanyak 151 buah kamar dengan kapasitas tempat tidur yang tersedia pada usaha akomodasi di kabupaten Luwu adalah sebanyak 194 buah tempat tidur.

Data mengenai jumlah kamar dan tempat tidur pada usaha akomodasi yang ada di kabupaten Luwu pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1
Jumlah Kamar dan Tempat Tidur Menurut Kecamatan
di Kabupaten Luwu Tahun 2021

No	Nama Hotel	Jumlah	
		Kamar	Tempat Tidur
1	Larompong	6	12
2	Larompong Selatan	6	6
3	Suli	59	68
4	Suli Barat	-	-
5	Belopa	48	56

No	Nama Hotel	Jumlah	
		Kamar	Tempat Tidur
6	Kamanre	32	52
7	Belopa Utara	-	-
8	Bajo	-	-
9	Bajo Barat	-	-
10	Bassesangtempe	-	-
11	Latimojong	-	-
12	Bastem Utara	-	-
13	Bupon	-	-
14	Ponrang	-	-
15	Ponrang Selatan	-	-
16	Bua	-	-
17	Walentrang	-	-
18	Walentrang Timur	-	-
19	Lamasi	-	-
20	Walentrang Utara	-	-
21	Walentrang Barat	-	-
22	Lamasi Timur	-	-
	Total	151	194

Sumber : BPS Kabupaten Luwu, 2021

Salah satu indikator keberhasilan operasional dan penyediaan usaha akomodasi adalah tingkat hunian kamar (*room occupancy*). Analisis terhadap data tingkat hunian kamar akan menjadi acuan dalam memahami karakteristik kebutuhan pasar wisatawan (*room seeker*) terhadap ketersediaan jenis kamar pada hotel berbintang atau non-bintang serta dari sisi sediaan terhadap jumlah dan tipe kamar beserta tempat tidur yang tersedia.

Pola tingkat penghunian kamar setiap bulan dapat digunakan untuk melihat pola peminatan terhadap hotel dan akomodasi lainnya sehingga bisa diketahui saat peminatan tertinggi dan terendah. Tingkat Penghunian Kamar rata-rata pada tahun 2020 di Kabupaten Luwu sebesar 36,28 persen dari jumlah kamar tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa kabupaten Luwu belum menjadi daerah tujuan, karena dengan jumlah kamar yang masih terbatas dan belum merata pada semua kecamatan namun sebahagian besar kamar yang tersedia tidak terjual.

Pada tahun 2020, rata-rata lama menginap tamu yaitu 1,85 hari. Hal ini menunjukkan bahwa para tamu yang datang tidak memiliki agenda yang panjang di kabupaten Luwu. Sebagian besar tamu yang datang untuk agenda yang hanya membutuhkan waktu singkat, misalnya dalam rangka perjalanan dinas, atau kepentingan bisnis dan bukan untuk agenda yang memakan waktu berhari-hari, seperti liburan.

Data tersebut menunjukkan bahwa dari sisi ketersediaan kamar (*room supply*), jumlah kamar dan tempat tidur yang tersedia pada hotel di kabupaten Luwu sampai saat ini masih terjadi kelebihan (*over supply*). Sebagai kabupaten yang akan menjadi destinasi wisata yang diminati, maka pembangunan usaha akomodasi yang berkualitas khususnya hotel berbintang menjadi mutlak untuk dikembangkan. Untuk itu dari sisi daya tarik (*pull factor*) diperlukan upaya strategis dalam memperbanyak aktivitas dan atraksi yang menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke kabupaten Luwu.

Guna memenuhi kebutuhan pasar yang sudah ada (*existing market*) maka jenis wisata MICE merupakan alternatif kegiatan wisata yang perlu dikembangkan melalui penyediaan sarana ruang pertemuan, ruang rapat, serta kegiatan wisata minat khusus

kuliner dan outbound lainnya yang memungkinkan sehingga lama tinggal wisatawan dapat diperpanjang.

5.1.2. Restoran dan Cafe

Selain ketersediaan kamar yang bersih, aman dan nyaman bagi wisatawan, keberadaan usaha restoran, rumah makan dan café juga menjadi salah satu daya tarik yang mampu menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke kabupaten Luwu.

Keberadaan restoran, rumah makan dan café di kabupaten Luwu belum tertata dengan baik. Untuk restoran yang memenuhi standar kebutuhan wisatawan masih belum dijumpai, sebahagian besar hotel menyiapkan fasilitas restoran dan café dengan pilihan menu yang sangat terbatas. Restoran, rumah makan, cafe dan usaha penjualan makanan dan minuman lainnya yang tersedia sebahagian besar menawarkan sajian hidangan yang tidak spesifik menawarkan kuliner tradisional dalam racikan modern.

Sebahagian lainnya di daerah yang sering menjadi tempat singgah dan istirahat favorit bagi masyarakat yang berkunjung atau yang sekedar melintasi kabupaten Luwu hanya menyediakan tempat terbatas berupa warung sederhana yang menjual makanan berupa mie instan, nasi campur, makanan umum lainnya serta kopi, teh dan minuman ringan lainnya (*soft drink*).

Dukungan potensi sumberdaya alam yang melimpah akan hasil perikanan air tawar, peternakan, pertanian dan perkebunan sebagai kontributor utama dalam perekonomian kabupaten Luwu, sejatinya mampu membuat dan menumbuhkan minat investasi dalam penyediaan fasilitas restoran, rumah makan dan cafe.

Hal tersebut akan sangat berperan dalam mendorong kepuasan wisatawan serta memacu minat wisatawan berkunjung ke kabupaten Luwu mengingat ketersediaan restoran di kabupaten Luwu masih sangat terbatas. Keterbatasan tersebut bukan hanya dari segi kuantitas, namun dalam hal variasi produk kuliner yang dipasarkan, kebersihan, kenyamanan dan suasana restoran yang ada saat ini juga masih sangat terbatas. Selain itu, dari sisi distribusi lokasi restoran sebahagian besar berada pada kecamatan ibukota kabupaten. Untuk itu diperlukan upaya yang lebih terarah dalam mengangkat dan memperkenalkan kuliner tradisional melalui penyediaan fasilitas restoran yang baik, pelatihan tenaga kerja serta penyusunan ikon kuliner tradisional kabupaten Luwu.

Adapun data tentang restoran, rumah makan dan café di kabupaten Luwu tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.2
Jumlah Restoran, Rumah Makan, Cafe, dan Usaha Lainnya
Menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Tahun 2019-2020

No	Nama Hotel	Jumlah	
		2019	2020
1	Larompong	2	2
2	Larompong Selatan	3	3
3	Suli	3	3
4	Suli Barat	-	-
5	Belopa	30	3
6	Kamanre	22	22
7	Belopa Utara	2	2
8	Bajo	3	3
9	Bajo Barat	-	-
10	Bassesangtempe	-	-
11	Latimojong	-	-
12	Bastem Utara	-	-
13	Bupon	-	-

No	Nama Hotel	Jumlah	
		2019	2020
14	Ponrang	-	-
15	Ponrang Selatan	-	-
16	Bua	3	3
17	Walenrang	3	3
18	Walenrang Timur	-	-
19	Lamasi	3	3
20	Walenrang Utara	-	-
21	Walenrang Barat	4	4
22	Lamasi Timur	-	-
	Total	78	78

Sumber : BPS Kabupaten Luwu, 2021

5.1.3. Biro Perjalanan Wisata

Usaha Biro Perjalanan Wisata ataupun Agen Perjalanan Wisata merupakan jenis usaha pariwisata yang memegang peran penting dalam menarik dan meningkatkan angka kunjungan wisatawan ke kabupaten Luwu melalui pengemasan berbagai jenis paket wisata serta promosi dan pemasaran potensi daya tarik wisata kabupaten Luwu yang terarah, terencana dan berkelanjutan sehingga kabupaten Luwu akan lebih dikenal oleh wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun manca negara.

Saat ini, sejumlah Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata yang ada di kabupaten Luwu masih sangat terbatas dan berfokus dalam sewa kendaraan angkutan, penjualan tiket penerbangan dan paket wisata religi Umrah dan Haji.

5.1.4. Usaha Jasa MICE

Usaha Jasa MICE merupakan jenis usaha pariwisata yang mendukung aktivitas pariwisata dalam menarik dan meningkatkan angka kunjungan wisatawan minat khusus MICE ke kabupaten Luwu. Saat ini pertumbuhan kebutuhan wisatawan MICE terhadap pelayanan *Meeting, Incentive, Conference* dan *Exhibition* menunjukkan prospek yang cukup signifikan.

Pertumbuhan ekonomi dan industri kabupaten Luwu serta posisi dan peran kabupaten Luwu sangat memungkinkan dalam melaksanakan berbagai jenis kegiatan formal tingkat nasional, provinsi dan kabupaten seperti *event* olah raga, musyawarah nasional, festival budaya dan pameran lainnya.

Untuk dapat menangkap potensi pasar pada segmentasi MICE tersebut, dibutuhkan upaya terstruktur dalam bekerjasama dengan perusahaan event organizer (EO dan PCO) yang sudah ada, ataupun dengan mendorong masyarakat dalam membuka dan mengusahakan terbentuknya event organizer di kabupaten Luwu.

5.1.5. Usaha Kawasan Pariwisata dan Daya Tarik Wisata

Usaha kawasan pariwisata dan daya tarik wisata merupakan jenis usaha pariwisata yang sangat strategis dalam menarik dan meningkatkan angka kunjungan wisatawan ke kabupaten Luwu melalui penyediaan kawasan pariwisata yang menarik sehingga dapat menjadi atraksi dan aktivitas pariwisata yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dibandingkan dengan daya tarik pada destinasi lainnya.

Saat ini, terdapat beberapa buah kawasan pariwisata dan daya tarik wisata yang sudah dikelola dan dikembangkan oleh komunitas masyarakat, Dinas Pariwisata kabupaten Luwu bekerjasama dengan pemerintahan desa setempat. Kawasan pariwisata yang dibangun dan dikembangkan berbasis potensi daya tarik wilayah seperti kawasan wisata tematik, *rest area*, dan kolam permandian.

5.1.6. Usaha Salon dan Spa

Usaha Salon dan Spa merupakan jenis usaha pariwisata yang mendukung aktivitas pariwisata dalam menarik dan meningkatkan angka kunjungan wisatawan ke kabupaten Luwu. Saat ini pertumbuhan kebutuhan wisatawan terhadap pelayanan kecantikan dan kesehatan menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan.

Saat ini, sejumlah salon kecantikan yang ada di kabupaten Luwu masih berfokus dalam pelayanan penataan rambut dan perawatan kulit, kuku dan wajah.

5.1.7. Usaha Pariwisata Lainnya

Untuk usaha pariwisata lainnya sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, seperti usaha daya tarik wisata; jasa transportasi wisata; jasa informasi pariwisata; jasa konsultan pariwisata; dan jasa pramuwisata belum terdapat di kabupaten Luwu.

5.2. Usaha Kecil dan Menengah Pendukung Pariwisata

Keberadaan usaha kecil dan menengah pendukung pariwisata selain usaha penyediaan akomodasi dan usaha makan minum adalah usaha yang berbasis kreativitas yang dapat mendorong perkembangan pariwisata kabupaten Luwu, seperti usaha cinderamata (termasuk kuliner dan kerajinan), usaha pengolahan bahan lokal serta percetakan dan usaha kreatif berbasis digital.

Keberadaan usaha kecil dan menengah dalam mendukung pariwisata memberikan ruang kepada masyarakat untuk memperkenalkan bahan dan produk lokal dengan penanganan tradisional sehingga menarik untuk melibatkan wisatawan dalam pembuatan produknya serta memacu penjualan produk melalui pembelajaran wisatawan sebagai cinderamata, sekaligus sebagai bahan promosi yang menarik bagi kepariwisataan kabupaten Luwu.

BAB -6

PASAR DAN PEMASARAN PARIWISATA KABUPATEN LUWU

6.1. Kinerja Pariwisata Indonesia

Pariwisata merupakan sektor yang cukup penting bagi perekonomian. Untuk itu, diperlukan seperangkat “tools” untuk mengukur kinerja serta peran sektor pariwisata dalam mendorong perekonomian. *United Nations World Tourism Organization* (UNWTO) telah menyusun dan mengembangkan “tools” yang menjadi panduan di berbagai negara, yaitu *Tourism Satellite Accounts* (TSA).

Dahulu, dengan menggunakan kerangka metodologi yang berbeda, neraca seperti ini dikenal dengan istilah Neraca Satelit Pariwisata Nasional (Nesparnas). *Tourism Satellite Accounts* Indonesia (TSA Indonesia) hadir sebagai bentuk penyempurnaan dari publikasi tersebut. Ketersediaan TSA Indonesia sangat diperlukan dalam rangka membantu pemerintah, pelaku usaha dan akademisi serta masyarakat dalam menyusun kebijakan efektif, tepat sasaran, dan operasi bisnis yang efisien.

Tourism Satellite Accounts adalah sebuah kerangka kerja untuk menganalisis kebijakan yang terkait dengan pariwisata dan mengukur kontribusi pariwisata dalam perekonomian. Struktur TSA disusun berdasarkan hukum ekonomi yaitu keseimbangan antara belanja (*demand*) dan penyediaan (*supply*) barang dan jasa oleh sektor pariwisata. *Tourism Satellite Accounts* Indonesia menganalisis permintaan barang dan jasa terkait aktivitas wisatawan, kemudian mengobservasi konsistensi penawaran barang dan jasa tersebut di dalam perekonomian, dan mendeskripsikan bagaimana penawaran tersebut berinteraksi dengan aktivitas ekonomi lain.

Pada sisi penyediaan, pariwisata melibatkan hampir semua sektor ekonomi. Tidak hanya industri yang berkarakter pariwisata, seperti hotel dan restoran, sektor yang sepiintas tidak berkaitan langsung dengan industri pariwisata, dimana sebagian permintaannya berasal dari industri pariwisata (*tourism connected industry*), seperti usaha angkutan, juga dilibatkan. Sementara pada sisi permintaan, wisatawan yang dicakup tidak hanya wisatawan mancanegara, tetapi juga wisatawan domestik serta orang Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri (*wisatawan outbound*).

Tourism Satellite Accounts Indonesia menjelaskan hubungan nilai pengeluaran wisatawan tersebut dengan nilai penyediaan pariwisata oleh industri pariwisata. Penyusunan *Tourism Satellite Accounts* Indonesia mencakup proses konsultatif dan partisipatif yang melibatkan baik produsen/ penyedia maupun pengguna data di lingkup nasional dan regional. Selain data BPS yang dikumpulkan melalui sensus dan survei terhadap rumah tangga dan perusahaan, data *Tourism Satellite Accounts* Indonesia juga berasal dari data administrasi kementerian/ lembaga, dan *big data* (*mobile positioning data*).

Tourism Satellite Accounts Indonesia mencatat aktivitas pariwisata oleh wisatawan ke dalam tiga bentuk, yaitu:

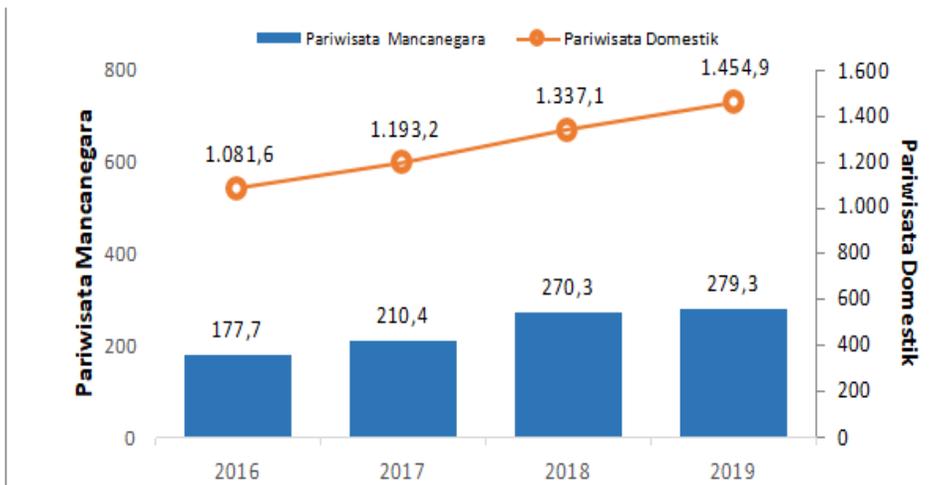
- a. Pariwisata internal (*internal tourism*), mencatat aktivitas pariwisata yang dilakukan, baik oleh wisatawan domestik (pariwisata domestik) maupun wisatawan mancanegara (pariwisata mancanegara).

- b. Pariwisata nasional (*national tourism*), mencatat aktivitas wisatawan di tempat tujuan pariwisata baik di dalam (pariwisata domestik) dan di luar negeri (pariwisata *outbound*).
- c. Pariwisata internasional (*international tourism*), mencatat aktivitas wisatawan di tempat tujuan pariwisata di luar negeri (pariwisata mancanegara plus pariwisata *outbound*).

Interaksi ketiga bentuk pariwisata tersebut memunculkan aktivitas pariwisata lainnya, yaitu:

- a. Pariwisata domestik (*domestic tourism*) yakni aktivitas pariwisata yang dilakukan wisatawan domestik.
- b. Pariwisata mancanegara (*inbound tourism*) yakni aktivitas pariwisata yang dilakukan wisatawan mancanegara.
- c. Pariwisata *outbound* (*outbound tourism*) yakni aktivitas pariwisata dilakukan wisatawan nasional yang melakukan perjalanan wisata ke luar negeri.

Gambar 6.1
Pengeluaran Pariwisata Mancanegara dan Pariwisata Domestik di Indonesia, 2016-2019 (Triliun Rupiah)

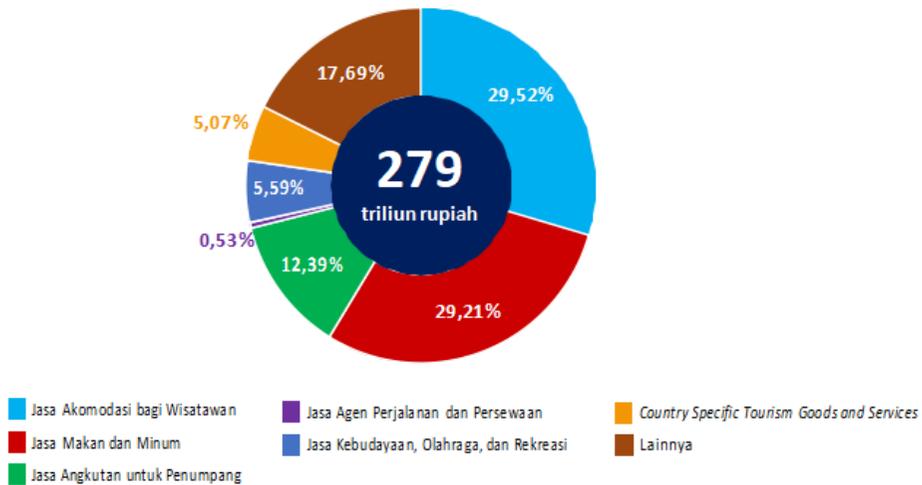


Sumber : Publikasi TSA Indonesia 2016-2019, 2021

Secara umum, total pengeluaran pariwisata mancanegara ke Indonesia cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, pengeluaran tersebut mencapai 177,7 triliun rupiah, dan terus meningkat dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2019 mencapai 279,3 triliun rupiah. Total pengeluaran pariwisata domestik di Indonesia juga mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga 2019. Pada tahun 2016, pengeluaran pariwisata domestik mencapai 1.081,6 triliun rupiah, dan terus meningkat dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2019 mencapai 1.454,9 triliun rupiah.

Sebagian besar pengeluaran wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia pada tahun 2019 ditujukan untuk produk Jasa Akomodasi bagi Wisatawan serta Jasa Makan dan Minum. Proporsi pengeluaran untuk kedua produk tersebut mencapai hampir 60 persen total pengeluaran selama kunjungan mereka di Indonesia.

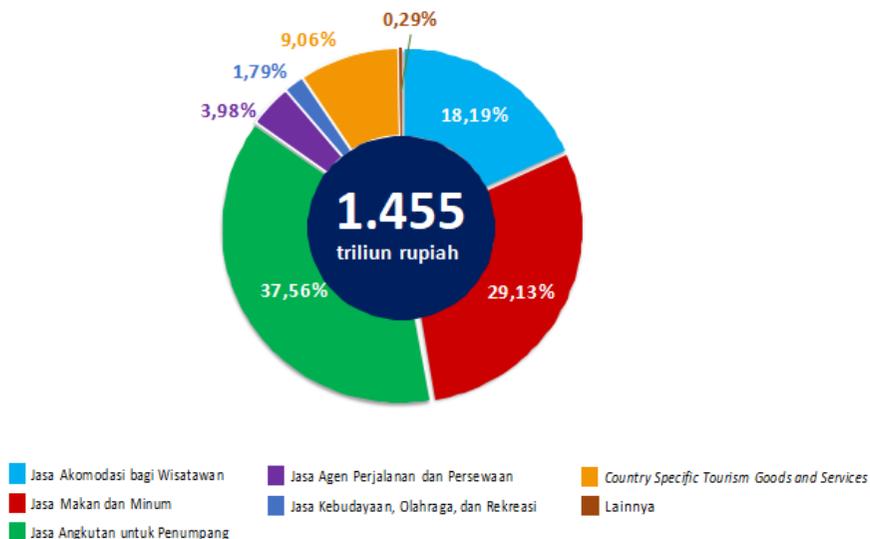
Gambar 6.2
Pengeluaran Pariwisata Mancanegara Menurut Produk Pariwisata
di Indonesia, 2019 (%)



Sumber : Publikasi TSA Indonesia 2016-2019, 2021

Sedangkan untuk pengeluaran pariwisata domestik didominasi produk Jasa Angkutan untuk Penumpang dan Jasa Makan dan Minum. Proporsi pengeluaran untuk kedua produk tersebut mencapai hampir 70 persen total pengeluaran selama kunjungan mereka di tempat tujuan wisata.

Gambar 6.3
Pengeluaran Pariwisata Nusantara Menurut Produk Pariwisata
di Indonesia, 2019 (%)

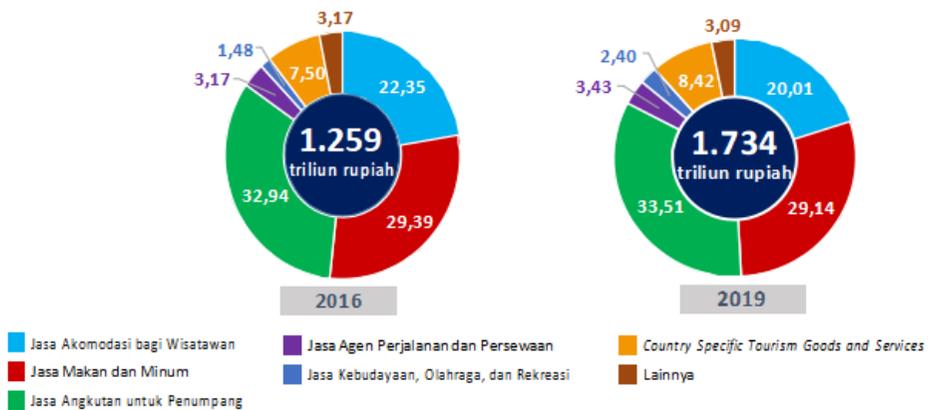


Sumber : Publikasi TSA Indonesia 2016-2019, 2021

Konsumsi pariwisata internal merupakan penjumlahan pengeluaran pariwisata mancanegara, pengeluaran pariwisata domestik, dan imputasi konsumsi lain wisatawan. Tahun 2019, konsumsi pariwisata internal Indonesia mencapai 1.734,2 triliun rupiah meningkat dibandingkan tahun 2016 sebesar 1.259,3 triliun rupiah.

Struktur konsumsi pariwisata internal Indonesia tidak berubah signifikan, yang didominasi oleh Jasa Angkutan untuk Penumpang; Jasa Makanan dan Minum; dan Jasa Akomodasi bagi Wisatawan. Kontribusi ketiga produk jasa tersebut sebesar 82,66 persen di tahun 2019. Jasa Angkutan untuk Penumpang; Jasa Kebudayaan, Olahraga, dan Rekreasi; dan *Country Specific Tourism Goods and Services* mengalami peningkatan kontribusi pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2016.

Gambar 6.4
Struktur Konsumsi Pariwisata Internal Indonesia, 2016-2019 (Triliun Rupiah)

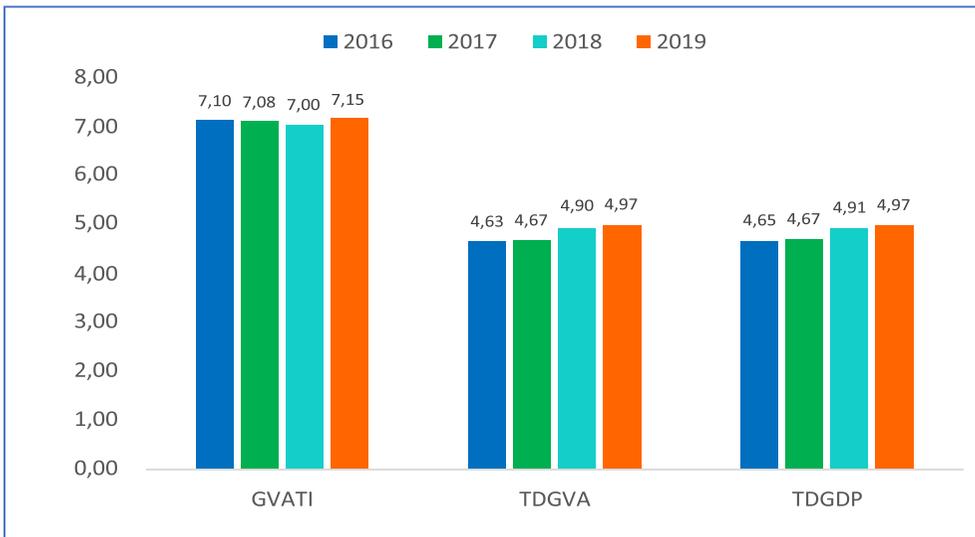


Sumber : Publikasi TSA Indonesia 2016-2019, 2021

Kontribusi pariwisata terhadap perekonomian dapat dilihat dari indikator Nilai Tambah Bruto Industri Pariwisata (Gross Value Added Tourism Industry/GVATI), TDGVA dan TDGDP. Angka GVATI menunjukkan kontribusi nilai tambah industri pariwisata terhadap seluruh Nilai Tambah Bruto (NTB) yang dihasilkan dalam suatu perekonomian, tanpa memperhatikan apakah nilai tambah industri pariwisata tersebut dikonsumsi atau digunakan langsung oleh wisatawan. Hal ini belum dapat menggambarkan kontribusi pariwisata terhadap perekonomian dari sisi supply disebabkan kurangnya kemampuan GVATI menghubungkan langsung dengan konsumsi pariwisata.

Nilai GVATI menunjukkan peningkatan pada tahun 2019, walaupun pada tahun 2016 hingga 2018 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2016, nilai GVATI menunjukkan nilai sebesar 7,10 persen. Sedangkan pada tahun 2019, angka GVATI menunjukkan nilai sebesar 7,15 persen.

Gambar 6.5
Perbandingan GVATI, TDGVA dan TDGDP, 2016-2019 (%)



Sumber : Publikasi TSA Indonesia 2016-2019, 2021

Apabila dilihat dari nilai TDGVA, dari tahun 2016 hingga 2019 menunjukkan peningkatan yaitu dari 4,63 persen pada tahun 2016 menjadi sebesar 4,97 persen pada tahun 2019. TDGVA merupakan agregat yang menjumlahkan NTB dari industri pariwisata serta industri-industri lain dari perekonomian yang secara langsung melayani wisatawan sebagai dampak dari konsumsi pariwisata internal.

Di sisi lain, TDGDP dapat mengukur bagian dari PDB yang terkait langsung dengan konsumsi pariwisata internal. Perbedaan ukuran ini dengan TDGVA adalah TDGDP yang mencakup pajak produk netto dan impor sedangkan pada TDGVA tidak mencakup pajak tersebut. Berdasarkan Gambar 8, TDGDP mengalami peningkatan dari 2016 dengan nilai TDGDP sebesar 4,65 persen meningkat menjadi 4,97 persen pada tahun 2019.

6.2. Perkembangan Wisatawan Kabupaten Luwu

Pemasaran pariwisata merupakan salah satu aspek terpenting dalam perencanaan kepariwisataan (*tourism planning and development*) karena merupakan ujung tombak dalam menentukan arus kunjungan wisatawan. Pemasaran pariwisata terdiri dari dua aspek pokok yaitu aspek produk sebagai *supply side* dan pasar sebagai *demand side*. Hal tersebut sangat penting dalam menjalankan fungsi pemasaran pariwisata karena akan memberikan kontribusi yang besar dalam perancangan kebijaksanaan pemasaran kabupaten Luwu.

Pemasaran pariwisata kabupaten Luwu sebagai destinasi pariwisata dilaksanakan melalui penetapan pasar sasaran dan strategi pengembangan pasar melalui penciptaan, pendistribusian, dan komunikasi pemasaran yang terencana, terstruktur dan terintegrasi. Orientasi pasar diterapkan secara konsisten dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap keselarasan antara sumber daya dengan preferensi dan *trend* pasar pariwisata kabupaten Luwu.

Untuk memenuhi kebutuhan pasar maka pariwisata kabupaten Luwu harus mampu disesuaikan dengan tipologi dan perilaku wisatawan secara menyeluruh agar dapat disesuaikan dengan sediaan produk yang ditawarkan. Melalui strategi

pemasaran yang baik, maka angka kunjungan wisatawan ke kabupaten Luwu akan terus meningkat dan menjadi motor penggerak perekonomian daerah.

Angka kunjungan wisatawan merupakan salah satu indikator utama dari keberhasilan pembangunan kepariwisataan suatu daerah. Pertumbuhan minat kunjungan wisatawan tersebut akan memberikan pengaruh terhadap penyiapan komponen kepariwisataan lainnya seperti aksesibilitas, akomodasi, atraksi dan aktivitas wisata, serta amenitas kepariwisataan sebagai upaya untuk memberikan pelayanan yang baik agar kepuasan wisatawan dapat terpenuhi dan menjadikan daya saing kepariwisataan daerah semakin meningkat.

6.2.1. Wisatawan Nusantara

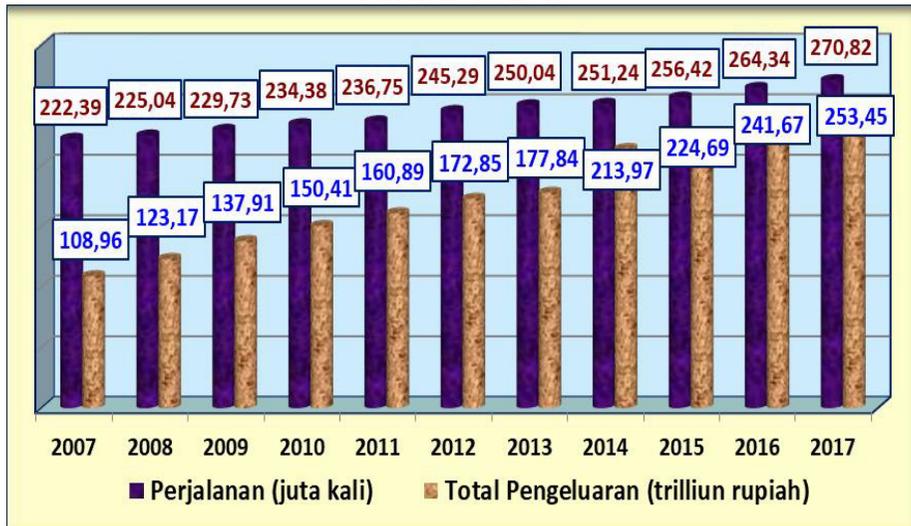
Wisatawan nusantara merupakan potensi pasar yang terus disasar dan didorong oleh pemerintah dalam meningkatkan kepariwisataan nasional dengan target sebesar 120-140 Juta pergerakan di tahun 2020 meningkat menjadi 330-355 Juta pergerakan di tahun 2024. Dampak pandemi covid-19 yang melanda seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia menyebabkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia kemudian melakukan penyesuaian terhadap target tersebut menjadi 180 juta pergerakan wisatawan nusantara sebagai akibat berbagai pembatasan dalam melaksanakan protokol kesehatan selama masa pandemi.

Wisatawan Nusantara (*wisnus*)/ *domestic tourists* adalah seseorang yang melakukan perjalanan di wilayah teritori suatu negara, dalam hal ini Indonesia, dengan lama perjalanan kurang dari 6 bulan dan bukan bertujuan untuk memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi serta bukan merupakan perjalanan rutin (sekolah atau bekerja), dengan mengunjungi objek wisata komersial, dan atau menginap di akomodasi komersial, dan atau jarak perjalanan lebih besar atau sama dengan 100 (seratus) kilometer pergi-pulang.

Data Kementerian Pariwisata menunjukkan bahwa pada tahun 2017 jumlah perjalanan wisatawan nusantara mencapai sebanyak 270,82 juta perjalanan yang berarti mengalami peningkatan sebesar 2,45 persen dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 264,34 juta perjalanan. Sedangkan rata-rata pertumbuhan jumlah perjalanan setiap tahun selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir mencapai sekitar 2,61 persen. Peningkatan ini diduga sebagai akibat kondisi perekonomian yang semakin membaik, keamanan yang cukup kondusif serta semakin mudahnya aksesibilitas ke daerah-daerah tujuan wisata. Disamping itu, adanya kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat juga ikut berperan dalam mendorong kemajuan sektor pariwisata. Maraknya penggunaan media sosial sangat membantu dalam rangka menyebarkan informasi mengenai destinasi wisata tertentu.

Total pengeluaran selama tahun 2017 mencapai sebesar 253,45 triliun rupiah. Hal ini berarti terjadi peningkatan sebesar 4,87 persen dibandingkan tahun 2016 yang mencapai sebesar 241,67 triliun rupiah. Sementara untuk rata-rata pertumbuhan jumlah pengeluaran tiap tahun cukup tinggi hingga mencapai sekitar 10,24 persen.

Gambar 6.6
Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara (Wisnus) dan Total Pengeluaran,
Tahun 2010-2017



Sumber : Publikasi Kajian Data Pasar Wisnus, 2017

Penduduk Indonesia yang melakukan perjalanan secara garis besar dapat dibedakan menurut daerah asal dan daerah tujuan. Daerah asal adalah daerah tempat tinggal dari orang yang melakukan perjalanan, sedangkan yang dimaksud daerah tujuan adalah daerah-daerah yang dikunjungi selama melakukan perjalanan. Karakteristik penduduk yang melakukan perjalanan menurut daerah asal maupun daerah tujuan yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, status perkawinan, jenis kegiatan utama, pekerjaan utama, maksud kunjungan, akomodasi yang digunakan, moda angkutan, aktivitas wisata yang dilakukan, rata-rata lama bepergian dan rata-rata pengeluaran per kunjungan.

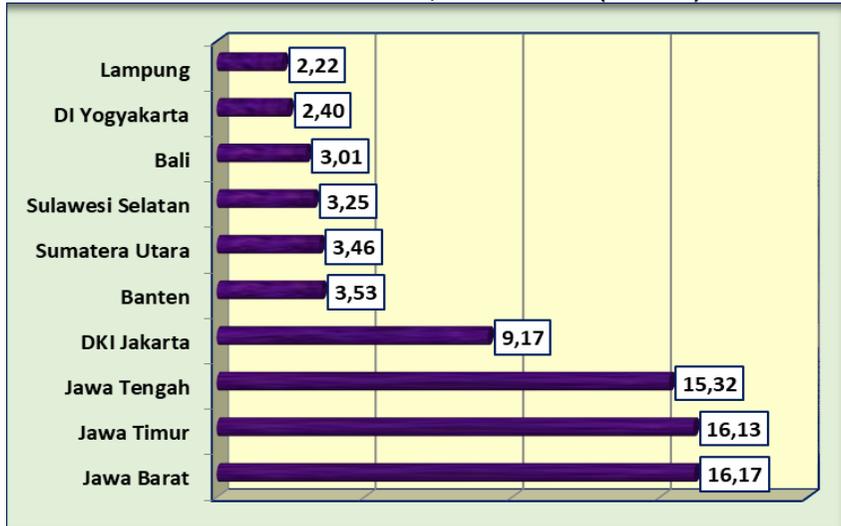
6.2.1.1. Daerah Asal Wisatawan Nusantara

Daerah asal wisatawan nusantara merupakan tempat domisili dari wisnus tersebut. Sebagian besar perjalanan wisatawan nusantara selama tahun 2017 dilakukan oleh penduduk yang berdomisili di wilayah Pulau Jawa, yaitu mencapai 62,71 persen dari seluruh perjalanan wisatawan nusantara di Indonesia.

Perjalanan yang paling banyak dilakukan oleh penduduk yang berdomisili di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah yaitu sekitar 16,17 persen, 16,13 persen serta 15,32 persen dari seluruh perjalanan wisata di Indonesia. Sementara itu, penduduk yang berdomisili di luar Pulau Jawa yang paling banyak melakukan perjalanan adalah penduduk yang berdomisili di Provinsi Sumatera Utara.

Jumlah perjalanan wisatawan nusantara yang dilakukan oleh penduduk Sumatera Utara selama tahun 2017 hingga mencapai sekitar 3,46 persen dari seluruh perjalanan wisata di Indonesia. Selanjutnya adalah perjalanan yang dilakukan oleh penduduk yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan, Bali, dan Lampung yang masing-masing mencapai sekitar 3,25 persen; 3,01 persen; dan 2,22 persen

Gambar 6.7
Distribusi Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara
Menurut Provinsi Asal, Tahun 2017 (Persen)

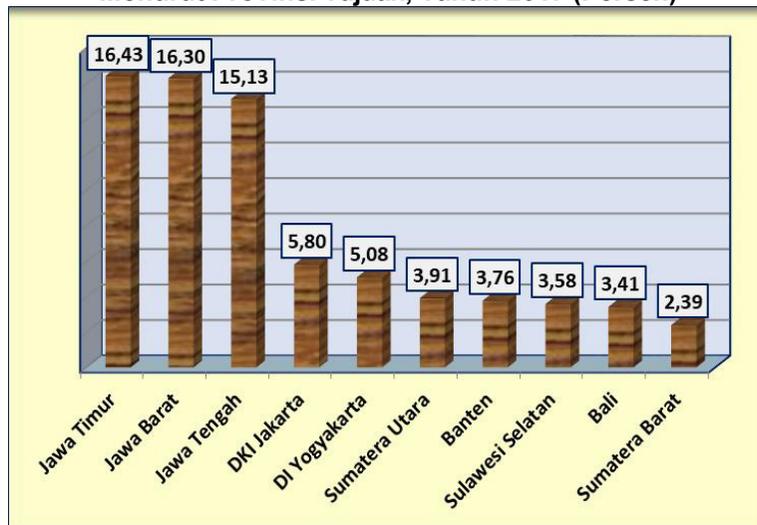


Sumber : Publikasi Kajian Data Pasar Wisnus, 2017

6.2.1.2. Daerah Tujuan Wisatawan Nusantara

Daerah tujuan wisatawan nusantara merupakan tempat tujuan dari perjalanan yang dilakukan oleh wisatawan nusantara tersebut atau sering disebut dengan destinasi wisata. Pilihan daerah tujuan wisata ini akan sangat menentukan kecenderungan kabupaten/ kota dalam wilayah provinsi untuk mendapatkan kunjungan wisatawan nusantara.

Gambar 6.8
Distribusi Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara
Menurut Provinsi Tujuan, Tahun 2017 (Persen)



Sumber : Publikasi Kajian Data Pasar Wisnus, 2017

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa jumlah perjalanan penduduk Indonesia yang bertujuan ke Provinsi Jawa Timur merupakan yang tertinggi hingga

mencapai sekitar 10,37 persen dari seluruh perjalanan wisata di Indonesia. Kemudian diikuti oleh wisatawan nusantara yang bertujuan mengunjungi wilayah-wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Barat, yang masing-masing sekitar 8,77 persen dan 6,75 persen. Kondisi tersebut hampir sama dengan pola yang terjadi menurut daerah asal, dimana Pulau Jawa sangat mendominasi. Sekitar 34,33 persen dari keseluruhan perjalanan yang dilakukan oleh wisatawan nusantara, bertujuan di wilayah-wilayah Pulau Jawa.

Provinsi di luar Pulau Jawa yang menjadi tujuan favorit wisatawan nusantara adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mencapai sekitar 6,64 persen dari seluruh perjalanan yang dilakukan oleh wisnus di Indonesia. Kemudian disusul oleh wisatawan dengan tujuan wilayah-wilayah di Provinsi Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali dan Sumatera Barat yang masing-masing sekitar 3,91 persen; 3,58 persen; 3,41 persen; dan 2,39 persen.

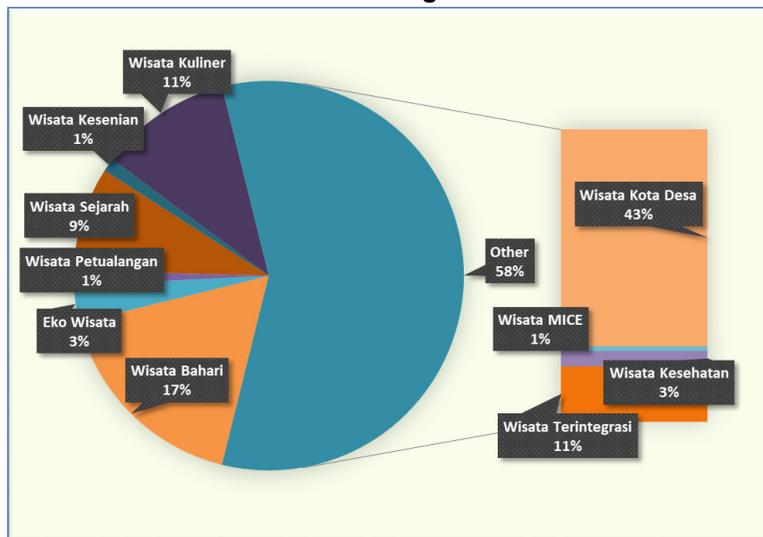
6.2.1.3. Aktivitas Wisata

Aktivitas wisata merupakan jenis-jenis aktivitas yang dilakukan oleh wisatawan nusantara selama melakukan perjalanan wisata. Kegiatan/aktivitas pariwisata dikelompokkan menjadi 10 jenis aktivitas, yaitu: wisata bahari, eko wisata, wisata petualangan, wisata sejarah/religi, wisata kesenian, wisata kuliner, wisata kota & pedesaan, wisata MICE, wisata olahraga/kesehatan, dan wisata terintegrasi.

Aktivitas yang paling banyak dilakukan oleh wisatawan nusantara adalah jenis wisata kota dan pedesaan seperti wisata belanja, mengunjungi teman atau kerabat, menikmati hiburan malam, tinggal di desa tradisional/*homestay*, mengunjungi pasar tradisional, wisata darmabakti, *philantropis* (dermawan), program tanggung jawab sosial perusahaan, fotografi & *architectural visit*, dan *live-in program*. Aktivitas ini mencapai sekitar 42,76 persen dari seluruh aktivitas yang dilakukan selama melakukan perjalanan wisata. Aktivitas selanjutnya adalah wisata bahari yang mencapai sekitar 17,28 persen kemudian diikuti oleh wisata terintegrasi/terpadu dan wisata kuliner yang masing masing sekitar 11 persen. Sedangkan yang paling sedikit dilakukan oleh wisatawan nusantar adalah wisata MICE yang masih sekitar 0,92 persen.

Gambar 6.9

Distribusi Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Menurut Aktivitas Wisata Yang Dilakukan Tahun 2017



Sumber : Publikasi Kajian Data Pasar Wisnus, 2017

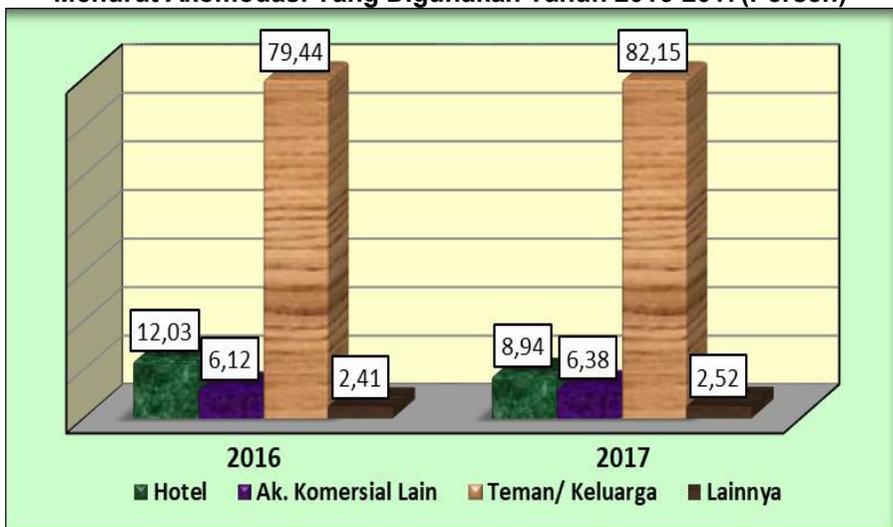
6.2.1.4. Akomodasi Yang Digunakan

Wisatawan nusantara yang berkunjung ke wilayah-wilayah di Indonesia, berdasarkan data yang tersedia menunjukkan pola yang hampir sama dalam hal penggunaan akomodasi, dimana sebagian besar menginap di akomodasi. Pada tahun 2017, wisnus yang menggunakan akomodasi mencapai sekitar 53,65 persen sedangkan pada tahun 2016 proporsinya mencapai sebesar 56,48 persen.

Akomodasi yang digunakan oleh wisnus untuk menginap sebagian besar adalah rumah teman atau keluarga. Hal ini diduga karena sebagian besar mereka bermaksud untuk mengunjungi teman atau keluarga. Berdasarkan hasil Kajian Data Pasar Wisatawan Nusantara tahun 2017 menunjukan bahwa proporsi wisnus yang menginap di rumah teman atau keluarga mencapai sekitar 82,15 persen dari jumlah wisnus yang menginap di akomodasi, dimana proporsinya cenderung lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai sebesar 79,44 persen.

Sedangkan wisnus yang menginap di akomodasi komersial hanya sekitar 15,33 persen saja, dimana 8,94 persen menginap di hotel, baik hotel bintang maupun nonbintang, dan 6,38 persen wisnus menginap di akomodasi komersial lainnya. Proporsi wisnus yang menginap di akomodasi komersial, baik di hotel maupun di akomodasi komersial lainnya mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu yang mencapai sekitar 18,15 persen dari jumlah wisnus yang menggunakan akomodasi.

Gambar 6.10
Distribusi Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara
Menurut Akomodasi Yang Digunakan Tahun 2016-2017(Persen)

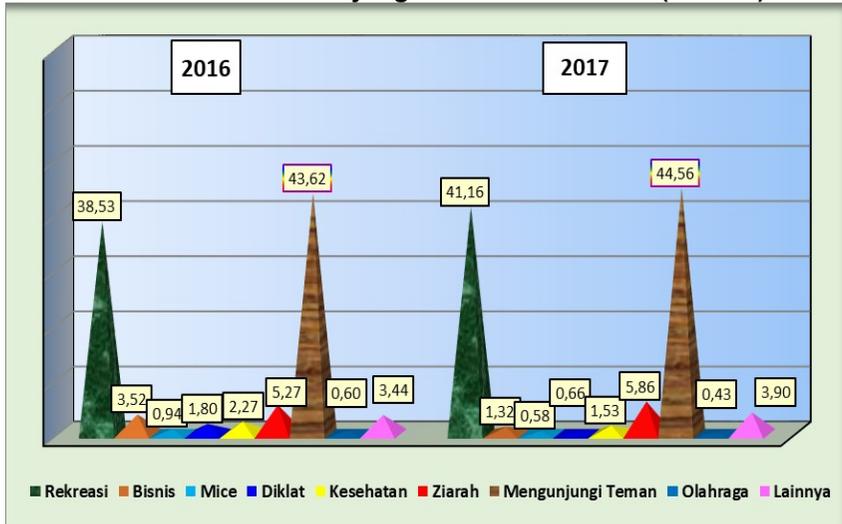


Sumber : Publikasi Kajian Data Pasar Wisnus, 2017

6.2.1.5. Maksud Kunjungan

Maksud atau tujuan dari wisatawan nusantara dalam melakukan bepergian/ perjalanan atau kunjungan sangat beragam. Pada tahun 2017, sebagian besar wisnus melakukan perjalanan dengan tujuan untuk mengunjungi teman/ keluarga/ mudik. Proporsi wisatawan nusantara yang mengunjungi teman/ keluarga/ mudik mencapai sekitar 44,56 persen. Kelompok ini terbagi atas 32,67 persen wisnus yang bertujuan utama untuk mengunjungi teman/keluarga dan 11,89 persen wisnus yang tujuan utamanya adalah untuk mudik/ pulang kampung pada hari raya. Selanjutnya adalah wisnus yang bertujuan untuk berlibur atau rekreasi yang mencapai sekitar 41,16 persen dari seluruh perjalanan wisatawan nusantara di Indonesia.

Gambar 6.11
Distribusi Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara
Menurut Maksud Kunjungan Tahun 2016-2017(Persen)



Sumber : Publikasi Kajian Data Pasar Wisnus, 2017

Proporsi wisnus yang melakukan perjalanan dengan tujuan utama berlibur/ rekreasi ini menunjukkan peningkatan dibanding 2016 yang hanya mencapai sekitar 38,53 persen. Selain itu, terdapat wisnus dengan tujuan utama untuk berziarah/ keagamaan (5,86 persen), kesehatan/berobat (1,53 persen), profesi/ bisnis (1,32 persen), sedangkan sisanya terbagi dengan tujuan utama pertemuan/ kongres/ seminar, training/ pelatihan, olahraga/ kesenian, dan lainnya

6.2.1.6. Rata-Rata Lama Bepergian

Rata-rata lama bepergian penduduk Indonesia yang melakukan perjalanan wisata selama dua tahun terakhir tidak mengalami banyak perubahan meskipun cenderung mengalami penurunan. Selama dua tahun terakhir, baik tahun 2017 maupun 2016, rata-rata lama bepergian wisatawan nusantara adalah 3,85 hari dan 3,87, atau sedikit menurun dibandingkan tahun 2016.

Wisatawan yang berasal dari Provinsi Papua Barat, Papua, Maluku, dan Maluku Utara cenderung bepergian dalam jangka waktu yang lebih lama dibandingkan wisnus dari provinsi-provinsi lain di Indonesia. Rata-rata lama bepergian dari ke empat provinsi ini berkisar antara 7,63 hingga 14,07 hari. Sedangkan wisatawan yang berasal dari Pulau Jawa, rata-rata lama bepergiannya hanya sekitar 2 hingga 5 hari. Apabila dilihat dari provinsi yang menjadi tujuan utama, wisatawan yang melakukan perjalanan ke Provinsi Papua Barat, dan Maluku juga cenderung lebih lama waktu bepergiannya. Rata-rata lama bepergian wisatawan nusantara yang berkunjung ke provinsi tersebut mencapai sekitar 7 hingga 12 hari, sedangkan penduduk Indonesia yang melakukan perjalanan dengan tujuan ke wilayah-wilayah di Pulau Jawa hanya sekitar 2 hingga 6 hari.

Gambar 6.12
Rata-Rata Lama Bepergian Wisatawan Nusantara
Tahun 2016-2017 (Hari)



Sumber : Publikasi Kajian Data Pasar Wisnus, 2017

6.2.1.7. Rata-Rata Pengeluaran

Rata-rata pengeluaran setiap perjalanan yang dilakukan wisatawan nusantara dalam melakukan kunjungan ke berbagai wilayah-wilayah di Indonesia selama tahun 2017 mencapai sebesar 935,84 ribu rupiah. Sementara itu, rata-rata pengeluaran pada tahun 2016 hanya sekitar 914,3 ribu rupiah. Hal ini berarti terjadi kenaikan sebesar 2,36 persen dibandingkan tahun 2016.

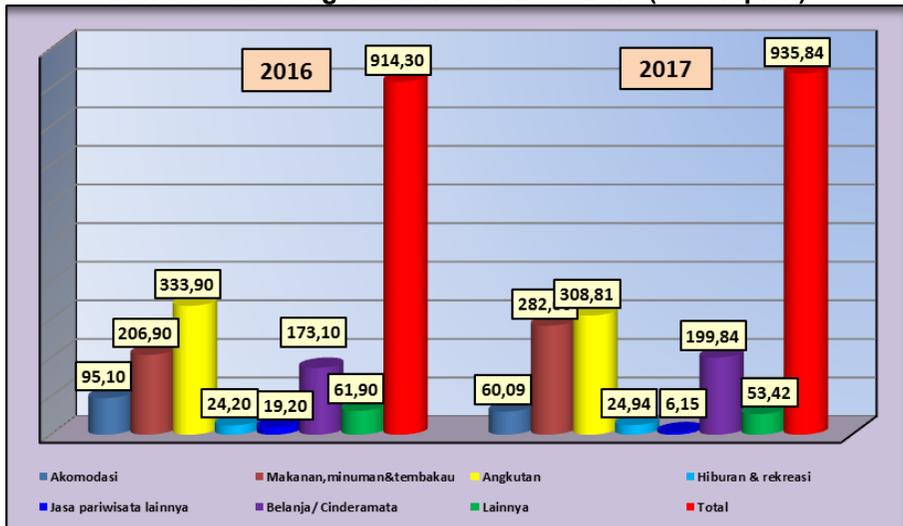
Pada tahun 2017, rata-rata pengeluaran yang terbesar adalah wisatawan yang berasal dari provinsi-provinsi di Indonesia bagian timur. Rata-rata pengeluaran wisatawan asal Provinsi Papua Barat dan Papua mencapai lebih dari 5 juta rupiah setiap kunjungan. Di sisi lain, wisatawan yang berasal dari provinsi-provinsi di Pulau Jawa, rata-rata pengeluarannya hanya sekitar 400 ribu rupiah hingga 1 juta rupiah.

Komposisi pengeluaran yang dilakukan wisatawan nusantara baik pada tahun 2016 maupun tahun 2017, memperlihatkan bahwa sebagian besar belanja yang dikeluarkan digunakan untuk membiayai angkutan (sebesar 36,5 persen pada 2016 dan 33,00 persen pada 2017). Rata-rata pengeluaran per kunjungan untuk angkutan mencapai sebesar 308,81 ribu rupiah atau terjadi penurunan sekitar 7,51 persen dibanding tahun 2016 yang mencapai 333,90 ribu rupiah.

Sementara itu, pengeluaran wisnus untuk membeli makanan, minuman, dan tembakau dalam melakukan perjalanan mencapai sekitar 30,20 persen dari total pengeluaran atau rata-rata sebesar 282,60 ribu rupiah. Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan sebesar 36,59 persen dibanding tahun 2016 yang hanya mencapai 206,90 ribu rupiah.

Rata-rata biaya yang dikeluarkan wisnus untuk berbelanja dan pembelian cinderamata adalah sekitar 199,84 ribu rupiah, atau sekitar 21,35 persen dari rata-rata pengeluaran total wisnus. Pengeluaran untuk berbelanja dan pembelian cinderamata mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 173,10 ribu rupiah. Rata-rata pengeluaran untuk akomodasi menyumbang proporsi sekitar 6,42 persen atau kira-kira sekitar 60,09 ribu rupiah.

Gambar 6.13
Rata-Rata Pengeluaran Per Perjalanan Wisatawan Nusantara
Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2016-2017 (000 Rupiah)



Sumber : Publikasi Kajian Data Pasar Wisnus, 2017

Berdasarkan informasi dari Kajian Data Pasar Wisatawan Nusantara 2017, membuktikan bahwa aktivitas pariwisata sudah mulai berkembang. Kondisi tersebut diharapkan dapat menjadikan aktivitas pariwisata menjadi salah satu alternatif dari kegiatan ekonomi yang potensial dalam membangun suatu wilayah. Dengan memberikan dukungan atas terselenggarakannya kegiatan pariwisata dengan baik, maka kegiatan tersebut diharapkan dapat mengarah menjadi aktivitas ekonomi yang handal dan mampu mendorong sektor-sektor ekonomi lain terkait.

Aktivitas pariwisata dapat berdampak pada peningkatan lapangan usaha, pendapatan masyarakat dan produksi nasional. Dukungan tersebut dapat berupa penyediaan infrastruktur yang cukup memadai, jaminan keamanan dan keselamatan baik jiwa maupun harta benda, dan juga memberikan informasi yang cukup memadai kepada wisatawan

6.2.2. Wisatawan Mancanegara

Pertumbuhan minat kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia bertumbuh sangat signifikan seiring dengan semakin gencarnya kegiatan promosi dan bertumbuhnya daya tarik wisata baru di seluruh wilayah nusantara termasuk kabupaten Luwu. Sejak tahun 2020 pada saat seluruh negara di dunia dilanda pandemi covid-19 yang berdampak terhadap angka kunjungan wisatawan mancanegara hingga pada akhir tahun 2021 ke angka 0 kunjungan wisatawan mancanegara, menyebabkan target nasional terhadap angka kunjungan wisatawan ikut terkoreksi hingga kondisi dampak pandemi dapat diatasi secara global dan wisatawan mancanegara dapat bergerak kembali.

Letak geografis kabupaten Luwu yang cukup strategis dalam pertimbangan wisatawan memutuskan pola perjalanan wisata yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat internasional dalam koridor wisata Toraja-Bulukumba-Selayar sebagai ikon utama daya Tarik pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan menjadikan kabupaten Luwu sebagai destinasi wajib dikunjungi oleh wisatawan.

Keayaan dan keindahan alam yang sangat eksotis, keragaman budaya, keunikan tinggalan sejarah dan peradaban masyarakat masa lalu serta keramah-tamahan penduduk kabupaten Luwu menjadi daya tarik yang sangat kuat bagi

wisatawan mancanegara. Hal tersebut juga ditunjang oleh kemudahan aksesibilitas dengan keragaman moda transportasi yang tersedia serta perkembangan sarana prasarana pendukung kepariwisataan lainnya yang semakin membaik menjadikan posisi kabupaten Luwu sebagai destinasi pariwisata nasional semakin kompetitif.

Berbeda halnya dengan kunjungan wisatawan nusantara, pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke kabupaten Luwu menunjukkan angka yang sangat kurang. Hal ini tentu saja menjadi tugas prioritas dalam menata, mengembangkan, mengemas serta mempromosikan potensi pariwisata kabupaten Luwu pada pasar pariwisata internasional.

6.3. Karakteristik Pasar Wisatawan Kabupaten Luwu

Karakteristik atau tipologi wisatawan merupakan hal yang perlu dianalisis oleh sebuah destinasi untuk mengetahui lebih mendalam tentang kesesuaian produk pariwisata yang tersedia dan dimiliki oleh kabupaten Luwu dengan preferensi minat kunjungan wisatawan sehingga dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan promosi dan pemasaran pariwisata, akan dijadikan dasar dalam pengembangannya.

Secara umum, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara yang berkunjung ke kabupaten Luwu adalah wisatawan yang terdistribusi dari pintu masuk utama ke kota atau provinsi lain yang melanjutkan kegiatan wisatanya di kota Makassar dan melintasi kabupaten Luwu sehingga dalam identifikasi karakteristik pasar harus melihat perkembangan pada wilayah tersebut.

Pertumbuhan sektor industri, khususnya industri pertambangan di kabupaten Luwu diharapkan dapat mendorong arus angka kunjungan wisatawan ke kabupaten Luwu, termasuk posisi geografis yang sangat menguntungkan karena kabupaten Luwu merupakan koridor utama pergerakan wisatawan melalui jalur darat untuk berkunjung ke daya tarik utama pariwisata Sulawesi Selatan pada jalur selatan menuju kabupaten Bulukumba dan kabupaten kepulauan Selayar.

6.3.1. Karakteristik Wisatawan Nusantara

Wisatawan nusantara yang berkunjung ke kabupaten Luwu sebahagian besar adalah wisatawan bisnis dan tujuan urusan dinas, baik yang bersifat individu maupun kelompok berupa komunitas dan profesi yang berasal dari dalam provinsi Sulawesi Selatan.

Untuk wisatawan nusantara, wisatawan asal pulau Jawa termasuk Jakarta merupakan pasar wisatawan yang bertumbuh sangat signifikan sehingga diperlukan strategi promosi dan pemasaran yang lebih baik. Selain itu, perlu penambahan dan perbaikan sarana transportasi darat dan laut dari berbagai jalur pelayaran baik komersil penumpang umum maupun kapal pesiar pribadi.

Dalam menganalisis tipologi wisatawan yang berkunjung ke kabupaten Luwu, akibat dampak pandemi covid-19, maka baseline acuan yang digunakan dalam kajian ini adalah baseline kunjungan wisatawan tahun 2019.

Berdasarkan distribusi kelompok umur, wisatawan yang berkunjung ke kabupaten Luwu di dominasi oleh wisatawan pada kelompok usia 26 sampai dengan 50 tahun sebesar 72,14%, disusul oleh wisatawan kelompok usia 17 sampai dengan 25 tahun sebesar 23,06%, dan yang terkecil adalah wisatawan pada kelompok usia kurang dari 17 tahun sebesar 4,80%.

Berdasarkan data tersebut, wisatawan yang berkunjung ke kabupaten Luwu merupakan wisatawan pada pada kelompok umur yang sangat produktif, matang (*mature*), selektif dan aktif. Kelompok wisatawan pada rentang usia 17 sampai dengan 50 tahun merupakan kelompok yang sangat produktif dan aktif sehingga menjadi pangsa pasar yang sangat baik dan potensial untuk berkembang.

Untuk dapat mengetahui kualitas wisatawan yang berkunjung ke kabupaten Luwu, maka penelusuran data dan informasi terhadap pekerjaan/ profesi wisatawan

menjadi bagian penting dalam menganalisis kecenderungan pilihan destinasi yang diminati wisatawan, serta menjadi referensi dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas destinasi dan atraksi wisata kabupaten Luwu.

Berdasarkan pekerjaan dan profesi, wisatawan yang berkunjung ke kabupaten Luwu sebahagian besar adalah pegawai negeri sipil dan BUMN yaitu sebesar 70 %, disusul oleh kelompok pegawai swasta sebesar 18 %, kelompok profesional sebesar 8 % dan yang terkecil adalah kelompok mahasiswa/ pelajar yaitu hanya sebesar 4 %.

Dengan pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil, BUMN, swasta dan profesional, maka dapat diyakini bahwa kemampuan daya beli terhadap produk wisata sangat kompetitif. Untuk itu kemasan paket wisata dengan daya tarik dan atraksi yang menantang, unik dan memberikan kenangan merupakan peluang yang perlu diantisipasi.

Motivasi dan tujuan kunjungan ke kabupaten Luwu oleh wisatawan menunjukkan bahwa wisatawan sebahagian besar datang dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas dan rapat, yaitu sebesar 63%. Selanjutnya adalah wisatawan yang bermaksud untuk bisnis dan perdagangan sebesar 14%, wisatawan dengan aktivitas menghadiri event, seminar serta penelitian sebesar 13%, wisatawan dengan tujuan liburan sebesar 6%, dan motivasi yang paling kecil adalah mengunjungi teman, kerabat, keluarga yaitu sebesar 4%.

Jumlah kunjungan wisatawan ke kabupaten Luwu berdasarkan jumlah kunjungan menunjukkan bahwa sebanyak 32% wisatawan merupakan kunjungan pertama ke kabupaten Luwu, dan sisanya sebanyak 68% telah berkunjung ke kabupaten Luwu sebanyak 2 sampai dengan 5 kali. Dalam hal jumlah wisatawan per kunjungan, sebanyak 21% wisatawan melakukan kunjungan secara sendiri-sendiri, dan sisanya sebanyak 79% melakukan kunjungan bersama keluarga atau teman dengan jumlah 2 sampai dengan 3 orang.

Besaran pendapatan dari wisatawan yang berkunjung ke kabupaten Luwu menunjukkan bahwa sebahagian besar wisatawan (87%) merupakan kelompok masyarakat sejahtera dengan pendapatan antara 5,1 sampai dengan 10 juta rupiah per bulan dan hanya sebahagian kecil wisatawan yang berpenghasilan kurang dari 2 juta rupiah per bulan.

Data dan informasi ini menunjukkan bahwa diperlukan upaya strategis dalam hal pengembangan kualitas serta diversifikasi produk dan destinasi serta atraksi wisata sehingga dapat memacu minat wisatawan dalam melakukan kunjungan ulang (*repeater*) dengan membawa keluarga, rekan maupun kerabat untuk menjadikan kabupaten Luwu sebagai destinasi wisata.

Berdasarkan sumber informasi yang diperoleh wisatawan tentang kabupaten Luwu, sebahagian besar wisatawan (68%) memperoleh informasi melalui penelusuran terhadap media *on-line* termasuk media sosial, disusul oleh wisatawan yang memperoleh informasi dari teman/ keluarga 14 %, dan informasi dari media lain seperti koran, majalah, buletin dan jurnal sebanyak 18%, dan tidak ada wisatawan yang memperoleh informasi tentang kabupaten Luwu melalui biro perjalanan wisata.

Berdasarkan data tersebut, maka diperlukan upaya yang lebih intensif dalam membangun relasi dengan kantor atau perusahaan serta biro perjalanan wisata sehingga pelaksanaan kegiatannya dapat dilaksanakan di kabupaten Luwu. Selain itu, pemanfaatan media sebagai saluran distribusi (*distribution channel*) dalam mempromosikan dan memasarkan pariwisata kabupaten Luwu perlu lebih dioptimalkan.

Sumber biaya yang dikeluarkan oleh wisatawan selama melakukan kunjungan ke kabupaten Luwu menunjukkan bahwa sebanyak 32% melakukan perjalanan dengan biaya sendiri, 65% wisatawan melakukan perjalanan atas biaya kantor/ perusahaan, dan sisanya sebanyak 3% dibiayai oleh rekan, keluarga maupun kerabatnya.

Rata-rata lama kunjungan wisatawan di kabupaten Luwu adalah 1 hari. Sebahagian besar wisatawan (89%) belum menjadikan kabupaten Luwu sebagai destinasi utama. Sebanyak 64% dari wisatawan yang menjadikan kabupaten Luwu sebagai tujuan utama wisata minat khusus budaya dan sejarah, alam, dan menghadiri event tertentu yang tinggal selama 2 sampai dengan 3 hari. Lama tinggal yang terbesar yaitu 3 sampai dengan 4 hari hanya sebanyak 16,21% yaitu kelompok wisatawan dengan tujuan melakukan kegiatan bisnis dan kegiatan dinas atau kegiatan perusahaan/ profesi lainnya di kabupaten Luwu.

Jenis akomodasi yang digunakan wisatawan selama melakukan kunjungan di kabupaten Luwu menunjukkan pilihan yang bervariasi. Sebahagian besar wisatawan (63%) dikategorikan visitor karena waktu kunjungan di kabupaten Luwu kurang dari 24 jam dan terdapat 37% responden lebih menyukai menginap di hotel.

Besarnya pengeluaran wisatawan per hari selama melakukan kunjungan ke kabupaten Luwu sangat bervariasi dengan rata-rata sebesar Rp. 500.000. Distribusi pengeluaran terbesar untuk wisatawan adalah akomodasi, kemudian makan minum, transportasi, serta cinderamata.

Jika kecenderungan minat wisatawan dalam beraktivitas atau menikmati daya tarik destinasi pada saat melakukan kunjungan di tempat lain dikorelasikan dengan motivasi dan rencana aktivitas mereka pada saat melakukan kunjungan ke kabupaten Luwu menunjukkan hubungan yang signifikan.

Selain aktivitas wisata yang dilakukan wisatawan, jenis atraksi wisata yang paling diminati oleh wisatawan nusantara adalah Taman Wisata Alam Lejja dan aktivitas pada malam hari di kawasan Taman Kalong.

Pilihan wisatawan terhadap kuliner dan minuman yang paling diminati selama melakukan kunjungan ke kabupaten Luwu menunjukkan bahwa sebahagian besar wisatawan tidak mengapresiasi kuliner yang ditawarkan karena lebih banyak disebabkan oleh terbatasnya restoran dan rumah makan yang layak (representatif) dan menjual makanan dan minuman tradisional serta terbatasnya kreativitas masyarakat dan pengusaha restoran dalam mengembangkan produk kuliner.

Tanggapan wisatawan terhadap ketersediaan makanan dan minuman tradisional menunjukkan terbatasnya pilihan terhadap tempat penjualan produk kuliner. Restoran, rumah makan dan warung yang menyediakan kuliner tradisional lainnya kurang layak dari sisi kenyamanan dan kebersihan.

6.3.2. Karakteristik Wisatawan Mancanegara

Untuk wisatawan mancanegara, kecenderungan minat terhadap atraksi dan aktivitas wisata yang tertinggi adalah aktivitas wisata alam seperti panorama pegunungan dan pantai. Selain itu, keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di kabupaten Jeneponto serta pengembangan smelter pada industri pertambangan di kabupaten Luwu yang banyak mempekerjakan konsultan dan tenaga kerja asing menyebabkan meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara, walaupun sebagian dari mereka diberikan fasilitas pemondokan di dalam area perusahaan ataupun lebih senang untuk berkunjung ke kota Makassar.

Mengingat keberadaan kabupaten Luwu belum menjadi destinasi utama kunjungan wisatawan mancanegara sehingga karakteristik wisatawan mancanegara yang berkunjung ke kabupaten Luwu digeneralisasi berdasarkan karakteristik wisatawan mancanegara yang berkunjung ke kota Makassar. Berdasarkan analisis profil wisatawan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan tentang profil umum dan kecenderungan wisatawan ke kabupaten Luwu berdasar kelompok dan karakter tertentu, sebagai berikut :

a. Wisatawan Malaysia :

Adapun karakteristik wisatawan asal Malaysia yang berkunjung ke kota Makassar adalah sebagai berikut :

- 1) Berusia produktif antara 35 sampai dengan 42 tahun, dan sebahagian besar merupakan profesional dan pegawai.
- 2) Motif kunjungan adalah MICE, bisnis, kunjungan keluarga dan wisata religi.
- 3) Aktivitas utama yang diminati adalah pertemuan, kuliner, ziarah, wisata alam, spa, hiburan malam, dan belanja.
- 4) Sebahagian besar merencanakan dan melakukan perjalanan sendiri secara sendiri-sendiri, dan melalui biro perjalanan wisata secara berkelompok.
- 5) Menjadikan kota Makassar sebagai destinasi utama, khususnya dalam pelaksanaan *meeting* dan bisnis
- 6) Rata-rata lama tinggal di kota Makassar adalah 4 malam.
- 7) Pengeluaran rata-rata di kota Makassar sebesar US\$. 95 atau US\$. 375 per kunjungan (tidak termasuk biaya transportasi kedatangan dan keberangkatan).

b. Wisatawan Singapura

Adapun karakteristik wisatawan asal Malaysia yang berkunjung ke kota Makassar adalah sebagai berikut :

- 1) Berusia produktif antara 35 sampai dengan 45 tahun, dan sebahagian besar merupakan profesional dan pegawai.
- 2) Motif kunjungan adalah MICE, bisnis, dan belanja.
- 3) Aktivitas utama yang diminati adalah pertemuan, kuliner, golf, spa, hiburan malam, dan belanja.
- 4) Sebahagian besar merencanakan dan melakukan perjalanan sendiri secara sendiri-sendiri.
- 5) Menjadikan kota Makassar sebagai destinasi utama, khususnya dalam pelaksanaan *meeting* dan bisnis
- 6) Rata-rata lama tinggal di kota Makassar adalah 3 malam.
- 7) Pengeluaran rata-rata di kota Makassar sebesar US\$.115 atau US\$. 350 per kunjungan (tidak termasuk biaya transportasi kedatangan dan keberangkatan).

c. Wisatawan Jerman

Adapun karakteristik wisatawan asal Jerman yang berkunjung ke kota Makassar adalah sebagai berikut :

- 1) Berusia cukup produktif antara 35 sampai dengan 50 tahun, dan sebahagian besar merupakan profesional.
- 2) Motif kunjungan adalah berlibur.
- 3) Aktivitas utama yang diminati adalah atraksi budaya, pantai dan pulau, kuliner, dan belanja
- 4) Sangat peka terhadap kualitas akomodasi, keramahan, pelayanan, dan keunikan lokal
- 5) Sebahagian besar merencanakan dan melakukan perjalanan sendiri secara berkelompok melalui biro perjalanan wisata secara berkelompok dan sendiri-sendiri.
- 6) Belum menjadikan kota Makassar sebagai destinasi utama, keberadaan di kota Makassar hanya transit sebelum atau setelah melakukan perjalanan ke Tana Toraja, atau Bulukumba.
- 7) Rata-rata lama tinggal di kota Makassar adalah 2 malam.
- 8) Pengeluaran rata-rata di kota Makassar sebesar US\$. 68 atau US\$. 130 per kunjungan (tidak termasuk biaya transportasi kedatangan dan keberangkatan).

d. Wisatawan Tiongkok

Adapun karakteristik wisatawan asal China yang berkunjung ke kota Makassar adalah sebagai berikut :

- 1) Berusia cukup produktif antara 30 sampai dengan 55 tahun, dan sebahagian besar merupakan profesional, militer dan pegawai.
- 2) Aktivitas utama yang diminati adalah kuliner, wisata alam, spa, hiburan malam, dan belanja.
- 3) Motif kunjungan adalah liburan, bisnis, kuliner dan belanja.
- 4) Sebahagian besar merencanakan dan melakukan perjalanan sendiri secara berkelompok melalui biro perjalanan wisata.
- 5) Membutuhkan *guide* khusus berbahasa mandarin.
- 6) Rata-rata lama tinggal di kota Makassar adalah 3 malam.
- 7) Pengeluaran rata-rata di kota Makassar sebesar US\$. 123 atau US\$. 500 per kunjungan (tidak termasuk biaya transportasi kedatangan dan keberangkatan).

6.4. Pemasaran Pariwisata Kabupaten Luwu

Program dan kegiatan pemasaran kabupaten Luwu yang belum optimal menyebabkan belum terjadinya pemasaran terintegrasi secara optimal dalam konteks keseluruhan wilayah provinsi Sulawesi Selatan. Sebagai sebuah wilayah yang akan dikembangkan sebagai destinasi unggulan regional Sulawesi Selatan, destinasi pariwisata nasional dengan skala internasional, diperlukan strategi pemasaran pariwisata yang lebih terencana, terarah dan berkelanjutan.

Kegiatan promosi dan pemasaran pariwisata kabupaten Luwu yang perlu menjadi perhatian utama dalam pengembangan pariwisata kabupaten Luwu adalah sebagai berikut:

- a. Pembuatan brosur, *flyer* dan buku informasi kepariwisataan yang belum secara optimal memberikan informasi komprehensif terhadap kepariwisataan kabupaten Luwu.
- b. Pengembangan *web-site* kepariwisataan yang secara umum belum mampu mengetengahkan informasi yang komprehensif terkait dengan kepariwisataan kabupaten Luwu.
- c. Pengembangan event-event budaya sebagai bentuk promosi pariwisata yang belum secara signifikan mampu menarik kunjungan wisatawan ke kabupaten Luwu.
- d. Peran serta masyarakat dalam mempromosikan potensi pariwisata kabupaten Luwu belum optimal.
- e. *Calendar of Event* pariwisata kabupaten Luwu belum tersusun secara komprehensif untuk dijadikan acuan oleh wisatawan dalam merencanakan perjalanannya.
- f. Identifikasi kesesuaian produk dan pasar terlaksana dengan baik.
- g. Keterbatasan pusat informasi kepariwisataan serta rendahnya kualitas bahan informasi pariwisata kabupaten Luwu.

Sebagai sebuah destinasi pariwisata yang sedang berkembang dan belum dikenal oleh pasar wisatawan, peningkatan *awareness* merupakan langkah utama yang harus dikembangkan dalam pemasaran kepariwisataan sehingga dapat meningkatkan motivasi wisatawan terhadap kekayaan sumber daya dan potensi daya tarik wisata di kabupaten Luwu sehingga diharapkan akan berimplikasi terhadap jumlah kunjungan wisatawan.

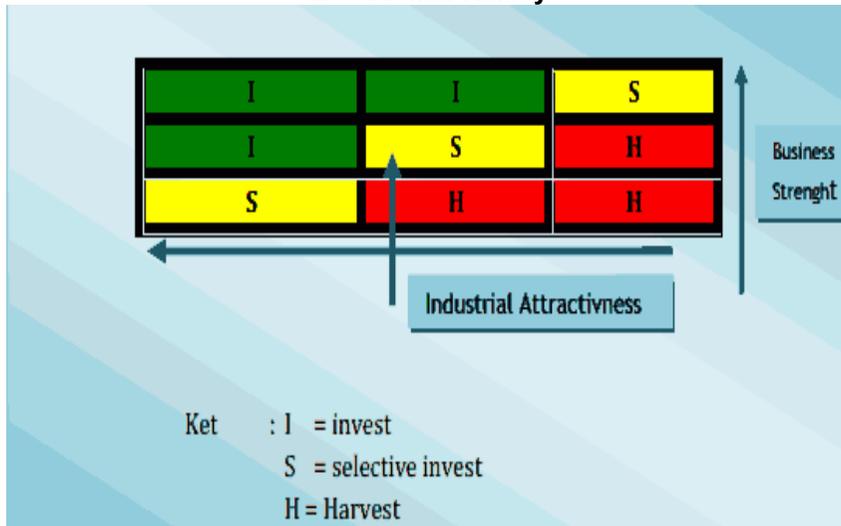
Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pemasaran pariwisata kabupaten Luwu sebagai destinasi di Provinsi Sulawesi Selatan adalah pembentukan citra destinasi (*destination image*). Citra Destinasi menggambarkan keseluruhan ekosistem pariwisata meliputi citra kognitif dan citra afektif yang merupakan bagian dari identitas destinasi melalui pembentukan produk wisata yang unik dan membedakannya dari destinasi lainnya dan membentuk persepsi wisatawan.

Kualitas informasi dapat mempengaruhi efektivitas pemasaran kepada target

pasar, mengingat fungsinya sebagai alat pemasaran maupun sebagai alat untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dan interaktif. Sejalan dengan perkembangan peradaban yang didominasi oleh kontribusi teknologi informasi, maka pemanfaatan media *on-line* (digitalisasi) menjadi sangat dominan dalam pemasaran pariwisata. Ekspektasi pasar terhadap ketersediaan dan kualitas informasi kawasan melalui media *on-line* berdampak pada keharusan pemerintah, pengusaha dan masyarakat kabupaten Luwu untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi digital dalam pemasaran pariwisata.

Analisis kekuatan bisnis pariwisata kabupaten Luwu melalui dengan daya tarik potensi pariwisata dapat dianalisis melalui matriks Mc Kinsey berikut ini:

Gambar 6.14
Matriks Mc. Kinsey



Sumber : Mc. Kinsey Analysis

Posisi kepariwisataan kabupaten Luwu saat ini berada pada kolom I (*invest*) yaitu kegiatan pengembangan pariwisata kabupaten Luwu harus ditata dan dibangun dengan investasi dalam upaya perbaikan-perbaikan di berbagai aspek. Manifestasi dari strategi dasar tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

- 1) Penciptaan dan pemeliharaan sumber-sumber kompetitif yang terdapat pada aspek nilai beda/daya tarik dan komitmen stakeholders.
- 2) Penciptaan kebijakan dan iklim Investasi di bidang pariwisata yang mampu menarik minat investor.
- 3) Perencanaan pengembangan pariwisata yang berimbang antara manfaat (*benefit*) dan korbanan (*cost*) yang dihasilkan.
- 4) Perluasan akses masyarakat lokal dalam investasi pariwisata

Berdasarkan strategi dasar tersebut, maka untuk menyelaraskan antara strategi pengembangan produk dan pasar dalam pengembangan pariwisata, terdapat beberapa langkah stratejik yang dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Penetrasi Pasar (*Market Penetration*), yang ditujukan untuk mendayagunakan atau mengoptimumkan kapasitas produk dan pasar yang ada. Saat ini, kabupaten Luwu hanya dikenal sebagai dengan wisata bahari, tirta dan agro dengan daya tarik utama adalah pantai seruni, pantai marina, air terjun bissappu dan Eremerasa, serta puncak Loka. Sementara potensi yang dimiliki sangat besar dalam potensi wisata sejarah dan budaya serta potensi kawasan dataran tinggi dengan panorama yang sangat variatif. Maka langkah penetrasi pasar yang dilakukan

adalah dengan menggiatkan kegiatan pariwisata pada pasar existing, namun lebih mengetengahkan wisata sejarah dan budaya

- b. Pengembangan Produk (*Product Development*), yang ditujukan untuk mengembangkan produk-produk baru bagi pasar yang ada saat ini. Misalnya, dengan mengembangkan kegiatan wisata *leisure and experience*, berupa pembangunan geowisata, *eco heritage*, maupun *eco-friendly tourism* atau kegiatan wisata lain termasuk mengangkat potensi desa wisata dan alam lain yang potensial di kabupaten Luwu.
- c. Pengembangan Pasar (*Market Development*), yang ditujukan untuk mengembangkan pasar wisatawan baru agar berkunjung dan menikmati produk wisata yang telah berkembang saat ini maupun yang akan dikembangkan. Pasar tersebut dapat berasal dari pasar wisata nusantara maupun pasar wisata mancanegara dengan melakukan promosi pada daerah-daerah yang secara geografis merupakan pintu masuk aksesibilitas wisatawan ke kabupaten Luwu.
- d. Diversifikasi Produk (*Product Diversification*), yang ditujukan untuk menciptakan produk dan pasar yang baru bagi pariwisata kabupaten Luwu. Strategi ini utamanya ditujukan bagi pasar Internasional maupun *niche market* (eco, sejarah dan budaya, MICE).

Berdasarkan kajian pada masing-masing aspek pemasaran tersebut, perlu diterapkan beberapa prinsip-prinsip pengembangan pemasaran kepariwisataan sebagai berikut:

a. Memahami Profil Pasar Sasaran

Pengamatan terhadap pasar dibutuhkan untuk dapat mengembangkan produk-produk pariwisata yang menarik dan mampu mengakomodasi keinginan dan kebutuhan pasar wisatawan. Utamanya untuk menciptakan produk dan pelayanan pariwisata yang dapat menciptakan kepuasan wisatawan. Selain itu, pemahaman terhadap profil pasar sasaran dapat mengarahkan desain produk wisata agar pengalaman wisatawan dalam berwisata menjadi semakin berkesan sehingga sektor pariwisata semakin maju dan unggul. Pemahaman terhadap profil pasar sasaran juga akan semakin meningkatkan harmonisasi produk pariwisata dengan kegiatan pemasaran pariwisata.

b. Peningkatan Kualitas Produk Wisata

Kualitas pariwisata ditentukan oleh keberadaan produk wisata yang bersifat nyata (*tangible*) dan pelayanan (*intangible*) yang secara keseluruhan bertumpu pada kualitas sumberdaya manusia yang mengelola dan yang memberikan pelayanan terhadap wisatawan. Oleh sebab itu, kualitas pariwisata yang unggul dapat dipicu melalui peningkatan dan pengembangan kualitas sumberdaya manusia dan penerapan standar usaha pariwisata.

c. Pengembangan Inovasi

Inovasi berupa pengembangan dan pemanfaatan kreatifitas yang menghasilkan nilai tambah dan daya saing merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Inovasi dimulai dari pengembangan ide dan gagasan kreatif untuk menghasilkan identitas (*branding*) sebagai ciri pembeda kepariwisataan kabupaten Luwu. Hal tersebut diperoleh dari proses belajar yang terus menerus dari segenap *stakeholders* yang terlibat didalam pengembangan kepariwisataan. Oleh sebab itu, pengembangan pariwisata harus dapat memfasilitasi proses belajar, bertumbuh, dan berkembang bagi seluruh *stakeholders* yang terkait.

d. Penguatan Posisi Stratejik

Kabupaten Luwu memiliki keunggulan bersaing dengan destinasi lain di Indonesia. Oleh sebab itu kabupaten Luwu harus mampu mengidentifikasi faktor keunggulan sekaligus mengeliminir kekurangan serta memantapkan posisinya untuk dapat bersaing dengan destinasi lain dengan memanfaatkan peluang pasar yang semakin terbuka.

Penjelasan dari prinsip-prinsip tersebut terdapat pada Gambar berikut ini:

Gambar 6.15
Prinsip dan Langkah Strategik Pengembangan
Daya Saing Pariwisata



Sumber : Adaptasi Poon (1993)

KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN LUWU

Perubahan paradigma sistem pemerintahan pada era otonomi daerah memberikan peluang dan ruang kepada pemerintah kabupaten Luwu untuk merencanakan dan mengelola pembangunan kepariwisataan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan kepariwisataan nasional dan provinsi Sulawesi Selatan.

Tuntutan terhadap partisipasi aktif dari seluruh komponen yang dikenal dengan peristilahan *pentahelix* pembangunan pariwisata yang terdiri dari unsur akademisi, pengusaha, masyarakat, pemerintah dan media (ABCGM) dalam proses pembangunan kepariwisataan kabupaten Luwu, mulai dari dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sehingga pengembangan potensi lokal yang bersumber dari alam, sosial budaya ataupun ekonomi masyarakat dari diangkat sebagai bagian dari potensi pariwisata yang dikembangkan.

Pelibatan komponen kelembagaan kepariwisataan dalam pembangunan pariwisata dalam mewujudkan peningkatan daya saing kepariwisataan kabupaten Luwu sampai saat ini belum terlaksana secara optimal. Hal ini disebabkan oleh banyak hal yang secara akumulatif menyebabkan masing-masing pihak masih berjalan secara sendiri-sendiri.

7.1 Unsur Akademisi (*Academician*)

Unsur akademisi merupakan komponen yang memegang peran penting dalam perencanaan, implementasi dan evaluasi program pengembangan pariwisata kabupaten Luwu. Pihak perguruan tinggi memiliki tugas pokok dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan, penelitian serta pengabdian pada masyarakat di bidang pariwisata seharusnya secara terpadu dan berkelanjutan melaksanakan sinergi program khususnya dalam membantu unsur lainnya (pemerintah, masyarakat, pengusaha) dalam menyampaikan hasil-hasil kajian ilmiah yang relevan dengan kebutuhan pembangunan kabupaten Luwu.

Selain hal tersebut, unsur akademisi juga bertanggungjawab dalam membuat program dan jenjang pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha sehingga dapat mendorong ketersediaan sumber daya manusia yang profesional dan kompeten pada tingkat pelaksana dan manajerial dan pada akhirnya akan meningkatkan kualitas dan daya saing industri dan destinasi pariwisata kabupaten Luwu.

Kajian-kajian ilmiah serta program pendidikan dan pelatihan terhadap masyarakat, pengusaha dan pemerintah yang dilakukan oleh unsur akademisi, selanjutnya dikomunikasi kepada unsur media sehingga penyebaran informasi kepada masyarakat termasuk wisatawan tentang ketersediaan sumberdaya dan daya tarik wisata kabupaten Luwu dapat dikenal oleh masyarakat luas.

Saat ini di kabupaten Luwu telah berdiri beberapa perguruan tinggi antara lain Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Datu Kamanre Luwu, Sekolah Tinggi Teologi Yesyurun Arastamar Luwu, dan Akademi Keperawatan (AKPER) Sawerigading. Dari keseluruhan perguruan tinggi tersebut, belum ada yang membuka jurusan atau program studi kepariwisataan.

Untuk jenjang pendidikan pada tingkat pendidikan menengah, saat ini di kabupaten Luwu telah terdapat 24 buah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) namun hanya 2 buah Sekolah Menengah Kejuruan yang menyelenggarakan pendidikan bidang Pariwisata sebagai wadah pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia pariwisata di kabupaten Luwu, yaitu SMK Negeri 5 Luwu dengan program studi yang diselenggarakan berfokus pada bidang usaha perjalanan wisata, dan SMK Negeri 11 Luwu dengan program studi yang diselenggarakan berfokus pada bidang perhotelan.

Selain potensi unsur akademisi yang berada di kabupaten Luwu, pemerintah daerah kabupaten Luwu juga menjalin kerjasama kelembagaan dengan berbagai perguruan tinggi untuk mendukung berbagai program pembangunan kepariwisataan kabupaten Luwu seperti pendidikan dan pelatihan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, sertifikasi usaha serta sertifikasi kompetensi tenaga kerja pariwisata.

7.2 Unsur Birokrasi (Government)

Unsur birokrasi merupakan komponen yang sangat dominan dan menentukan arah pembangunan kepariwisataan. Melalui pengkajian dan penyusunan kebijakan yang efektif, maka arah pelaksanaan pengembangan pariwisata akan terwujud secara efektif dan efisien serta menjadi acuan bagi seluruh komponen kepariwisataan yang ada (*stakeholders*) dalam merencanakan dalam melaksanakan kegiatan menurut tugas dan tanggungjawab para pihak.

Peran birokrasi dalam pembangunan kepariwisataan di kabupaten Luwu belum berjalan secara optimal dan masih bertumpu pada Dinas Pariwisata Kabupaten Luwu, sementara dalam pembangunan kepariwisataan yang baik harus melibatkan seluruh komponen birokrasi menurut kewenangan yang dimiliki oleh masing masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kabupaten Luwu, termasuk hubungan dengan pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat dalam pelaksanaan kewenangan pengembangan kepariwisataan.

Beberapa komponen pariwisata yang harus dilakukan melalui koordinasi dan sinergi program antara lain sebagai berikut :

- a. Aksesibilitas pariwisata, dibutuhkan koordinasi dalam hal perluasan kapasitas dan fasilitas pelabuhan, pengembangan frekuensi dan pembukaan jalur pelayaran, peningkatan dan pengembangan kualitas jalan dan jembatan, pengembangan kualitas akses dari dan ke destinasi dan atraksi wisata, pengembangan moda transportasi, dan sebagainya.
- b. Atraksi wisata, dibutuhkan koordinasi dalam hal perencanaan dan pengembangan destinasi dan daya tarik wisata, penataan lingkungan pariwisata, pengembangan dan pelestarian nilai dan tinggalkan sejarah budaya, dan sebagainya
- c. Aktivitas wisata, dibutuhkan koordinasi dalam hal penyediaan dan pembangunan sarana dan prasaran penunjang kegiatan wisata, pelibatan masyarakat dalam pengelolaan dan investasi, dan sebagainya.
- d. Akomodasi, koordinasi dibutuhkan dalam hal kebijakan investasi usaha akomodasi, pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia, pelaksanaan sertifikasi kompetensi tenaga kerja dan sertifikasi usaha, penyediaan lahan (*land clearing*) untuk usaha akomodasi, dan sebagainya.
- e. Amenitas, dibutuhkan koordinasi dan sinkronisasi program dalam penyediaan listrik, air bersih, sarana telekomunikasi, fasilitas perbankan, toilet umum, dermaga, fasilitas kesehatan, dan sebagainya.

Mengingat pentingnya koordinasi dan sinkronisasi program antar lembaga pemerintahan dalam pembangunan pariwisata kabupaten Luwu, diperlukan sebuah bentuk Badan Koordinasi Pembangunan Kepariwisata sebagai pelengkap dari Badan Promosi dan Pengembangan Pariwisata kabupaten Luwu yang belum terbentuk. Melalui keberadaan kedua badan tersebut diharapkan akan lebih memudahkan dalam

koordinasi dan sinergitas program antar satuan kerja perangkat daerah dengan masyarakat, pengusaha dan komponen kepariwisataan lainnya.

7.3 Unsur Masyarakat (*Community*)

Unsur masyarakat merupakan obyek sekaligus subyek pembangunan kepariwisataan daerah karena pengembangan kepariwisataan disesuaikan dengan ketersediaan potensi yang berasal dari budaya masyarakat, dikembangkan berdasarkan kebutuhan masyarakat, serta dampaknya harus memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat sehingga arah pembangunan kepariwisataan kabupaten Luwu didesain berbasis masyarakat (*community based tourism development*)

Pengembangan wisata alam dan wisata budaya dalam perspektif kemandirian lokal merupakan perwujudan interkoneksi dalam tatanan masyarakat yang dilakukan secara mandiri oleh tatanan itu sendiri guna meningkatkan kualitas dengan tetap memelihara kelestarian alam dan nilai-nilai budaya lokal, serta obyek wisata alam dan wisata budaya yang ada. Selama ini pengembangan pariwisata kabupaten Luwu ditujukan untuk mengembangkan potensi lokal yang bersumber dari alam, sosial budaya ataupun ekonomi guna memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, saat ini perencanaan pengembangan pariwisata menggunakan *community approach* atau *community based development*. Dalam hal ini masyarakat lokal yang akan membangun, memiliki dan mengelola langsung fasilitas wisata serta pelayanannya, sehingga dengan demikian masyarakat diharapkan dapat menerima secara langsung keuntungan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraannya dan pada akhirnya akan mengurangi urbanisasi.

Pengembangan pariwisata yang berorientasi pada masyarakat lokal masih minim karena masyarakat tidak memiliki kemampuan secara finansial dan keahlian yang berkualitas untuk mengelola potensi pariwisata daerah atau terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata yang berbasiskan alam dan budaya. Sehingga perlunya partisipasi aktif masyarakat untuk menjadi tuan rumah yang baik, menyediakan sesuatu yang terbaik sesuai kemampuan, ikut menjaga keamanan, ketentraman, keindahan dan kebersihan lingkungan, memberikan kenangan dan kesan yang baik bagi wisatawan dalam rangka mendukung program sapta pesona, serta menanamkan kesadaran masyarakat dalam rangka pengembangan desa wisata.

Pemerintah kabupaten Luwu melalui Dinas Pariwisata telah membentuk berbagai kelompok sadar wisata serta komunitas pendukung kepariwisataan lainnya di kabupaten Luwu sebagai perwujudan penyiapan masyarakat dalam mengelola dan mengambil bagian secara aktif dalam pembangunan kepariwisataan. Dukungan pemerintah daerah tersebut berupa pembentukan wadah organisasi, pelatihan dan pemberdayaan, fasilitasi akses dan modal usaha, serta fasilitasi pemasaran produk dalam menunjang pembangunan kepariwisataan kabupaten Luwu.

Beberapa hal yang masih harus didorong adalah pembentukan komunitas usaha industri kreatif berbasis potensi daerah seperti kuliner khas kabupaten Luwu, kerajinan dan cinderamata, pengemasan produk kuliner, pembentukan usaha kuliner, pelestarian nilai budaya melalui pembentukan sanggar seni budaya, serta peran serta masyarakat dalam mengelola dan mempromosikan potensi dan daya tarik destinasi wisata di kabupaten Luwu.

Selain pembentukan komunitas masyarakat pariwisata tersebut, juga diperlukan untuk membentuk asosiasi profesi pariwisata sesuai jenis profesi yang sudah ada di kabupaten Luwu seperti *Indonesia Hotel General Manager Association* (IHGMA), *Hotel Frontliner Association* (HAFLA), *Indonesia Housekeeping Association* (IHKA), Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI), *Indonesia Food & Beverage Association* (IFBEC), *Indonesia Chef Association* (ICA), Generasi Pesona Indonesia (GENPI) dan

lain sebagainya. Keberadaan asosiasi profesi pariwisata tersebut akan sangat membantu mendorong dan mempercepat peningkatan kualitas sumberdaya manusia sesuai dengan bidang profesi masing-masing. Selain itu, asosiasi profesi juga akan membantu meningkatkan kualitas usaha/ industri pariwisata dan mengenalkan potensi pariwisata daerah secara nasional.

7.4 Unsur Pengusaha (*Business*)

Unsur pengusaha merupakan salah satu komponen yang menentukan perkembangan kepariwisataan kabupaten Luwu. Keberadaan unsur pengusaha menentukan minat kunjungan wisatawan melalui penyediaan berbagai usaha akomodasi dan aktivitas wisata lainnya yang bisa dinikmati oleh wisatawan pada saat melakukan kunjungan wisata di kabupaten Luwu.

Pariwisata memiliki mekanisme pengaturan yang kompleks karena mencakup pengaturan pergerakan wisatawan dari negara asalnya, di daerah tujuan wisata hingga kembali ke negara asalnya yang melibatkan berbagai hal seperti; transportasi, penginapan, restoran, pemandu wisata, dan lain-lain. Oleh karena itu, pengusaha industri pariwisata memegang peranan yang sangat penting dalam pengembangan pariwisata.

Dalam menjalankan perannya, pengusaha pariwisata harus menerapkan konsep dan peraturan serta panduan yang berlaku dalam pengembangan pariwisata agar mampu mempertahankan dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang nantinya bermuara pada pemberian manfaat ekonomi bagi industri pariwisata dan masyarakat lokal. Industri pariwisata yang sangat berperan dalam pengembangan pariwisata adalah: biro perjalanan wisata, hotel dan restoran. Selain itu juga didukung oleh industri pendukung serta asosiasi industri pariwisata lainnya.

Jenis dan jumlah usaha pariwisata yang ada di kabupaten Luwu sampai saat ini masih dikelola secara konvensional sehingga berdampak pada daya saing destinasi yang masih rendah. Untuk itu perlu memacu minat investasi pengusaha pariwisata dalam mengembangkan usaha akomodasi berupa pembangunan hotel dan resort berbintang, restoran, ruang pertemuan (MICE), rekreasi dan aktivitas wisata, transportasi wisata dan lain sebagainya.

Melalui penyediaan sarana pariwisata yang baik dan berkualitas, akan mendorong minat wisatawan untuk berkunjung dan mempromosikan kabupaten Luwu sebagai destinasi yang menarik untuk dikunjungi dan menjadi surga yang memanjakan setiap wisatawan yang berkunjung.

Selain ketersediaan usaha pariwisata, keberadaan asosiasi pengusaha sebagai tempat berhimpun dan memecahkan masalah pengembangan pariwisata secara bersama-sama menjadi sebuah keharusan dalam mendukung keberlangsungan usaha/ industri pariwisata. Saat ini asosiasi pengusaha industri pariwisata yang sudah ada di kabupaten Luwu adalah Perhimpunan Hotel dan restoran Indonesia. Keberadaan asosiasi pengusaha bidang perhotelan tersebut bertanggungjawab dalam mengembangkan dan memelihara standar industry dan pelayanan serta memberikan saran dan usulan kebijakan pengembangan usaha perhotelan di kabupaten Luwu. Untuk itu optimalisasi peran asosiasi pengusaha pariwisata perlu terus ditingkatkan dan asosiasi pengusaha pariwisata lainnya seperti ASITA, PUTRI, GAHAWISRI perlu dibentuk seiring dengan operasionalisasi usaha pariwisata tersebut di kabupaten Luwu.

7.5 Unsur Media (*Media*)

Unsur media memegang peran sentral yang sangat menentukan dalam melakukan promosi dan pemasaran pariwisata kabupaten Luwu. Seiring dengan perkembangan peradaban yang sangat dipengaruhi oleh kualitas informasi melalui berbagai media, baik media *on-line* maupun *off-line*. Media berkewajiban untuk

mengedukasi dan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat termasuk wisatawan.

Saat ini, peran media khususnya media *on-line* termasuk media penyiaran lokal dan nasional sudah banyak meliput dan memberitakan potensi dan daya tarik kabupaten Luwu sebagai salah satu destinasi pariwisata daerah, namun intensitas dan kualitas informasi yang disampaikan masih perlu dioptimalkan.

Mengingat jumlah pengguna media sosial saat ini melonjak secara spektakuler, maka salah satu media yang perlu dioptimalkan dalam menyampaikan dan menyebarkan informasi kepariwisataan kabupaten Luwu adalah pemanfaatan media sosial. Untuk itu melalui peran serta masyarakat dan komunitas media (*blogger*, dll) dengan sendirinya akan menjadi agen penyebarluasan informasi potensi dan daya tarik pariwisata kabupaten Luwu.

BAB -8

PRINSIP DAN KONSEP PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN LUWU

8.1 Capaian Penyelenggaraan Pembangunan Kepariwisata

Capaian sektor pariwisata merupakan indikator utama yang digunakan dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan kepariwisataan sekaligus menganalisis konsistensi pembangunan kepariwisataan agar tetap bersesuaian dengan prinsip dan konsep pembangunan. Dalam pembangunan kepariwisataan daerah kabupaten/ kota sebagai bagian integral dari pembangunan kepariwisataan provinsi dan nasional, maka analisis capaian pembangunan kepariwisataan perlu untuk dianalisis secara komprehensi sehingga menjadi acuan dalam pembangunan kepariwisataan ke depan.

a. Capaian Penyelenggaraan Kepariwisata Nasional 2015-2019

Capaian sektor pariwisata nasional pada periode 2015-2019 mengalami pertumbuhan secara konsisten dan signifikan walaupun sempat terjadi penurunan pada tahun 2016. Capaian kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional terus meningkat dan mencapai target, sehingga pariwisata sebagai leading sector tercatat menduduki peringkat sebagai penyumbang devisa setelah industri sawit. Konsistensi capaian dari devisa yang telah ditetapkan didukung oleh capaian wisatawan nusantara (wisnus) yang terus melebihi target yang ditetapkan.

Gambar 8.1

Target dan Capaian Pariwisata Nasional 2015-2019

INDIKATOR	2015			2016			2017			2018			2019		
	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
KONTRIBUSI PADA PDB NASIONAL	4,32%	4,25%	100,47%	4,50%	4,13%	91,78%	5,00%	5,00%	100,00%	5,25%	5,25%	100,00%	5,50%	*4,8%	87,27%
DEVISA (TRILIUN Rp)	144	175,71	122,02%	172	176,23	102,46%	200	202,13	101,07%	223	224	100,45%	280	*197	70,36%
JUMLAH TENAGA KERJA (JUTA ORANG)	11,4	10,36	90,88%	11,8	12,28	104,07%	12	12,6	105,00%	12,6	12,7	100,79%	13	*12,9	99,23%
INDEKS DAYA SAING (WEF)	#50	#50	100%	n.a	n.a	n.a	#40	#42	95,24%	n.a	n.a	n.a	30	40	75,00%
WISATAWAN MANCANEGERA (JUTA KUNJUNGAN)	10	10,41	104,10%	12	12,02	100,17%	15	14,04	93,60%	17	15,81	93,00%	20	16,1	80,50%
WISATAWAN NUSANTARA (JUTA PERJALANAN)	255	256,42	100,56%	260	264,33	101,67%	265	270,82	102,20%	270	303,5	112,41%	275	*290	105,45%

Keterangan:

#Indeks daya saing hanya dilakukan 2 (dua) tahun sekali

*Angka proyeksi sementara berdasarkan RKP 2021

T: Target; R: Realisasi; C: Capaian

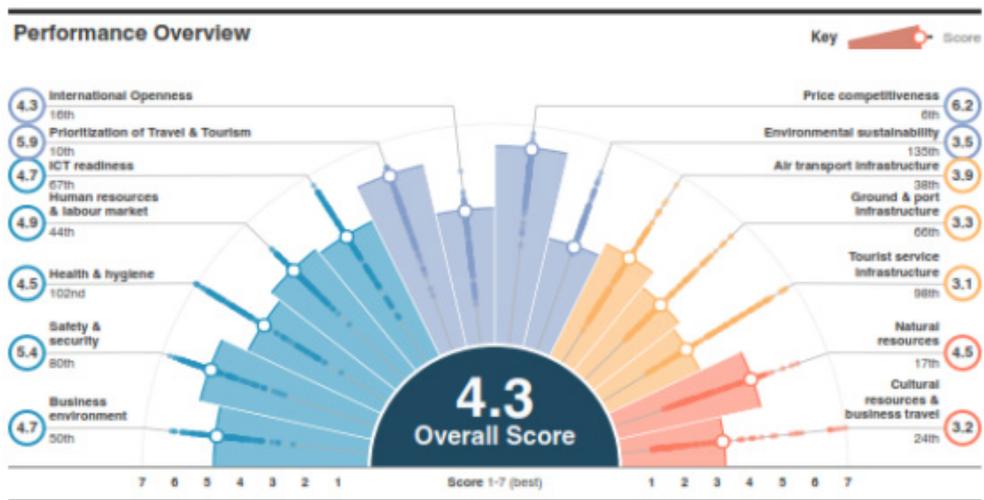
Sumber : Renstra Kemenparekraf/ Baparekraf 2021-2024

Faktor utama yang menyebabkan penurunan angka kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia sebahagian besar disebabkan oleh faktor bencana alam. Sebagai contoh: gempa bumi di Lombok pada bulan Agustus 2019 yang menyebabkan pembatalan kunjungan wisman lebih dari 75%. Penurunan terjadi dari bulan Agustus hingga Desember 2019. Dari 500.000 kunjungan wisman, rata-rata kunjungan menjadi 100.000 wisman perbulan. Kemudian polemik *zero dollar tours* wisman Tiongkok, dan bencana maskapai penerbangan, seperti kecelakaan pesawat Lion Air JT 610 di perairan Karawang.

Peningkatan kunjungan wisatawan terjadi dengan adanya *event* seperti ASIAN Games yang memberikan kontribusi cukup banyak. Wisman dari kawasan ASEAN memberikan kontribusi sebesar 4,861 juta dengan pertumbuhan terbesar mencapai 21,02%. Sehingga, penyelenggaraan *event* besar seperti ASIAN Games, Olimpiade, dan sebagainya perlu dijadikan prioritas pada sektor pariwisata.

Gambar 8.2

Capaian Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) Indonesia Tahun 2019



Sumber : Renstra Kemenparekraf/ Baparekraf 2021-2024

Daya saing pariwisata nasional yang diukur melalui *Travel and Tourism Competitiveness Index* (TTCI), Indonesia sudah mencapai peringkat ke 40 (empat puluh) dari target peringkat ke 30 (tiga puluh) pada tahun 2019. Secara umum nilai rata-rata indikator TTCI mendapatkan nilai 4,3. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah terkait infrastruktur baik *air transport infrastructure*, *ground & port infrastructure*, maupun *tourist infrastructure*. Hal lain yang juga menjadi perhatian khusus adalah terkait *environmental sustainability*, *health & hygiene*, *safety & security*, *ICT readiness*, *business environment*, serta *human resources & labour market*. Upaya perbaikan harus diakselerasi secara konsisten dan berkesinambungan dilakukan agar daya saing sektor pariwisata meningkat. Selaras dengan indikator TTCI, pengembangan tenaga kerja dari sektor pariwisata juga masih perlu terus menjadi perhatian dari sisi kuantitas dan kualitas. Hal ini tercantum juga pada visi RPJMN 2020-2024, yaitu meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

b. Potensi Pembangunan Pariwisata

Analisis terhadap permasalahan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif dilakukan terhadap pilar pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif. Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pembangunan kepariwisataan meliputi industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan pariwisata.

1. Pontensi Pembangunan Destinasi Pariwisata

Destinasi pariwisata dikembangkan atas dasar potensi daya tarik wisata yang dikembangkan secara sinergis dengan pengembangan fasilitas wisata, fasilitas umum, aksesibilitas/sarana prasarana serta pemberdayaan masyarakat dalam sistem yang utuh dan berkelanjutan. Dalam konteks pengembangan destinasi pariwisata, terdapat sejumlah potensi sekaligus sebagai kekuatan Indonesia untuk dapat berkembang sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan, antara lain:

a) Kekayaan dan Keragaman Sumber Daya Pariwisata Nasional

Kekayaan sumberdaya alam dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia sangatlah besar dan dapat diberdayakan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan nasional. Potensi dan kekayaan sumber daya alam dan budaya tersebut baru sebagian kecil saja yang telah dikelola dan dikembangkan sebagai daya tarik wisata dan menjadi magnet untuk menarik kunjungan wisatawan mancanegara maupun menggerakkan perjalanan wisatawan nusantara.

Indonesia yang dihuni oleh lebih dari 300 (tiga ratus) suku bangsa, dan memiliki 742 (tujuh ratus empat puluh dua) bahasa dan dialek serta segala ekspresi budaya dan adat tradisinya merupakan laboratorium budaya terbesar di dunia. Sejumlah karya dan peninggalan budaya tersebut telah diakui dunia sebagai world cultural heritage sites (8 warisan budaya). Indonesia yang memiliki 51 (lima puluh satu) taman nasional, merupakan negara mega biodiversity ketiga setelah Brazil dan Zaire, yang memiliki keanekaragaman hayati yang begitu besar, antara lain mencakup: 35 (tiga puluh lima) spesies primata, 25% (dua puluh lima persen) endemic; Indonesia menjadi habitat dari 16% (enam belas persen) binatang reptil dan amfibi di dunia; Indonesia menjadi habitat dari 17% (tujuh belas persen) burung di dunia, 26% (dua puluh enam persen) endemik.

Kekayaan sumber daya wisata alam dan taman nasional tersebut memberikan potensi yang sangat besar bagi pengembangan wisata alam maupun *ecotourism* atau *green tourism* sebagai salah satu bentuk wisata alternatif yang menjadi tren dunia saat ini dan ke depan. Indonesia merupakan negara yang berada pada jalur cincin api (*ring of fire*) yang aktif di dunia dengan persebaran gunung yang paling banyak di dunia.

Kekayaan potensi geologi dan kegunungapian tersebut menjadi modal yang sangat besar bagi pengembangan wisata minat khusus petualangan (*geotourism*) Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki kaitan sejarah dengan momentum-momentum penting dalam sejarah peradaban dunia, antara lain penjelajahan Laksamana Cheng Ho yang fenomenal, penjelajahan Sir Arthur Wallacea (*operation Wallacea*), jalur pelayaran sutera (*silk route*), jalur rempah dunia (*spice route*), dan berbagai kaitan sejarah masa lalu.

Kekayaan potensi momentum-momentum sejarah penting dunia tersebut menjadi modal yang sangat besar bagi pengembangan wisata minat khusus melalui pengembangan simpul-simpul dan koridor jejak perjalanan tersebut, yang sekaligus akan mengaitkannya dengan negara-negara pangsa pasar yang memiliki kaitan sejarah dan emosional dengan daya tarik tersebut.

Melihat keanekaragaman sumber daya alam dan budaya yang dimiliki Indonesia, Kemenparekraf/ Baparekraf menetapkan fokus pengembangan produk wisata Indonesia dalam 3 (tiga) kategori, yaitu produk wisata alam, budaya, dan buatan, dengan persentase performansi yang memperlihatkan *size*, *spread*, dan *sustainability* pada posisi saat ini. Proyeksi dan upaya pengembangan terhadap portofolio produk ini perlu dilakukan untuk mengoptimalkan sumber daya melalui

diversifikasi, diferensiasi, dan positioning produk yang didalamnya terdiri dari sejumlah produk wisata yang spesifik.

- b) Pertumbuhan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah dan Destinasi.

Konektivitas infrastruktur destinasi pariwisata merupakan salah satu faktor untuk menentukan kualitas pengembangan destinasi pariwisata. Komitmen nasional dalam pembangunan infrastruktur dilaksanakan melalui Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional menyebutkan bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan proyek strategis untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan upaya percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Proyek strategis nasional mencakup pembangunan infrastruktur darat, laut dan udara serta penyeberangan yang bermuara pada kemudahan mobilitas wisatawan sebagai dampak dari terbangunnya konektivitas antar daerah. Selain itu, sejak 2018, pemerintah telah menyusun *Integrated Tourism Master Plan* (ITMP) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba, Borobudur dan Lombok yang nantinya akan menjadi acuan pedoman pembangunan bagi kementerian/ lembaga untuk membangun kawasan pariwisata tersebut.

- c) Indonesia Sebagai Negara Tujuan Investasi yang Prospektif.

Prospek dan peluang investasi bidang pariwisata di Indonesia menunjukkan bahwa kondisi bisnis dan ekonomi nasional yang terus membaik pasca krisis ekonomi global telah membuat kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia semakin bagus, sehingga Indonesia menjadi negara tujuan investasi yang prospektif. *World Investment Prospects Survey 2014- 2016* melaporkan bahwa dari 159 (seratus lima puluh Sembilan) respon eksekutif Perusahaan Transnasional (TNC) dari negara-negara maju dan/atau berkembang, prospek untuk berinvestasi di Indonesia menduduki peringkat ketiga atau cukup prospektif. Tentu hal ini berkaitan dengan keberlanjutan (*sustainability*), dimana penilaian Indonesia pada daya saing yang berkelanjutan sangat penting untuk prospek investasi, mengingat bahwa investasi adalah salah satu komponen dalam PDB dan pertumbuhannya. Secara umum, ada 3 (tiga) hal pokok yang selalu menjadi pertimbangan pengusaha dalam melakukan investasi:

- 1) Stabilitas politik dan keamanan yang memberikan kepastian berusaha.
- 2) Birokrasi yang luwes dan proaktif, sehingga bisa melayani keinginan pengusaha tetapi tetap dalam koridor hukum dan peraturan yang berlaku.
- 3) Mampu memberikan iklim yang kondusif untuk berusaha, sehingga pengusaha dapat memperoleh keuntungan, karena perusahaan bukanlah badan sosial.

Namun demikian, investasi kepariwisataan saat ini relatif belum optimal untuk menggerakkan industri pariwisata secara lebih merata di berbagai wilayah provinsi dan destinasi pariwisata di Indonesia. Saat ini kegiatan investasi sebagian besar masih terkonsentrasi di Bali, Jawa dan Batam dengan dominasi jenis usaha di bidang perhotelan, restoran, dan transportasi.

- d) Atensi dan Sikap Positif Masyarakat Terhadap Kepariwisataannya Serta Potensi Wilayah Pedesaan.

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang ramah. Karakter keramahmatan masyarakat Indonesia telah dikenal luas oleh masyarakat dunia, sehingga hal tersebut merupakan modal yang sangat penting dalam konteks kepariwisataan, mengingat esensi pariwisata adalah hubungan interaksi antara wisatawan sebagai tamu (*guest*) dengan masyarakat atau penduduk setempat sebagai tuan rumah (*host*).

Berdasarkan laporan tahunan statistik Indonesia yang diterbitkan BPS tahun 2019, penduduk Indonesia tersebar di 98 (sembilan puluh delapan) kota dan 83.931 (delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh satu) desa yang terletak di lembah, lereng dan hamparan. Hal tersebut menegaskan bahwa distribusi penduduk Indonesia yang sebagian besar tinggal di wilayah pedesaan/ rural area. Potensi penduduk di wilayah pedesaan dengan karakter kehidupan yang khas dan terbangun dari budaya yang hidup dalam masyarakat lintas generasi juga merupakan potensi dan kekuatan dalam kerangka pengembangan daya tarik wisata untuk meningkatkan diversifikasi daya tarik serta daya saing pariwisata Indonesia.

Potensi daya tarik yang sebagian besar ada di daerah pedesaan apabila mampu dikelola melalui pendekatan pembangunan kepariwisataan berkelanjutan secara terpadu dan berkelanjutan, sangat dimungkinkan dapat memberi nilai tambah tidak saja dari aspek ekologis, edukatif, dan aspek sosial budaya, tetapi juga nilai tambah dari aspek rekreatif dan aspek ekonomis yang bermanfaat bagi kesejahteraan bangsa, sekaligus meminimalisir tingkat kemiskinan dan kesenjangan pembangunan di pedesaan.

Pengembangan wisata berbasis pedesaan (desa wisata) akan menggerakkan aktivitas ekonomi pariwisata di pedesaan yang akan mencegah urbanisasi masyarakat desa ke kota. Pengembangan wisata pedesaan akan mendorong pelestarian alam (antara lain bentang alam, persawahan, sungai, danau) yang pada gilirannya akan berdampak mereduksi pemanasan global.

2. Pontensi Pembangunan Pemasaran Pariwisata

Dalam kerangka pembangunan Pemasaran Pariwisata, terdapat sejumlah potensi yang telah berkembang sebagai modal utama dalam mendorong akselerasi pemasaran pariwisata, antara lain:

a) Potensi pasar wisman dan wisnus yang terus tumbuh.

Pasar wisatawan mancanegara yang terus tumbuh pesat setiap tahunnya dan potensi outbound yang tinggi dari sejumlah negara-negara pasar wisatawan menyediakan peluang yang besar bagi Indonesia untuk menarik kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Demikian halnya dalam konteks wisatawan nusantara, semakin meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat untuk melakukan perjalanan merupakan pasar yang semakin terbuka dalam meningkatkan perjalanan wisatawan nusantara.

Kememparekraf/ Baparekraf melakukan analisis terkait pasar luar negeri telah sebagai dasar untuk menentukan kebijakan pengembangan pasar pariwisata. Analisa tersebut didasarkan pada jumlah kunjungan wisman, tingkat pertumbuhan, penerimaan devisa, dan rata-rata pengeluaran wisman per kunjungan.

Target devisa yang cukup besar di RPJMN 2020-2024, maka rata-rata pengeluaran wisman per kunjungan menjadi salah satu variabel yang menentukan dalam melakukan analisis target pasar. Analisis pasar dalam dan luar negeri selama ini dilakukan berdasarkan referensi data sekunder, yaitu BPS, Euromonitor, UNWTO, WEF, dan AC Nielsen.

Selain itu, *Market Intelligence* juga sudah dilaksanakan oleh *Visit Indonesia Tourism Officer* (VITO) untuk mencari data dan informasi terkini tentang pasar yang nantinya akan digunakan untuk penguatan analisis dan strategi pasar sebagai bahan pengambilan keputusan.

b) Citra positif yang terbangun melalui berbagai *event* dan peristiwa penting.

Citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing perlu terus dibangun melalui berbagai cara, sehingga pencitraan positif akan terus terangkat dan terinformasikan secara luas, untuk mendorong wisatawan memiliki minat dan motivasi berkunjung ke Indonesia.

Berbagai *event* dan peristiwa politik maupun pencapaian- pencapaian tertentu di bidang pariwisata turut berkontribusi besar dalam pengembangan citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata, di antaranya adalah kesuksesan pelaksanaan ASIAN Games 2018 dan kelancaran proses pelaksanaan Pemilu Presiden tahun 2019 menjadi bukti kondisi tersebut.

Di sisi lain pencitraan positif didukung oleh semakin banyaknya destinasi pariwisata Indonesia yang memperoleh berbagai kategori apresiasi/ penghargaan sebagai destinasi pariwisata internasional dari media internasional, contohnya Indonesia berada di peringkat 1 *The Best Countries in the World: 2019 Readers' Choice Awards*.

Penghargaan ini dikeluarkan *Conde Nast Traveler*, 8 November 2019, melalui situs *cntraveler.com*. Selain itu, *Rough Guides* - -situs pemandu perjalanan asal Inggris, menetapkan Indonesia masuk peringkat enam sebagai negara paling indah di dunia melalui berdasarkan voting atau pemilihan suara warganet dari seluruh dunia.

c) Peran media dan teknologi informasi dan komunikasi yang adaptif.

Di sektor media, juga ditandai dengan semakin banyaknya media (elektronik/ cetak/ online) dan perusahaan pembuat film yang melakukan peliputan/pembuatan program/film di berbagai destinasi wisata di Indonesia, misalnya film *Eat Pray Love*, *The Philosopher*, *American Next Top Model*, *Kohlanta*, dsb.

Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi dan kekayaan serta nilai jual yang tinggi. Dengan adanya tren teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang sangat pesat saat ini, maka berbagai informasi mengenai produk dan destinasi pariwisata dapat disampaikan pada calon wisatawan melalui berbagai metode baru misalnya melalui media travel blog, online media sosial, aplikasi pada tablet/ *smartphone*, dsb.

Khusus media sosial, penetrasi yang tinggi menjadikan media sosial sebagai media pemasaran yang menjanjikan. Tingginya jumlah pengguna media sosial baik di dunia maupun di Indonesia, dan sifatnya yang memungkinkan komunikasi dua arah, saling berbagi konten dan informasi serta jangkauannya yang luas menjadikan media sosial sebagai salah satu media promosi ideal bagi industri pariwisata pada umumnya dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada khususnya.

Melalui media sosial, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat melakukan promosi/ pemasaran, campaign, menyebarkan informasi terkait produk, event kepariwisataan, dan destinasi pariwisata kepada calon wisatawan secara efektif dan efisien.

Dengan strategi media sosial yang tepat dan eksekusi strategi yang baik, maka Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif beserta industri pariwisata di Indonesia dapat meningkatkan *awareness* dan citra positif pariwisata nasional sehingga jumlah kunjungan dan pergerakan wisatawan mancanegara dan nusantara akan meningkat.

d) Kemitraan pemasaran yang semakin luas dibangun di kalangan pelaku pariwisata.

Salah satu kunci penting dalam strategi pemasaran adalah dikembangkannya kemitraan pemasaran di antara para pelaku pariwisata, baik antara Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah dengan swasta maupun antar pelaku industri pariwisata di sektor swasta. Kemitraan pemasaran dilaksanakan dalam bentuk *co-marketing* dan *co-Branding* atau keterlibatan *publicprivate partnership* dalam memasarkan pariwisata, yang akan mampu memperluas jangkauan target pemasaran serta meningkatkan kualitas kinerja dan mengefektifkan sumber daya yang dimiliki pemerintah dari segi pembiayaan pelaksanaan kegiatannya.

Dengan banyaknya asosiasi dan industri pariwisata yang berdiri antara lain: PHRI, ASITA, GIPI, dan sebagainya, pembangunan kepariwisataan mampu memberikan

dampak yang sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam kontribusi peningkatan lapangan kerja bagi masyarakat di suatu destinasi pariwisata. *Co-marketing* mampu menimbulkan kesadaran kepemilikan *stakeholder* pariwisata untuk bekerja sama dan memajukan pariwisata Indonesia. Indonesia juga telah memiliki tenaga perwakilan yang telah ditunjuk sebagai *Visit Indonesia Tourism Officers* (VITO) yang merupakan tenaga ahli bidang pemasaran dalam membantu memasarkan pariwisata Indonesia di luar negeri. VITO tersebut tersebar di 23 (dua puluh tiga) kota di 14 (empat belas) negara yang menjadi fokus pasar wisatawan mancanegara. Banyaknya kerja sama di bidang pemasaran pariwisata yang tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) baik dari dalam dan luar negeri terkait kerja sama dalam memasarkan pariwisata Indonesia menunjukkan banyak pihak yang tertarik terhadap kepariwisataan dan juga ingin mengembangkan kepariwisataan Indonesia.

- e) Promosi Indonesia yang semakin kuat yang terfokus dan media promosi yang semakin beragam.

Promosi sebagai cara untuk memasarkan produk dan menumbuhkan minat wisatawan untuk berkunjung dan melakukan perjalanan ke Indonesia atau perjalanan lintas daerah akan dapat dikembangkan lebih terfokus dengan adanya penetapan terhadap fokus dan prioritas destinasi pariwisata yang dikembangkan/ Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) serta fokus pasar wisatawan baik mancanegara maupun nusantara. Fokus tersebut sebagai dasar dalam memilih strategi promosi yang dibuat mencapai target sasaran dan juga informasi yang dibutuhkan pasar terhadap destinasi pariwisata Indonesia.

Keberagaman dan kesiapan sejumlah destinasi pariwisata Indonesia yang menawarkan daya tarik wisata massal maupun daya tarik wisata alternatif/minat khusus merupakan modal yang semakin besar untuk mendukung promosi destinasi pariwisata Indonesia yang semakin beragam di sejumlah wilayah, tidak terpaku hanya di Bali saja, namun sudah meluas di Lombok, Nusa Tenggara Timur (Komodo, Kelimutu), Papua (Raja Ampat), Sulawesi (Toraja, Wakatobi, Bunaken), Kalimantan (Derawan, Tanjung Puting), dan Sumatera (Batam, Bintan, Toba, Nias, Mentawai). Pelaksanaan Otonomi Daerah menjadi salah satu hal yang menjadi potensi dalam membantu memasarkan destinasi pariwisata karenanya banyak daerah yang berusaha untuk mempromosikan daerahnya dengan keunikan masing-masing sebagai salah satu tujuan wisata.

Banyaknya event daerah yang menarik dengan lokalitas yang tinggi dapat ditawarkan kepada wisatawan yang datang, baik wisatawan nusantara maupun mancanegara. Beberapa daerah sudah memiliki sarana pusat informasi pariwisatanya sendiri, sehingga mampu untuk memasarkan dan menginformasikan mengenai keberagaman destinasi wisata yang dimiliki daerahnya.

Media promosi saat ini berkembang semakin luas dengan berkembangnya New Media Marketing yang mengacu pada pemanfaatan serangkaian teknik pemasaran modern (berbasis internet) dan penggunaan teknologi informasi yang dinilai lebih efisien tetapi efektif dalam menjangkau segmen pasar yang lebih luas.

Model penggunaan media pemasaran melalui *look, book, pay* di antaranya adalah berbagai situs yang menjual secara *online* berbagai produk pariwisata dan jasa pelayanan pendukungnya seperti tiket penerbangan, akomodasi, serta paket wisata. Kemudian juga penggunaan media sosial sebagai sarana promosi seperti media travel blog, online social media, *facebook, twitter, youtube*, dan *blog*, aplikasi pada tablet/ *smartphone*, dsb.

- f) *Brand Equity Wonderful Indonesia*.

Salah satu alat ukur citra kepariwisataan suatu negara adalah *Country Brand Ranking* yang dipublikasikan oleh *Bloom Consulting*. *Country branding Wonderful*

Indonesia masuk dalam Top 10 Asia pada tahun 2019 *Country branding Wonderful Indonesia* mencerminkan *positioning* dan *differentiating* Pariwisata Indonesia. Peningkatan pariwisata disusun mempertimbangkan 4 (empat) variabel, yaitu:

- 1) Kinerja perekonomian dari sektor pariwisata suatu negara yang dihitung berdasarkan statistik pariwisata internasional dari UNWTO, yang terdiri dari penerimaan pariwisata, yaitu rata-rata total penerimaan pariwisata tahunan dari wisatawan mancanegara di suatu negara, dan pertumbuhan penerimaan pariwisata, yaitu rata-rata pertumbuhan total penerimaan pariwisata tahunan dari wisatawan mancanegara di suatu negara;
 - 2) *Digital Demand (D2)*/ Permintaan Digital yang mengukur volume pencarian total secara daring terhadap aktivitas dan daya tarik pariwisata. Semakin banyak pencarian daring mengenai pariwisata, maka semakin menarik brand dari negara tersebut;
 - 3) *Country Brand Strategy (CBS Rating)* yang mengukur akurasi strategi branding pariwisata suatu negara; dan
 - 4) Kinerja daring dari brand suatu negara. Untuk memperkuat *branding*, Indonesia akan meluncurkan *National Branding* yang akan digunakan untuk semua Kementerian/ Lembaga, dan saat ini sedang dilakukan kajian untuk *National Branding* tersebut.
- g) Berkembangnya teori terkait konsep pemasaran yang baru. Teori pemasaran terbaru saat ini yaitu *Marketing 4.0*. Didorong oleh perkembangan teknologi yang memungkinkan proses produksi, pemasaran, distribusi dan sebagainya menjadi lebih efektif dan efisien. Pendekatan *Marketing 4.0* mengombinasikan interaksi *online* dan *offline* antara perusahaan dengan pelanggan. Konektivitas digital memungkinkan hubungan yang lebih cepat dengan jangkauan yang luas serta pemilihan alokasi yang lebih optimal antara pelaku bisnis terhubung dengan akses permodalan dan pasar yang lebih berkembang. Selain memberikan kemudahan dengan akses konektivitas yang lebih cepat dan luas, *marketing* digital juga memiliki risiko yang harus dihadapi terhadap keadaan sesudah transaksi seperti pembeli dan penjual yang itikad baiknya belum tentu sesuai harapan serta layanan setelah pembelian serta pertanggung jawaban yang diragukan. *Marketing 4.0* juga mengombinasikan antara *style* dan *substance* yang artinya merek tidak hanya mengedepankan *branding* bagus, tetapi konten yang relevan dengan pelanggan atau menyuguhkan konten yang bagus dan *up-to-date*. Penggunaan media online dan offline yang menggambarkan kondisi suatu destinasi pariwisata nusantara yang *up-to-date* dan bagus sangat penting. Dengan penggunaan media *online*, pengunjung dapat melihat penilaian dan kondisi sebenarnya dari pengunjung lainnya selain dari informasi yang diberikan oleh pemerintah dan pengelola objek wisata. Kemenparekraf/ Baparekraf dapat mengadopsi konsep *Marketing 4.0* untuk menarik wisatawan ke Indonesia. Namun, konsep *Marketing 4.0* memiliki risiko yang berasal dari penggunaan teknologi *online* yaitu maraknya *cyber Army* atau sekelompok orang yang mempunyai kepentingan tertentu untuk menyebarkan keresahan atau berita bohong yang tujuannya mengganggu stabilitas dan merusak persaingan usaha yang sehat. Tentunya hal ini harus menjadi perhatian pemerintah atau Kemenparekraf/ Baparekraf dan para pelaku usaha pariwisata untuk mengonfirmasi setiap isu yang diragukan kebenarannya.

3. Pontensi Pembangunan Industri Pariwisata

Dalam kerangka pembangunan Industri Pariwisata, terdapat sejumlah potensi yang telah berkembang sebagai modal utama dalam mendorong akselerasi industri pariwisata, antara lain:

- a) Pariwisata menciptakan rantai nilai usaha yang luas dan beragam. Pariwisata merupakan sektor yang memiliki keterkaitan rantai nilai kegiatan yang luas dengan berbagai jenis usaha sehingga mampu menciptakan lapangan usaha yang luas bagi masyarakat. Keterkaitan dan sinergi antarmata rantai usaha kepariwisataan merupakan faktor kunci yang membuat industri pariwisata berjalan dengan baik dan mampu memenuhi harapan wisatawan selaku konsumen. Penguatan sinergitas antarmata rantai pembentuk industri pariwisata harus selalu dibangun dan dikembangkan agar seluruh komponen dan sistem kepariwisataan dapat bergerak dan memberikan kontribusi serta perannya masing-masing dalam menciptakan produk dan pelayanan yang berkualitas bagi wisatawan. Kompetisi sektor kepariwisataan menuntut kemampuan pelaku industri pariwisata untuk dapat mengembangkan dan menjaga kualitas produk serta kredibilitasnya sehingga memiliki daya saing dan memperoleh kepercayaan dari kalangan konsumen/pasar.
- b) Daya saing produk dan kredibilitas bisnis
Dalam penilaian tingkat daya saing kepariwisataan, Indonesia memiliki keunggulan dari sisi daya saing sumber daya pariwisata serta daya saing harga. Keunggulan daya saing tersebut diharapkan akan menjadi modal untuk menggerakkan pilar-pilar lain sehingga memiliki daya saing yang lebih tinggi, khususnya dari sisi manajemen atraksi/daya tarik wisata, fasilitas pariwisata maupun aksesibilitas pariwisata. Upaya peningkatan daya saing produk dan kredibilitas bisnis terus didorong oleh Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui berbagai bentuk bimbingan teknis dan kegiatan sertifikasi usaha pariwisata yang akan didorong secara lebih intensif kedepannya.
- c) Tanggung jawab lingkungan yang semakin tinggi.
Era pariwisata hijau (*greentourism*) dan pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan (*sustainable tourism development*), telah menumbuhkan kesadaran yang luas dari berbagai pihak dan pemangku kepentingan untuk dapat mengelola dan memberikan perhatian pada aspek-aspek kelestarian lingkungan, melalui pengembangan paket-paket wisata yang mengandung unsur edukasi lingkungan (*eco-tourism*) maupun penerapan prinsip daur ulang terhadap material atau bahan pendukung operasional usaha pariwisata. Dari sisi pasar wisatawan juga semakin berkembang preferensi untuk memilih destinasi pariwisata yang lebih mengemban misi-misi pelestarian/ tanggung jawab lingkungan. Sehingga potensi tersebut memberi peluang bagi destinasi pariwisata di Indonesia untuk lebih mewujudkan pengelolaan daya tarik dan produk wisata yang berwawasan lingkungan.

4. Pontensi Pembangunan Kelembagaan Pariwisata

Dalam kerangka pembangunan Kelembagaan kepariwisataan, terdapat sejumlah potensi yang dapat diberdayakan sebagai modal utama dalam mendorong peran kelembagaan yang lebih efektif mendukung pembangunan kepariwisataan nasional, antara lain:

- a) Penguatan Organisasi
Dalam konteks organisasi kepariwisataan, upaya membangun organisasi yang solid dalam mendukung pembangunan kepariwisataan terus diperkuat oleh Pemerintah sehingga dapat terwujud tata kelola kepariwisataan yang semakin baik (*good tourism governance*) yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Berbagai upaya pembenahan organisasi di tingkat pusat dan lokal telah dilakukan, diantaranya pembentukan GIPI (Gabungan Industri Pariwisata Indonesia); BPPI

(Badan Promosi Pariwisata Indonesia) dan unsur di daerah dalam bentuk BPPD, pembentukan DMO (*Destination Management Organization*), dan sebagainya.

Dalam konteks internal, reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi kepariwisataan sebagai portofolio pembangunan nasional juga semakin diperkuat melalui berbagai koordinasi kebijakan, penyusunan, dan evaluasi program kelembagaan dan tata laksana; perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan *e-government*; koordinasi kebijakan, penyusunan, evaluasi program dan pembinaan integritas sumber daya manusia aparatur; koordinasi kebijakan, penyusunan dan evaluasi program pelayanan publik.

b) SDM Kepariwisata

Peningkatan produk pariwisata dalam rangka memenangkan persaingan global, harus diimbangi oleh ketersediaan SDM yang kompeten, yang tidak hanya berada pada tataran operasional atau tenaga teknis saja tetapi juga pada tataran akademisi, teknokrat, dan profesional. Pengembangan SDM Kepariwisata dapat dilakukan dengan pendekatan pendidikan formal dan pelatihan, baik bagi Aparatur, Pengusaha Industri Pariwisata, Karyawan pada Industri Pariwisata maupun Masyarakat yang berada di kawasan pariwisata.

Penambahan jumlah lembaga pendidikan tinggi kepariwisataan sebagai Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Kemenparekraf/ Baparekraf diharapkan akan mampu menjawab kebutuhan SDM yang kompeten di setiap tataran dan meningkatkan pengetahuan dan wawasan dari SDM Kepariwisata. Selain itu, pelaksanaan pelatihan, penyiapan piranti pelaksanaan sertifikasi kompetensi, pembekalan, *workshop*, sosialisasi, beserta penyiapan kurikulum dan modul pelatihan merupakan bagian dari kegiatan pengembangan SDM kepariwisataan. Pengembangan SDM berbasis kompetensi dilakukan agar dapat memberikan hasil sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi dengan standar kinerja yang telah ditetapkan. Kebutuhan akan SDM pariwisata yang kompeten dapat dilakukan melalui jalur formal dan jalur informal.

Dalam rangka menyiapkan SDM yang kompeten tersebut, telah disiapkan sertifikasi kompetensi SDM bidang pariwisata. Sertifikasi kompetensi merupakan sebuah kebutuhan SDM pada saat ini, hal ini karena sertifikasi kompetensi merupakan bukti nyata bahwa SDM tersebut telah memiliki kompetensi dalam suatu bidang. Hal tersebut juga berlaku untuk SDM bidang pariwisata, dimana kita akan dihadapkan pada sebuah kompetisi besar pergerakan arus barang dan jasa di dunia yang mengharuskan Kemenparekraf/ Baparekraf untuk mempersiapkan SDM yang kompeten di bidang pariwisata dengan melakukan program pelaksanaan sertifikasi SDM pelaku pariwisata; Penyusunan SKKNI bidang pariwisata; serta penyiapan assessor.

c) Pariwisata sebagai kegiatan multisektor, borderless dan regulasi yang mendukung. Kegiatan kepariwisataan merupakan kegiatan yang bersifat multisektor dan *borderless* (tidak mengenal batasan administratif), oleh karenanya pengembangan pariwisata memerlukan koordinasi dan integrasi kebijakan secara intensif untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan kepariwisataan sebagai sektor andalan pembangunan nasional, baik dalam rangka mendorong percepatan peningkatan kunjungan wisatawan, untuk meningkatkan penerimaan devisa maupun kontribusi ekonomi bagi daerah guna mendorong usaha-usaha pemberdayaan masyarakat.

Upaya mendukung akselerasi pembangunan kepariwisataan dan koordinasi yang intensif lintas pelaku (sektoral dan regional) tersebut telah memiliki sejumlah payung hukum, antara lain melalui PP Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pariwisata Nasional dan Perpres Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata. Dengan payung hukum

tersebut maka Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat memanfaatkan akses koordinasi yang lebih efektif dalam mendukung percepatan pembangunan kepariwisataan.

d) Bonus demografi Indonesia

Indonesia sedang mendapatkan bonus demografi, yaitu kondisi pertumbuhan penduduk terutama penduduk usia produktif (15-64 tahun). Ini merupakan suatu kesempatan karena bonus demografi adalah sumber pertumbuhan ekonomi akibat adanya konsumsi yang tinggi, peningkatan investasi dan produktivitas serta penurunan angka ketergantungan. Bonus demografi selain sebagai potensi pertumbuhan ekonomi juga bisa menjadi bencana demografi jika tanpa kualitas sumber daya manusia yang baik. Data Badan Pusat Statistik memroyeksikan bahwa pada tahun 2019, kelompok usia produktif akan mencapai besaran 67 persen dari total populasi penduduk dan sebanyak 45 persen dari 67 persen tersebut berusia antara 15–34 tahun.

Namun, setelah 2030, angka ketergantungan mulai mengalami peningkatan karena jumlah penduduk usia tua (65 tahun ke atas) meningkat. Hingga pada 2045, Indonesia sudah menjadi *aging society* dengan perkiraan penduduk tua mencapai 12,45 persen dari total penduduk. Perubahan struktur penduduk merupakan peluang untuk memanfaatkan produktivitas penduduk usia produktif agar mendorong pertumbuhan ekonomi negara, salah satunya melalui pariwisata.

Adanya bonus demografi merupakan potensi bagi industri pariwisata dengan ketersediaan SDM yang dapat diserap menjadi tenaga kerja pariwisata. Tidak hanya secara kuantitas, namun kualitas SDM sendiri perlu diperhatikan karena jika bonus demografi tidak diimbangi dengan pengembangan kualitas SDM akan menjadi bencana demografi

c. Pemasaalahan Pembangunan Pariwisata

1. Permasalahan Pembangunan Destinasi Pariwisata

Dalam kerangka pengembangan destinasi wisata, terdapat beberapa masalah utama yang harus dihadapi, yaitu:

a) Perubahan Iklim dan Bencana Alam.

Isu perubahan iklim telah menjadi isu di seluruh dunia. Perubahan iklim ini disebabkan oleh tindakan merusak yang dilakukan manusia, seperti penebangan pohon secara sembarangan, pengerukan gunung, dan tidak dirawatnya daerah tepi pantai. Perubahan iklim ini berdampak kepada berbagai bencana alam yang terjadi di berbagai wilayah, seperti banjir, kebakaran hutan, kemarau panjang, gempa bumi, gunung meletus, dan sebagainya. Isu perubahan iklim ini juga berdampak kepada pemilihan destinasi wisata oleh wisatawan dunia. Wisatawan menjadi lebih berhati-hati dalam menentukan tujuan wisata ke daerah yang sering terkena bencana alam.

Selain perubahan iklim, letak geografis Indonesia yang berada di antara lempeng benua dan lempeng samudera, yaitu lempeng Indo-Australia di sebelah selatan, lempeng Eurasia di utara dan lempeng Pasifik di sebelah timur, telah membuat Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat kerawanan yang cukup tinggi terhadap bencana, terutama pada daerah sepanjang ring of fire dari Sumatera–Jawa–Bali–Nusa Tenggara–Banda–Maluku. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak kota-kota pantai dan sebagian wilayah pesisir Indonesia, yaitu pesisir barat Sumatera, pesisir selatan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara terletak pada kawasan yang rawan bencana, terutama bencana gempa bumi dan tsunami.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis tren kejadian bencana dalam 10 tahun terakhir yang menunjukkan bahwa bahwa bencana banjir, tanah longsor, puting beliung dan letusan gunung berapi menjadi bencana yang paling sering terjadi dalam 10 tahun terakhir. Bencana menyebabkan lumpuhnya

berbagai aktivitas di sekitar wilayah berdampak bencana, termasuk aktivitas pariwisata seperti penutupan destinasi wisata serta menimbulkan kekhawatiran bagi wisman untuk menentukan tujuan. Sebagai contoh pada tahun 2014 dimana terjadi erupsi Gunung Kelud yang berdampak pada lumpuhnya aktivitas 7 (tujuh) bandara utama di Pulau Jawa selama beberapa hari, sehingga pergerakan wisatawan dari dan menuju destinasi menjadi tertunda.

Daya tarik wisata di Indonesia tidak luput dari kerusakan yang diakibatkan oleh perubahan iklim dan bencana alam. Hal ini juga akan membuat citra Indonesia di mata wisatawan internasional menjadi kurang baik, serta diperlukan sumber daya lebih untuk memperbaiki kerusakan tersebut.

Maka dari itu, diperlukan langkah-langkah untuk mengantisipasi hal ini, seperti kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, pemberian sanksi bagi perusahaan termasuk penyelenggara pariwisata yang merusak lingkungan, menyusun strategi tanggap bencana lingkungan pada berbagai objek wisata dan pembangunan citra tanggap bencana (*crisis management*).

- b) Ketersediaan konektivitas dan infrastruktur yang belum optimal. Ketidaknyamanan wisatawan dalam berwisata dan kesulitan dalam mencapai lokasi destinasi wisata merupakan masalah akibat tidak tersedianya infrastruktur yang baik. Akibat masalah infrastruktur ini, dapat menimbulkan masalah lain, seperti: yaitu ketidaksiapan sarana dan prasarana destinasi, keamanan, kebersihan, ketertiban destinasi, keterbatasan aksesibilitas, dan hambatan konektivitas, yang membuat jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia belum optimal.

Kenyamanan wisatawan dapat terpenuhi dengan adanya sarana, prasarana, dan fasilitas umum yang aman, bersih, dan tertib yang perlu disiapkan oleh setiap pengelola objek wisata di daerah destinasi wisata sehingga Citra destinasi wisata Indonesia pun akan semakin baik. Akses menuju daya tarik wisata prioritas seperti Danau Toba, Raja Ampat, Pulau Komodo, dan Morotai masih terbatas, sehingga perlu dikembangkan dengan menambahkan sarana transportasi yang mudah dijangkau dari daerah asal wisatawan.

- c) Kesiapan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata yang belum optimal. Banyak daerah yang sudah dikenal wisatawan dan menjadi destinasi wisata Indonesia, namun tidak diimbangi oleh kesiapan masyarakat sekitar. Hal ini akan berakibat pada kurang terawatnya destinasi wisata, kurang profesionalnya pengelolaan destinasi wisata, serta eksploitasi berlebihan dari destinasi wisata. Untuk mencegah timbulnya masalah tersebut, diperlukan pemberdayaan masyarakat di daerah destinasi wisata Indonesia. Pemberdayaan tersebut dapat dilakukan dengan menanamkan nilai dan pemahaman akan tujuan pariwisata Indonesia dan memberikan pendidikan dan pelatihan keterampilan. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat mengembangkan sendiri daerahnya sebagai daerah destinasi wisata Indonesia secara bertanggung jawab, serta turut memajukan pariwisata Indonesia.

- d) Kemudahan investasi yang masih belum optimal. Indonesia sebagai negara tujuan investasi yang prospektif merupakan nilai tambah penting yang akan dapat meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia. Namun demikian, potensi tersebut menjadi tidak memiliki arti manakala berbagai hambatan iklim usaha masih terjadi.

Keruwetan birokrasi dan proses yang berbelit yang masih terjadi di sejumlah daerah menjadi catatan tersendiri yang membuat para investor masih enggan untuk melakukan investasi. Hal ini perlu ditangani dengan berbagai langkah misalnya dengan membuat kebijakan yang mempermudah proses investasi dengan tetap memperhatikan daerah destinasi disertai pengawasan kepada proses tersebut.

2. Permasalahan Pembangunan Pemasaran Pariwisata

Dalam pengembangan pemasaran pariwisata, terdapat beberapa permasalahan yang menjadikan promosi pariwisata Indonesia belum optimal yaitu:

- a) Belum adanya acuan riset pasar yang komprehensif.
Dalam menetapkan target pasar wisatawan nusantara dan mancanegara masih belum mengacu kepada riset pasar yang dilakukan secara komprehensif. Hal ini dapat terlihat dari penetapan fokus pasar yang belum mengacu pada analisis pasar yang dilakukan. Hal ini disebabkan belum adanya pembobotan terhadap variabel yang menjadi penilaian dalam menentukan fokus pasar baik wisatawan mancanegara, maupun wisatawan nusantara. Penetapan pasar wisatawan mancanegara dan nusantara baru berdasarkan desk analysis yang diambil dari BPS dan sumber-sumber referensi yang akurat antara lain dari Euromonitor, UNWTO, WEF, serta sumber – sumber referensi lain yang relevan sehingga belum mencapai pada kedalaman informasi yang diharapkan.
- b) Strategi komunikasi pemasaran yang belum terpadu
Branding pariwisata Indonesia (*Wonderful Indonesia*) masih belum terpublikasikan secara optimal di berbagai negara pasar utama dan potensial pariwisata Indonesia. Hal ini juga ditimbulkan oleh tidak konsistennya branding pariwisata yang digunakan, sehingga product awareness dari (calon wisatawan) pada negara-negara pasar utama dan potensial terhadap produk dan destinasi pariwisata Indonesia masih lemah bila dibandingkan dengan negara-negara pesaing Indonesia. Indonesia juga belum memiliki suatu strategi komunikasi pemasaran pariwisata terpadu yang dapat digunakan oleh pemerintah maupun para pemangku kepentingan pariwisata Indonesia dalam melakukan aktivitas pemasaran pariwisata Indonesia.
Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi belum optimal dalam mempromosikan citra pariwisata Indonesia di dunia internasional. Hal ini karena banyaknya pemangku kepentingan pariwisata yang belum memiliki kesadaran serta tidak memiliki kemampuan untuk menyikapi tren perkembangan teknologi, informasi, dan media sosial tersebut.
- c) Sinergi kemitraan pemasaran masih belum optimal.
Banyaknya Asosiasi dan organisasi yang bergerak di bidang pariwisata antara lain seperti ASITA, GIPI, PHRI, yang belum bersinergi dengan program kerja pemerintah sehingga menghambat pengembangan public-private partnerships (PPP). Hal ini akibat perbedaan tujuan dan kepentingan yang justru menghambat usaha pemerintah dalam memasarkan pariwisata.
Permasalahan lainnya juga dapat terlihat dari belum efektifnya MoU-MoU kerja sama pemasaran pariwisata yang sudah disepakati antara pihak pemerintah dan juga asosiasi, serta organisasi yang masih belum berjalan dengan baik. MoU-MoU kerja sama bidang pemasaran pariwisata yang telah tertuang masih belum dilaksanakan secara optimal, komitmen industri dan asosiasi yang tertuang dalam MoU kerja sama masih dalam batas dokumen karena pada kenyataannya banyak kerja sama yang belum terimplementasikan dengan baik.
Masalah lainnya adalah mengenai pusat informasi kepariwisataan yang masih bersifat parsial terbatas lokasi karena Pusat Informasi Kepariwisataan berskala nasional masih belum terbentuk. Kebutuhan akan adanya pusat informasi kepariwisataan merupakan hal yang sangat penting bagi wisatawan dalam mengunjungi suatu destinasi pariwisata (kebutuhan pengisian bahan informasi pariwisata).
Selain itu Indonesia juga telah memiliki tenaga perwakilan di 14 negara yang telah ditunjuk sebagai VITO, namun tenaga perwakilan tersebut bukanlah tenaga yang khusus bekerja dalam memasarkan pariwisata Indonesia saja, sehingga diperlukan penguatan terhadap peran VITO. Di sisi lain, belum adanya kantor

perwakilan Pemasaran Pariwisata Indonesia (ITPO: Indonesia Tourism Promotion Office) di fokus pasar menjadi salah satu kendala dalam mengoordinasikan, memperluas dan mengefektifkan upaya penetrasi pasar wisatawan di negara-negara tersebut.

d) Kegiatan promosi masih berjalan parsial.

Event-event yang berskala nasional dan internasional masih terbatas karena banyak daerah yang mempunyai event-event daerah yang menarik namun belum menetapkan kepastian waktu pelaksanaan dan belum mampu mengemas event secara profesional sehingga kemasannya kurang menarik, juga belum semua daerah mempunyai aksesibilitas maupun sarana dan prasarana penunjang yang memadai untuk layak dipromosikan baik secara nasional dan internasional, sehingga *event-event* daerah secara pelan-pelan perlu didukung dan didorong agar dapat dikemas secara lebih menarik dan mulai dipromosikan secara nasional maupun internasional. Dalam mempromosikan pariwisata Indonesia, belum semua program dibuat secara terpadu sehingga diperlukan keterpaduan program antar pemerintah pusat dan daerah, maupun masyarakat dalam mengemas program yang kreatif dan inovatif, juga keterpaduan media promosi agar gaung promosinya makin meluas dengan memanfaatkan komunitas-komunitas untuk promosi sertasinergitas program/kegiatan yang sifatnya nasional maupun internasional dengan promosi pariwisata bersama secara *co-marketing*.

e) Daya saing pariwisata Indonesia masih belum kuat

Berdasarkan hasil TTCI 2019 Indonesia, indikator *safety and security* berada pada #80, *health and hygiene* #102, *Environmental Sustainability* #135, dan *tourist service infrastructure* #98 dari 140 (seratus empat puluh) negara. Dari sekian banyak tantangan yang harus ditangani adalah terkait indikator *safety*, dimana Indonesia sering mendapat *Travel Advisory* dari negara negara pasar yang mengakibatkan usaha untuk melakukan promosi menjadi tidak efektif.

3. Permasalahan Pembangunan Industri Pariwisata

Dalam kerangka pengembangan industri pariwisata, terdapat beberapa masalah utama yang dihadapi dan menjadi kendala bagi tumbuhnya industri pariwisata, yaitu:

a) Sinergi antar mata rantai usaha pariwisata yang belum optimal

Persoalan di lapangan menunjukkan bahwa belum semua destinasi pariwisata didukung oleh operasi dari berbagai jenis usaha kepariwisataan dan sinergi yang baik dalam menciptakan produk dan layanan yang berkualitas bagi wisatawan. Sehingga di satu sisi kualitas industri pariwisata belum bisa berkembang optimal, dan di sisi lain nilai manfaat ekonomi pariwisata juga belum mampu dikembangkan untuk menopang perekonomian daerah setempat.

Dalam kerangka membangun struktur dan mata rantai industri pariwisata yang kokoh dan kondusif, maka diperlukan berbagai bentuk koordinasi yang intensif dan kerja sama/ kemitraan yang baik antar pelaku industri pariwisata dalam berbagai wadah organisasi yang telah dibentuk (GIPI, ASITA, PHRI, HPI, dan sebagainya). Penguatan struktur industri pariwisata akan semakin cepat dilaksanakan dengan implementasi peran dan tugas GIPI dalam menyusun kode etik usaha pariwisata Indonesia, menyalurkan aspirasi serta memelihara kerukunan dan kepentingan anggota dalam pengembangan industri pariwisata, meningkatkan kerja sama antara pengusaha pariwisata Indonesia dan pengusaha luar negeri dalam pembangunan kepariwisataan, mencegah persaingan usaha pariwisata yang tidak sehat, serta penyesuaian kebijakan pemerintah di bidang pariwisata. Penguatan struktur Industri pariwisata juga dilaksanakan melalui peningkatan sinergi dan keadilan distribusi antarmata rantai pembentuk industri pariwisata, sehingga dapat terwujud persaingan usaha pariwisata yang sehat pada segala level.

Permasalahan penguatan struktur Industri pariwisata, sinergi dan keadilan distribusi adalah kurangnya kerja sama dan jejaring antarpelaku usaha pariwisata dalam pengembangan industri pariwisata Indonesia serta tidak adanya database usaha pariwisata yang komprehensif. Sebagai rencana tindak prioritas untuk penyelesaian permasalahan tersebut adalah peningkatan daya saing industri pariwisata melalui fasilitasi sertifikasi kompetensi dan peningkatan nilai tambah usaha pariwisata skala mikro, kecil, menengah dan koperasi, serta implementasi sertifikasi usaha pariwisata skala besar nasional maupun internasional yang beroperasi di Indonesia.

Selain itu diperlukan kontribusi dan dukungan dari pelaku industri pariwisata melalui optimalisasi peran dan tugas GPI dalam pembangunan kepariwisataan Indonesia. Sedangkan dukungan dari pemerintah daerah adalah sinergi kebijakan dan kegiatan pemerintah daerah dengan pelaku usaha pariwisata dan pemerintah.

b) Daya saing produk wisata yang belum optimal.

Peningkatan daya saing produk wisata, yang mencakup daya tarik wisata, fasilitas pariwisata dan aksesibilitas, berpotensi untuk meningkatkan daya saing usaha dan Industri pariwisata Indonesia. Sementara kondisi saat ini ketiga komponen tersebut masih dianggap kurang kecuali daya saing sumber daya budaya dan alam Indonesia yang sangat beragam, unik dan menarik.

Daya saing fasilitas pariwisata Indonesia relatif masih kurang jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Singapura dan Thailand. Daya saing usahapariwisata Indonesia masih di bawah ketiga negara tersebut, di atas Philipina dan Brunei Darussalam namun bersaing dengan Vietnam.

Keterbatasan jumlah dan ruang lingkup Lembaga Standar Usaha bidang pariwisata merupakan salah satu kendala dalam upaya peningkatan standar usaha pariwisata di Indonesia. Daya saing aksesibilitas Indonesia secara umum kurang, yang antara lain terlihat dari kecilnya frekuensi dan jumlah kapasitas tempat duduk penerbangan serta infrastruktur jalan, pelabuhan dan bandara di berbagai destinasi wisata Indonesia yang terdapat fasilitas/usaha pariwisata. Selama ini, usaha pariwisata di berbagai destinasi wisata Indonesia kurang berkembang karena kurangnya wisatawan yang datang dan menggunakan fasilitas dan jasa usaha pariwisata walaupun mereka telah mempromosikan produk dan jasa usaha pariwisatanya baik yang dilaksanakan masing-masing maupun berkerja sama dengan pihak lain termasuk pemerintah daerah.

Pengembangan Industri Pariwisata yang belum *in-line* atau sesuai dengan pengembangan aksesibilitas telah berakibat pada kurangnya kemampuan usaha pariwisata untuk memenuhi permintaan pasar, yang pada akhirnya menyebabkan kurangnya daya saing fasilitas atau usaha pariwisata Indonesia.

c) Kesenjangan antara tingkat harga dengan pengalaman wisata.

Kesesuaian tingkat harga dengan kualitas pengalaman (*value for money*) yang diperoleh wisatawan di sejumlah destinasi pariwisata seringkali masih menunjukkan adanya kesenjangan, yang mengakibatkan keluhan wisatawan. Dalam konteks kredibilitas bisnis, kondisi tersebut akan menjadi promosi negatif yang berdampak pada penurunan daya saing produk wisata yang kita miliki sehingga tidak mampu bersaing dengan produk sejenis yang dikembangkan oleh kompetitor.

Disisi lain ketidaksesuaian antara fitur yang dipromosikan dengan realitas yang dijumpai wisatawan/ konsumen juga masih sering terjadi di lapangan. Dalam berbagai kasus dan tempat seringkali masih terjadi ketidaksesuaian antara apa yang dipromosikan dengan apa yang didapat dilapangan.

Promosi semacam ini dapat dianggap sebagai promosi yang tidak bertanggung jawab, yang membuat kredibilitas produk menjadi diragukan. Untuk mengangkat daya saing produk, maka upaya promosi harus menerapkan dan menekankan

prinsip-prinsip pemasaran pariwisata yang bertanggung jawab (*responsible marketing*), yang responsif terhadap hak-hak wisatawan, terhadap pelestarian lingkungan dan hak-hak sosial ekonomi masyarakat lokal.

- d) Kemitraan usaha pariwisata yang belum optimal.
Kemitraan usaha pariwisata antara industri pariwisata skala besar dengan usaha – usaha ekonomi pariwisata skala Mikro, Kecil dan Menengah belum berjalan dengan maksimal. Pengembangan kemitraan usaha dimaksudkan agar peluang dan nilai manfaat berkembangnya kepariwisataan akan dapat dinikmati semua pihak dalam berbagai jenis dan skala usaha.

Oleh karena itu, pola-pola kemitraan antar usaha pariwisata, maupun usaha pariwisata dengan pelaku usaha lainnya di berbagai destinasi pariwisata perlu didorong dan ditingkatkan. Contoh bentuk kemitraan yang dapat dilakukan antara lain adalah kerja sama dalam pengembangan daya tarik wisata, kerja sama promosi dan pemasaran, dan lain-lain.

Kesadaran untuk mengembangkan kemitraan usaha pariwisata dalam kerangka pemberdayaan masyarakat maupun mendorong tumbuhnya UMKM bidang pariwisata masih memerlukan dorongan dan peran aktif Pemerintah selaku fasilitator dan regulator, agar UMKM bidang pariwisata juga memiliki kemampuan, kapasitas dan akses untuk dapat mengembangkan usaha dan memperoleh manfaat ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat setempat.

- e) Pengembangan tanggung jawab lingkungan oleh kalangan usaha pariwisata masih belum optimal.

Pengembangan tanggung jawab lingkungan usaha pariwisata, baik lingkungan sosial, alam maupun budaya agar tetap berkelanjutan berpotensi untuk mengembangkan jejaring usaha pariwisata berkelanjutan yang dapat meningkatkan daya saing usaha pariwisata Indonesia. Permasalahannya adalah masih kecilnya jumlah usaha pariwisata yang memiliki komitmen terhadap tanggung jawab lingkungan dan menerapkan prinsip-prinsip berwawasan lingkungan walaupun permintaan pasar semakin kuat, kurangnya insentif terhadap usaha pariwisata yang menerapkan prinsip-prinsip pembangunan kepariwisataan berkelanjutan, kurangnya alokasi program corporate social responsibility (CSR) usaha pariwisata dan usaha non pariwisata untuk pengembangan pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat lokal.

4. Permasalahan Pembangunan Kelembagaan Pariwisata

Dalam kerangka pengembangan Kelembagaan kepariwisataan, terdapat beberapa masalah utama yang dihadapi antara lain:

- a) Belum meratanya penguatan organisasi yang membidangi kepariwisataan di daerah.

Melalui desentralisasi, Pemerintah Daerah dituntut untuk mengelola keuangan daerah secara akuntabel dan transparan. Dengan kebijakan normatif yang ada, pemerintah daerah diberi kesempatan untuk melakukan perubahan kebijakan dan sistem pengelolaan keuangan daerah. Namun, paradigma tersebut belum menjadi persepsi nasional yang merata di segala tingkatan dan tidak tersedianya tata ruang secara nasional dan holistik yang digunakan sebagai dasar bagi pengembangan sumber-sumber ekonomi, khususnya bagi sektor pariwisata yang berdampak langsung bagi pembangunan ekonomi daerah.

Pariwisata masih dianggap sebagai sektor pilihan, dan belum dianggap sebagai sektor strategis yang memberikan kontribusi berarti bagi pembangunan daerah maupun bagi kesejahteraan masyarakat, sehingga penguatan organisasi yang membidangi pembangunan kepariwisataan belum merata di berbagai daerah. Sebagai akibatnya koordinasi lintas daerah dalam penanganan terpadu aset

kepariwisataan yang bersifat lintas wilayah-pun seringkali mengalami kendala dan hambatan.

Di sisi lain, lemahnya pemahaman tentang kepariwisataan, seringkali memposisikan kepariwisataan sebagai sektor pelengkap yang tidak memiliki posisi strategis dalam struktur organisasi pembangunan di daerah.

- b) SDM pariwisata dan pengembangan pendidikan tinggi pariwisata yang masih terbatas

Peningkatan daya saing produk pariwisata Indonesia agar memiliki keunggulan banding dan keunggulan saing secara regional dan global harus diimbangi oleh ketersediaan SDM yang kompeten, yang tidak hanya berada pada tataran operasional atau tenaga teknis saja tetapi juga pada tataran akademisi, teknokrat, dan profesional. Pengembangan SDM kepariwisataan dapat dilakukan dengan pendekatan pendidikan formal dan pelatihan, baik bagi aparatur, pengusaha industri pariwisata, karyawan pada industri pariwisata maupun masyarakat yang berada di kawasan pariwisata.

Perkembangan pariwisata Indonesia saat ini kurang diimbangi dengan pengembangan SDM bidang pariwisata. Pengembangan SDM bidang pariwisata meliputi aparatur, industri dan masyarakat. Hal ini berguna untuk menunjang pengembangan pariwisata di daerah tersebut. Dengan akan diberlakukannya kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), maka tuntutan SDM yang kompeten dan mampu bersaing dengan SDM dari luar negeri akan semakin dipersyaratkan. Saat ini, adanya bonus demografi yang menyediakan SDM secara kuantitas, perlu diimbangi dengan kualitas yang maksimal agar tidak berbalik menjadi bencana demografi.

- c) Koordinasi dan sinkronisasi pembangunan lintas sektor dan regional yang belum efektif.

Isu koordinasi dan kerja sama antara pusat dan daerah muncul sebagai konsekuensi dari implementasi otonomi daerah yang tidak dilandasi dengan prinsip-prinsip *Good Governance*. Dengan adanya UU Otonomi Daerah maka kewenangan pengembangan produk pariwisata berada di daerah, sedangkan kewenangan pemasarannya berada di pusat.

Pengaturan kewenangan ini menimbulkan arogansi Daerah untuk menentukan arah pembangunan dan pengelolaan sumber daya serta wilayah administratifnya masing-masing, sehingga mengakibatkan pengembangan kegiatan kepariwisataan antara pusat dan daerah kurang terkoordinasi dengan baik. Begitu pula koordinasi antara pemerintah dan swasta.

Hal ini dapat memicu kecenderungan orientasi pembangunan yang hanya mengejar peningkatan PAD yang mendorong masing-masing daerah berkompetisi secara kurang sehat untuk menarik pasar wisatawan ke daerahnya dengan kebijakan-kebijakan tertentu yang tidak memberikan kenyamanan kunjungan wisatawan dan bahkan mengarah pada eksploitasi berlebihan terhadap objek wisata yang berdampak pada penurunan daya dukung dan kualitas objek tersebut. Selain itu, ancaman yang paling serius atas implementasi otonomi daerah adalah munculnya paradigma sektoral yang menggilas peran lintas sektoral pariwisata, yang selanjutnya berpengaruh besar terhadap pembangunan faktor pendukung pariwisata seperti aksesibilitas, amenities, atraksi, dan promosi. Padahal, pembangunan kepariwisataan bersifat borderless, yang berarti pembangunan dan pengelolaannya berlangsung lintas batas administratif dan lintas sektor. Oleh karena itu, hendaknya setiap pemegang kewenangan otonom dan pemangku kepentingan pariwisata harus berpikir nasional (Indonesia) dan bertindak lokal (daerah).

Dengan konsep ini, berarti para pemegang kewenangan daerah otonom tidak menutup diri bagi kebijakan pariwisata secara nasional untuk kepentingan

kemajuan daerahnya. Pemerintah dalam hal ini telah mengeluarkan peraturan yang diharapkan mampu mengatasi masalah koordinasi lintas sektoral dalam pembangunan kepariwisataan di Indonesia dengan Perpres Nomor 64 Tahun 2014, dan Perpres Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata. Dengan adanya peraturan ini, maka jelas posisi sektor pariwisata sebagai ujung tombak pembangunan kepariwisataan di Indonesia sehingga diharapkan tujuan dari pembangunan kepariwisataan tercapai dan multiplier effect dari kegiatan pariwisata menjadi lebih besar.

8.2 Tantangan dan Isu Strategis Pembangunan Kepariwisata

Seiring dengan semakin menggeliatnya pertumbuhan sektor pariwisata sebagai motor penggerak perekonomian negara yang dari tahun ke tahun menunjukkan kinerja yang semakin membaik, menjadikan setiap daerah dengan potensi alam dan budaya yang sangat beragam mulai dilirik dan dikembangkan sebagai destinasi pariwisata yang menarik bagi wisatawan.

Prinsip penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan daerah tidak terlepas dari prinsip penyelenggaraan kepariwisataan nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, bahwa kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:

- a. Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal tersebut menjadikan penyelenggaraan kepariwisataan antar daerah kabupaten dan kota dalam provinsi Sulawesi Selatan menjadi semakin kompetitif karena akan terbangun sinergitas antara kabupaten/ kota serta antara wilayah/ kawasan di dalam kabupaten/ kota dalam bingkai prinsip penyelenggaraan kepariwisataan. Tentu saja jika hal ini tidak dilakukan dalam prinsip penyelenggaraan yang sama, akan memberikan dampak negatif melalui persaingan antar destinasi jika tidak disikapi dengan baik menjadi sebuah pola kemitraan dan integrasi bagi setiap daerah dalam bentuk pengembangan pemaketan bersama dalam pola perjalanan wisata yang menarik.

Beberapa isu strategis yang menjadi fokus perhatian pemerintah daerah kabupaten Luwu dalam pengembangan pariwisata antara lain sebagai berikut :

- a. Pariwisata sebagai sektor prioritas pembangunan daerah.
Berdasarkan analisis potensi alam, sejarah, budaya, minat khusus, dan buatan manusia di kabupaten Luwu, maka pemerintah daerah menetapkan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor andalan penggerak perekonomian daerah. Hal ini dilihat dari pertumbuhan yang cukup signifikan dari kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB kabupaten Luwu.

- b. Degradasi lingkungan dan vandalisme.
Sebagai kawasan dengan wilayah geografis yang lengkap terdiri dari wilayah dataran tinggi hingga wilayah pesisir, dimana kondisi geografis wilayah kabupaten Luwu dan kabupaten lain di sekitarnya dalam wilayah provinsi Sulawesi Selatan selama ini telah banyak mengalami degradasi lingkungan akibat pola hidup masyarakat yang tidak bertanggungjawab dan ramah terhadap lingkungan khususnya dalam melakukan eksploitasi potensi alam sebagai sumber mata pencaharian utama keluarga dan masyarakat.
Pola pembukaan lahan pada wilayah-wilayah konservasi telah menurunkan dan merusak kualitas lingkungan khususnya ekosistem hutan sehingga menurunkan kualitas destinasi kabupaten Luwu dan kabupaten lain di sekitarnya dalam wilayah provinsi Sulawesi Selatan.
Pengrusakan ekosistem hutan dengan pembukaan areal hutan sebagai lahan pertanian dan perkebunan dengan cara membakar, menebang pohon dan melakukan alih fungsi lahan secara tidak bertanggungjawab telah menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, udara, air, dan memperluas daerah rawan bencana di kabupaten Luwu.
Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan perluasan wilayah pemukiman, menjadikan kawasan penyangga dan pelindung seperti kawasan hutan dan area resapan air ikut terdegradasi dan berubah fungsi.
Faktor lain yang turut berkontribusi terhadap degradasi lingkungan adalah masalah sampah khususnya sampah plastik dan sampah lain yang timbul akibat pertumbuhan penduduk dan pemukiman. Untuk kabupaten Luwu, selain sampah penduduk lokal juga pada waktu-waktu tertentu terdapat sampah kiriman di sungai dan laut dari kawasan lain dari luar wilayah kabupaten Luwu sehingga jika pengembangan pariwisata tidak dilakukan secara terencana, maka akan menimbulkan kerusakan lingkungan yang lebih parah dan menjadikan kabupaten Luwu sebagai destinasi yang tidak menarik.
- c. Koordinasi lintas sektoral yang masih rendah
Pembangunan sektor pariwisata dikenal sebagai pembangunan multi-sektor yang melibatkan banyak pihak, baik pemerintah pusat maupun provinsi Sulawesi Selatan, serta lintas sektor yang tidak hanya melibatkan instansi pemerintah namun juga sektor swasta, bahkan masyarakat dan wisatawan secara umum.
Sampai saat ini, koordinasi antar OPD dalam pemerintahan daerah kabupaten Luwu, kabupaten Luwu dengan kabupaten lain di sekitarnya di dalam wilayah provinsi Sulawesi Selatan, kabupaten Luwu dengan kabupaten lain di sekitarnya di luar wilayah provinsi Sulawesi Selatan, kabupaten Luwu dengan pemerintah pusat, serta para pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata kabupaten Luwu dengan kabupaten lain di sekitarnya dalam wilayah provinsi Sulawesi Selatan belum bersinergi dengan baik.
- d. Regulasi yang kontraproduktif.
Regulasi merupakan salah satu masalah klasik yang dihadapi khususnya dalam hal relevansi dan tumpang tindihnya kebijakan dalam pengelolaan dan pengembangan sektor pariwisata.
Selain tumpang tindih kebijakan, juga terdapat banyak kebijakan yang tidak relevan dalam mendorong pembangunan pariwisata daerah seperti kebijakan investasi, pengelolaan kawasan konservasi, pengelolaan wilayah laut, pantai dan pesisir, pengelolaan taman wisata alam pada kawasan hutan lindung, dan sebagainya.
Masih banyak ditemukan regulasi yang tidak sinkron dengan regulasi lainnya atau regulasi yang secara operasional menimbulkan resistensi pada masyarakat ataupun regulasi yang tidak dapat diimplementasikan.

- e. **Infrastruktur pendukung pariwisata yang masih sangat terbatas**
 Sebagai wilayah dengan kondisi geografis yang cukup unik yaitu sebagai hub dan perlintasan masyarakat dari beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan, serta jalur penyeberangan dari Sulawesi Selatan ke provinsi Sulawesi Tenggara menjadikan kabupaten Luwu sebagai salah satu wilayah di provinsi Sulawesi Selatan yang masih perlu untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur jika dibandingkan dengan wilayah lain yang telah menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor andalan ekonomi daerah dan masyarakat di Sulawesi Selatan.
 Ketersediaan infrastruktur jalan, jembatan, bangunan, dan transportasi darat serta hampir seluruh jenis infrastruktur utama dalam pembangunan kepariwisataan masih sangat terbatas dari sisi jumlah dan kualitas.
 Selain itu, infrastruktur dasar yang menghubungkan antara daya tarik wisata baik antar wilayah juga belum tersedia dengan baik. Hal ini berdampak pada kenyamanan dan keamanan wisatawan saat berkunjung ke kabupaten Luwu.
- f. **Kualitas sumberdaya manusia pariwisata yang masih rendah.**
 Kualitas sumberdaya manusia pariwisata baik pada sektor pemerintahan maupun industri masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan oleh pola rekrutmen dan pengembangan karir pada sektor pemerintahan masih belum berjalan dengan optimal.
 Pada sektor swasta khususnya pada usaha/ industri pariwisata, rendahnya kualitas sumberdaya manusia lebih banyak disebabkan oleh kualitas industri pariwisata yang masih berskala kecil sehingga belum menarik minat tenaga kerja profesional untuk bekerja pada industri pariwisata di kabupaten Luwu.
 Keberadaan SMK pariwisata juga masih menyelenggarakan program dan jenjang pendidikan yang sangat terbatas dengan fasilitas dan tenaga pendidik yang terbatas pula sehingga kontribusinya dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia pariwisata belum optimal.
 Di sisi lain, putra-putri terbaik kabupaten Luwu yang menimba ilmu pada pendidikan tinggi dan vokasi di luar kabupaten Luwu, selanjutnya enggan kembali untuk bekerja di kabupaten Luwu karena pertimbangan kualitas industri dan usaha yang masih kecil serta pendapatan yang relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan pendapatan mereka pada industri yang lebih besar dan daerah yang lebih maju dalam pembangunan pariwisatanya.
- g. **Investasi pariwisata yang masih terbatas**
 Investasi pariwisata yang ada di kabupaten Luwu saat ini hampir sepenuhnya merupakan investasi dari pengusaha lokal yang dalam penyediaan usaha/ industri pariwisata dilakukan melalui pengalihan dan atau penambahan fungsi dari rumah mereka menjadi usaha hotel atau restoran serta usaha pariwisata lainnya.
 Hal ini mengakibatkan rendah kualitas industri/ usaha pariwisata yang ada. Bentuk dan desain bangunan yang tidak sesuai, ketersediaan fasilitas yang sangat terbatas, serta desain interior yang kurang menarik.
 Untuk itu diperlukan sebuah kebijakan investasi yang dapat menarik minat investor dalam menanamkan modal dan membangun usaha pariwisata di kabupaten Luwu sehingga akan meningkatkan daya saing destinasi sekaligus mendorong minat kunjungan wisatawan ke kabupaten Luwu.
- h. **Pasar dan pemasaran pariwisata konvensional**
 Pengembangan pasar dan pola pemasaran pariwisata kabupaten Luwu dilaksanakan masih cenderung konvensional melalui berbagai media namun pada tempat dan waktu yang kurang sesuai.
 Mengacu pada prinsip promosi *Destination-Origin-Timeline* (DOT), sejatinya kabupaten Luwu mampu mengidentifikasi segmentasi pasar yang sesuai dengan sediaan produk yang dimiliki saat ini. Pintu masuk utama wisatawan ke kabupaten Luwu adalah kota Makassar, maka sebaiknya kabupaten Luwu melakukan

branding dan promosi di bandara dan tempat-tempat strategis di kota Makassar atau kota-kota lain yang menjadi pintu masuk wisatawan ke kabupaten Luwu. Digitalisasi pemasaran pariwisata juga belum dilakukan secara optimal serta pelibatan masyarakat untuk ikut mempromosikan potensi kabupaten Luwu melalui media sosial belum dilaksanakan secara optimal. Hal lain yang perlu menjadi prioritas adalah pembuatan *branding* dan *tag-line* promosi dan pemasaran pariwisata kabupaten Luwu sehingga lebih mudah diingat, dikenal dan menarik untuk dikunjungi. Pembuatan *branding* dan *tag-line* pariwisata harus dibuat bersesuaian dengan visi dan misi pembangunan serta sistem nilai masyarakat Luwu.

8.3 Prinsip Pembangunan Kepariwisata

Prinsip pembangunan kepariwisataan kabupaten Luwu disesuaikan dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten Luwu tahun 2019-2024, yaitu "**Luwu Sebagai Daerah Yang Maju, Mandiri Dan Sejahtera Dalam Nuansa Religi**". Adapun makna yang terkandung dalam visi tersebut, adalah :

- a. Maju, yaitu kondisi masyarakat yang menikmati standar hidup yang relatif tinggi, yang ditandai dengan pemanfaatan teknologi, ekonomi yang merata, sumber daya manusia yang berkualitas (adaptif dan kompetitif), derajat kesehatan yang membaik, dan terpenuhinya hak pendidikan dasar, tercapainya tujuan pembangunan fisik dan non fisik, serta birokrasi yang profesional, inovatif, dan responsif;
- b. Sejahtera, yaitu kondisi dimana masyarakat Kabupaten Luwu memiliki tata kehidupan dan penghidupan, mampu memenuhi kebutuhan dasar secara berkelanjutan (material maupun spiritual), yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan tentram;
- c. Mandiri, yaitu mampu memberdayakan seluruh potensi yang ada untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara berkelanjutan; dan
- d. Religi, yaitu kehidupan masyarakat Kabupaten Luwu yang mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya, yang tercermin dalam tatanan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram dan nyaman.

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut, maka misi pembangunan daerah kabupaten Luwu 2019-2024, adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan, dan akuntabel;

Tata kelola pemerintahan bersih pada prinsipnya adalah sebuah model penyelenggaraan pemerintahan yang paling diminati bahkan dijadikan nilai kerja untuk memperoleh kepercayaan publik. Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Luwu melalui misi ini tidak hanya menjadikan hal tersebut sebagai narasi melainkan tercermin dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk mendukung tercapainya pemerintahan yang bersih salah satu hal yang paling esensial adalah penyelenggaraan pemerintahan secara profesional.

Secara umum, upaya-upaya yang dilakukan untuk mewujudkan misi ini antara lain adalah peningkatan kualitas sistem perencanaan pembangunan, meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, penerapan *merit system* dalam pengisian jabatan, pembinaan dan pengawasan melekat, pengembangan inovasi, peningkatan kualitas SDM aparatur, penguatan regulasi, meningkatkan pengelolaan keuangan daerah.

Dengan pelaksanaan misi ini, akan terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang amanah dan transparan, yang memuaskan masyarakat. Hal ini akan

meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah, sehingga terwujud pemerintahan yang berwibawa.

- b. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat;

Misi kedua merupakan misi yang esensial dalam pencapaian Visi Luwu yang Maju. Pada pokoknya misi ini adalah upaya pemerintah menghadirkan pelayanan secara maksimal agar masyarakat Luwu dapat menikmati pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Misi ini juga dimaksudkan untuk memberikan pelayanan dasar yang inklusif. Secara umum misi kedua ini diarahkan untuk mencapai tujuan terciptanya suatu kondisi masyarakat Luwu yang cerdas, adaptif, dan kompetitif dengan derajat pengetahuan yang maju serta menguasai perkembangan teknologi. Melalui misi ini peran manajemen pendidikan yang berkualitas adalah kunci utama, peningkatan kualitas ini diharapkan akan memberikan pelayanan pendidikan sesuai SPM.

Selain ditandai dengan masyarakat yang cerdas, Luwu yang maju juga diarahkan untuk mencapai derajat masyarakat yang sehat. Upaya peningkatan derajat kesehatan yang berkualitas diharapkan terwujud melalui manajemen kesehatan yang berkualitas dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang merata di seluruh wilayah.

- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan; Melalui misi ini akan menjawab kebutuhan beberapa daerah yang masih terisolir disebabkan belum adanya pembangunan infrastruktur yang representatif, terintegrasi dan berkeadilan sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Dengan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan, akan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi, bahkan juga diarahkan untuk pertumbuhan wilayah ekonomi baru guna menghindari kesenjangan ekonomi antarwilayah.

Sehubungan dengan itu, berbagai infrastruktur yang diprioritaskan melalui misi ini adalah:

- 1) Infrastruktur yang berhubungan dengan pembangunan fasilitas umum berwujud fisik antara lain jalan raya, saluran irigasi, dan lain-lain.
- 2) Infrastruktur yang berhubungan dengan fungsi utilitas publik, antara lain: pengadaan air bersih, penyediaan jaringan telekomunikasi, dan lain-lain.
- 3) Infrastruktur yang berhubungan dengan sistem, nilai, norma, peraturan, dan pelayanan publik, yang disediakan oleh berbagai pihak, khususnya pemerintah, antara lain: etika kerja, peraturan lalu lintas, pelayanan publik yang berkualitas, peraturan perundangan, dan lain-lain.

Infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah maupun swasta terdiri dari berbagai komponen yang saling mendukung satu sama lainnya. Beberapa komponen infrastruktur tersebut antara lain adalah: perencanaan kota, jalan kota, air minum, drainase, air limbah, persampahan, pengendalian banjir, perumahan, perbaikan kampung, perbaikan prasarana kawasan pasar, dan lain-lain.

Percepatan pembangunan infrastruktur secara substansial adalah bagian perwujudan perlakuan adil bagi seluruh masyarakat Luwu. Pengembangan dan percepatan pembangunan infrastruktur berpedoman pada tata ruang dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

- d. Pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan koperasi, usaha mikro kecil menengah dan perluasan lapangan kerja;

Pada misi keempat ini diarahkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Peningkatan kesejahteraan rakyat dilakukan melalui peningkatan pendapatan masyarakat dengan mengaktifkan kembali koperasi sebagai dasar ekonomi kerakyatan. Selain itu misi ini juga

merespon perubahan yang terjadi dimasyarakat dengan melakukan pembinaan dan peningkatan kualitas usaha mikro kecil menengah, promosi dan perluasan pasar bagi produk unggulan daerah. Diharapkan melalui misi ini mampu menciptakan lapangan kerja.

- e. Mewujudkan ketahanan pangan dan perekonomian daerah yang tangguh berbasis agribisnis;

Amanah yang terkandung pada misi kelima adalah Kabupaten Luwu yang memiliki ketahanan pangan yang tangguh dan agribisnis yang tumbuh dengan baik, sehingga meningkatkan perekonomian daerah. Hal ini dapat diwujudkan dengan meningkatkan produksi dan daya saing produk pertanian. Untuk meningkatkan produksi dilakukan dengan peningkatan jaringan irigasi dan ekstensifikasi dengan pembukaan lahan baru, sementara intensifikasi dilakukan dengan memaksimalkan fungsi penyuluh pertanian.

Sedangkan untuk meningkatkan daya saing produk pertanian dilakukan dengan pengembangan inovasi pada sektor-sektor unggulan daerah dan juga pemanfaatan nilai-nilai kearifan lokal. Kabupaten Luwu memiliki berbagai jenis produk olahan makanan yang sudah dikenal masyarakat luas, baik di Provinsi Sulawesi Selatan maupun Indonesia.

- f. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam mewujudkan masyarakat kabupaten Luwu yang religius;

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat yang taat dan taqwa kepada Tuhan YME sebagai cerminan dari pengamalan nilai-nilai agama, sehingga terwujud kehidupan masyarakat yang religius. Ukuran yang dapat digunakan untuk hal ini antara lain adalah kondisi ketentraman, ketertiban dan kenyamanan lingkungan. Oleh karena itu, upaya-upaya yang dilakukan dapat berbentuk fisik maupun non fisik seperti fasilitasi terhadap pembangunan/ pemeliharaan sarana peribadatan maupun pihak-pihak yang terkait, peningkatan kegiatan-kegiatan keagamaan, penegakan hukum dan lain-lain.

Melalui misi ini, manusia yang berakhlak secara terus-menerus dibangun sejak usia dini. Disamping itu, ditumbuhkembangkan rasa saling percaya, kemauan untuk saling nasehat menasehati, serta kesadaran untuk menjadi teladan bagi masyarakat disekitarnya. Dengan demikian, kehidupan masyarakat yang religius menjadi penopang dalam mewujudkan kondisi Luwu yang kodusif dan harmonis.

- g. Optimaslisasi otonomi desa dan pemberdayaan masyarakat desa;

Arah dari misi ialah memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa untuk memperkuat berbagai bentuk partisipasi masyarakat desa. Mengingat bahwa pengertian otonomi desa adalah kewenangan yang diberikan kepada desa secara luas untuk dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka upaya yang dilakukan adalah meningkatkan kemampuan pemerintahan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pemanfaatan dana desa.

Untuk mendukung capaian arah misi tersebut dibutuhkan kolaborasi, melibatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan fungsinya, dan juga inovasi masyarakat desa itu sendiri, terutama dalam pemberdayaan kaum perempuan dan kaum pemuda desa. Kolaborasi ini akan diproyeksikan tidak hanya sekedar melibatkan masyarakat saja, tetapi partisipasi dengan kolaborasi akan menghasilkan suatu tindakan maupun kebijakan yang mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi desa, dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

- h. Menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif berwawasan lingkungan;

Investasi atau penanaman modal menjadi salah satu faktor penentu pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Dengan meningkatnya investasi, baik asing/ PMA maupun domestik/ PMDN, maka diharapkan terjadi akselerasi roda perekonomian yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Iklim investasi adalah

semua kebijakan, kelembagaan, dan lingkungan, baik yang sedang berlangsung maupun yang diharapkan terjadi di masa datang, yang bisa mempengaruhi tingkat pengembalian dan risiko suatu investasi.

Misi ini merupakan rumusan kebijakan yang menitikberatkan pada peningkatan investasi tetapi daya dukung lingkungan tetap terjaga. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan adalah mengundang investor untuk berinvestasi di Kabupaten Luwu dengan memaksimalkan kondisi yang mendukung iklim investasi. Menurut Asian Development Bank (2005), terdapat tiga faktor utama dalam iklim investasi mencakup:

- 1) Kondisi ekonomi makro termasuk stabilitas ekonomi makro, keterbukaan ekonomi, persaingan pasar, dan stabilitas sosial dan politik;
- 2) Kepemerintahan dan kelembagaan termasuk kejelasan dan efektivitas peraturan, perpajakan, sistem hukum, sektor keuangan, fleksibilitas pasar tenaga kerja dan keberadaan tenaga kerja yang terdidik dan terampil;
- 3) Infrastruktur mencakup antara lain sarana transportasi, telekomunikasi, listrik, dan air.

Selanjutnya menurut KPPOD dan Asia Foundation (2009), terkait dengan daya tarik investasi di suatu daerah, ada beberapa faktor dan variabel penentu daya tarik tersebut. Faktor dan variabel tersebut adalah:

- 1) Faktor kelembagaan (variabel kepastian hukum, keuangan daerah, aparatur, perda);
- 2) Faktor sosial politik (variabel stabilitas politik, konflik masyarakat, unjuk rasa, partisipasi masyarakat, keamanan, dan budaya);
- 3) Faktor ekonomi daerah (variabel potensi ekonomi dan struktur ekonomi);
- 4) Faktor tenaga kerja dan produktivitas (variabel biaya tenaga kerja, ketersediaan tenaga kerja, dan produktivitas tenaga kerja); dan
- 5) Faktor infrastruktur fisik (variabel ketersediaan dan kualitas pelabuhan udara, pelabuhan laut, jalan, telepon, dan listrik).

- i. Penegakan supremasi hukum, hak asasi manusia, untuk mendorong partisipasi publik;

Misi kesembilan secara spesifik adalah perwujudan dari target pembangunan berkelanjutan terutama tentang penegakan Perda, perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak, serta pemenuhan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Selain itu misi ini diarahkan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, sehingga akan menstimulus keterlibatan masyarakat dalam membangun daerah.

Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat, perlu dilakukan berbagai upaya peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki fungsi penting, antara lain sebagai sarana bagi masyarakat baik orang perseorangan, kelompok masyarakat, maupun organisasi kemasyarakatan dalam mengekspresikan kebutuhan dan kepentingannya sehingga proses pembentukan kebijakan daerah lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan Masyarakat. Partisipasi Masyarakat juga merupakan hal penting dalam mewujudkan kepedulian dan dukungan Masyarakat untuk keberhasilan pembangunan di daerahnya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 dinyatakan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam setiap perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan daerah.

- j. Mewujudkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta penanggulangan bencana.
Misi kesepuluh ini pada prinsipnya mengarahkan pemanfaatan seluruh potensi sumber daya alam untuk kepentingan masyarakat Luwu. Dalam penyelenggaraan pemanfaatan sumber daya alam harus didasarkan pada kaidah-kaidah hasil kajian lingkungan hidup, selain itu merupakan keniscayaan dalam konteks pengambilan kebijakan terutama dalam hal pemanfaatan sumber daya alam harus mempedomani rencana pembangunan berkelanjutan dengan tujuan untuk tetap menjaga keseimbangan alam guna mencegah dan meminimalisir terjadinya bencana alam

Dalam upaya untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah kabupaten Luwu tersebut, maka sasaran beserta indikator tiap tujuan dari program unggulan yang direncanakan oleh pemerintah daerah pada tahun 2019-2024 dijabarkan sebagai berikut:

- a. Tujuan 1: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
Tata kelola pemerintahan yang akan diwujudkan adalah orientasi pada kepentingan masyarakat, khususnya keberpihakan pada masyarakat yang lemah, memperteguh keharmonisan, kepemimpinan dan martabat manusia.
Selain itu juga ditekankan adanya partisipasi, keadilan, persamaan hak, transparansi, supremasi hukum dan akuntabilitas, didukung dengan sumber daya aparatur yang profesional, mandiri dan bertanggung jawab. Dibidang keuangan, diupayakan untuk terus mengembangkan pengelolaan keuangan daerah sehingga semakin mandiri dan mampu mengembangkan potensi daerah. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dicapai dengan sasaran sebagai berikut:
- 1) Sasaran 1.1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, dengan indikator Nilai SAKIP.
 - 2) Sasaran 1.2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, dengan indikator Opini Laporan Keuangan.
 - 3) Sasaran 1.3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat.
- b. Tujuan 2: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
Untuk menyiapkan generasi emas, pendidikan menjadi jalan utama. Dalam hal ini, pendidikan untuk semua (*education for all*) menjadi pekerjaan yang perlu dituntaskan. Bukan sekadar pemerataan, tetapi juga peningkatan kualitas. Upaya yang dilakukan antara lain gerakan pendidikan anak usia dini serta penuntasan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar. Di samping itu perluasan akses ke perguruan tinggi juga diupayakan dengan memberikan akses secara khusus kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi, tetapi berkemampuan akademik.
Selain pendidikan, aspek kesehatan juga perlu mendapat prioritas melalui peningkatan kualitas layanan dengan menyediakan pusat kesehatan masyarakat pada tingkat desa, menyeimbangkan ketersediaan tenaga medis, meningkatkan kualifikasi tenaga medis, hingga mengefisiensikan pelayanan kesehatan.
Tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dicapai dengan sasaran sebagai berikut:
- 1) Sasaran 2.1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat, dengan indikator Indeks Pendidikan.
 - 2) Sasaran 2.2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dengan indikator Indeks Kesehatan.

- c. Tujuan 3: Pemerataan pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas dan berkelanjutan.

Infrastruktur merupakan aset (fisik dan non fisik) yang dirancang dalam sistem agar mampu melayani masyarakat. Mengacu pada manfaat infrastruktur bagi masyarakat tersebut, karakteristik dari peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur diprioritaskan untuk yang menghasilkan masukan/input bagi masyarakat (sarana air bersih, jaringan irigasi), mengambil keluaran/ output dari masyarakat (saluran drainase, tempat pembuangan sampah, sanitasi), dan yang dapat memberikan input dan mengambil output dari masyarakat (jaringan komunikasi, jalan raya).

Tujuan meningkatnya kualitas infrastruktur dasar, dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- 1) Sasaran 3.1. Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah, dengan indikator Persentasi Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap.
- 2) Sasaran 3.2. Meningkatkan kelayakan dan ketersediaan infrastruktur dasar, dengan indikator Persentase penduduk berakses air minum dan Rasio jaringan irigasi.
- 3) Sasaran 3.3. Meningkatkan PSU lingkungan kawasan permukiman, dengan indikator Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.

- d. Tujuan 4: Meningkatnya perekonomian daerah

Pembangunan merupakan tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita. Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan semua elemen yang terdapat dalam suatu negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Hal ini dilakukan karena kenaikan pendapatan perkapita mencerminkan perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pendapatan perkapita harus berlangsung dalam jangka panjang.

Suatu perekonomian dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang apabila pendapatan perkapita dalam jangka panjang cenderung meningkat, meskipun tidak berarti harus mengalami kenaikan terus-menerus (misalnya dalam keadaan bencana). Ada beberapa faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, namun pada hakikatnya faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi.

Faktor ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi diantaranya adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan keahlian atau kewirausahaan. Sumber daya alam, yang meliputi tanah dan kekayaan alam seperti kesuburan tanah, keadaan iklim/cuaca, hasil hutan, tambang, dan hasil laut, sangat memengaruhi pertumbuhan industri, terutama dalam hal penyediaan bahan baku produksi. Sementara itu, keahlian dan kewirausahaan dibutuhkan untuk mengolah bahan mentah dari alam, menjadi sesuatu yang memiliki nilai lebih tinggi.

Sumber daya manusia juga menentukan keberhasilan pembangunan nasional melalui jumlah dan kualitas penduduk. Jumlah penduduk yang besar merupakan pasar potensial untuk memasarkan hasil-hasil produksi, sementara kualitas penduduk menentukan seberapa besar produktivitas yang ada.

Tujuan meningkatnya perekonomian daerah, dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- 1) Sasaran 4.1. Meningkatnya pendapatan masyarakat, dengan indikator PDRB Perkapita dan Indeks Gini.
- 2) Sasaran 4.2. Mengembangkan destinasi wisata, dengan indikator Jumlah obyek wisata yang dikembangkan.
- 3) Sasaran 4.3. Menurunnya jumlah pengangguran, dengan indikator Tingkat

Pengangguran Terbuka.

- e. Tujuan 5: Meningkatkan hasil pangan dan kemandirian pangan sebagai penopang kesejahteraan masyarakat.

Kemandirian pangan dapat diartikan sebagai kemampuan daerah dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Kemandirian pangan dipengaruhi oleh hasil produksi dan selanjutnya kemandirian pangan juga merupakan penopang/ ukuran kesejahteraan masyarakat di suatu daerah.

Tujuan meningkatkan hasil pangan dan kemandirian pangan sebagai penopang kesejahteraan masyarakat, dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- 1) Sasaran 5.1. Meningkatnya perekonomian daerah berbasis agribisnis, dengan indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian.

- f. Tujuan 6: Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan religius.

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan dalam rangka tercapainya tujuan pembangunan yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Toleransi merupakan suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya. Sikap toleransi dapat menghindari terjadinya diskriminasi, walaupun banyak terdapat kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu kelompok masyarakat. Toleransi merupakan salah satu ciri kehidupan yang religius.

Tujuan terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan religius, dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- 1) Sasaran 6.1. Meningkatnya upaya penyebarluasan ajaran agama dengan indikator Jumlah kader mubaligh muda (orang) dan Presentase kasus menerima suap, penipuan dan penggelapan.

- g. Tujuan 7: Meningkatkan kemandirian Desa

Setidaknya terdapat tiga dimensi untuk mengukur kemandirian desa. Pertama, dimensi kelembagaan pemerintah desa. Pada dimensi ini akan diketahui bagaimana tingkat kemandirian kelembagaan pemerintah desa terhadap pemerintah di atasnya. Ketergantungan kelembagaan pemerintah desa terhadap pemerintah di atasnya harus semakin kecil.

Kedua, dimensi kelembagaan ekonomi masyarakat desa. Pada dimensi ini akan diketahui bagaimana tingkat kemampuan kelembagaan ekonomi masyarakat dalam upaya memajukan kondisi perekonomian. Semakin berjalan fungsi-fungsi kelembagaan ekonomi dalam menjawab semua kebutuhan material masyarakat, kelembagaan ekonomi itu semakin mandiri.

Ketiga, kelembagaan sosial masyarakat. Pada dimensi ini akan tergambar dengan jelas bagaimana fungsi-fungsi kelembagaan sosial ini berjalan. Berbeda dengan dua dimensi lainnya yang cenderung material, dimensi ketiga ini cenderung abstrak. Bagaimana nilai-nilai kearifan lokal, nilai-nilai universal dianut dan dijalankan oleh masyarakat dalam kelembagaan sosial akan sangat menentukan bagaimana keberhasilan kelembagaan sosial ini berperan di masyarakat.

Tujuan meningkatkan kemandirian Desa, dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- 1) Sasaran 7.1. Berkembangnya Perekonomian Desa, dengan indikator Jumlah BUMDes berprestasi di tingkat nasional.

- h. Tujuan 8: Meningkatkan nilai investasi
Investasi adalah penanaman aset atau dana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu demi memperoleh imbal balik yang lebih besar di masa depan. Ada banyak hal yang terlibat dalam aktivitas ini, dan beberapa di antaranya adalah jumlah dana dan tujuan dari investasi itu sendiri. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rangka meningkatkan investasi di suatu daerah adalah situasi yang kondusif, infrastruktur, dan jaminan berinvestasi.
Tujuan meningkatkan nilai investasi, dicapai dengan sasaran sebagai berikut:
1) Sasaran 8.1. Meningkatnya realisasi investasi, dengan indikator Jumlah PMA dan PMDN yang berinvestasi dan Persentase wirausaha muda.
- i. Tujuan 9: Meningkatnya penegakan dan perlindungan hukum.
Menanamkan kesadaran hukum pada warga masyarakat wajib dilakukan semua pihak agar tertib hukum dapat berjalan lancar. Hukum adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengatur sebuah lembaga atau sebuah kelompok masyarakat tertentu. Hukum muncul untuk mengatur norma dan kehidupan masyarakatnya agar tercipta keharmonisan hidup. Hukum mengatur semua regulasi tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat. Hukum membuat suatu keadaan, baik politik, sosial, maupun ekonomi dan beberapa bidang yang lain menjadi lebih tertata dan lebih baik. Hukum sejatinya tak akan pernah bisa terjadi bila tidak ada kesadaran untuk mentaatinya.
Terdapat beberapa hal yang perlu ditekankan agar kesadaran hukum bisa tumbuh dan berlaku sebagaimana mestinya di tengah-tengah masyarakat, yaitu: pengetahuan yang luas tentang apa itu hukum, pemahaman akan hukum, kesadaran tentang kewajiban hukum terhadap orang lain, serta penerimaan masyarakat terhadap hukum.
Tujuan meningkatnya penegakan dan perlindungan hukum, dicapai dengan sasaran sebagai berikut:
1) Sasaran 9.1. Meningkatkan produk hukum daerah, dengan indikator Cakupan ketersediaan produk hukum daerah (%);
2) Sasaran 9.2. Meningkatkan perlindungan sosial terhadap penyandang masalah sosial, dengan indikator Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial;
3) Sasaran 9.3. Meningkatkan pemberdayaan gender dan perlindungan terhadap perempuan dan anak, dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender.
- j. Tujuan 10: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
Masalah lingkungan hidup merupakan kewajiban asasi manusia untuk dikelola sebagaimana mestinya, sehingga setiap manusia baik secara langsung maupun tidak langsung bertanggung jawab terhadap kelangsungan lingkungan hidup. Pemerintah daerah harus melakukan upaya-upaya konkrit untuk menjaga kualitas lingkungan hidup sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kemampuan dan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan. Sebagai contoh, untuk menghindari bencana atau mengurangi resiko dan kerugian khususnya bencana banjir, diperlukan adanya pemahaman tentang pengelolaan sungai yang baik dengan kerja sama semua pihak.
Tujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dicapai dengan sasaran sebagai berikut:
1) Sasaran 10.1. Meningkatkan pengawasan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan indikator Persentase pembinaan dan pengawasan izin PPLH dan PUU LH;
2) Sasaran 10.2. Meningkatnya kualitas pengelolaan bencana, dengan indikator Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).

8.4 Konsep Pembangunan Kepariwisata

Konsep pembangunan kepariwisataan kabupaten Luwu disusun berdasarkan integrasi dan arahan yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Tahun 2011-2031 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2011.

8.4.1 Tujuan Penataan Ruang

Tujuan penataan ruang Kabupaten Luwu merupakan arahan perwujudan ruang wilayah kabupaten yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Rumusan tujuan penataan ruang ini akan berfungsi sebagai dasar untuk memformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten, memberikan arahan bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW Kabupaten, dan sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan :

1. Visi dan misi wilayah kabupaten;
2. Karakteristik wilayah kabupaten;
3. Isu strategis;
4. Kondisi obyektif yang diinginkan.

Kriteria yang digunakan dalam perumusan tujuan penataan ruang wilayah kabupaten adalah:

1. Tidak bertentangan dengan tujuan penataan ruang provinsi dan nasional;
2. Jelas dan dapat tercapai sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan;
3. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Merujuk pada uraian di atas, maka tujuan penataan ruang wilayah kabupaten Luwu adalah mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dengan di dukung masyarakat melalui pengembangan pertanian, perikanan dan kelautan berbasis konservasi dan mitigasi bencana.

Peran perencanaan penataan ruang kabupaten Luwu adalah sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan kesinambungan pemanfaatan ruang di kabupaten Luwu. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu berfungsi sebagai pedoman untuk :

- i. penyusunan rencana pembangunan daerah;
- j. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Luwu;
- k. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah serta keserasian antarsektor di Kabupaten Luwu;
- l. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Kabupaten Luwu; dan
- m. perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kabupaten Luwu dengan kawasan sekitarnya.

8.4.2 Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten Luwu merupakan arahan tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan wilayah ruang kabupaten. Kebijakan penataan ruang Kabupaten Luwu, meliputi :

- a. Penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung yang meliputi hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan rawan bencana, kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya;
- b. Pengembangan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan;

- d. Pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis pertanian, perikanan dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan;
- e. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar, mengurangi disparitas wilayah/ kawasan dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana; dan
- f. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

8.4.3 Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten Luwu merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Strategi penataan ruang Kabupaten Luwu, terdiri atas :

- a. Strategi penataan ruang yang dilakukan dalam rangka penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung, meliputi:
 - 1) Pemantapan tata batas kawasan lindung dan kawasan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi;
 - 2) Menyusun dan melaksanakan program rehabilitasi lingkungan, terutama pemulihan fungsi perlindungan daerah bawahannya, setempat dan suaka alam serta hutan lindung yang berbasis masyarakat;
 - 3) Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan; dan
 - 4) meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya keanekaragaman hayati.
- b. Strategi penataan ruang yang dilakukan untuk pengembangan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meliputi:
 - 1) Mengembangkan energi alternatif sebagai sumber listrik;
 - 2) Mengembangkan kegiatan konservasi yang bernilai lingkungan dan sekaligus juga bernilai sosial-ekonomi; dan
 - 3) Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan sumber energi yang terbarukan.
- c. Strategi penataan ruang yang dilakukan dalam rangka peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan, meliputi:
 - 1) Mempertahankan lahan-lahan persawahan beririgasi teknis sebagai kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan agar tidak beralih fungsi peruntukan lain;
 - 2) meningkatkan produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan melalui intensifikasi lahan;
 - 3) Memanfaatkan lahan non produktif dan/atau lahan kritis untuk peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat;
 - 4) Meningkatkan teknologi pertanian, termasuk perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi; dan
 - 5) Meningkatkan pemasaran hasil pertanian melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan.
- d. Strategi penataan ruang yang dilakukan untuk pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis pertanian, perikanan dan kelautan, meliputi:
 - 1) Mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar agroindustri dan agribisnis pada kawasan industri yang telah ditetapkan;

- 2) Mengembangkan balai pendidikan, penelitian dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menjadi kekuatan utama ekonomi masyarakat pesisir; dan
 - 3) Meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, pengelolaan objek wisata yang lebih profesional serta pemasaran yang lebih agresif, inovatif dan efektif.
- e. Strategi penataan ruang yang dilakukan untuk pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar, mengurangi disparitas wilayah/ kawasan dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana, meliputi:
- 1) Membangun sistem prasarana dan sarana transportasi (darat, laut, udara dan ASDP) yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan dan berimbang;
 - 2) Mengembangkan sistem prasarana dan sarana energi kelistrikan dan migas, telekomunikasi dan sumberdaya air/ pengairan untuk lahanlahan persawahan untuk meningkatkan produktivitas hasil-hasil pertanian;
 - 3) Membangun utilitas dan fasilitas sosial secara proporsional dan memadai sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap pusat permukiman (kawasan darat dan pesisir) dan pusat pelayanan lingkungan; dan
 - 4) Menyusun program dan membangun berbagai perangkat keras dan lunak untuk mitigasi berbagai bencana alam, seperti abrasi pantai, longsor, banjir, gerakan tanah, gempa bumi, kebakaran hutan dan ancaman lainnya.
- f. Strategi penataan ruang yang dilakukan untuk meningkatkan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi :
- 1) Mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
 - 2) Menyusun perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang, memperhatikan kepentingan pertahanan keamanan;
 - 3) mengembangkan kawasan lindung dan/ atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun;
 - 4) Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya; dan
 - 5) Turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara.

8.5 Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan Kepariwisata

8.5.1 Visi Pembangunan Kepariwisata

Pengembangan pariwisata Kabupaten Luwu diharapkan memberi kontribusi dalam pencapaian visi pembangunan kabupaten Luwu secara umum. Oleh karena itu, rumusan Visi Pengembangan Pariwisata Kabupaten Luwu adalah **“Terwujudnya Kabupaten Luwu Sebagai Destinasi Pariwisata Unggulan di Provinsi Sulawesi Selatan Yang Maju, Mandiri Dan Sejahtera Dalam Nuansa Religi”**.

Dari tatanan tersebut, menunjukkan bahwa dalam membangun kepariwisataan kabupaten Luwu terdapat 4 prinsip utama yang harus diwujudkan, yaitu :

- a. Mengembangkan pariwisata yang unggul;
 Dalam mengembangkan dan membangun kepariwisataan kabupaten Luwu, dimana gabungan potensi alam sebagai karunia Tuhan YME yang terdiri dari wilayah sungai, wilayah pegunungan, hutan, air terjun, gua, sawah, kebun, flora dan fauna serta potensi sejarah dan budaya pada akhirnya memposisikan kabupaten Luwu sebagai destinasi yang unggul dan berdaya saing pada potensi wisata alam berbasis alam, sejarah, budaya dan minat khusus berbasis ekologi dan edukasi.

Berdasarkan potensi alam tersebut, masyarakat kabupaten Luwu menempatkan sumber ekonomi utama dari perkebunan dan pertanian sehingga pola dan cara hidup masyarakat ini yang harus dioptimalkan dengan mengintegrasikannya sebagai daya tarik wisata.

Beberapa konteks kehidupan masyarakat maritim yang menarik untuk menjadi daya tarik wisata adalah pengembangan desa wisata, area bumi perkemahan (*camping ground*), kuliner tradisional, keterampilan kerajinan, kearifan lokal dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan, serta pengembangan destinasi wisata sungai.

- b. Berorientasi pada pelestarian alam, lingkungan, dan kebudayaan.

Pengembangan pariwisata kabupaten Luwu yang sarat dengan kekayaan sumberdaya alam, sejarah dan budaya sehingga peran pariwisata sebagai media pelestarian alam, lingkungan serta sejarah dan budaya harus diwujudkan.

Keuntungan ekonomis yang diperoleh dari penerimaan sektor pariwisata yang tidak berorientasi pada pelestarian alam, lingkungan, sejarah dan akar budaya masyarakat Luwu, tentu saja tidak sebanding dengan kerusakan alam dan karakter budaya masyarakat Luwu. Untuk itu dibutuhkan peran serta dan kepedulian dari seluruh komponen masyarakat untuk memelihara dan menjaga kelestariannya.

Kabupaten Luwu juga sarat dengan tinggalan sejarah dan nilai budaya luhur masyarakat sehingga pengembangan pariwisata harus menjamin tumbuh dan lestariannya budaya masyarakat dalam pengemasan paket dan atraksi wisata.

Berbagai jenis artefak dan tinggalan sejarah serta kebudayaan masyarakat masa lampau yang masih terpelihara dalam hidup dan kehidupan masyarakat kabupaten Luwu saat ini harus memperoleh ruang untuk dikembangkan dan dilestarikan sekaligus menjadi daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung ke kabupaten Luwu

- c. Berorientasi pada perwujudan kesejahteraan masyarakat;

Pengembangan pariwisata kabupaten Luwu yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat diwujudkan melalui pola keseimbangan antara eksploitasi dan konservasi dengan mengedepankan sebesar-besarnya untuk kepentingan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Pariwisata yang dibangun harus ramah lingkungan dan membuka akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat kabupaten Luwu untuk terlibat dalam pengelolaan, pengembangan dan perlindungannya melalui pembentukan kelompok sadar wisata.

Eksploitasi lingkungan alam, sosial dan budaya yang berlebihan serta berpotensi menimbulkan kerusakan harus dicegah dan dihindari. Untuk itu, 2 (dua) prinsip utama dalam pengembangan pariwisata yaitu pembangunan pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism development*) dan pariwisata berkelanjutan (*sustainability tourism development*) menjadi mutlak untuk diintegrasikan dan menjadi dasar pengembangan pariwisata kabupaten Luwu.

- d. Berlandaskan pada nilai religius;

Masyarakat kabupaten Luwu dikenal sebagai masyarakat yang religius dan melandaskan hidup dan kehidupannya pada nilai-nilai agamis yang dianut. Mayoritas penduduk kabupaten Luwu adalah penganut agama Islam sehingga pembangunan pariwisata harus direncanakan dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai agama dan kepercayaan masyarakat.

Pembangunan pariwisata tidak boleh bertentangan apa lagi berpotensi merusak sendi-sendi agama dan kepercayaan masyarakat. Interaksi antara masyarakat lokal dengan wisatawan harus menjamin terpeliharanya nilai moralitas masyarakat sehingga asosiasi dan asimilasi budaya dari luar harus mampu memperkuat aspek agama dan kepercayaan.

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sehubungan sistem nilai masyarakat

kabupaten Luwu antara lain adalah :

- 1) Pengwilayahan kawasan sungai, hutan, dan kawasan pegunungan beserta sumber mata air alam sesuai peruntukan wisatawan, karena karakteristik dan gaya hidup wisatawan asing dengan masyarakat lokal sangat berbeda.
- 2) Pengembangan produk kuliner dan minuman yang disediakan untuk wisatawan harus diyakini bersesuaian dengan kehidupan masyarakat religius sehingga harus halal dan bebas alkohol.
- 3) Penataan desa wisata atau *homestay* yang dapat menjamin perlindungan masyarakat (khususnya anak-anak dan perempuan) dari dampak negatif pengembangan pariwisata yang tidak bertanggungjawab.

8.5.2 Misi Pembangunan Kepariwisataan

Berdasarkan visi pembangunan kepariwisataan kabupaten Luwu tersebut, ditetapkanlah misi pembangunan pariwisata kabupaten Luwu sebagai berikut :

- a. Mengembangkan Produk Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif;
- b. Membangun Infrastruktur Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif;
- c. Meningkatkan Pemasaran Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif;
- d. Melestarikan nilai, Kekayaan dan Keragaman Budaya Dalam Rangka Memperkuat Karakter dan Jatidiri Masyarakat Luwu; dan
- e. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia bidang Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif.

8.5.3 Tujuan Pembangunan Kepariwisataan

Berdasarkan misi pembangunan kepariwisataan kabupaten Luwu, maka berikut ini adalah tujuan pembangunan pariwisata kabupaten Luwu yaitu :

- a. Mengembangkan destinasi di Kabupaten Luwu yang berdaya saing;
- b. Mengembangkan Seni dan Budaya Tradisional Kabupaten Luwu sebagai daya tarik Destinasi Pariwisata Budaya berbasis ekologi;
- c. Membangun Obyek Wisata Sejarah/ Arkeologi dan Wisata Agro sebagai daya tarik Destinasi Pariwisata Alam, sejarah, dan Minat Khusus berbasis edukasi;
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pariwisata, antara lain dengan menyediakan lapangan pekerjaan, dan menyediakan kesempatan investasi bagi masyarakat;
- e. Meningkatkan keterlibatan komunitas lokal dalam penyediaan prasarana dan sarana pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif;
- f. Meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas koordinasi antara instansi dan sektor-sektor pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif;
- g. Meningkatkan arus perjalanan wisata ke Kabupaten Luwu;
- h. Meningkatkan penyediaan data dan informasi bagi wisatawan, serta pemasaran dan promosi pariwisata kabupaten Luwu ke segmentasi pasar wisatawan yang tepat dan terarah;
- i. Mewujudkan iklim investasi yang harmonis dan menguntungkan bagi masyarakat Kabupaten Luwu;
- j. Mempertimbangkan daya dukung lingkungan hidup dalam pengelolaan sumber daya alam dan budaya untuk pariwisata dalam rangka menciptakan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan; dan
- k. Membangun jaringan Promosi dan Pemasaran Pariwisata Kabupaten Luwu.

8.5.4 Sasaran Pembangunan Kepariwisataan

Berdasarkan tujuan pembangunan kepariwisataan kabupaten Luwu, maka secara operasional, sasaran pengembangan pariwisata kabupaten Luwu diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Luwu, dengan sasaran utama tahun 2021-2036 adalah :

- a. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan manca negara melalui peningkatan kualitas dan kuantitas daya tarik dan atraksi wisata dan kebudayaan, pengembangan aksesibilitas pariwisata, pengembangan promosi dan pemasaran pariwisata, serta peningkatan citra pariwisata;
- b. Meningkatkan lama tinggal wisatawan melalui pelaksanaan berbagai jenis even dan festival, pengembangan usaha akomodasi, dan pengembangan amenitas pariwisata;
- c. Meningkatkan pendapatan dari belanja wisatawan melalui pemberdayaan potensi kreatif masyarakat serta penganekaragaman produk serta atraksi wisata dan budaya;
- d. Meningkatkan perlindungan, pengelolaan dan pengembangan warisan budaya melalui pemberdayaan potensi budaya masyarakat, pengembangan sanggar seni dan budaya, pelestarian nilai-nilai sejarah dan budaya, serta pelestarian benda cagar budaya;
- e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pariwisata melalui pendidikan dan pelatihan serta kerjasama dan alih teknologi bersama perguruan tinggi, usaha pariwisata, asosiasi profesi, dan pemerintah.
- f. Meningkatkan perlindungan, pengelolaan dan pengembangan potensi alam sebagai daya tarik pariwisata melalui perencanaan, pengawasan, dan konsistensi penegakan hukum yang adil dan bermartabat.

BAB -9

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN LUWU

9.1 Kebijakan Pembangunan Kepariwisata

Kebijakan pembangunan kepariwisataan kabupaten Luwu tidak lepas dari kebijakan penataan ruang sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Luwu, dengan arah Kebijakan penataan ruang, terdiri atas :

- a. Penetapan pusat-pusat kegiatan yang mencakup PKLp, PPK dan PPL;
- b. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana, transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air dan jaringan pelayanan sosial ekonomi yang merata di seluruh wilayah kabupaten;
- c. Pemeliharaan dan mempertahankan luas kawasan lindung;
- d. Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan sistem ekologi wilayah;
- e. Pengembangan kegiatan berbasis agrobisnis, perikanan, dan pariwisata serta pemanfaatan ruangnya secara optimal pada setiap kawasan budi daya;
- f. Pengembangan prasarana guna mendukung kegiatan agrobisnis, perikanan dan pariwisata serta prasarana kawasan budi daya lainnya;
- g. Pengendalian pemanfaatan ruang kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi lindung;
- h. Pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- i. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dan pengembangan perekonomian kabupaten;
- j. Pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung;
- k. Pelestarian dan peningkatan kualitas sosial dan budaya lokal; dan
- l. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Berdasarkan arah Kebijakan penataan ruang sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Luwu tahun 2011-2031, maka kebijakan pembangunan kepariwisataan kabupaten Luwu, adalah sebagai berikut :

- a. Pemanfaatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung melalui kegiatan pariwisata, dengan memperhatikan :
 - 1) Pemanfaatan kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya dengan aktivitas wisata edukasi dan ekologi sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 2) Pencegahan pembangunan dan pengembangan fasilitas pariwisata pada kawasan rawan bencana resiko tinggi. Aktivitas pariwisata dapat dilakukan pada kawasan rawan bencana rendah dan sedang dengan ketentuan memperhatikan kondisi, gejala alam dan kebijakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada saat aktivitas wisata akan dilaksanakan;

- 3) Pengembangan sistem mitigasi bencana pada kawasan daya tarik wisata; dan
 - 4) Pelaksanaan pemulihan dan konservasi kawasan rawan bencana melalui aktivitas wisata ekologi.
- b. Pengembangan paket wisata ekologi sebagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam, sejarah dan budaya yang berbasis konservasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui aktivitas pariwisata;
 - c. Peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan melalui program agrowisata (*agro-tourism*), wisata pedesaan (*rural tourism*), dan desa wisata (*tourism village*);
 - d. Pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis pertanian, perikanan dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan melalui pengembangan ekonomi kreatif;
 - e. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas pada daya tarik wisata sebagai pemenuhan hak dasar, mengurangi disparitas wilayah/ kawasan dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang pada destinasi wisata yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana; dan
 - f. Peningkatan fungsi kawasan pariwisata dengan tetap memperhatikan pertahanan dan keamanan negara.

9.2 Strategi Pembangunan Kepariwisataaan

Strategi strategi penataan ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu 2011-2031, terdiri atas :

- a. Strategi penetapan pusat-pusat kegiatan yang mencakup PKLp, PPK dan PPL, terdiri atas:
 - 1) Penetapan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan sebagai PKLp;
 - 2) Penetapan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan beberapa kecamatan sebagai PPK; dan
 - 3) Penetapan kawasan perkotaan sebagai PPL yang berfungsi untuk mendukung PPK dengan melayani kegiatan beberapa kecamatan
- b. Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana, transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air dan jaringan pelayanan sosial ekonomi yang merata di seluruh wilayah kabupaten Luwu, terdiri atas:
 - 1) Pengembangan jaringan infrastruktur transportasi darat yang dapat meningkatkan aksesibilitas pusat pertumbuhan dengan semua kawasan yang ditetapkan sebagai PKL, PPK, PPL maupun kawasan strategis lainnya;
 - 2) Pembangunan jaringan jalan lokal yang menghubungkan pusat kota Belopa, kawasan permukiman dan sentra-sentra produksi dengan wilayah pengembangan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan jaringan pelayanan sosial ekonomi;
 - 3) Pengembangan jaringan transportasi laut;
 - 4) Peningkatan jaringan transportasi udarai;
 - 5) Pengembangan jaringan transportasi kereta api sebagai lintas trans Sulawesi;
 - 6) Dorongan pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan terisolir;
 - 7) Pengembangan jaringan energi untuk memanfaatkan energi secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik; dan
 - 8) Pengembangan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan ketersediaan sistem jaringan sumber daya air untuk air bersih, air minum dan irigasi.
- c. Strategi pemeliharaan dan mempertahankan luas kawasan lindung, terdiri atas:

- 1) Penetapan kawasan lindung di ruang darat, laut maupun udara termasuk di dalam bumi;
 - 2) Perwujudan kawasan berfungsi lindung dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah tersebut sesuai dengan kondisi ekosistemnya atas dasar kriteria kawasan-kawasan yang berfungsi lindung; dan
 - 3) Pengembalian dan peningkatan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah
- d. Strategi pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan sistem ekologi wilayah, terdiri atas:
- 1) Penyelenggaraan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi sistem ekologi wilayah;
 - 2) Perlindungan kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/ atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - 3) Perlindungan kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
 - 4) Pencegahan terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
 - 5) Pengendalian pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini maupun generasi masa depan;
 - 6) Pengelolaan sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana, termasuk revitalisasi fungsi sistem ekologi lokal serta pembangunan sumber daya baru untuk penghasilan dan pelestarian lingkungan; dan
 - 7) Pengelolaan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
- e. Strategi pengembangan kegiatan berbasis agrobisnis, perikanan, dan pariwisata serta pemanfaatan ruangnya secara optimal pada setiap kawasan budi daya, terdiri atas:
- 1) Penetapan zona-zona dengan fungsi utamanya pada kawasan budi daya;
 - 2) Pengembangan kegiatan budi daya unggulan pada setiap zona-zona dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan;
 - 3) Pengembangan fungsi-fungsi kawasan budi daya lainnya; dan
 - 4) Pengembangan dan melestarikan kawasan budi daya pertanian, perikanan untuk mewujudkan ketahanan pangan kabupaten.
- f. Strategi pengembangan prasarana guna mendukung kegiatan agrobisnis, perikanan dan pariwisata serta prasarana kawasan budi daya lainnya, terdiri atas:
- 1) Mengembangkan dan menyediakan infrastruktur pendukung pada kawasan-kawasan agrobisnis, perikanan dan pariwisata;
 - 2) Peningkatan fungsi dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana pada setiap kawasan budi daya;
 - 3) Pembangunan kegiatan perikanan dengan pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI); dan
 - 4) Pembatasan perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan besar untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya.
- g. Strategi pengendalian pemanfaatan ruang kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi lindung, terdiri atas:

- 1) Pengurangan tingkat dampak negatif terhadap pengembangan kawasan budi daya pada lingkungan sekitarnya;
 - 2) Peningkatan fungsi pada kawasan hutan produksi sebagai kawasan penyangga bagi kawasan lindung; dan
 - 3) Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan secara periodik terhadap kegiatan-kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu fungsi lindung.
- h. Strategi pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, terdiri atas:
- 1) Pemanfaatan kawasan lindung sebagai fungsi hidrologis, melindungi kawasan setempat, melindungi habitat flora dan fauna, serta melindungi kawasan rawan bencana alam;
 - 2) Pengendalian, pengarahan, pemantauan, dan penegakan hukum di kawasan lindung;
 - 3) Pengembangan kebijakan tata guna tanah/lahan, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumber daya alam yang ramah lingkungan; dan
 - 4) Pengembangan kebijakan pengembangan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan yang berkesinambungan;
- i. Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dan pengembangan perekonomian kabupaten, terdiri atas:
- 1) Pengembangan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budidaya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;
 - 2) Penciptaan iklim yang kondusif bagi investasi yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal dan pelestarian lingkungan;
 - 3) Pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;
 - 4) Pengelolaan dampak negatif kegiatan budi daya agar tidak menurunkan kualitas sosial ekonomi budaya masyarakat dan lingkungan hidup kawasan;
 - 5) Pengintensifan promosi peluang investasi bagi kegiatan ramah lingkungan dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal; dan
 - 6) Peningkatan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi
- j. Strategi pelestarian dan peningkatan kawasan lindung, terdiri atas:
- 1) Pelestarian keaslian fisik serta mempertahankan keseimbangan ekosistemnya;
 - 2) Peningkatan kepariwisataan;
 - 3) Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta seni; dan
 - 4) Penjagaan kualitas, keasrian dan kelestarian eksistensi sistem ekologi wilayah.
- k. Strategi pelestarian dan peningkatan sosial budaya lokal, terdiri atas:
- 1) Peningkatan kecintaan masyarakat terhadap nilai budaya lokal yang mencerminkan jati diri komunitas lokal yang berbudi luhur;
 - 2) Pengembangan penerapan ragam nilai budaya lokal dalam kehidupan masyarakat; dan
 - 3) Pelestarian situs warisan budaya komunitas lokal yang beragam.
- l. Strategi peningkatan pertahanan dan keamanan, terdiri atas:
- 1) dukungan penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - 2) Pengembangan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun disekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan;
 - 3) Pengembangan budi daya secara selektif di dalam dan sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan; dan
 - 4) Turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara.

Strategi pembangunan kepariwisataan kabupaten Luwu sebagaimana direduksi dari strategi penataan ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu 2011-2031, dikemukakan sebagai berikut :

- a. Strategi penataan ruang untuk kepentingan pariwisata yang dilakukan dalam rangka penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung, meliputi:
 - 1) Pemantapan tata batas kawasan lindung dan kawasan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi di bidang pariwisata;
 - 2) Menyusun dan melaksanakan program rehabilitasi lingkungan, terutama pemulihan fungsi perlindungan daerah bawahannya, setempat dan suaka alam serta hutan lindung yang berbasis masyarakat melalui aktivitas wisata edukasi dan ekologi;
 - 3) Meningkatkan program pariwisata hijau (*green tourism*) dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan; dan
 - 4) Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya keanekaragaman hayati melalui program pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism*) dan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism development*).
- b. Strategi penataan ruang untuk kepentingan pariwisata yang dilakukan untuk pengembangan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meliputi:
 - 1) Mengembangkan program hemat energi pada industri pariwisata dan pemanfaatan energi alternatif sebagai sumber listrik pada destinasi wisata;
 - 2) Mengembangkan kegiatan konservasi yang bernilai lingkungan dan sekaligus juga bernilai sosial-ekonomi melalui aktivitas wisata edukasi dan ekologi; dan
 - 3) Meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan (*stakeholders - pentahelix*) pariwisata dalam pemanfaatan sumber energi yang terbarukan dalam aktivitas pariwisata.
- c. Strategi penataan ruang untuk kepentingan pariwisata yang dilakukan dalam rangka peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian, perkebunan dan kehutanan dengan pengelolaan yang ramah lingkungan, meliputi:
 - 1) Mengembangkan paket wisata agro berbasis areal persawahan dan perkebunan dalam mendorong petani untuk mempertahankan lahan-lahan perkebunan dan persawahan beririgasi teknis sebagai kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan agar tidak beralih fungsi peruntukan lain;
 - 2) Mengembangkan diversifikasi produk hasil pertanian dan perkebunan untuk konsumsi wisatawan dan produk ekonomi kreatif untuk mendorong peningkatan produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan melalui intensifikasi lahan;
 - 3) Memanfaatkan lahan non produktif dan/ atau lahan kritis untuk peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat melalui aktivitas wisata pedesaan;
 - 4) Pengembangan aktivitas pariwisata yang dapat mendorong peningkatan pemasaran hasil pertanian dan perkebunan melalui peningkatan sumber daya manusia pariwisata dan kelembagaan serta fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan.
- d. Strategi penataan ruang untuk kepentingan pariwisata yang dilakukan untuk pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis pertanian, perikanan dan kelautan, meliputi:

- 1) Menjadikan industri pengolahan hasil kegiatan agro sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar agroindustri dan agribisnis pada kawasan industri yang telah ditetapkan sebagai daya tarik wisata agro;
 - 2) Mendorong pembukaan program studi wisata bahari dan perhotelan pada perguruan tinggi yang dikembangkan sehingga menjadi kekuatan utama ekonomi masyarakat pesisir; dan
 - 3) Meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, pengelolaan daya tarik wisata yang lebih profesional serta pemasaran yang lebih agresif, inovatif dan efektif.
- e. Strategi penataan ruang untuk kepentingan pariwisata yang dilakukan untuk pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar, mengurangi disparitas wilayah/ kawasan dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana, meliputi:
- 1) Mengkoordinasikan pembangunan sistem prasarana dan sarana transportasi (darat, laut, udara dan ASDP) yang mampu mendorong peningkatan kunjungan wisatawan sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan dan berimbang;
 - 2) Mengkoordinasikan pengembangan sistem prasarana dan sarana energi kelistrikan dan migas, telekomunikasi dan sumberdaya air untuk kawasan daya tarik wisata;
 - 3) Mengkoordinasikan pembangunan utilitas dan fasilitas sosial secara proporsional dan memadai sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap pusat permukiman (kawasan darat dan pesisir) dan pusat pelayanan lingkungan yang dijadikan kawasan pariwisata atau desa wisata; dan
 - 4) Mengkoordinasikan penyusunan program dan pembangunan berbagai perangkat keras dan lunak untuk mitigasi berbagai bencana alam, seperti abrasi pantai, longsor, banjir, gerakan tanah, gempa bumi, kebakaran hutan dan ancaman lainnya pada kawasan daya tarik wisata.
- f. Strategi penataan ruang untuk kepentingan pariwisata yang dilakukan untuk meningkatkan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi :
- 1) Mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
 - 2) Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk peruntukan pariwisata dengan memperhatikan kepentingan pertahanan keamanan;
 - 3) Mengkoordinasikan pengembangan kawasan lindung dan/ atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun untuk kepentingan pariwisata;
 - 4) Mengkoordinasikan pengembangan kegiatan pariwisata secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya; dan
 - 5) Turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara.

Untuk mendukung strategi pembangunan kabupaten Luwu, dalam rencana tata ruang wilayah direncanakan struktur ruang wilayah yang meliputi pusat-pusat kegiatan, sistem jaringan prasarana utama, dan sistem jaringan prasarana lainnya. Pusat-pusat kegiatan dimaksud, terdiri atas Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp); Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan Pusat Pelayanan Lokal (PPL).

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) kabupaten Luwu berada di Kota Belopa.

PKLp kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk menjadi Pusat Kegiatan Lokal yang dipersiapkan sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) kabupaten Luwu berada di Bua, Padang Sappa dan Batusitanduk.

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) kabupaten Luwu berada di Lamasi, To' Lemo, Taba, Suli, Larompong, Bonepute, Bajo, Pattedong, Cilallang, dan Noling.

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) di kabupaten Luwu, meliputi Lindajang, Bone Lemo, Rante Balla, Beuma, Illanbatu dan Bosso.

9.3 Sistem Jaringan Prasarana Utama

Sistem jaringan prasarana utama yang ada di Kabupaten Luwu adalah sistem jaringan transportasi yang diharapkan dapat mendukung aksesibilitas daerah sehingga dapat mendorong percepatan pembangunan ekonomi termasuk sektor pariwisata. Sistem jaringan prasarana utama tersebut terdiri atas sistem jaringan transportasi darat; sistem jaringan transportasi laut; sistem jaringan transportasi udara; dan sistem jaringan perkeretaapian.

9.3.1 Sistem Jaringan Transportasi Darat

Sistem jaringan transportasi darat kabupaten Luwu, terdiri atas : jaringan jalan; jaringan prasarana lalu lintas ; dan jaringan layanan lalu lintas. Jaringan jalan, terdiri atas :

- a. Jaringan jalan arteri primer yaitu ruas jalan Tarumpakkae (batas Kabupaten Wajo) – Belopa – Palopo – Masamba (batas Kabupaten Luwu Utara);
- b. rencana jaringan jalan kolektor primer K3 di kabupaten, terdiri atas:
 - 1) Ruas jalan Bua – Pantilang – Kabupaten Toraja Utara;
 - 2) Ruas jalan Bukit Sutra – Kabupaten Sidrap; dan
 - 3) Ruas jalan Batusitanduk – Illanbatu – Kabupaten Toraja Utara.
- c. Jaringan jalan kolektor primer K4 dan jalan lokal primer/ sekunder di kabupaten Luwu.

Jaringan prasarana lalu lintas kabupaten Luwu, terdiri atas:

- a. Terminal penumpang (induk) terdapat di Belopa dan Karetan;
- b. Terminal penumpang (pembantu) terdapat di Kecamatan Larompong Selatan, Larompong, Suli, Kamanre, Ponrang, Bupon, Bajo dan Lamasi;
- c. Rencana pengembangan terminal penumpang tipe c terdapat di Karetan; dan
- d. Rencana pengembangan terminal penumpang tipe B dan terminal barang (logistik) terdapat di Kecamatan Belopa Utara.

Jaringan layanan lalu lintas kabupaten Luwu tersebut, terdiri atas:

- a. Trayek angkutan barang, terdiri atas:
 - 1) Bonepute – Larompong – Suli – Belopa;
 - 2) Suli Barat – Suli – Belopa;
 - 3) Ranteballa – Bonelemo – Bajo – Belopa;
 - 4) Beuma – Bua – Belopa;
 - 5) Noling – Belopa;
 - 6) To'lemo, Taba, Bosso, Illanbatu, Lamasi – Karetan; dan
 - 7) Karetan – Belopa.
- b. Trayek pengembangan angkutan barang, terdiri atas:
 - 1) To'lemo, Lamasi, Taba, Bosso, Illanbatu – Karetan (terminal tipe C);

- 2) Karetan – Belopa (terminal logistik);
 - 3) Bonepute, Larompong, Suli, Lindajang – Belopa (terminal logistik);
 - 4) Ranteballa, Bonelemo, Bajo – Belopa (terminal logistik);
 - 5) Beuma – Bua – Belopa (terminal logistik);
 - 6) Noling – Belopa (terminal logistik); dan
 - 7) Belopa – Makassar.
- c. Trayek angkutan penumpang terdiri atas:
- 1) Belopa – Suli – Larompong – Laompong Selatan;
 - 2) Belopa – Kamanre – Padang Sappa – Bua;
 - 3) Belopa - Walenrang – Lamasi; dan
 - 4) Belopa – Karetan – Rante Damai.
- d. Trayek pengembangan angkutan penumpang terdiri atas:
- 1) To'lemo – Lamasi– Karetan;
 - 2) Bosso, Illanbatu, Taba– Karetan;
 - 3) Karetan – Belopa ;
 - 4) Beuma – Bua – Belopa;
 - 5) Noling – Padang Sappa – Belopa;
 - 6) Ranteballa – Bonelemo– Bajo – Belopa;
 - 7) Bonepute – Larompong– Suli – Belopa; dan
 - 8) Lindajang –Suli – Belopa.

9.3.2 Sistem Jaringan Transportasi Laut

Sistem jaringan transportasi sungai, dan penyeberangan berupa pelabuhan penyeberangan di kabupaten Luwu yang dikembangkan, meliputi: tatanan kepelabuhanan dan alur pelayaran. Sistem tatanan kepelabuhanan yaitu berupa rencana pembangunan pelabuhan regional/ pengumpan primer Senga di Kecamatan Belopa dengan panjang *causway* 570 (lima ratus tujuh puluh) meter dan kedalaman 13 (tiga belas) meter LWS. Alur pelayaran kabupaten Luwu terdiri atas alur Senga – Kolaka- Kolaka Utara - Palopo dan Malili.

9.3.3 Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pengembangan sistem jaringan transportasi udara di kabupaten Luwu, terdiri atas: tatanan kebandarudaraan dan jalur penerbangan. Sistem tatanan kebandarudaraan yaitu Bandar Udara Pengumpan Lagaligo/ Bua di Kecamatan Bua. Jalur penerbangan terdiri atas rute Bua – Makassar , Bua – Masamba – Seko – Luwuk, dan rencana pengembangannya meliputi: Bua – Kolaka Utara, Bua – Mamuju, Bua – Kendari, Bua – Tana Toraja , Bua – Palu dan Bua – Manado.

9.3.4 Sistem Jaringan Perkeretaapian

Sistem jaringan perkeretaapian di kabupaten Luwu ditetapkan dalam rangka mengembangkan interkoneksi dengan sistem jaringan jalur wilayah nasional, pulau Sulawesi dan provinsi Sulawesi Selatan. Sistem jaringan perkeretaapian di kabupaten Luwu, terdiri atas: jaringan jalur kereta api dan stasiun kereta api.

Jalur kereta api di kabupaten Luwu yaitu rencana jaringan jalur kereta api nasional yang merupakan trans Sulawesi yang menghubungkan Watampone – Belopa – Palopo – Wotu (wilayah Kabupaten Luwu Timur). Rencana stasiun kereta api di kabupaten Luwu terdapat di Belopa Kecamatan Belopa.

9.4 Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Sistem jaringan prasarana lainnya dalam pembangunan kabupaten Luwu adalah keseluruhan jaringan prasarana yang terdiri atas sistem jaringan energi; sistem jaringan telekomunikasi; sistem jaringan sumber daya air; dan sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

9.4.1 Sistem Jaringan Energi

Rencana sistem jaringan energi di kabupaten Luwu, terdiri atas: pembangkit tenaga listrik dan jaringan prasarana energi. Pembangkit tenaga listrik, terdiri atas : Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB).

Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) meliputi: Kecamatan Larompong Selatan, Larompong, Suli Barat, Bajo Barat, Latimojong, Bastem, Bua, Bupon, Walenrang Barat dan Walenrang Utara; serta Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) kecamatan Walenrang, Kecamatan Suli, Larompong Selatan dan Bua.

Jaringan prasarana energi di kabupaten Luwu terdiri atas: Depot Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kecamatan Bua desa Karang-Karangan; dan Jaringan Transmisi Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang terdapat di Kecamatan Lamasi Timur, Walenrang Timur, Latimojong dan Bastem.

9.4.2 Sistem Jaringan Telekomunikasi

Sistem jaringan telekomunikasi kabupaten Luwu ditetapkan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas masyarakat dan dunia usaha terhadap layanan telekomunikasi. Rencana sistem jaringan telekomunikasi, terdiri atas: sistem jaringan kabel dan sistem jaringan nirkabel. Sistem jaringan kabel telekomunikasi tersebar di setiap kecamatan hingga ke pelosok desa dan sistem jaringan nirkabel, berupa pembangunan Stasiun Telepon Otomat (STO) dan *Base Transceiver Station* (BTS) di setiap ibukota kecamatan.

9.4.3 Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Sistem jaringan sumber daya air kabupaten Luwu ditetapkan dalam rangka pengelolaan sumber daya air yang terdiri atas Wilayah Sungai (WS), Daerah Irigasi (DI) dan Prasarana Air Baku, Air Tanah untuk kebutuhan air bersih dan irigasi.

Wilayah Sungai di kabupaten Luwu, terdiri dari atas Wilayah Sungai strategis nasional yaitu Wilayah Sungai Walenae-Cendranae, meliputi : DAS Noling/ Paremang, DAS Bajo, DAS Suli, DAS Larompong. DAS yang meliputi : DAS Bua, DAS Lamasi, DAS Makawa, DAS Pakalolo, DAS Kandoa, DAS Paremang, DAS Bajo, DAS Suli, DAS Rantebel, DAS Sampano, dan DAS Temboe.

Daerah Irigasi (DI) kabupaten Luwu, terdiri atas :

- a. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah terdiri dari :
 - 1) Daerah Irigasi (DI) Padang Sappa 12.588 (Dua Belas Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Delapan) Hektar;
 - 2) Daerah Irigasi (DI) Lamasi Kanan 5.503 (Lima Ribu Lima Ratus Tiga) Hektar;
 - 3) Daerah Irigasi (DI) Lamasi Kiri 4.803 (Empat Ribu Delapan Ratus Tiga) Hektar;
 - 4) Daerah Irigasi (DI) Bajo 7.000 (tujuh Ribu) Hektar
- b. Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Pemerintah Provinsi terdiri atas :
 - 1) Daerah Irigasi (DI) Makawa 2.600 (Dua Ribu Enam Ratus) Hektar;
 - 2) Daerah Irigasi (DI) Lekopini 1.000 (Seribu) Hektar;
 - 3) Daerah Irigasi (DI) Tubu Ampak Kanan 712 (Tujuh Ratus Dua Belas) Hektar;
- c. Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan kabupaten terdapat ditetapkan dalam peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten.

Prasarana air baku, air tanah untuk kebutuhan air bersih dan irigasi kabupaten Luwu, terdiri atas :

- a. Embung Kecamatan Larompong, Larompong Selatan, Sulu, Suli Barat, Bajo, Bajo Barat, Bupon, Walenrang, Walenrang Utara.

- b. Sumur-sumur air tanah Kecamatan Bajo, Belopa, Belopa Utara, Suli, Bua, Ponrang, Bupon, Kamanre, Bajo Barat, Larompong, Larompong Selatan, Walenrang Utara dan Lamasi.

9.4.4 Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Sistem prasarana pengelolaan lingkungan kabupaten Luwu terdiri atas sistem jaringan persampahan, sistem penanganan limbah, sistem jaringan air bersih, dan jalur evakuasi bencana.

9.4.4.1. Sistem Pengelolaan Persampahan

Sistem pengelolaan persampahan kabupaten Luwu ditetapkan dalam rangka mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah guna meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Sistem pengelolaan persampahan di Kabupaten Luwu, terdiri atas tempat penampungan sementara (TPS), dan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah.

Rencana pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di kecamatan Bajo, kecamatan Ponrang, kecamatan Lamasi, kecamatan Bua, kecamatan Suli, kecamatan Larompong, kecamatan Larompong Selatan. Pengembangan TPA pada Kecamatan Bajo telah disiapkan lahan seluas kurang lebih 5 (lima) hektar di Desa Tallang Bulawang sebagai tempat pemrosesan sampah dan industri daur ulang; dan Pengembangan TPA di Tallang Bulawang didukung oleh lokasi-lokasi Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang tersebar di Kecamatan Belopa, Belopa Utara dan Bajo.

9.4.4.2. Sistem Jaringan Air Limbah

Sistem prasarana penanganan limbah di kabupaten Luwu, terdiri atas: sistem penanganan limbah rumah tangga, sistem penanganan cair rumah sakit/ puskesmas, dan sistem penanganan limbah cair industri.

Sistem penanganan limbah rumah, terdiri atas: sanitasi lingkungan yaitu pengelolaan limbah dilakukan oleh masing-masing rumah tangga/kegiatan di setiap kecamatan; pengelolaan limbah terpusat dengan sistem perpipaan diterapkan pada wilayah-wilayah padat penduduk di kecamatan Belopa, Belopa Utara, Bua, Larompong Selatan; dan penyediaan MCK plus-plus diterapkan pada wilayah-wilayah padat penduduk di setiap kecamatan.

Sistem penanganan limbah cair rumah sakit/ puskesmas di kabupaten Luwu, terdiri atas: penyediaan fasilitas dan peralatan pengelolaan limbah cair sendiri dengan pengelolaan yang baik; kewajiban melakukan monitoring dan pengawasan terhadap limbah cairnya yang menuju ke badan air; dan pengolahan limbah toksin seperti limbah cair sisa obat-obatan dan suntikan, harus dipisahkan dari pengolahan limbah cair yang bersifat non toksin.

Sistem penanganan limbah cair industri kabupaten Luwu, terdiri atas: penyediaan fasilitas dan peralatan limbah cair pada setiap kawasan industri; dan pengelolaan limbah cair pada kawasan industri dengan mengikuti standar baku

9.4.4.3. Sistem Jaringan Air Minum

Sistem jaringan air minum di kabupaten Luwu terdiri atas: pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perkotaan untuk melayani daerah yang belum terlayani meliputi:

- a. IKK Larompong Selatan kapasitas 20 (dua puluh) liter/detik, IKK Suli kapasitas 20 (dua puluh) liter/detik, IKK Larompong kapasitas 20 (dua puluh) liter/detik, IKK Kamanre dan Belopa Utara kapasitas 30 (tiga puluh) liter/detik, IKK Ponrang Selatan dan Bupon kapasitas 20 (dua puluh) liter/detik, IKK Lamasi Timur

- kapasitas 20 (dua puluh) liter/detik dan IKK Walenrang Timur kapasitas 20 (dua puluh) liter/detik.
- b. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perdesaan untuk melayani beberapa desa yang belum terlayani dengan jumlah penduduk kurang lebih 75.375 (tujuh puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima) jiwa meliputi 59 (lima puluh sembilan) desa dan 16 (enam belas) kecamatan;
 - c. Peningkatan kapasitas produksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan menurunkan kehilangan air;
 - d. Rehabilitasi sistem distribusi; dan
 - e. Pengembangan sistem air minum akan difokuskan pada pengelolaan sumber air yang ada, pemanfaatan sumber air baru dan peningkatan jaringan distribusi.

9.4.4.4. Sistem Jaringan Drainase

Sistem jaringan drainase di kabupaten Luwu meliputi : rencana pengembangan sistem drainase kawasan perkotaan dan perdesaan; normalisasi jaringan drainase yang ada; pembangunan dan pengembangan kolam retensi di kawasan perkotaan; dan penetapan elevasi atau ketinggian tanah yang berkaitan dengan jalur drainase induk, sekunder dan tersier di kawasan perkotaan dan perdesaan.

9.4.4.5. Jalur Dan Ruang Evakuasi Bencana

Jalur dan ruang evakuasi bencana di kabupaten Luwu bertujuan sebagai penyediaan jalur dan ruang yang dapat digunakan untuk tempat keselamatan dan tempat berlindung jika terjadi bencana. Jalur dan ruang evakuasi bencana ditetapkan dalam skala kota, skala kawasan, dan skala lingkungan berupa jalur evakuasi bencana (*escape way*) dan ruang evakuasi bencana (*melting point*).

Jalur evakuasi bencana di kabupaten Luwu direncanakan mengikuti dan/ atau menggunakan jaringan jalan dengan rute terdekat ke ruang evakuasi dan merupakan jaringan jalan paling aman dari ancaman berbagai bencana, serta merupakan tempat-tempat yang lebih tinggi dari daerah bencana.

9.5 Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Luwu

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Luwu ditetapkan dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Rencana pola ruang wilayah kabupaten Luwu meliputi rencana peruntukan kawasan lindung dan rencana peruntukan kawasan budidaya.

9.5.1 Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung

Rencana pola ruang wilayah kabupaten meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri atas kawasan hutan lindung; kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bahawannya; kawasan perlindungan setempat; kawasan cagar budaya; kawasan rawan bencana alam; dan kawasan lindung geologi.

9.5.1.1 Kawasan Hutan Lindung

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf a, tersebar di 19 (sembilan belas) kecamatan dengan luas kurang lebih 85.371,63 (Delapan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh satu koma enam tiga) Hektar diluar kawasan hutan mangrove dan luasan kawasan hutan mangrove kurang lebih 4.372 (Empat Ribu tiga ratus tujuh puluh dua) Hektar

9.5.1.2 Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya di kabupaten Luwu merupakan kawasan yang ditetapkan dengan tujuan mencegah terjadinya erosi dan sedimentasi, menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan serta memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan. Kawasan resapan air di kabupaten Luwu terdapat di Kecamatan Walenrang Utara dan Lamasi Timur dengan luas kurang lebih 1.000 (seribu) hektar.

9.5.1.3 Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat di kabupaten Luwu terdiri atas: kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai. Kawasan sempadan pantai terdapat di kecamatan Larompong, Larompong Selatan, Suli, Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Ponrang Selatan, Ponrang, Bua, Walenrang Timur dan Lamasi Timur dengan panjang kurang lebih 116,161 (Seratus enam belas koma satu enam satu) kilometer dengan ketentuan daratan sepanjang tepian laut minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi kearah darat.

Kawasan sempadan sungai terdapat di sungai Noling, Bajo, Suli, Larompong, Tembo'e, Bua, Lamasi dan Makawa. Kawasan sempadan sungai terdapat pada tepian sungai dengan ketentuan :

- a. Dataran sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggung diluar kawasan pemukiman dengan lebar 100 (seratus) meter dari tepian sungai.
- b. Dataran sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggung diluar kawasan pemukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai;
- c. Dataran sepanjang tepian sungai bertanggung dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar; dan
- d. Sungai dikawasan pemukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) meter.

9.5.1.4 Kawasan Cagar Budaya

Kawasan cagar budaya di kabupaten Luwu meliputi:

- a. Kawasan cagar budaya Lapandoso terdapat di kecamatan Bua;
- b. Kawasan cagar budaya Meriam Kuno terdapat di kecamatan Suli;
- c. kawasan cagar budaya Ayam Puang Ritede terdapat di kecamatan Bastem;
- d. Kawasan cagar budaya Bubun Lamu terdapat di kecamatan Bastem;
- e. Kawasan cagar budaya Benteng Tajajok terdapat di kecamatan Bastem;
- f. Kawasan cagar budaya Awa'tondong terdapat di kecamatan Bastem;
- g. Kawasan cagar budaya Pantilang terdapat di kecamatan Bastem;
- h. Kawasan cagar budaya Loko Maindo terdapat di kecamatan Bastem;
- i. Kawasan cagar budaya Bukit Kamanre terdapat di kecamatan Kamanre;
- j. Kawasan cagar budaya Kuburan Tua Noling terdapat di kecamatan Bupon;
- k. Kawasan cagar budaya Kaili terdapat di kecamatan Suli Barat; dan
- l. Kawasan cagar budaya Patung Batu Pemburu terdapat di kecamatan Walenrang Barat.

9.5.1.5 Kawasan Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana alam di kabupaten Luwu ditetapkan dalam rangka memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas kemungkinan bencana alam terhadap fungsi lingkungan hidup dan kegiatan lainnya. Kawasan rawan bencana alam di kabupaten Luwu, meliputi: kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan banjir.

Kawasan rawan tanah longsor terdapat di Kecamatan Latimojong, Larompong, Larompong Selatan, Bajo, Bajo Barat, Suli Barat, Bastem, Bupon, Bua, Walenrang Utara dan Walenrang Barat. Kawasan rawan banjir terdapat di Kecamatan Larompong Selatan, Larompong, Suli, Belopa, Belopa Utara, Bajo, Kamanre, Ponrang, Ponrang Selatan, Bua, Walenrang Timur dan Lamasi Timur.

9.5.1.6 Kawasan Lindung Geologi

Kawasan lindung geologi di kabupaten Luwu ditetapkan dalam rangka memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas kemungkinan bencana alam geologi dan perlindungan terhadap air tanah. Kawasan lindung geologi di kabupaten Luwu berupa kawasan rawan abrasi pantai terdapat di kecamatan Larompong Selatan, Larompong, Suli, Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Ponrang, Ponrang Selatan, Bua, Walenrang Timur dan Lamasi Timur.

9.5.2 Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya kabupaten Luwu, terdiri atas kawasan hutan produksi, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman dan kawasan peruntukan lainnya.

9.5.2.1 Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan peruntukan hutan produksi di kabupaten Luwu meliputi: kawasan hutan produksi terbatas, dan kawasan hutan produksi tetap. Kawasan hutan produksi terbatas terdapat di Kecamatan Walenrang Barat, Bastem, Bua, Bupon dan Ponrang dengan luas kurang lebih 5.122,08 (lima ribu seratus dua puluh dua koma nol delapan) hektar. Kawasan hutan produksi tetap terdapat di kecamatan Bastem, Bua, Bupon, Latimojong, Ponrang dan Walenrang Utara dengan luas kurang lebih 18.349,7 (delapan belas ribu tiga ratus empat puluh sembilan koma tujuh) Hektar.

9.5.2.2 Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Luwu terdiri atas kawasan kawasan pertanian tanaman pangan, kawasan pertanian hortikultura, kawasan perkebunan; dan kawasan peternakan.

Kawasan pertanian tanaman pangan terdapat di setiap wilayah kecamatan ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan, dengan luas kurang lebih 52.738 (lima puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh delapan) hektar. Kawasan pertanian hortikultura terdapat di setiap wilayah kecamatan kurang lebih 7.953 (tujuh ribu sembilan ratus lima puluh tiga) hektar.

Kawasan perkebunan di kabupaten Luwu, terdiri atas:

- a. Kawasan pengembangan Tanaman Kakao dengan luas kurang lebih 36.762 (tiga puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh dua) hektar tersebar di seluruh wilayah kecamatan di kabupaten Luwu;
- b. Kawasan pengembangan Tanaman Kelapa dengan luas kurang lebih 4.711 (empat ribu tujuh ratus sebelas) hektar tersebar di seluruh wilayah Kecamatan Kabupaten Luwu;
- c. Kawasan pengembangan Tanaman Cengkeh dengan luas kurang lebih 14.280 (empat belas ribu dua ratus delapan puluh) hektar tersebar di wilayah kecamatan Larompong Selatan, Larompong, Suli, Suli Barat, Belopa, Belopa Utara, Bajo, Bajo Barat, Latimojong, Bastem, Ponrang, Bupon, Bua, Walenrang, Walenrang Barat, Walenrang Timur dan Walenrang Utara;

- d. Kawasan pengembangan Tanaman Kopi dengan luas kurang lebih 4.627 (empat ribu enam ratus dua puluh tujuh) hektar tersebar di wilayah kecamatan Bastem dan Latimojong;
- e. Kawasan pengembangan Tanaman Lada dengan luas kurang lebih 321 (tiga ratus dua puluh satu) hektar tersebar di wilayah kecamatan Larompong, Larompong Selatan, Suli, Suli Barat, Bajo, Bajo Barat, Latimojong dan Bastem;
- f. Kawasan pengembangan tanaman sagu dengan luas kurang lebih 1.462 (seribu empat ratus enam puluh dua) hektar tersebar di wilayah kecamatan Larompong Selatan, Larompong, Suli, Suli Barat, Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Bajo, Bajo Barat, Latimojong, Ponrang, Ponrang Selatan, Bupon, Bua, Lamasi, Lamasi Timur, Walenrang, Walenrang Barat, Walenrang Timur dan Walenrang Utara; dan
- g. Kawasan perkebunan komoditas lain-lain dengan luas kurang lebih 2.833 (dua ribu delapan ratus tiga puluh tiga) hektar.

Kawasan peternakan di kabupaten Luwu terdiri atas: ternak besar sejumlah 22.860 (dua puluh dua ribu delapan ratus enam puluh) ekor dan ternak kecil sejumlah 23.087 (dua puluh tiga ribu delapan puluh tujuh) ekor terdapat di setiap wilayah kecamatan.

9.5.3 Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan kabupaten Luwu terdiri atas kawasan peruntukan perikanan tangkap, kawasan peruntukan budidaya perikanan, dan kawasan pengolahan ikan, meliputi

- a. Kawasan peruntukan perikanan tangkap terdapat di teluk Bone meliputi kecamatan Belopa, Larompong Selatan, Bua, Ponrang, Ponrang Selatan, Larompong dan Suli.
- b. Kawasan peruntukan budidaya perikanan, di kabupaten Luwu terdiri atas:
 - 1) Rumput laut di kecamatan Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Suli, Ponrang, Ponrang Selatan, Bua, Larompong, Larompong Selatan, Walenrang Timur dan Lamasi Timur;
 - 2) Udang di kecamatan Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Suli, Ponrang, Ponrang Selatan, Bua, Larompong, Larompong Selatan, Walenrang Timur dan Lamasi Timur;
 - 3) Ikan Bandeng di kecamatan Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Suli, Ponrang, Ponrang Selatan, Bua, Larompong, Larompong Selatan, Walenrang Timur dan Lamasi Timur;
 - 4) ikan Mas di Kecamatan Bajo, Suli Barat, Bupon, Walenrang dan Lamasi.
- c. Kawasan peruntukan pengolahan ikan terdapat di kecamatan Larompong, Suli, Ponrang Selatan dan Bua.

9.5.4 Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan di kabupaten Luwu terdiri atas kawasan peruntukan pertambangan mineral logam dan batu bara, kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam, kawasan peruntukan pertambangan mineral batuan, dan kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi.

Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam dan batu bara meliputi kecamatan Walenrang Utara, Walenrang Barat, Walenrang, Bastem, Latimojong, Bajo Barat, Suli Barat, Larompong, Bupon dan Bua. Kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam, meliputi kecamatan Walenrang Utara, Walenrang Barat, Lamasi, Lamasi Timur, Walenrang, Bastem, Latimojong, Bajo, Bajo Barat, Suli, Suli Barat, Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Bupon, Ponrang, Ponrang Selatan, Larompong dan Larompong Selatan. Kawasan peruntukan pertambangan mineral batuan, meliputi kecamatan Walenrang Utara, Walenrang Barat, Lamasi, Lamasi Timur, Walenrang,

Bastem, Latimojong, Bajo, Bajo Barat, Suli, Suli Barat, Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Ponrang Selatan, Larompong dan Larompong Selatan. Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi (migas) berada di Blok Bone Utara.

9.5.5 Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri di kabupaten Luwu merupakan kawasan yang potensi dimanfaatkan untuk kegiatan industri yang meliputi :

- a. Kawasan industri menengah, yaitu : kawasan potensi usaha industri di kecamatan Bua dan Walenrang;
- b. Kawasan industri kecil meliputi: kawasan potensi usaha industri di kecamatan Belopa, Suli, Suli Barat, Bajo Barat, Bupon, Ponrang, Ponrang Selatan, Larompong Selatan, Walenrang Barat, Walenrang Timur, Walenrang Utara, dan Lamasi Timur; dan
- c. Kawasan industri mikro meliputi: kawasan potensi usaha industri di kecamatan Larompong Selatan, Larompong, Suli, Suli Barat, Bajo, Bajo Barat, Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Ponrang Selatan, Ponrang, Bupon, Bua, Latimojong, Bastem, Walenrang, Walenrang Timur, Walenrang Barat, Walenrang Utara, Lamasi, Lamasi Timur.

9.5.6 Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata kabupaten Luwu terdiri atas kawasan peruntukan pariwisata budaya dan kawasan peruntukan pariwisata alam. Kawasan peruntukan pariwisata budaya, yaitu berupa kawasan adat /upacara adat perkawinan dan upacara penguburan mayat di kecamatan Bastem.

Kawasan peruntukan pariwisata alam di kabupaten Luwu, terdiri atas:

- a. Wisata alam air terjun, meliputi :
 - 1) Air Terjun Magandang di kecamatan Walenrang Barat;
 - 2) Air Terjun Toga Tipayo, Salonsa di kecamatan Walenrang Utara;
 - 3) Air Terjun Sarasa Katapuk di kecamatan Latimojong;
 - 4) Air Terjun Buntu Sawa di kecamatan Larompong;
 - 5) Air Terjun Paraposoang dan Karang Titale di kecamatan Bua;
 - 6) Air Terjun Bungalo di kecamatan Ponrang;
 - 7) Air Terjun Rumaju dan Sarasa Jambong di kecamatan Bajo;
 - 8) Air Terjun Salosawa di kecamatan Bastem;
 - 9) Air Terjun Tampumea dan Bilante di kecamatan Bupon;
 - 10) Air Terjun Salotodang, Serambu Masiang dan Tombanbai di kecamatan Suli Barat; dan
 - 11) Air Terjun Tumbubara di kecamatan Bajo Barat.
- b. Wisata alam pantai, meliputi :
 - 1) Pantai Bonepute di kecamatan Larompong Selatan;
 - 2) Pantai Buntu Mata'bing di kecamatan Larompong;
 - 3) Pantai Pannori di kecamatan di Larompong Selatan;
 - 4) Pantai Batu Killong di kecamatan Suli;
 - 5) Pantai Talumae di kecamatan Belopa;
 - 6) Pantai Mamonta di kecamatan Belopa Utara;
 - 7) Pantai Lare-Lare di kecamatan Bua; dan
 - 8) Pantai Bone Pance, Bone Jambong dan Salolo di kecamatan Ponrang Selatan.
- c. Wisata alam pemandian, meliputi :
 - 1) Permandian alam Bonto Tolle di kecamatan Walenrang;
 - 2) Permandian alam Sapuangirat di kecamatan Suli Barat; dan
 - 3) Permandian alam Makawa di kecamatan Walenrang Utara.
- d. Wisata alam Goa, meliputi :

- 1) Goa Liang Andulan di kecamatan Walenrang Utara;
 - 2) Goa Pompessak di kecamatan Bastem;
 - 3) Goa Illanbatu di kecamatan Walenrang Barat;
 - 4) Goa Lebani di kecamatan Belopa Utara; dan
 - 5) Goa Palar di kecamatan Larompong.
- e. Wisata laut di Teluk Bone; dan
- f. Wisata alam hutan penelitian Simoma kecamatan Larompong Selatan.

9.5.7 Kawasan Peruntukan Pemukiman

Kawasan peruntukan permukiman kabupaten Luwu terdiri atas kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan kawasan peruntukan permukiman perdesaan.

Kawasan permukiman perkotaan, terdiri dari atas kurang lebih 4.464 (empat ribu empat ratus enam puluh empat) hektar tersebar di kecamatan Belopa, Belopa Utara, Larompong Selatan, Larompong, Suli, Kamanre, Bajo, Ponrang, Ponrang Selatan, Bua, Walenrang dan Lamasi.

Kawasan permukiman perdesaan, terdiri dari atas kurang lebih 2.773 (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga) hektar tersebar di seluruh wilayah kecamatan di kabupaten Luwu kecuali kecamatan Belopa dan Belopa Utara.

9.5.8 Kawasan Peruntukan Lainnya

Kawasan peruntukan lainnya di kabupaten Luwu adalah kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan, yang terdiri atas:

- a. Kawasan wilayah pertahanan KORAMIL Larompong;
- b. Kawasan wilayah pertahanan KORAMIL Suli;
- c. Kawasan wilayah pertahanan KORAMIL Belopa;
- d. Kawasan Wilayah pertahanan KORAMIL Bajo;
- e. Kawasan wilayah pertahanan KORAMIL Bastem;
- f. Kawasan wilayah pertahanan KORAMIL Ponrang; dan
- g. Kawasan wilayah pertahanan KORAMIL Walenrang.

Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain di kabupaten Luwu selain yang telah ditetapkan tersebut di atas, dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana diatur dalam peraturan daerah RTRW kabupaten Luwu. Pemanfaatan kawasan tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan telah mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang di Kabupaten Luwu.

9.6 Kawasan Strategis Kabupaten Luwu

Kawasan strategis Kabupaten Luwu merupakan bagian wilayah Kabupaten Luwu yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten di bidang ekonomi, sumberdaya alam, dan/ atau lingkungan. Kawasan Strategis yang ada di Kabupaten Luwu terdiri atas Kawasan Strategis Nasional (KSN), Kawasan Strategis Provinsi (KSP); dan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK).

Kawasan Strategis Nasional (KSN) di wilayah kabupaten yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan meliputi wilayah pertahanan Komando Rayon Militer (KORAMIL) berkedudukan di Kecamatan Larompong, Suli, Bajo, Belopa, Bastem, Ponrang dan Walenrang dan merupakan dokumen khusus yang bersifat rahasia.

Kawasan Strategis Provinsi (KSP) di wilayah kabupaten Luwu, terdiri atas:

- a. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dari sudut kepentingan ekonomi, terdiri atas:

- 1) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan khususnya beras terdapat di kecamatan Ponrang, Ponrang Selatan, Bupon, Bajo, Kamanre, Walenrang, Walenrang Timur, Walenrang Utara, Lamasi, Lamasi Timur; dan jagung di kecamatan Bajo Barat, Latimojong, Bupon, Suli Barat, Larompong, Walenrang dan Lamasi Timur;
 - 2) Kawasan pengembangan budi daya alternatif komoditi perkebunan unggulan kakao terdapat di kecamatan Larompong, Bupon, Bajo, kelapa sawit terdapat di kecamatan Suli, Walenrang Utara, kopi robusta terdapat di kecamatan Walenrang Barat, Bastem, jambu mete terdapat di kecamatan Walenrang Utara dan jarak terdapat di kecamatan Suli; dan
 - 3) Kawasan pengembangan budi daya rumput laut jenis cotoni terdapat di kecamatan Larompong Selatan, Larompong, Suli, Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Ponrang Selatan, Ponrang ,Bua, dan jenis grasi laria terdapat di kecamatan Larompong Selatan, Larompong, Suli, Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Ponrang Selatan, Ponrang, Bua, Walenrang Timur dan Lamasi Timur.
- b. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/ atau teknologi tinggi, yaitu kawasan pertambangan migas Blok Bone Utara yang meliputi kabupaten Luwu dan Kota Palopo.
- Kawasan Strategis kabupaten, terdiri atas:
- a. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
 - b. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;
 - c. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
 - d. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, terdiri atas:

- a. Kawasan strategis Kota Belopa, Bajo, Kamanre sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan;
- b. Kawasan strategis Bandar Udara Lagaligo sebagai pusat pelayanan udara antar kabupaten dan provinsi;
- c. Kawasan strategis Agropolitan sebagai pusat pengembangan komoditas pertanian di kecamatan Bajo, Bajo Barat, Latimojong sebagai pusat produksi dan kecamatan Suli Barat, Larompong, Larompong Selatan, Bupon, Bua, Walenrang Utara dan Walenrang Barat sebagai pendukung;
- d. Kawasan strategis Industri di kecamatan Bua;
- e. Kawasan strategis Minapolitan sebagai pusat pengembangan budi daya perikanan di kecamatan Ponrang, Ponrang Selatan, Kamanre sebagai pusat pengembangan budi daya utama dan kecamatan Belopa, Belopa Utara, Suli, Larompong, Larompong Selatan, Bua, Walenrang Timur dan Lamasi Timur sebagai pendukung;
- f. Kawasan strategis pengembangan perikanan tangkap di Ulo-Ulo, Bonepute dan Balambang; dan
- g. Kawasan strategis PKLp Bua , Padang Sappa dan Batusitanduk.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya meliputi: upacara adat perkawinan bernuansa tradisional berdasarkan strata sosial masyarakat, prosesi pemakaman yang merupakan tradisi etnis tertentu, upacara maccera tasi, mapacekke wanua, pesta panen dan kesenian daerah. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi meliputi tambang logam emas dan PLTMH di kecamatan Latimojong dan Walenrang Barat. Kawasan strategis dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan meliputi kawasan hutan penelitian Simoma kecamatan Larompong Selatan.

BAB -10

RENCANA PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN PARIWISATA KABUPATEN LUWU

10.1 Destinasi Pariwisata Daerah (DPD)

Perwilayahan Destinasi Pariwisata merupakan perwilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk Destinasi Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) kabupaten Luwu ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :

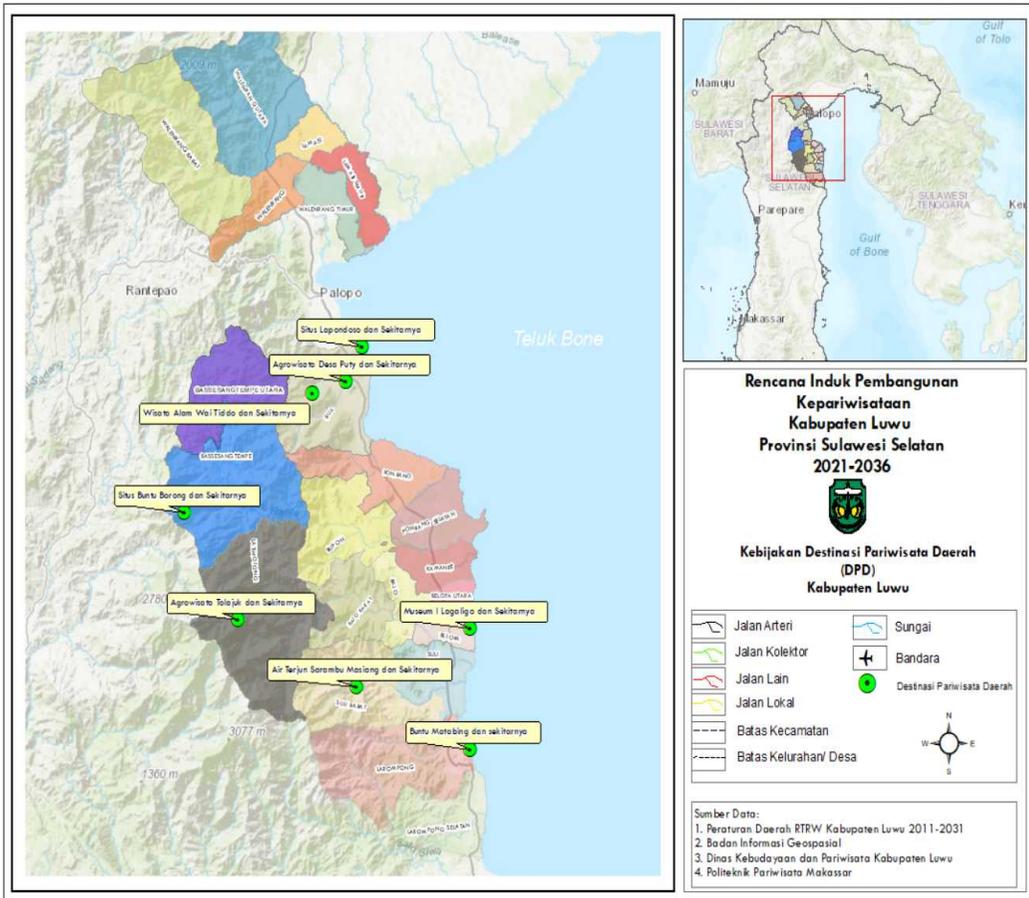
- a. Merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah kabupaten dan/ atau lintas kabupaten yang di dalamnya terdapat kawasan-Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD), diantaranya merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD);
- b. Memiliki Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara lokal, regional, nasional dan/ atau internasional, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan;
- c. Memiliki kesesuaian tema Daya Tarik Wisata yang mendukung penguatan daya saing;
- d. Memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait; dan
- e. Memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan.

Berdasarkan kriteria tersebut di atas serta keterkaitannya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Luwu, maka Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) kabupaten Luwu ditetapkan sebagai berikut :

- a. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) **Kawasan Buntu Ma'tabbing dan Sekitarnya**. Tema utama dari Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Buntu Ma'Tabbing dan Sekitarnya, adalah wisata alam berbasis pantai, wisata tematik, dan hutan penelitian yang terletak di Kecamatan Larompong dan kecamatan Larompong Selatan. Aktivitas wisata yang ditawarkan pada Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Buntu Ma'Tabbing dan sekitarnya yaitu berenang, *photo spot*, *tracking* pada hutan penelitian berbasis ekologi, *water sport recreation*, dan rekreasi wisata keluarga;
- b. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) **Kawasan Latimojong dan Sekitarnya**. Tema utama dari Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Latimojong dan Sekitarnya, yaitu wisata alam berbasis pegunungan dan panorama yang terletak di kecamatan Latimojong. Aktivitas wisata yang ditawarkan pada Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Latimojong yaitu *climbing*, *tracking*, *hiking*, *adventure*, *rafting*, *camping*, agrowisata dan rekreasi wisata keluarga, wisata ekologi berbasis desa wisata;
- c. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) **Kawasan Sarambu Masiang dan Sekitarnya**. Tema utama dari Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Air Terjun Sarambu Masiang dan Sekitarnya, yaitu wisata alam berbasis air terjun yang terletak di kecamatan Suli Barat. Aktivitas wisata yang ditawarkan pada Destinasi

- Pariwisata Daerah (DPD) Air Terjun Sarambu Masiang yaitu wisata alam berbasis ekologi dan rekreasi keluarga
- d. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) **Kawasan Wisata Alam Pakalolo dan Sekitarnya**. Tema utama dari Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Wisata Alam Pakalolo dan Sekitarnya, yaitu wisata alam berbasis sungai dan panorama yang terletak di kecamatan Bua. Aktivitas wisata yang ditawarkan pada Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Wisata Alam Pakalolo yaitu wisata tirta, *meeting*, rekreasi keluarga;
 - e. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) **Kawasan Situs Batu Borrong dan Sekitarnya**. Tema utama dari Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Situs Batu Borrong dan Sekitarnya, yaitu wisata sejarah dan budaya yang terletak di kecamatan Basesangtempe. Aktivitas wisata yang ditawarkan pada Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Situs Batu Borrong yaitu wisata edukasi berbasis situs, wisata budaya berbasis rumah adat, *photo spot*, panorama, wisata tirta, dan rekreasi wisata keluarga;
 - f. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) **Kawasan Pelabuhan Belopa dan Sekitarnya**. Tema utama dari Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Pelabuhan Belopa dan Sekitarnya pada ayat (1) huruf f, yaitu wisata *Meeting, Incentive, Congress and Convergence* (MICE), sejarah dan budaya yang terletak kecamatan Belopa. Aktivitas wisata yang ditawarkan pada Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Pelabuhan Belopa yaitu wisata edukasi berbasis museum, wisata budaya, dan wisata kota (*urban tourism*);
 - g. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) **Kawasan Situs Lapadoso dan Sekitarnya**. Tema utama dari Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Situs Lapadoso dan Sekitarnya, yaitu wisata sejarah dan budaya yang terletak di kecamatan Bua. Aktivitas wisata yang ditawarkan pada Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Situs Lapadoso yaitu wisata edukasi berbasis situs, wisata budaya tradisi masyarakat, dan wisata sungai;
 - h. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) **Kawasan Agrowisata Desa Puty dan Sekitarnya**. Tema utama dari Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Agrowisata Desa Puty dan Sekitarnya, yaitu wisata alam berbasis pertanian (*agrotourism*) yang terletak di kecamatan Bua. Aktivitas wisata yang ditawarkan pada Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Agrowisata Desa Puty yaitu wisata edukasi, rekreasi keluarga, dan *photo spot*; dan
 - i. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) **Kawasan Desa Siteba dan Sekitarnya**. Tema utama dari Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Desa Siteba dan Sekitarnya, yaitu wisata alam berbasis Desa Wisata (*tourism village*) yang terletak di kecamatan Walenrang Utara. Aktivitas wisata yang ditawarkan pada Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Desa Siteba yaitu wisata edukasi, rekreasi keluarga, dan desa wisata.

Gambar 10.1
Peta Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Kabupaten Luwu



Sumber : Data Olahan, 2021

10.2 Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD)

Berdasarkan penetapan Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) kabupaten Luwu, selanjutnya diidentifikasi potensi daya tarik wisata yang menjadi tema utama sehingga akan memudahkan dalam menyusun pemaketan dan pola perjalanan wisata termasuk dalam menyesuaikan beberapa komponen pendukung seperti pusat pelayan wisata, aksesibilitas pariwisata, amenitas serta infrastruktur pendukung lainnya.

Berdasarkan hasil analisis potensi daya Tarik wisata dan pendekatan zonasi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, ditetapkan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) kabupaten Luwu sebagai berikut :

- a. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona Selatan, terdiri dari kecamatan Larompong Selatan, kecamatan Larompong, kecamatan Suli dan kecamatan Suli Barat;
- b. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona Timur, terdiri dari kecamatan Belopa, kecamatan Belopa Utara, kecamatan Kamanre, kecamatan Ponrang dan kecamatan Ponrang Selatan;
- c. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona Tengah, terdiri dari kecamatan Bajo, kecamatan Bajo Barat, kecamatan Bupon, dan kecamatan Bua;

- d. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona Barat, terdiri dari kecamatan Latimojong, kecamatan Basesangtempe, dan kecamatan Basesangtempe Utara; dan
- e. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona Utara, terdiri dari kecamatan Walenrang, kecamatan Walenrang Timur, kecamatan Walenrang Barat, kecamatan Lamasi dan kecamatan Lamasi Timur.

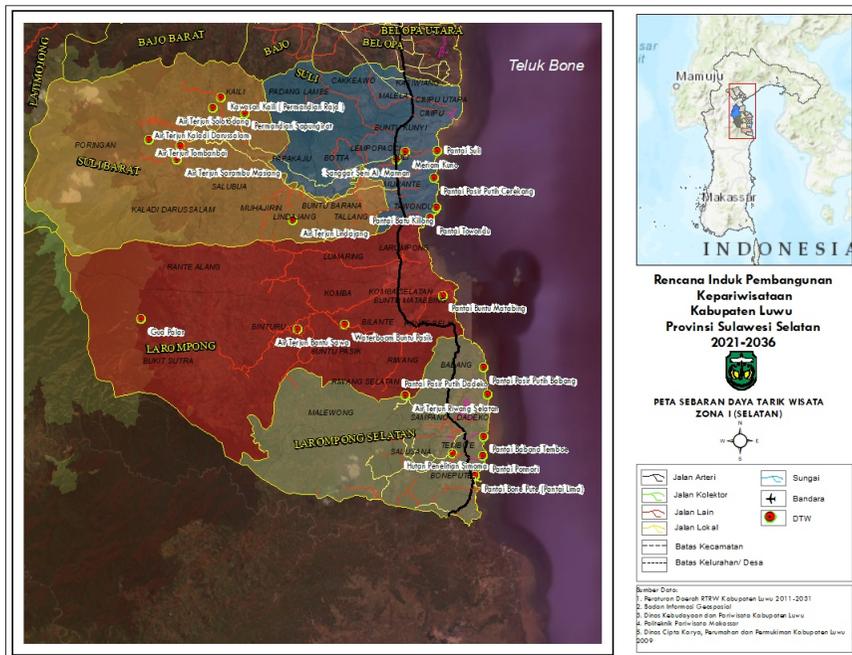
10.2.1 Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona Selatan

Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona Selatan merupakan kawasan pengembangan pariwisata kabupaten Luwu yang meliputi kecamatan Larompong Selatan, Larompong, Suli dan Suli Barat. Karakteristik wilayah dari kedua kecamatan ini didominasi oleh daerah dengan ketinggian 0-750 meter pada kawasan di kecamatan Suli dan Larompong Selatan sampai dengan ketinggian 0-2.250 mdpl pada kawasan di kecamatan Larompong.

Kondisi geografis wilayah pada kawasan ini mempengaruhi jenis daya tarik dan atraksi wisata yang dimiliki yang terdiri dari daya tarik wisata alam berupa area bukit, pantai, sungai, air terjun, dan panorama. Daya tarik wisata sejarah dan budaya berupa makam, dan tinggalan sejarah masa lampau berupa situs.

Sebagai kawasan yang terdiri kecamatan yang berbatasan dan akses langsung dengan dengan kabupaten wajo pada wilayah selatan sebagai akses transportasi darat dari kota Makassar, maka kecamatan Larompong Selatan harus mampu menjadi gerbang yang memberikan gambaran menarik bagi pengunjung dengan tujuan utama berwisata atau sekedar melewati kabupaten Luwu sebagai salah satu akses menuju kota Palopo, kabupaten Luwu Utara, Luwu Timur, sekaligus akses trans Sulawesi menuju provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.

Gambar 10.2
Peta KPPD Zona Selatan



Sumber : Data Olahan, 2021

KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KPPD ZONA SELATAN



<p>Daya Tarik Wisata</p>	<p>Pantai Bonepute, Pantai Ponnori, Hutan penelitian Simoma, Kawasan <i>SJ Park</i>, Hutan Mangrove Pantai Babana Tembo'E, Air Terjun Buntu Sawa, Pantai Buntu Mata'bing, Goa Palar, Kawasan cagar budaya Meriam Kuno, Pantai Batu Killong, Hutan Mangrove Pulangasa Towondu, Pantai Morante, Pantai Suli, Air Terjun Salotodang, Sarambu Masiang, Air terjun Tombanbai, Permandian alam Sapuangirat, Air Terjun Lindajang, Sarambu Paburru, Sarambu Daun Banga, Air Terjun Bollae, Sarambu Biqcu, Sarambu Balendo, Sarambu Pong Ma'ga, Sungai Likuraja, dan kuburan Jarra</p>
<p>Tema Pengembangan</p>	<p>Wisata alam pantai, permandian air alam, sungai, , air terjun, hutan mangrove dan panorama alam; wisata sejarah dan budaya, serta wisata minat khusus sebagai daya tarik utama</p>
<p>Komponen Pengembangan</p>	<p>Jabaran</p>
<p>Atraksi Wisata</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan DTW Alam Bahari dan Tirta 2. Pengembangan DTW Sejarah dan Budaya 3. Pengembangan DTW Minat Khusus
<p>Fasilitas Wisata</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan <i>resort</i> dan <i>homestay</i>; 2. Pengembangan fasilitas olah raga dan rekreasi keluarga (<i>marine tourism</i>); 3. Pengembangan Sistem Informasi, Guiding, Interpretasi, serta <i>Tourist Information Centre</i>; 4. Pengembangan fasilitas <i>Money Changer</i>, ATM dan Internet; 5. Penataan dan pengembangan kawasan wisata kuliner di kawasan Pantai Ponnori, Buntu Ma'tabbing dan Hutan Penelitian Simoma; 6. Penataan dan pengembangan fasilitas wisata di kawasan <i>SJ Park</i> dan <i>Air Terjun</i>;

	<ol style="list-style-type: none"> 7. Pengembangan usaha kreatif cinderamata; 8. Penataan dan pengembangan fasilitas wisata di wisata sejarah dan budaya; dan 9. Pengembangan Desa Wisata (<i>Tourism Village</i>) dan Wisata Pedesaan (<i>Rural Tourism</i>) berbasis desa nelayan.
Aksesibilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan jalur dan moda transportasi ke Daya Tarik Wisata yang lain yang berada di dalam kawasan dan antar kawasan; 2. Pengembangan dermaga dan fasilitas transportasi wisata bahari
Manajemen Tata Ruang	<p>Pembagian zona terhadap Daya Tarik Wisata.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zona inti adalah daerah dimana objek itu berada dan sekaligus sebagai zona konservasi. 2. Pengembangan fasilitas tambahan diluar dari zona inti.

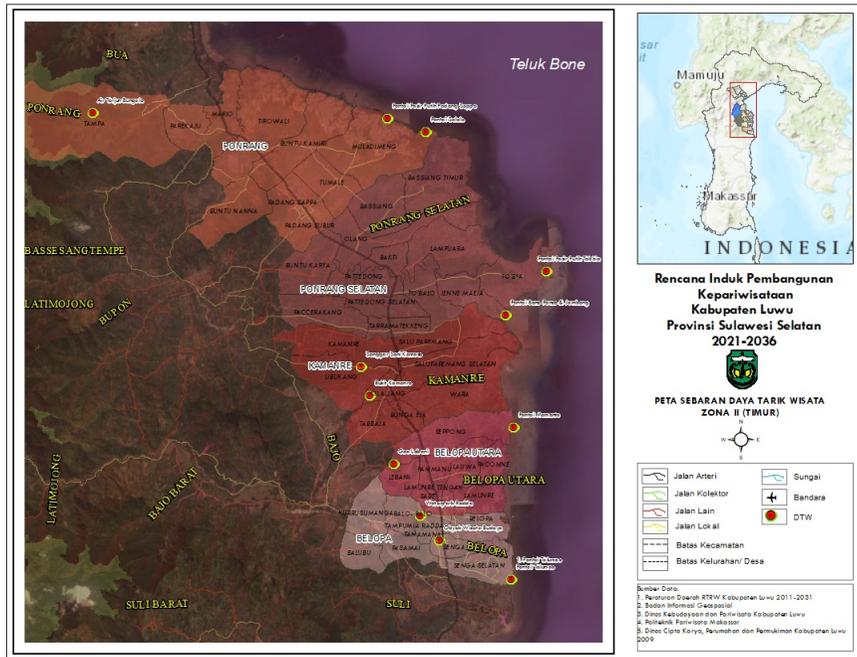
10.2.2 Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona Timur

Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona Timur merupakan kawasan pariwisata kabupaten Luwu yang meliputi kecamatan Belopa, kecamatan Belopa Utara, kecamatan Kamanre, kecamatan Ponrang dan kecamatan Ponrang Selatan. Karakteristik wilayah pada zona ini berada di daerah dengan ketinggian 0-250 meter di wilayah kecamatan Belopa Utara, Kamanre, dan Ponrang Selatan sampai dengan ketinggian 0-1.250 mdpl di kecamatan Ponrang, sehingga terdapat variasi yang sangat berbeda antara kondisi dataran rendah dengan daerah perbukitan.

Kondisi geografis wilayah pada kawasan pengembangan pariwisata ini mempengaruhi jenis daya tarik dan atraksi wisata yang dimiliki yang terdiri dari daya tarik wisata alam pantai dan air terjun, budaya dan sejarah berupa makam, situs dan tinggalan sejarah arkeologi lainnya.

Sebagai wilayah kawasan pengembangan pariwisata daerah yang juga sekaligus sebagai ibukota kabupaten kabupaten Luwu, yaitu di kecamatan Belopa, maka kawasan ini perlu dikembangkan gerbang identitas, aktivitas wisata urban dan pusat informasi pariwisata yang dapat memicu minat kunjungan wisatawan ke kabupaten Luwu .

Gambar 10.3
Peta KPPD Zona Timur

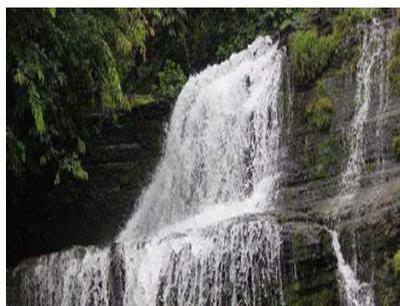


Sumber : Data Olahan, 2021

Peran sentral kecamatan Belopa sebagai ibukota kabupaten Luwu harus dioptimalkan khususnya dalam pengembangan infrastruktur pendukung sehingga peran sektor pariwisata dalam mengoptimalkan fasilitas dan peran kota dalam pengembangan pariwisata seperti pelaksanaan event dan kegiatan MICE lainnya berupa festival dan pameran akan meningkatkan peran sektor pariwisata kabupaten Luwu, sekaligus meningkatkan citra kabupaten Luwu dalam sektor pariwisata.

Dengan karakter geografis dan potensi daya tarik serta atraksi wisata yang sangat spesifik pada wisata alam dan urban, maka prioritas pengembangan pada wilayah kawasan pengembangan pariwisata ini adalah pengembangan sarana aktivitas wisata MICE, kuliner, belanja dan ekonomi kreatif sehingga dapat mengoptimalkan citra kawasan sebagai ibukota kabupaten LUwu sekaligus sebagai destinasi pariwisata yang menarik untuk dikunjungi.

KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KPPD ZONA TIMUR



Daya Tarik Wisata	Bubun Parani, Kawasan Taman Hijau Andi Benni, Museum Opu Daeng Risaju, Kawasan Terpadu Pariwisata Pelabuhan Belopa (Museum, Kuliner, dan Seni Pertunjukan), Pantai Talumae, Pantai Mamonta, Situs Buntu Lebani, kawasan cagar budaya Bukit Kamanre, Air Terjun Bungalo, Air Terjun Papakaju, Pantai Bone Pance, Pantai Bone Jambong, dan Pantai Salolo.
Tema Pengembangan	Wisata Alam, Wisata Budaya, Wisata Sejarah, dan Wisata Minat Khusus
Komponen Pengembangan	Jabaran
Atraksi Wisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan DTW Alam 2. Pengembangan DTW Sejarah dan Budaya 3. Pengembangan DTW Minat Khusus
Fasilitas Wisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan <i>venue</i> wisata MICE 2. Pengembangan <i>landmark</i> gerbang identitas 3. Pengembangan usaha kreatif cinderamata. 4. Pengembangan kawasan wisata Pelabuhan Belopa 5. Pengembangan fasilitas wisata pada kawasan Situs Sejarah dan Budaya. 6. Pengembangan wisata kuline dan wisata belanja
Aksesibilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan jalur dan moda transportasi ke Daya Tarik Wisata
Manajemen Tata Ruang	Pembagian zona terhadap Daya Tarik Wisata. <ol style="list-style-type: none"> 1. Zona inti adalah daerah dimana objek itu berada dan sekaligus sebagai zona konservasi. 2. Pengembangan fasilitas tambahan diluar dari zona inti.

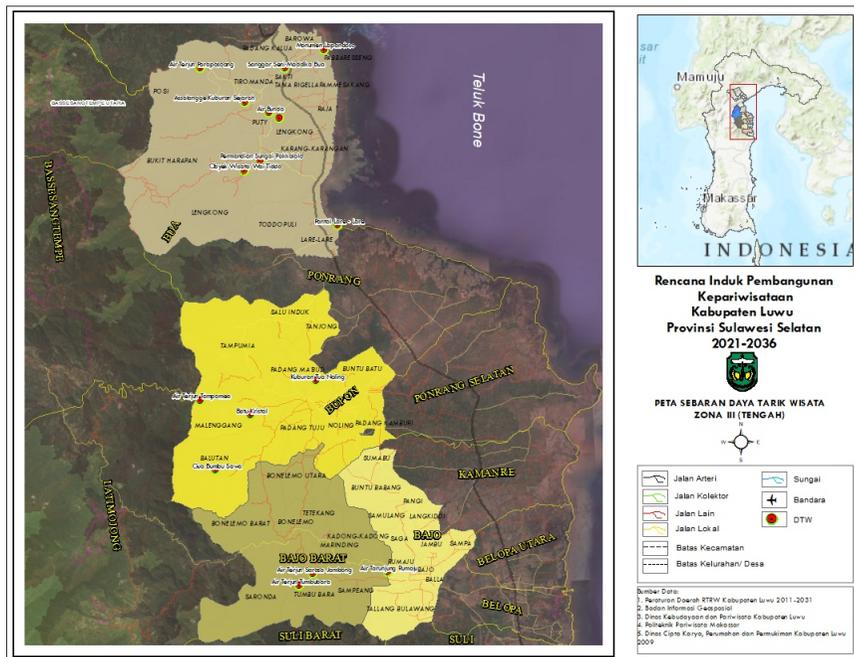
10.1.3 Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona Tengah

Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona 3 merupakan kawasan pariwisata kabupaten Luwu yang meliputi kecamatan Bajo, kecamatan Bajo Barat, kecamatan Bupon, dan kecamatan Bua. Karakteristik wilayah di kawasan ini yang didominasi oleh daerah dengan ketinggian 0-750 mdpl pada wilayah kecamatan Bajo sampai dengan ketinggian 0-1.750 mdpl di wilayah kecamatan Bajo Barat.

Kondisi geografis wilayah pada kawasan pengembangan pariwisata yang sangat variatif ini mempengaruhi jenis daya tarik dan atraksi wisata yang dimiliki yang sangat beragam terdiri dari daya tarik wisata alam berupa air terjun, bendungan, permandian alam, sungai, dan panorama. Daya tarik wisata budaya berupa ritual adat, makam dan tinggalan sejarah masa lampau.

Sebagai wilayah kawasan pengembangan pariwisata daerah yang merupakan lokasi bandara udara di kecamatan Bua, maka kawasan ini perlu dikembangkan gerbang identitas dan pusat informasi pariwisata yang dapat memicu minat kunjungan wisatawan melalui akses udara ke kabupaten Luwu. Zona ini juga memegang peran penting karena merupakan zona antara kabupaten Luwu yang berbatasan dengan kota Palopo.

Gambar 10.4
Peta KPPD Zona Tengah



Sumber : Data Olahan, 2021

KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KPPD ZONA TENGAH



Daya Tarik Wisata	Kawasan Bendung Tomatope, Benteng Rumaju, Air Terjun Tumbubara, Desa Bonelemo, Permandian Batu Alang, Salu Suso, Saruran Toke, kawasan cagar budaya Kuburan Tua Noling, Air Terjun Arung Tobo Tampumea, Air terjun Bilante, kawasan cagar budaya Lapandoso, Makam Maddika Bua Tandipau, Bubun Datu, Air Terjun Puraposoang, Air terjun Karangan Titale, Pantai Lare-Lare, Permandian alam Pakalolo, Wisata Alam Garungga dan Permandian alam Wai Tiddo.
-------------------	---

Tema Pengembangan	Wisata Alam Air Terjun, Permandian alam, Pantai, dan Wisata Sejarah dan Budaya, serta Wisata minat khusus Bendungan
-------------------	---

Komponen Pengembangan	Jabaran
Atraksi Wisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan DTW Alam 2. Pengembangan DTW Sejarah dan Budaya 3. Pengembangan DTW Kuliner
Fasilitas Wisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan kawasan dan pengembangan fasilitas wisata di Kawasan cagar budaya Lapandoso. 2. Penataan kawasan dan pengembangan fasilitas wisata di Kawasan Permandian Alam dan Air Terjun. 3. Pengembangan fasilitas olah raga dan rekreasi wisata petualangan dan <i>camping</i> 4. Pengembangan fasilitas minat khusus photography 5. Pengembangan resort area dan hotel. 6. Pengembangan pasar wisata milenial 7. Pengembangan fasilitas wisata persawahan (<i>rice field tracking and riding</i>)

	8. Pengembangan fasilitas Restoran dan Kuliner tradisional 9. Pengembangan fasilitas pembuatan dan penjualan cinderamata 10. Pengembangan Sistem Informasi, Guiding, Interpretasi, serta <i>Tourist Information Centre</i>
Aksesibilitas	Pengembangan jalur dan moda transportasi ke Daya Tarik Wisata yang lain serta hub transportasi Luwu-Toraja/ Toraja Utara.
Manajemen Tata Ruang	Pembagian zona terhadap Daya Tarik Wisata. 1. Zona inti adalah daerah dimana objek berada dan sekaligus sebagai zona konservasi. 2. Pengembangan fasilitas tambahan diluar dari zona inti.

10.1.4 Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona Barat

Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona Barat merupakan kawasan pariwisata kabupaten Luwu yang meliputi kecamatan Latimojong, kecamatan Basesangtempe, dan kecamatan Basesangtempe Utara. Karakteristik wilayah dari kecamatan pada zona ini yang didominasi oleh daerah dengan ketinggian antara 250-1.500 mdpl pada kawasan wilayah kecamatan Basesangtempe Utara sampai dengan ketinggian 0-3500 mdpl di wilayah kecamatan Latimojong.

Kondisi geografis wilayah pada kawasan pengembangan pariwisata ini mempengaruhi jenis daya tarik dan atraksi wisata yang dimiliki yang terdiri dari daya tarik wisata alam berupa Air terjun, goa, Sungai, dan panorama. Daya tarik wisata sejarah dan budaya berupa situs dan ritual adat, serta berbagai potensi ekonomi masyarakat sebagai daya tarik minat khusus agro wisata.

Sebagai wilayah kecamatan yang merupakan kawasan dataran tinggi serta potensi budaya masyarakat di masa lalu yang masih tetap bertahan, sehingga pada kawasan pengembangan pariwisata di zona barat merupakan fokus untuk wisata minat khusus petualangan dan agrowisata. Mengingat kondisi geografis wilayah yang didominasi oleh dataran tinggi, maka kawasan pengembangan pariwisata daerah ini membutuhkan infrastruktur aksesibilitas serta fasilitas wisata petualangan yang lebih baik sehingga menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke kabupaten Luwu.

		Tajojok, kawasan cagar budaya Awa'tondong, kawasan cagar budaya Pantilang, kawasan cagar budaya Loko Maindo, Air Terjun Salosawa, kawasan adat/upacara perkawinan dan upacara penguburan, dan Situs Batu Borrong.
Tema Pengembangan		Pengembangan Wisata Alam petualangan, camping dan panorama, Minat Khusus wisata agro dan wisata Pedesaan, serta wisata sejarah dan budaya
Komponen Pengembangan	Jabaran	
Atraksi Wisata		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan DTW Alam 2. Pengembangan DTW Sejarah dan Budaya 3. Pengembangan DTW Minat Khusus Agrowisata dan Wisata Pedesaan
Fasilitas Wisata		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan fasilitas makan minum dan fasilitas penunjang di kawasan Agrowisata dan Wisata Pedesaan. 2. Pengembangan fasilitas rekreasi wisata terintegrasi di kawasan wisata Latimojong. 3. Pengembangan fasilitas rekreasi wisata terintegrasi di kawasan Basesang Tempe 4. Pengembangan <i>Homestay</i>, <i>Camping ground</i> dan sarana akomodasi lainnya 5. Pengembangan Sistem Informasi, Guiding, Interpretasi, serta <i>Tourist Information Centre</i>. 6. Pengembangan fasilitas ATM 7. Pengembangan Pusat Informasi Pariwisata 8. Pengembangan fasilitas agrowisata
Aksesibilitas		Pengembangan jalur dan moda transportasi ke Daya Tarik Wisata lain yang berada di dalam kawasan dan antar kawasan.
Manajemen Ruang	Tata	Pembagian zona terhadap Daya Tarik Wisata. <ol style="list-style-type: none"> 1. Zona inti adalah daerah dimana objek berada dan sekaligus sebagai zona konservasi. 2. Pengembangan fasilitas tambahan diluar dari zona inti.

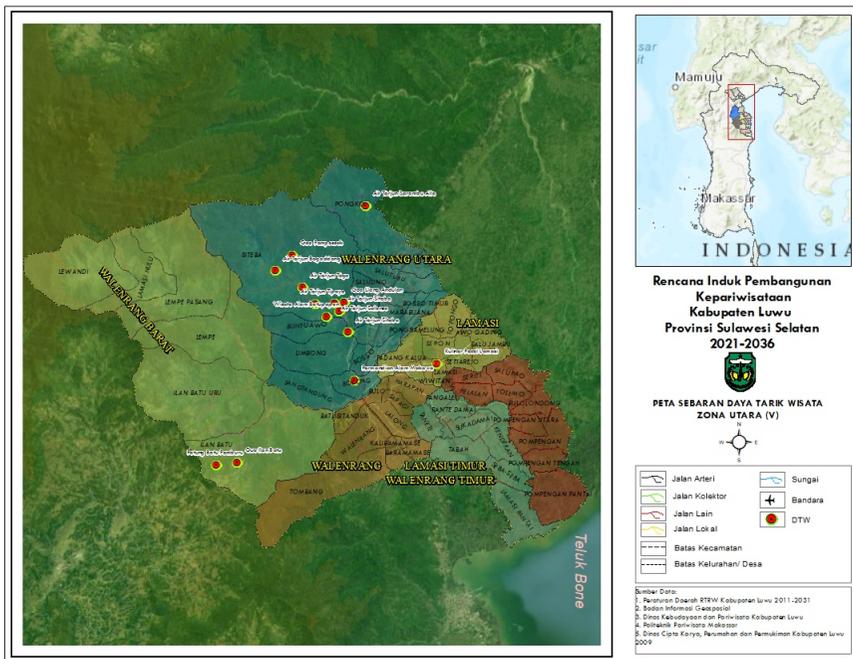
10.1.5 Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona Utara

Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona Utara merupakan kawasan pariwisata kabupaten Luwu yang meliputi kecamatan Walenrang, kecamatan Walenrang Timur, kecamatan Utara, kecamatan Walenrang Barat, kecamatan Lamasi dan kecamatan Lamasi Timur. Karakteristik wilayah dari kecamatan pada zona ini yang didominasi oleh daerah dengan ketinggian antara 0-250 mdpl pada kawasan di wilayah kecamatan Lamasi dan Lamasi Timur sampai dengan ketinggian 0-2.500 mdpl pada daerah dataran tinggi di wilayah kecamatan Walenrang Barat.

Kondisi geografis wilayah pada kawasan pengembangan pariwisata ini mempengaruhi jenis daya tarik dan atraksi wisata yang dimiliki yang terdiri dari daya tarik wisata alam berupa air terjun, goa, sungai, pantai, geologi dan panorama, potensi wisata sejarah dan budaya. Selain itu, posisi kawasan yang berbatasan langsung dengan kabupaten Luwu Utara dan kota Palopo, juga mempengaruhi pengembangan fasilitas pariwisata pada kawasan ini.

Sebagai wilayah kecamatan yang menjadi akses utama pengunjung dari kota Makassar ke kabupaten luwu utara dan Luwu Timur melalui kabupaten Luwu dan kota Palopo, juga sebagai akses jalur darat perjalanan dari kabupaten luwu ke kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara melalui jalur Batusitanduk. Selain itu, kawasan ini juga merupakan jalur perlintasan utama trans Sulawesi serta kondisi geografis wilayah yang didominasi oleh variasi pantai dan pegunungan, maka kawasan pengembangan pariwisata daerah ini membutuhkan infrastruktur aksesibilitas serta fasilitas wisata alam yang lebih baik, khususnya dalam mendorong perwujudan kawasan wisata Walenrang-Lamasi (Walmas) sehingga menarik minat wisatawan untuk singgah dan berkunjung ke kabupaten Luwu.

Gambar 10.6
Peta KPPD Zona Utara



Sumber : Data Olahan, 2021

KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KPPD ZONA UTARA



Daya Tarik Wisata	Permandian alam Bonto Tolle, Kawasan Desa Lamasi Pantai, Lo'ko Pa'kapanan (Illanbatu), Wisata Alam Batupapan, Permandian Alam Batiok, Sungai Makun, Permandian Sungai Lomasi, Air Terjun Toga Tipayo, Permandian alam Makawa, Liang Andulan, Goa Pompessak, Sarambu Ala, Air Terjun Andulan, Sarambu Ma'gandang, Air Terjun Waisuun, Kawasan Bukit desa Se'pon, Desa Wisata Seriti, dan Kawasan Sungai dan Muara Salu Taretti
Tema Pengembangan	Pengembangan Wisata Alam, Minat Khusus wisata agro dan wisata Pedesaan, Wisata Sejarah dan Budaya
Komponen Pengembangan	Jabaran
Atraksi Wisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan DTW Alam 2. Pengembangan DTW Sejarah dan Budaya 3. Pengembangan DTW Minat Khusus Agrowisata dan Wisata Pedesaan
Fasilitas Wisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan fasilitas makan minum dan fasilitas penunjang di kawasan Agrowisata dan Wisata Pedesaan. 2. Pengembangan fasilitas rekreasi wisata terintegrasi di kawasan wisata desa Siteba 3. Pengembangan fasilitas rekreasi wisata terintegrasi di kawasan Pantai 4. Pengembangan <i>Homestay</i> dan sarana akomodasi lainnya 5. Pengembangan Sistem Informasi, Guiding, Interpretasi, serta <i>Tourist Information Centre</i>. 6. Pengembangan fasilitas ATM
Aksesibilitas	Pengembangan jalur dan moda transportasi ke Daya Tarik Wisata lain yang berada di dalam kawasan dan

antar kawasan.

Manajemen Tata Ruang	Pembagian zona terhadap Daya Tarik Wisata. 1. Zona inti adalah daerah dimana objek berada dan sekaligus sebagai zona konservasi. 2. Pengembangan fasilitas tambahan diluar dari zona inti.
----------------------	--

10.3 Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD)

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) kabupaten Luwu ditentukan dengan potensi dan kriteria spesifik sebagai berikut:

- a. Memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
- b. Memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
- c. Memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun khususnya nasional;
- d. Memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
- e. Memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
- f. Memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- g. Memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
- h. Memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
- i. Memiliki kekhususan dari wilayah;
- j. Berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial daerah, provinsi dan/ atau nasional; dan
- k. Memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.

Rencana pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) kabupaten Luwu juga dibagi berdasarkan kelompok wilayah administratif dan karakter paket wisata dengan pertimbangan arah perjalanan wisata yang efektif dan efisien dengan tetap menikmati beberapa jenis daya tarik wisata dalam tiap paket perwilayahan yang dikembangkan, dengan tetap mempertimbangkan kondisi aksesibilitas dan karakter budaya yang ada di kabupaten Luwu.

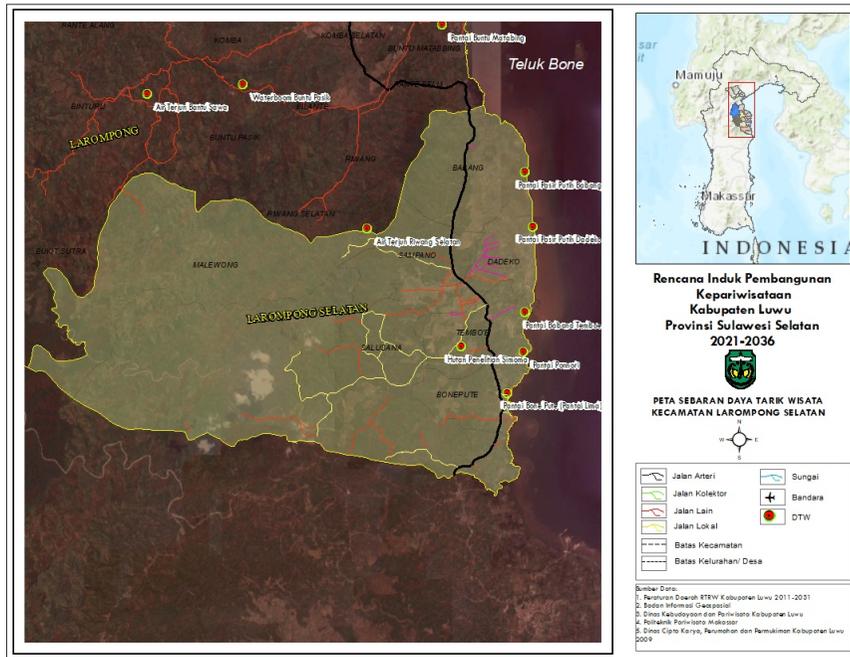
Berdasarkan pengertian, kriteria dan pertimbangan-pertimbangan karakter wilayah tersebut, maka Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) kabupaten Luwu meliputi:

1. KSPD Larompong Selatan dan Sekitarnya

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Larompong Selatan dan sekitarnya, dengan luas wilayah kecamatan adalah 131 km², yang terdiri dari 10 buah desa/ kelurahan, yaitu La'loa, Batu Lappa, Bonepute, Tembo'e, Salusana, Dadeko, Sampano, Malewong, Babang, dan Gandang Batu. Kawasan ini terletak pada ketinggian antara 0-750 mdpl.

Jumlah penduduk pada kecamatan Larompong Selatan pada tahun 2020 tercatat sebanyak 17.777 jiwa, dengan populasi tertinggi terdapat di desa Sampano yang mencapai 2.627 jiwa dan jumlah penduduk terkecil pada kawasan ini terdapat di desa Gandang Batu yang hanya sebanyak 577 jiwa.

Gambar 10.7
Peta KSPD Larompong Selatan dan Sekitarnya



Sumber : Data Olahan, 2021

Sarana transportasi antar wilayah dalam kawasan ini sebagian besar telah dapat diakses kendaraan umum dengan trayek tetap, dan masih terdapat dua buah wilayah yang belum diakses dengan angkutan umum, yaitu akses ke Malewong dan Gandang Batu.

Kondisi akses jalan dalam kawasan kecamatan Bontocani pada tahun 2020 menunjukkan bahwa sebagian besar jalan akses antar wilayah dalam kawasan dengan permukaan jalan aspal dan beton sehingga dapat diakses dengan baik dan aman sepanjang tahun, serta masih terdapat akses jalan dalam kondisi pengerasan batu/ kerikil yaitu di Malewong. Kawasan ini merupakan salah satu wilayah penghasil produk pertanian berupa sayur-sayuran, dan buah-buahan, serta hasil perkebunan.

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Larompong Selatan dan sekitarnya merupakan kawasan strategis dengan tema unggulan aktivitas dan atraksi wisata yang didominasi oleh pantai, hutan mangrove, hutan penelitian, panorama, serta tinggalan sejarah dan budaya.

Daya tarik utama dari kawasan ini adalah Pantai Bonepute, Pantai Ponnori, Hutan penelitian Simoma, Kawasan *SJ Park* dan Hutan Mangrove Pantai Babana Tembo'E. Kondisi potensi wisata pada Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Larompong Selatan dan sekitarnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10.1
Kondisi Aktual Daya Tarik Wisata KSPD Larompong Selatan dan Sekitarnya

No	Nama DTW	Atraksi	Kondisi Aktual
DTW Alam			
1	Pantai Bonepute	1. Panorama pantai 2. Rekreasi keluarga	Potensial
2	Pantai Pannori/ Ponnori	1. Panorama pantai 2. Rekreasi keluarga	Potensial
3	Hutan Penelitian Simoma	Wisata edukasi (flora dan fauna)	Potensial
4	Pantai Babana Tembo'E	1. Hutan Mangrove 2. Panorama pantai 3. Rekreasi keluarga	Potensial
DTW Buatan dan Minat Khusus			
5	Kawasan SJ <i>Park</i>	1. Minat khusus 2. Rekreasi keluarga	Baik

Sumber : Data Olahan, 2021

Kondisi aktual Daya Tarik Wisata di KSPD Larompong Selatan dan sekitarnya bervariasi, dari 5 daya tarik dan atraksi wisata yang ada, terdapat 4 buah daya tarik termasuk “Potensial” untuk dikembangkan, tidak ada daya tarik masih termasuk “kurang”, dan 1 buah daya tarik termasuk dalam kategori “Baik”.

2. KSPD Larompong dan Sekitarnya

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Larompong dan sekitarnya, dengan luas wilayah kecamatan adalah 225,25 km², yang terdiri dari 13 buah desa/ kelurahan, yaitu Riwang, Rante Belu, Buntu Matabbing, Komba, Bilante, Binturu, Bukit Sutra, Rante Alang, Lumaring, Larompong, Riwang Selatan, Buntu Pasik dan Komba Selatan. Kawasan ini terletak pada ketinggian antara 0-750 mdpl.

Jumlah penduduk pada kecamatan Larompong pada tahun 2020 tercatat sebanyak 22.348 jiwa, dengan populasi tertinggi terdapat di Larompong yang mencapai 3.750 jiwa dan jumlah penduduk terkecil pada kawasan ini terdapat di Riwang Selatan yang hanya sebanyak 422 jiwa.

Sarana transportasi antar wilayah dalam kawasan ini secara keseluruhan telah dapat diakses dengan kendaraan umum tanpa trayek tetap, yaitu di Riwang, Buntu Matabbing, Bilante, Bukit Sutra, Rante Alang, Lumaring, Riwang Selatan, dan Buntu Pasik. Sementara untuk di wilayah Rante Belu, Komba, Binturu, Larompong, dan Komba Selatan sudah dapat diakses oleh kendaraan umum dengan trayek tetap.

Kondisi akses jalan dalam kawasan kecamatan Larompong pada tahun 2020 menunjukkan bahwa sebahagian besar jalan akses antar wilayah dalam kawasan dengan permukaan aspal dan beton yang dapat dilalui sepanjang tahun yaitu di Rante Belu, Buntu Matabbing, Komba, Bilante, Binturu, Lumaring, Larompong, dan Komba Selatan sehingga dapat diakses dengan baik dan aman sepanjang tahun. Untuk wilayah Riwang, Bukit Sutra, Rante Alang, Riwang Selatan, dan Buntu Pasik masih dengan akses jalan dalam kondisi pengerasan berupa kerikil dan batu. Kawasan ini merupakan salah satu wilayah penghasil produk pertanian berupa sayur-sayuran, dan buah-buahan, serta hasil perkebunan.

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Larompong dan sekitarnya merupakan kawasan strategis dengan tema unggulan aktivitas dan atraksi wisata yang didominasi oleh pantai, air terjun, goa serta tinggalan sejarah dan budaya.

- kapasitas 20 (dua puluh) liter/detik dan IKK Walenrang Timur kapasitas 20 (dua puluh) liter/detik.
- b. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perdesaan untuk melayani beberapa desa yang belum terlayani dengan jumlah penduduk kurang lebih 75.375 (tujuh puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima) jiwa meliputi 59 (lima puluh sembilan) desa dan 16 (enam belas) kecamatan;
 - c. Peningkatan kapasitas produksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan menurunkan kehilangan air;
 - d. Rehabilitasi sistem distribusi; dan
 - e. Pengembangan sistem air minum akan difokuskan pada pengelolaan sumber air yang ada, pemanfaatan sumber air baru dan peningkatan jaringan distribusi.

9.4.4.4. Sistem Jaringan Drainase

Sistem jaringan drainase di kabupaten Luwu meliputi : rencana pengembangan sistem drainase kawasan perkotaan dan perdesaan; normalisasi jaringan drainase yang ada; pembangunan dan pengembangan kolam retensi di kawasan perkotaan; dan penetapan elevasi atau ketinggian tanah yang berkaitan dengan jalur drainase induk, sekunder dan tersier di kawasan perkotaan dan perdesaan.

9.4.4.5. Jalur Dan Ruang Evakuasi Bencana

Jalur dan ruang evakuasi bencana di kabupaten Luwu bertujuan sebagai penyediaan jalur dan ruang yang dapat digunakan untuk tempat keselamatan dan tempat berlindung jika terjadi bencana. Jalur dan ruang evakuasi bencana ditetapkan dalam skala kota, skala kawasan, dan skala lingkungan berupa jalur evakuasi bencana (*escape way*) dan ruang evakuasi bencana (*melting point*).

Jalur evakuasi bencana di kabupaten Luwu direncanakan mengikuti dan/ atau menggunakan jaringan jalan dengan rute terdekat ke ruang evakuasi dan merupakan jaringan jalan paling aman dari ancaman berbagai bencana, serta merupakan tempat-tempat yang lebih tinggi dari daerah bencana.

9.5 Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Luwu

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Luwu ditetapkan dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Rencana pola ruang wilayah kabupaten Luwu meliputi rencana peruntukan kawasan lindung dan rencana peruntukan kawasan budidaya.

9.5.1 Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung

Rencana pola ruang wilayah kabupaten meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri atas kawasan hutan lindung; kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bahawannya; kawasan perlindungan setempat; kawasan cagar budaya; kawasan rawan bencana alam; dan kawasan lindung geologi.

9.5.1.1 Kawasan Hutan Lindung

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf a, tersebar di 19 (sembilan belas) kecamatan dengan luas kurang lebih 85.371,63 (Delapan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh satu koma enam tiga) Hektar diluar kawasan hutan mangrove dan luasan kawasan hutan mangrove kurang lebih 4.372 (Empat Ribu tiga ratus tujuh puluh dua) Hektar

9.5.1.2 Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya di kabupaten Luwu merupakan kawasan yang ditetapkan dengan tujuan mencegah terjadinya erosi dan sedimentasi, menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan serta memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan. Kawasan resapan air di kabupaten Luwu terdapat di Kecamatan Walenrang Utara dan Lamasi Timur dengan luas kurang lebih 1.000 (seribu) hektar.

9.5.1.3 Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat di kabupaten Luwu terdiri atas: kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai. Kawasan sempadan pantai terdapat di kecamatan Larompong, Larompong Selatan, Suli, Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Ponrang Selatan, Ponrang, Bua, Walenrang Timur dan Lamasi Timur dengan panjang kurang lebih 116,161 (Seratus enam belas koma satu enam satu) kilometer dengan ketentuan daratan sepanjang tepian laut minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi kearah darat.

Kawasan sempadan sungai terdapat di sungai Noling, Bajo, Suli, Larompong, Tembo'e, Bua, Lamasi dan Makawa. Kawasan sempadan sungai terdapat pada tepian sungai dengan ketentuan :

- a. Dataran sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggung diluar kawasan pemukiman dengan lebar 100 (seratus) meter dari tepian sungai.
- b. Dataran sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggung diluar kawasan pemukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai;
- c. Dataran sepanjang tepian sungai bertanggung dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar; dan
- d. Sungai dikawasan pemukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) meter.

9.5.1.4 Kawasan Cagar Budaya

Kawasan cagar budaya di kabupaten Luwu meliputi:

- a. Kawasan cagar budaya Lapandoso terdapat di kecamatan Bua;
- b. Kawasan cagar budaya Meriam Kuno terdapat di kecamatan Suli;
- c. kawasan cagar budaya Ayam Puang Ritede terdapat di kecamatan Bastem;
- d. Kawasan cagar budaya Bubun Lamu terdapat di kecamatan Bastem;
- e. Kawasan cagar budaya Benteng Tajajok terdapat di kecamatan Bastem;
- f. Kawasan cagar budaya Awa'tondong terdapat di kecamatan Bastem;
- g. Kawasan cagar budaya Pantilang terdapat di kecamatan Bastem;
- h. Kawasan cagar budaya Loko Maindo terdapat di kecamatan Bastem;
- i. Kawasan cagar budaya Bukit Kamanre terdapat di kecamatan Kamanre;
- j. Kawasan cagar budaya Kuburan Tua Noling terdapat di kecamatan Bupon;
- k. Kawasan cagar budaya Kaili terdapat di kecamatan Suli Barat; dan
- l. Kawasan cagar budaya Patung Batu Pemburu terdapat di kecamatan Walenrang Barat.

9.5.1.5 Kawasan Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana alam di kabupaten Luwu ditetapkan dalam rangka memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas kemungkinan bencana alam terhadap fungsi lingkungan hidup dan kegiatan lainnya. Kawasan rawan bencana alam di kabupaten Luwu, meliputi: kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan banjir.

Kawasan rawan tanah longsor terdapat di Kecamatan Latimojong, Larompong, Larompong Selatan, Bajo, Bajo Barat, Suli Barat, Bastem, Bupon, Bua, Walenrang Utara dan Walenrang Barat. Kawasan rawan banjir terdapat di Kecamatan Larompong Selatan, Larompong, Suli, Belopa, Belopa Utara, Bajo, Kamanre, Ponrang, Ponrang Selatan, Bua, Walenrang Timur dan Lamasi Timur.

9.5.1.6 Kawasan Lindung Geologi

Kawasan lindung geologi di kabupaten Luwu ditetapkan dalam rangka memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas kemungkinan bencana alam geologi dan perlindungan terhadap air tanah. Kawasan lindung geologi di kabupaten Luwu berupa kawasan rawan abrasi pantai terdapat di kecamatan Larompong Selatan, Larompong, Suli, Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Ponrang, Ponrang Selatan, Bua, Walenrang Timur dan Lamasi Timur.

9.5.2 Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya kabupaten Luwu, terdiri atas kawasan hutan produksi, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman dan kawasan peruntukan lainnya.

9.5.2.1 Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan peruntukan hutan produksi di kabupaten Luwu meliputi: kawasan hutan produksi terbatas, dan kawasan hutan produksi tetap. Kawasan hutan produksi terbatas terdapat di Kecamatan Walenrang Barat, Bastem, Bua, Bupon dan Ponrang dengan luas kurang lebih 5.122,08 (lima ribu seratus dua puluh dua koma nol delapan) hektar. Kawasan hutan produksi tetap terdapat di kecamatan Bastem, Bua, Bupon, Latimojong, Ponrang dan Walenrang Utara dengan luas kurang lebih 18.349,7 (delapan belas ribu tiga ratus empat puluh sembilan koma tujuh) Hektar.

9.5.2.2 Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Luwu terdiri atas kawasan kawasan pertanian tanaman pangan, kawasan pertanian hortikultura, kawasan perkebunan; dan kawasan peternakan.

Kawasan pertanian tanaman pangan terdapat di setiap wilayah kecamatan ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan, dengan luas kurang lebih 52.738 (lima puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh delapan) hektar. Kawasan pertanian hortikultura terdapat di setiap wilayah kecamatan kurang lebih 7.953 (tujuh ribu sembilan ratus lima puluh tiga) hektar.

Kawasan perkebunan di kabupaten Luwu, terdiri atas:

- a. Kawasan pengembangan Tanaman Kakao dengan luas kurang lebih 36.762 (tiga puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh dua) hektar tersebar di seluruh wilayah kecamatan di kabupaten Luwu;
- b. Kawasan pengembangan Tanaman Kelapa dengan luas kurang lebih 4.711 (empat ribu tujuh ratus sebelas) hektar tersebar di seluruh wilayah Kecamatan Kabupaten Luwu;
- c. Kawasan pengembangan Tanaman Cengkeh dengan luas kurang lebih 14.280 (empat belas ribu dua ratus delapan puluh) hektar tersebar di wilayah kecamatan Larompong Selatan, Larompong, Suli, Suli Barat, Belopa, Belopa Utara, Bajo, Bajo Barat, Latimojong, Bastem, Ponrang, Bupon, Bua, Walenrang, Walenrang Barat, Walenrang Timur dan Walenrang Utara;

- d. Kawasan pengembangan Tanaman Kopi dengan luas kurang lebih 4.627 (empat ribu enam ratus dua puluh tujuh) hektar tersebar di wilayah kecamatan Bastem dan Latimojong;
- e. Kawasan pengembangan Tanaman Lada dengan luas kurang lebih 321 (tiga ratus dua puluh satu) hektar tersebar di wilayah kecamatan Larompong, Larompong Selatan, Suli, Suli Barat, Bajo, Bajo Barat, Latimojong dan Bastem;
- f. Kawasan pengembangan tanaman sagu dengan luas kurang lebih 1.462 (seribu empat ratus enam puluh dua) hektar tersebar di wilayah kecamatan Larompong Selatan, Larompong, Suli, Suli Barat, Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Bajo, Bajo Barat, Latimojong, Ponrang, Ponrang Selatan, Bupon, Bua, Lamasi, Lamasi Timur, Walenrang, Walenrang Barat, Walenrang Timur dan Walenrang Utara; dan
- g. Kawasan perkebunan komoditas lain-lain dengan luas kurang lebih 2.833 (dua ribu delapan ratus tiga puluh tiga) hektar.

Kawasan peternakan di kabupaten Luwu terdiri atas: ternak besar sejumlah 22.860 (dua puluh dua ribu delapan ratus enam puluh) ekor dan ternak kecil sejumlah 23.087 (dua puluh tiga ribu delapan puluh tujuh) ekor terdapat di setiap wilayah kecamatan.

9.5.3 Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan kabupaten Luwu terdiri atas kawasan peruntukan perikanan tangkap, kawasan peruntukan budidaya perikanan, dan kawasan pengolahan ikan, meliputi

- a. Kawasan peruntukan perikanan tangkap terdapat di teluk Bone meliputi kecamatan Belopa, Larompong Selatan, Bua, Ponrang, Ponrang Selatan, Larompong dan Suli.
- b. Kawasan peruntukan budidaya perikanan, di kabupaten Luwu terdiri atas:
 - 1) Rumput laut di kecamatan Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Suli, Ponrang, Ponrang Selatan, Bua, Larompong, Larompong Selatan, Walenrang Timur dan Lamasi Timur;
 - 2) Udang di kecamatan Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Suli, Ponrang, Ponrang Selatan, Bua, Larompong, Larompong Selatan, Walenrang Timur dan Lamasi Timur;
 - 3) Ikan Bandeng di kecamatan Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Suli, Ponrang, Ponrang Selatan, Bua, Larompong, Larompong Selatan, Walenrang Timur dan Lamasi Timur;
 - 4) ikan Mas di Kecamatan Bajo, Suli Barat, Bupon, Walenrang dan Lamasi.
- c. Kawasan peruntukan pengolahan ikan terdapat di kecamatan Larompong, Suli, Ponrang Selatan dan Bua.

9.5.4 Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan di kabupaten Luwu terdiri atas kawasan peruntukan pertambangan mineral logam dan batu bara, kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam, kawasan peruntukan pertambangan mineral batuan, dan kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi.

Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam dan batu bara meliputi kecamatan Walenrang Utara, Walenrang Barat, Walenrang, Bastem, Latimojong, Bajo Barat, Suli Barat, Larompong, Bupon dan Bua. Kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam, meliputi kecamatan Walenrang Utara, Walenrang Barat, Lamasi, Lamasi Timur, Walenrang, Bastem, Latimojong, Bajo, Bajo Barat, Suli, Suli Barat, Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Bupon, Ponrang, Ponrang Selatan, Larompong dan Larompong Selatan. Kawasan peruntukan pertambangan mineral batuan, meliputi kecamatan Walenrang Utara, Walenrang Barat, Lamasi, Lamasi Timur, Walenrang,

Bastem, Latimojong, Bajo, Bajo Barat, Suli, Suli Barat, Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Ponrang Selatan, Larompong dan Larompong Selatan. Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi (migas) berada di Blok Bone Utara.

9.5.5 Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri di kabupaten Luwu merupakan kawasan yang potensi dimanfaatkan untuk kegiatan industri yang meliputi :

- a. Kawasan industri menengah, yaitu : kawasan potensi usaha industri di kecamatan Bua dan Walenrang;
- b. Kawasan industri kecil meliputi: kawasan potensi usaha industri di kecamatan Belopa, Suli, Suli Barat, Bajo Barat, Bupon, Ponrang, Ponrang Selatan, Larompong Selatan, Walenrang Barat, Walenrang Timur, Walenrang Utara, dan Lamasi Timur; dan
- c. Kawasan industri mikro meliputi: kawasan potensi usaha industri di kecamatan Larompong Selatan, Larompong, Suli, Suli Barat, Bajo, Bajo Barat, Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Ponrang Selatan, Ponrang, Bupon, Bua, Latimojong, Bastem, Walenrang, Walenrang Timur, Walenrang Barat, Walenrang Utara, Lamasi, Lamasi Timur.

9.5.6 Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata kabupaten Luwu terdiri atas kawasan peruntukan pariwisata budaya dan kawasan peruntukan pariwisata alam. Kawasan peruntukan pariwisata budaya, yaitu berupa kawasan adat /upacara adat perkawinan dan upacara penguburan mayat di kecamatan Bastem.

Kawasan peruntukan pariwisata alam di kabupaten Luwu, terdiri atas:

- a. Wisata alam air terjun, meliputi :
 - 1) Air Terjun Magandang di kecamatan Walenrang Barat;
 - 2) Air Terjun Toga Tipayo, Salonsa di kecamatan Walenrang Utara;
 - 3) Air Terjun Sarasa Katapuk di kecamatan Latimojong;
 - 4) Air Terjun Buntu Sawa di kecamatan Larompong;
 - 5) Air Terjun Paraposoang dan Karang Titale di kecamatan Bua;
 - 6) Air Terjun Bungalo di kecamatan Ponrang;
 - 7) Air Terjun Rumaju dan Sarasa Jambong di kecamatan Bajo;
 - 8) Air Terjun Salosawa di kecamatan Bastem;
 - 9) Air Terjun Tampumea dan Bilante di kecamatan Bupon;
 - 10) Air Terjun Salotodang, Serambu Masiang dan Tombanbai di kecamatan Suli Barat; dan
 - 11) Air Terjun Tumbubara di kecamatan Bajo Barat.
- b. Wisata alam pantai, meliputi :
 - 1) Pantai Bonepute di kecamatan Larompong Selatan;
 - 2) Pantai Buntu Mata'bing di kecamatan Larompong;
 - 3) Pantai Pannori di kecamatan di Larompong Selatan;
 - 4) Pantai Batu Killong di kecamatan Suli;
 - 5) Pantai Talumae di kecamatan Belopa;
 - 6) Pantai Mamonta di kecamatan Belopa Utara;
 - 7) Pantai Lare-Lare di kecamatan Bua; dan
 - 8) Pantai Bone Pance, Bone Jambong dan Salolo di kecamatan Ponrang Selatan.
- c. Wisata alam pemandian, meliputi :
 - 1) Permandian alam Bonto Tolle di kecamatan Walenrang;
 - 2) Permandian alam Sapuangirat di kecamatan Suli Barat; dan
 - 3) Permandian alam Makawa di kecamatan Walenrang Utara.
- d. Wisata alam Goa, meliputi :

- 1) Goa Liang Andulan di kecamatan Walenrang Utara;
 - 2) Goa Pompessak di kecamatan Bastem;
 - 3) Goa Illanbatu di kecamatan Walenrang Barat;
 - 4) Goa Lebani di kecamatan Belopa Utara; dan
 - 5) Goa Palar di kecamatan Larompong.
- e. Wisata laut di Teluk Bone; dan
- f. Wisata alam hutan penelitian Simoma kecamatan Larompong Selatan.

9.5.7 Kawasan Peruntukan Pemukiman

Kawasan peruntukan permukiman kabupaten Luwu terdiri atas kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan kawasan peruntukan permukiman perdesaan.

Kawasan permukiman perkotaan, terdiri dari atas kurang lebih 4.464 (empat ribu empat ratus enam puluh empat) hektar tersebar di kecamatan Belopa, Belopa Utara, Larompong Selatan, Larompong, Suli, Kamanre, Bajo, Ponrang, Ponrang Selatan, Bua, Walenrang dan Lamasi.

Kawasan permukiman perdesaan, terdiri dari atas kurang lebih 2.773 (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga) hektar tersebar di seluruh wilayah kecamatan di kabupaten Luwu kecuali kecamatan Belopa dan Belopa Utara.

9.5.8 Kawasan Peruntukan Lainnya

Kawasan peruntukan lainnya di kabupaten Luwu adalah kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan, yang terdiri atas:

- a. Kawasan wilayah pertahanan KORAMIL Larompong;
- b. Kawasan wilayah pertahanan KORAMIL Suli;
- c. Kawasan wilayah pertahanan KORAMIL Belopa;
- d. Kawasan Wilayah pertahanan KORAMIL Bajo;
- e. Kawasan wilayah pertahanan KORAMIL Bastem;
- f. Kawasan wilayah pertahanan KORAMIL Ponrang; dan
- g. Kawasan wilayah pertahanan KORAMIL Walenrang.

Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain di kabupaten Luwu selain yang telah ditetapkan tersebut di atas, dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana diatur dalam peraturan daerah RTRW kabupaten Luwu. Pemanfaatan kawasan tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan telah mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang di Kabupaten Luwu.

9.6 Kawasan Strategis Kabupaten Luwu

Kawasan strategis Kabupaten Luwu merupakan bagian wilayah Kabupaten Luwu yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten di bidang ekonomi, sumberdaya alam, dan/ atau lingkungan. Kawasan Strategis yang ada di Kabupaten Luwu terdiri atas Kawasan Strategis Nasional (KSN), Kawasan Strategis Provinsi (KSP); dan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK).

Kawasan Strategis Nasional (KSN) di wilayah kabupaten yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan meliputi wilayah pertahanan Komando Rayon Militer (KORAMIL) berkedudukan di Kecamatan Larompong, Suli, Bajo, Belopa, Bastem, Ponrang dan Walenrang dan merupakan dokumen khusus yang bersifat rahasia.

Kawasan Strategis Provinsi (KSP) di wilayah kabupaten Luwu, terdiri atas:

- a. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dari sudut kepentingan ekonomi, terdiri atas:

- 1) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan khususnya beras terdapat di kecamatan Ponrang, Ponrang Selatan, Bupon, Bajo, Kamanre, Walenrang, Walenrang Timur, Walenrang Utara, Lamasi, Lamasi Timur; dan jagung di kecamatan Bajo Barat, Latimojong, Bupon, Suli Barat, Larompong, Walenrang dan Lamasi Timur;
 - 2) Kawasan pengembangan budi daya alternatif komoditi perkebunan unggulan kakao terdapat di kecamatan Larompong, Bupon, Bajo, kelapa sawit terdapat di kecamatan Suli, Walenrang Utara, kopi robusta terdapat di kecamatan Walenrang Barat, Bastem, jambu mete terdapat di kecamatan Walenrang Utara dan jarak terdapat di kecamatan Suli; dan
 - 3) Kawasan pengembangan budi daya rumput laut jenis cotoni terdapat di kecamatan Larompong Selatan, Larompong, Suli, Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Ponrang Selatan, Ponrang ,Bua, dan jenis grasi laria terdapat di kecamatan Larompong Selatan, Larompong, Suli, Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Ponrang Selatan, Ponrang, Bua, Walenrang Timur dan Lamasi Timur.
- b. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/ atau teknologi tinggi, yaitu kawasan pertambangan migas Blok Bone Utara yang meliputi kabupaten Luwu dan Kota Palopo.
- Kawasan Strategis kabupaten, terdiri atas:
- a. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
 - b. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;
 - c. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
 - d. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, terdiri atas:

- a. Kawasan strategis Kota Belopa, Bajo, Kamanre sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan;
- b. Kawasan strategis Bandar Udara Lagaligo sebagai pusat pelayanan udara antar kabupaten dan provinsi;
- c. Kawasan strategis Agropolitan sebagai pusat pengembangan komoditas pertanian di kecamatan Bajo, Bajo Barat, Latimojong sebagai pusat produksi dan kecamatan Suli Barat, Larompong, Larompong Selatan, Bupon, Bua, Walenrang Utara dan Walenrang Barat sebagai pendukung;
- d. Kawasan strategis Industri di kecamatan Bua;
- e. Kawasan strategis Minapolitan sebagai pusat pengembangan budi daya perikanan di kecamatan Ponrang, Ponrang Selatan, Kamanre sebagai pusat pengembangan budi daya utama dan kecamatan Belopa, Belopa Utara, Suli, Larompong, Larompong Selatan, Bua, Walenrang Timur dan Lamasi Timur sebagai pendukung;
- f. Kawasan strategis pengembangan perikanan tangkap di Ulo-Ulo, Bonepute dan Balambang; dan
- g. Kawasan strategis PKLp Bua , Padang Sappa dan Batusitanduk.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya meliputi: upacara adat perkawinan bernuansa tradisional berdasarkan strata sosial masyarakat, prosesi pemakaman yang merupakan tradisi etnis tertentu, upacara maccera tasi, mapacekke wanua, pesta panen dan kesenian daerah. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi meliputi tambang logam emas dan PLTMH di kecamatan Latimojong dan Walenrang Barat. Kawasan strategis dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan meliputi kawasan hutan penelitian Simoma kecamatan Larompong Selatan.

BAB -10

RENCANA PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN PARIWISATA KABUPATEN LUWU

10.1 Destinasi Pariwisata Daerah (DPD)

Perwilayahan Destinasi Pariwisata merupakan perwilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk Destinasi Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) kabupaten Luwu ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :

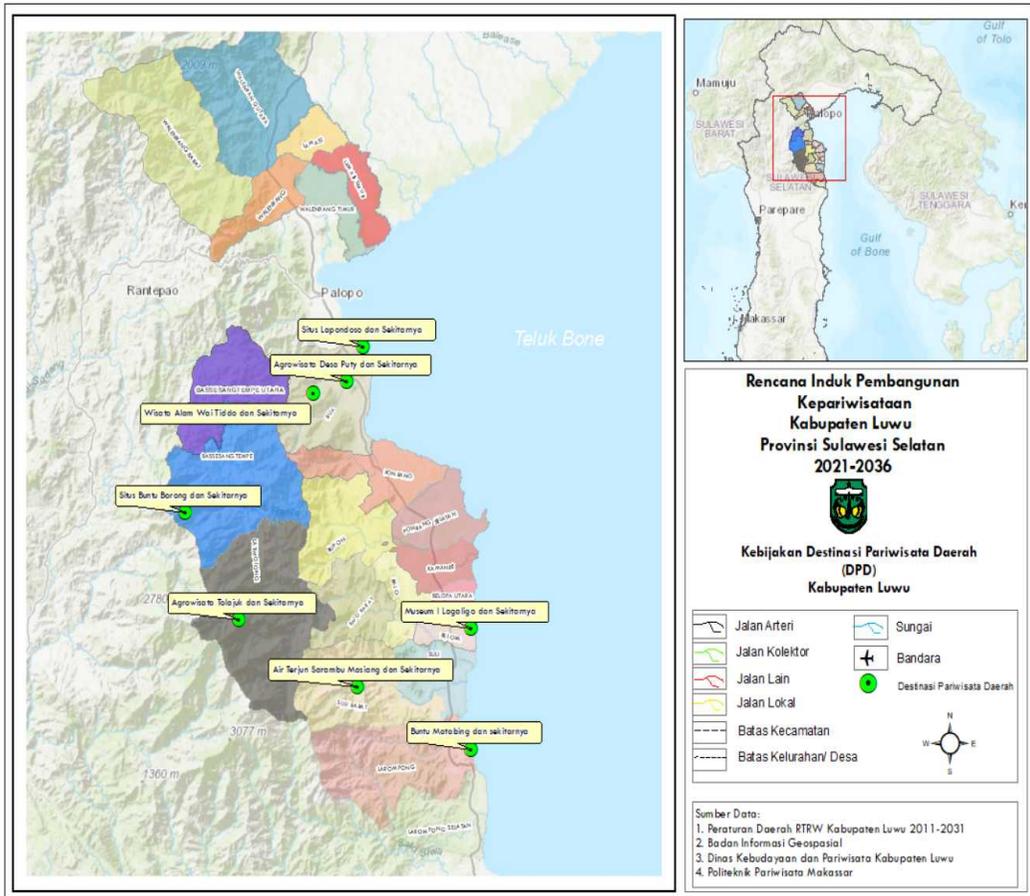
- a. Merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah kabupaten dan/ atau lintas kabupaten yang di dalamnya terdapat kawasan-Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD), diantaranya merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD);
- b. Memiliki Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara lokal, regional, nasional dan/ atau internasional, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan;
- c. Memiliki kesesuaian tema Daya Tarik Wisata yang mendukung penguatan daya saing;
- d. Memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait; dan
- e. Memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan.

Berdasarkan kriteria tersebut di atas serta keterkaitannya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Luwu, maka Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) kabupaten Luwu ditetapkan sebagai berikut :

- a. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) **Kawasan Buntu Ma'tabbing dan Sekitarnya**. Tema utama dari Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Buntu Ma'Tabbing dan Sekitarnya, adalah wisata alam berbasis pantai, wisata tematik, dan hutan penelitian yang terletak di Kecamatan Larompong dan kecamatan Larompong Selatan. Aktivitas wisata yang ditawarkan pada Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Buntu Ma'Tabbing dan sekitarnya yaitu berenang, *photo spot*, *tracking* pada hutan penelitian berbasis ekologi, *water sport recreation*, dan rekreasi wisata keluarga;
- b. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) **Kawasan Latimojong dan Sekitarnya**. Tema utama dari Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Latimojong dan Sekitarnya, yaitu wisata alam berbasis pegunungan dan panorama yang terletak di kecamatan Latimojong. Aktivitas wisata yang ditawarkan pada Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Latimojong yaitu *climbing*, *tracking*, *hiking*, *adventure*, *rafting*, *camping*, agrowisata dan rekreasi wisata keluarga, wisata ekologi berbasis desa wisata;
- c. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) **Kawasan Sarambu Masiang dan Sekitarnya**. Tema utama dari Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Air Terjun Sarambu Masiang dan Sekitarnya, yaitu wisata alam berbasis air terjun yang terletak di kecamatan Suli Barat. Aktivitas wisata yang ditawarkan pada Destinasi

- Pariwisata Daerah (DPD) Air Terjun Sarambu Masiang yaitu wisata alam berbasis ekologi dan rekreasi keluarga
- d. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) **Kawasan Wisata Alam Pakalolo dan Sekitarnya**. Tema utama dari Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Wisata Alam Pakalolo dan Sekitarnya, yaitu wisata alam berbasis sungai dan panorama yang terletak di kecamatan Bua. Aktivitas wisata yang ditawarkan pada Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Wisata Alam Pakalolo yaitu wisata tirta, *meeting*, rekreasi keluarga;
 - e. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) **Kawasan Situs Batu Borrong dan Sekitarnya**. Tema utama dari Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Situs Batu Borrong dan Sekitarnya, yaitu wisata sejarah dan budaya yang terletak di kecamatan Basesangtempe. Aktivitas wisata yang ditawarkan pada Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Situs Batu Borrong yaitu wisata edukasi berbasis situs, wisata budaya berbasis rumah adat, *photo spot*, panorama, wisata tirta, dan rekreasi wisata keluarga;
 - f. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) **Kawasan Pelabuhan Belopa dan Sekitarnya**. Tema utama dari Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Pelabuhan Belopa dan Sekitarnya pada ayat (1) huruf f, yaitu wisata *Meeting, Incentive, Congress and Convergence* (MICE), sejarah dan budaya yang terletak kecamatan Belopa. Aktivitas wisata yang ditawarkan pada Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Pelabuhan Belopa yaitu wisata edukasi berbasis museum, wisata budaya, dan wisata kota (*urban tourism*);
 - g. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) **Kawasan Situs Lapadoso dan Sekitarnya**. Tema utama dari Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Situs Lapadoso dan Sekitarnya, yaitu wisata sejarah dan budaya yang terletak di kecamatan Bua. Aktivitas wisata yang ditawarkan pada Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Situs Lapadoso yaitu wisata edukasi berbasis situs, wisata budaya tradisi masyarakat, dan wisata sungai;
 - h. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) **Kawasan Agrowisata Desa Puty dan Sekitarnya**. Tema utama dari Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Agrowisata Desa Puty dan Sekitarnya, yaitu wisata alam berbasis pertanian (*agrotourism*) yang terletak di kecamatan Bua. Aktivitas wisata yang ditawarkan pada Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Agrowisata Desa Puty yaitu wisata edukasi, rekreasi keluarga, dan *photo spot*; dan
 - i. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) **Kawasan Desa Siteba dan Sekitarnya**. Tema utama dari Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Desa Siteba dan Sekitarnya, yaitu wisata alam berbasis Desa Wisata (*tourism village*) yang terletak di kecamatan Walenrang Utara. Aktivitas wisata yang ditawarkan pada Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Desa Siteba yaitu wisata edukasi, rekreasi keluarga, dan desa wisata.

Gambar 10.1
Peta Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Kabupaten Luwu



Sumber : Data Olahan, 2021

10.2 Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD)

Berdasarkan penetapan Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) kabupaten Luwu, selanjutnya diidentifikasi potensi daya tarik wisata yang menjadi tema utama sehingga akan memudahkan dalam menyusun pemaketan dan pola perjalanan wisata termasuk dalam menyesuaikan beberapa komponen pendukung seperti pusat pelayan wisata, aksesibilitas pariwisata, amenitas serta infrastruktur pendukung lainnya.

Berdasarkan hasil analisis potensi daya Tarik wisata dan pendekatan zonasi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, ditetapkan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) kabupaten Luwu sebagai berikut :

- a. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona Selatan, terdiri dari kecamatan Larompong Selatan, kecamatan Larompong, kecamatan Suli dan kecamatan Suli Barat;
- b. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona Timur, terdiri dari kecamatan Belopa, kecamatan Belopa Utara, kecamatan Kamanre, kecamatan Ponrang dan kecamatan Ponrang Selatan;
- c. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona Tengah, terdiri dari kecamatan Bajo, kecamatan Bajo Barat, kecamatan Bupon, dan kecamatan Bua;

- d. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona Barat, terdiri dari kecamatan Latimojong, kecamatan Basesangtempe, dan kecamatan Basesangtempe Utara; dan
- e. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona Utara, terdiri dari kecamatan Walenrang, kecamatan Walenrang Timur, kecamatan Walenrang Barat, kecamatan Lamasi dan kecamatan Lamasi Timur.

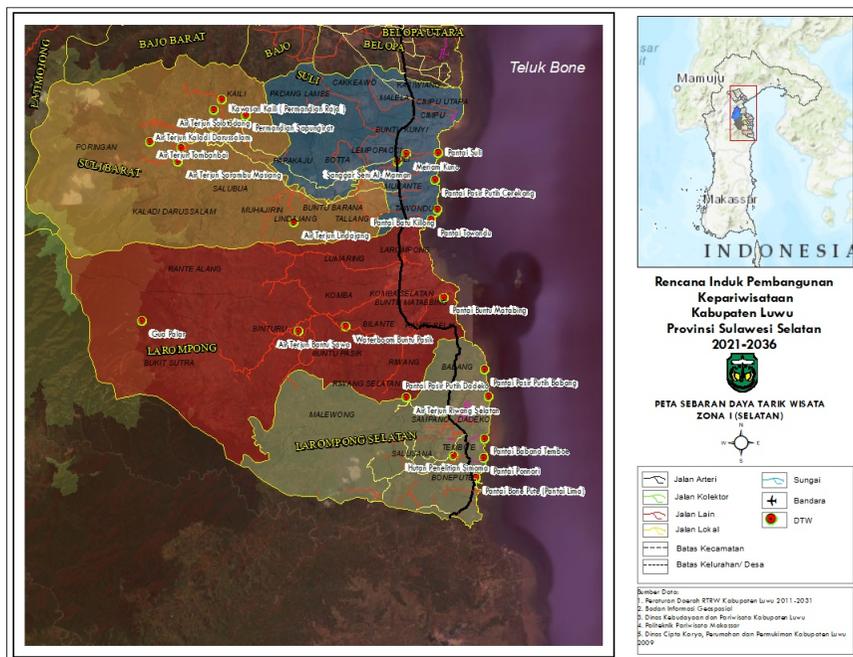
10.2.1 Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona Selatan

Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona Selatan merupakan kawasan pengembangan pariwisata kabupaten Luwu yang meliputi kecamatan Larompong Selatan, Larompong, Suli dan Suli Barat. Karakteristik wilayah dari kedua kecamatan ini didominasi oleh daerah dengan ketinggian 0-750 meter pada kawasan di kecamatan Suli dan Larompong Selatan sampai dengan ketinggian 0-2.250 mdpl pada kawasan di kecamatan Larompong.

Kondisi geografis wilayah pada kawasan ini mempengaruhi jenis daya tarik dan atraksi wisata yang dimiliki yang terdiri dari daya tarik wisata alam berupa area bukit, pantai, sungai, air terjun, dan panorama. Daya tarik wisata sejarah dan budaya berupa makam, dan tinggalan sejarah masa lampau berupa situs.

Sebagai kawasan yang terdiri kecamatan yang berbatasan dan akses langsung dengan dengan kabupaten wajo pada wilayah selatan sebagai akses transportasi darat dari kota Makassar, maka kecamatan Larompong Selatan harus mampu menjadi gerbang yang memberikan gambaran menarik bagi pengunjung dengan tujuan utama berwisata atau sekedar melewati kabupaten Luwu sebagai salah satu akses menuju kota Palopo, kabupaten Luwu Utara, Luwu Timur, sekaligus akses trans Sulawesi menuju provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.

Gambar 10.2
Peta KPPD Zona Selatan



Sumber : Data Olahan, 2021

KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KPPD ZONA SELATAN



<p>Daya Tarik Wisata</p>	<p>Pantai Bonepute, Pantai Ponnori, Hutan penelitian Simoma, Kawasan <i>SJ Park</i>, Hutan Mangrove Pantai Babana Tembo'E, Air Terjun Buntu Sawa, Pantai Buntu Mata'bing, Goa Palar, Kawasan cagar budaya Meriam Kuno, Pantai Batu Killong, Hutan Mangrove Pulangasa Towondu, Pantai Morante, Pantai Suli, Air Terjun Salotodang, Sarambu Masiang, Air terjun Tombanbai, Permandian alam Sapuangirat, Air Terjun Lindajang, Sarambu Paburru, Sarambu Daun Banga, Air Terjun Bollae, Sarambu Biqcu, Sarambu Balendo, Sarambu Pong Ma'ga, Sungai Likuraja, dan kuburan Jarra</p>
<p>Tema Pengembangan</p>	<p>Wisata alam pantai, permandian air alam, sungai, , air terjun, hutan mangrove dan panorama alam; wisata sejarah dan budaya, serta wisata minat khusus sebagai daya tarik utama</p>
<p>Komponen Pengembangan</p>	<p>Jabaran</p>
<p>Atraksi Wisata</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan DTW Alam Bahari dan Tirta 2. Pengembangan DTW Sejarah dan Budaya 3. Pengembangan DTW Minat Khusus
<p>Fasilitas Wisata</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan <i>resort</i> dan <i>homestay</i>; 2. Pengembangan fasilitas olah raga dan rekreasi keluarga (<i>marine tourism</i>); 3. Pengembangan Sistem Informasi, Guiding, Interpretasi, serta <i>Tourist Information Centre</i>; 4. Pengembangan fasilitas <i>Money Changer</i>, ATM dan Internet; 5. Penataan dan pengembangan kawasan wisata kuliner di kawasan Pantai Ponnori, Buntu Ma'tabbing dan Hutan Penelitian Simoma; 6. Penataan dan pengembangan fasilitas wisata di kawasan <i>SJ Park</i> dan <i>Air Terjun</i>;

	<ol style="list-style-type: none"> 7. Pengembangan usaha kreatif cinderamata; 8. Penataan dan pengembangan fasilitas wisata di wisata sejarah dan budaya; dan 9. Pengembangan Desa Wisata (<i>Tourism Village</i>) dan Wisata Pedesaan (<i>Rural Tourism</i>) berbasis desa nelayan.
Aksesibilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan jalur dan moda transportasi ke Daya Tarik Wisata yang lain yang berada di dalam kawasan dan antar kawasan; 2. Pengembangan dermaga dan fasilitas transportasi wisata bahari
Manajemen Tata Ruang	<p>Pembagian zona terhadap Daya Tarik Wisata.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zona inti adalah daerah dimana objek itu berada dan sekaligus sebagai zona konservasi. 2. Pengembangan fasilitas tambahan diluar dari zona inti.

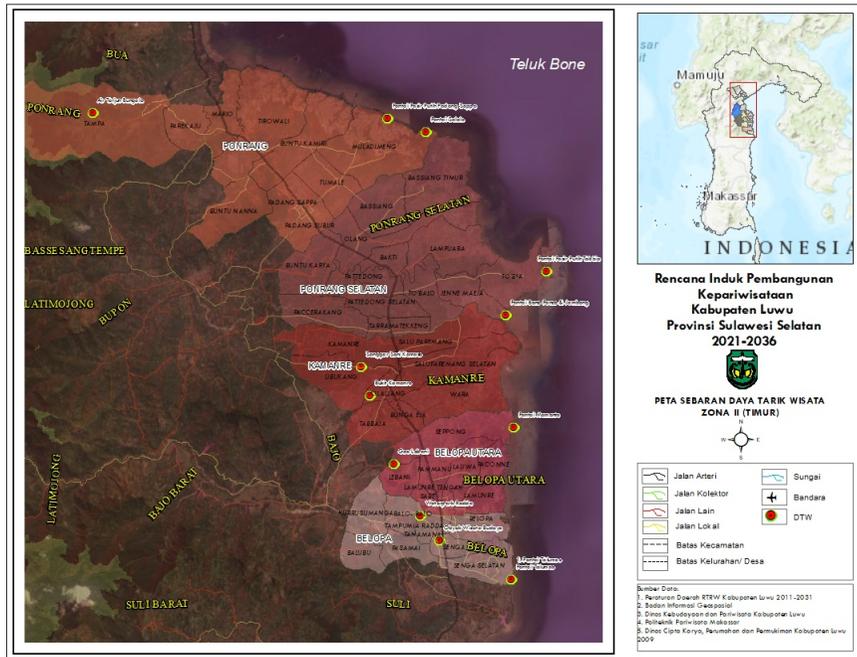
10.2.2 Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona Timur

Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona Timur merupakan kawasan pariwisata kabupaten Luwu yang meliputi kecamatan Belopa, kecamatan Belopa Utara, kecamatan Kamanre, kecamatan Ponrang dan kecamatan Ponrang Selatan. Karakteristik wilayah pada zona ini berada di daerah dengan ketinggian 0-250 meter di wilayah kecamatan Belopa Utara, Kamanre, dan Ponrang Selatan sampai dengan ketinggian 0-1.250 mdpl di kecamatan Ponrang, sehingga terdapat variasi yang sangat berbeda antara kondisi dataran rendah dengan daerah perbukitan.

Kondisi geografis wilayah pada kawasan pengembangan pariwisata ini mempengaruhi jenis daya tarik dan atraksi wisata yang dimiliki yang terdiri dari daya tarik wisata alam pantai dan air terjun, budaya dan sejarah berupa makam, situs dan tinggalan sejarah arkeologi lainnya.

Sebagai wilayah kawasan pengembangan pariwisata daerah yang juga sekaligus sebagai ibukota kabupaten kabupaten Luwu, yaitu di kecamatan Belopa, maka kawasan ini perlu dikembangkan gerbang identitas, aktivitas wisata urban dan pusat informasi pariwisata yang dapat memicu minat kunjungan wisatawan ke kabupaten Luwu .

Gambar 10.3
Peta KPPD Zona Timur

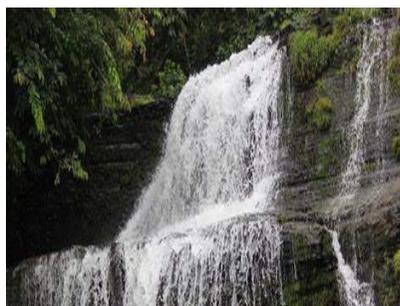


Sumber : Data Olahan, 2021

Peran sentral kecamatan Belopa sebagai ibukota kabupaten Luwu harus dioptimalkan khususnya dalam pengembangan infrastruktur pendukung sehingga peran sektor pariwisata dalam mengoptimalkan fasilitas dan peran kota dalam pengembangan pariwisata seperti pelaksanaan event dan kegiatan MICE lainnya berupa festival dan pameran akan meningkatkan peran sektor pariwisata kabupaten Luwu, sekaligus meningkatkan citra kabupaten Luwu dalam sektor pariwisata.

Dengan karakter geografis dan potensi daya tarik serta atraksi wisata yang sangat spesifik pada wisata alam dan urban, maka prioritas pengembangan pada wilayah kawasan pengembangan pariwisata ini adalah pengembangan sarana aktivitas wisata MICE, kuliner, belanja dan ekonomi kreatif sehingga dapat mengoptimalkan citra kawasan sebagai ibukota kabupaten LUwu sekaligus sebagai destinasi pariwisata yang menarik untuk dikunjungi.

KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KPPD ZONA TIMUR



Daya Tarik Wisata	Bubun Parani, Kawasan Taman Hijau Andi Benni, Museum Opu Daeng Risaju, Kawasan Terpadu Pariwisata Pelabuhan Belopa (Museum, Kuliner, dan Seni Pertunjukan), Pantai Talumae, Pantai Mamonta, Situs Buntu Lebani, kawasan cagar budaya Bukit Kamanre, Air Terjun Bungalo, Air Terjun Papakaju, Pantai Bone Pance, Pantai Bone Jambong, dan Pantai Salolo.
Tema Pengembangan	Wisata Alam, Wisata Budaya, Wisata Sejarah, dan Wisata Minat Khusus
Komponen Pengembangan	Jabaran
Atraksi Wisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan DTW Alam 2. Pengembangan DTW Sejarah dan Budaya 3. Pengembangan DTW Minat Khusus
Fasilitas Wisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan <i>venue</i> wisata MICE 2. Pengembangan <i>landmark</i> gerbang identitas 3. Pengembangan usaha kreatif cinderamata. 4. Pengembangan kawasan wisata Pelabuhan Belopa 5. Pengembangan fasilitas wisata pada kawasan Situs Sejarah dan Budaya. 6. Pengembangan wisata kuline dan wisata belanja
Aksesibilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan jalur dan moda transportasi ke Daya Tarik Wisata
Manajemen Tata Ruang	Pembagian zona terhadap Daya Tarik Wisata. <ol style="list-style-type: none"> 1. Zona inti adalah daerah dimana objek itu berada dan sekaligus sebagai zona konservasi. 2. Pengembangan fasilitas tambahan diluar dari zona inti.

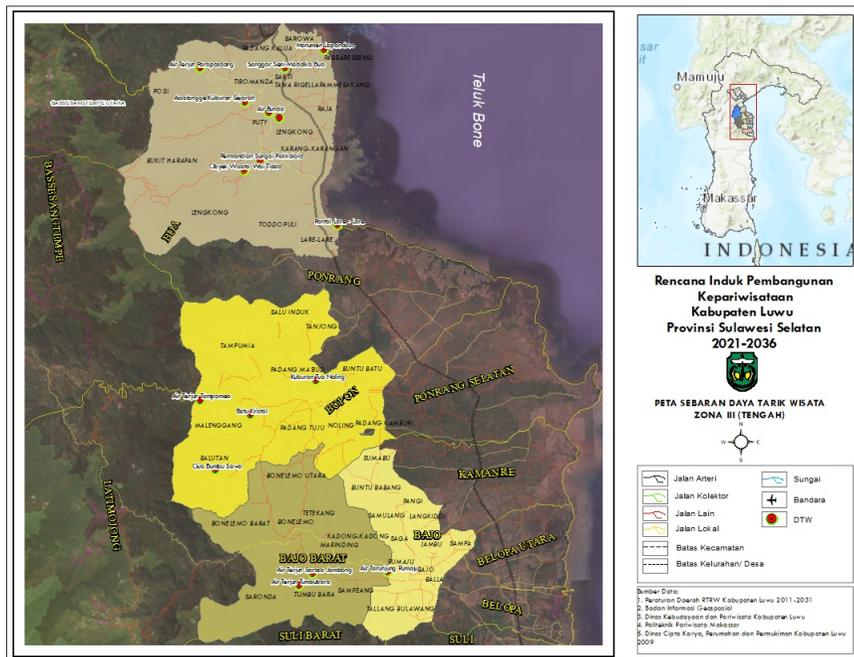
10.1.3 Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona Tengah

Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona 3 merupakan kawasan pariwisata kabupaten Luwu yang meliputi kecamatan Bajo, kecamatan Bajo Barat, kecamatan Bupon, dan kecamatan Bua. Karakteristik wilayah di kawasan ini yang didominasi oleh daerah dengan ketinggian 0-750 mdpl pada wilayah kecamatan Bajo sampai dengan ketinggian 0-1.750 mdpl di wilayah kecamatan Bajo Barat.

Kondisi geografis wilayah pada kawasan pengembangan pariwisata yang sangat variatif ini mempengaruhi jenis daya tarik dan atraksi wisata yang dimiliki yang sangat beragam terdiri dari daya tarik wisata alam berupa air terjun, bendungan, permandian alam, sungai, dan panorama. Daya tarik wisata budaya berupa ritual adat, makam dan tinggalan sejarah masa lampau.

Sebagai wilayah kawasan pengembangan pariwisata daerah yang merupakan lokasi bandara udara di kecamatan Bua, maka kawasan ini perlu dikembangkan gerbang identitas dan pusat informasi pariwisata yang dapat memicu minat kunjungan wisatawan melalui akses udara ke kabupaten Luwu. Zona ini juga memegang peran penting karena merupakan zona antara kabupaten Luwu yang berbatasan dengan kota Palopo.

Gambar 10.4
Peta KPPD Zona Tengah



Sumber : Data Olahan, 2021

KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KPPD ZONA TENGAH



Daya Tarik Wisata	Kawasan Bendung Tomatope, Benteng Rumaju, Air Terjun Tumbubara, Desa Bonelemo, Permandian Batu Alang, Salu Suso, Saruran Toke, kawasan cagar budaya Kuburan Tua Noling, Air Terjun Arung Tobo Tampumea, Air terjun Bilante, kawasan cagar budaya Lapandoso, Makam Maddika Bua Tandipau, Bubun Datu, Air Terjun Puraposoang, Air terjun Karangan Titale, Pantai Lare-Lare, Permandian alam Pakalolo, Wisata Alam Garungga dan Permandian alam Wai Tiddo.
-------------------	---

Tema Pengembangan	Wisata Alam Air Terjun, Permandian alam, Pantai, dan Wisata Sejarah dan Budaya, serta Wisata minat khusus Bendungan
-------------------	---

Komponen Pengembangan	Jabaran
Atraksi Wisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan DTW Alam 2. Pengembangan DTW Sejarah dan Budaya 3. Pengembangan DTW Kuliner
Fasilitas Wisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan kawasan dan pengembangan fasilitas wisata di Kawasan cagar budaya Lapandoso. 2. Penataan kawasan dan pengembangan fasilitas wisata di Kawasan Permandian Alam dan Air Terjun. 3. Pengembangan fasilitas olah raga dan rekreasi wisata petualangan dan <i>camping</i> 4. Pengembangan fasilitas minat khusus photography 5. Pengembangan resort area dan hotel. 6. Pengembangan pasar wisata milenial 7. Pengembangan fasilitas wisata persawahan (<i>rice field tracking and riding</i>)

	8. Pengembangan fasilitas Restoran dan Kuliner tradisional 9. Pengembangan fasilitas pembuatan dan penjualan cinderamata 10. Pengembangan Sistem Informasi, Guiding, Interpretasi, serta <i>Tourist Information Centre</i>
Aksesibilitas	Pengembangan jalur dan moda transportasi ke Daya Tarik Wisata yang lain serta hub transportasi Luwu-Toraja/ Toraja Utara.
Manajemen Tata Ruang	Pembagian zona terhadap Daya Tarik Wisata. 1. Zona inti adalah daerah dimana objek berada dan sekaligus sebagai zona konservasi. 2. Pengembangan fasilitas tambahan diluar dari zona inti.

10.1.4 Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona Barat

Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona Barat merupakan kawasan pariwisata kabupaten Luwu yang meliputi kecamatan Latimojong, kecamatan Basesangtempe, dan kecamatan Basesangtempe Utara. Karakteristik wilayah dari kecamatan pada zona ini yang didominasi oleh daerah dengan ketinggian antara 250-1.500 mdpl pada kawasan wilayah kecamatan Basesangtempe Utara sampai dengan ketinggian 0-3500 mdpl di wilayah kecamatan Latimojong.

Kondisi geografis wilayah pada kawasan pengembangan pariwisata ini mempengaruhi jenis daya tarik dan atraksi wisata yang dimiliki yang terdiri dari daya tarik wisata alam berupa Air terjun, goa, Sungai, dan panorama. Daya tarik wisata sejarah dan budaya berupa situs dan ritual adat, serta berbagai potensi ekonomi masyarakat sebagai daya tarik minat khusus agro wisata.

Sebagai wilayah kecamatan yang merupakan kawasan dataran tinggi serta potensi budaya masyarakat di masa lalu yang masih tetap bertahan, sehingga pada kawasan pengembangan pariwisata di zona barat merupakan fokus untuk wisata minat khusus petualangan dan agrowisata. Mengingat kondisi geografis wilayah yang didominasi oleh dataran tinggi, maka kawasan pengembangan pariwisata daerah ini membutuhkan infrastruktur aksesibilitas serta fasilitas wisata petualangan yang lebih baik sehingga menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke kabupaten Luwu.

		Tajojok, kawasan cagar budaya Awa'tondong, kawasan cagar budaya Pantilang, kawasan cagar budaya Loko Maindo, Air Terjun Salosawa, kawasan adat/upacara perkawinan dan upacara penguburan, dan Situs Batu Borrong.
Tema Pengembangan		Pengembangan Wisata Alam petualangan, camping dan panorama, Minat Khusus wisata agro dan wisata Pedesaan, serta wisata sejarah dan budaya
Komponen Pengembangan	Jabaran	
Atraksi Wisata		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan DTW Alam 2. Pengembangan DTW Sejarah dan Budaya 3. Pengembangan DTW Minat Khusus Agrowisata dan Wisata Pedesaan
Fasilitas Wisata		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan fasilitas makan minum dan fasilitas penunjang di kawasan Agrowisata dan Wisata Pedesaan. 2. Pengembangan fasilitas rekreasi wisata terintegrasi di kawasan wisata Latimojong. 3. Pengembangan fasilitas rekreasi wisata terintegrasi di kawasan Basesang Tempe 4. Pengembangan <i>Homestay</i>, <i>Camping ground</i> dan sarana akomodasi lainnya 5. Pengembangan Sistem Informasi, Guiding, Interpretasi, serta <i>Tourist Information Centre</i>. 6. Pengembangan fasilitas ATM 7. Pengembangan Pusat Informasi Pariwisata 8. Pengembangan fasilitas agrowisata
Aksesibilitas		Pengembangan jalur dan moda transportasi ke Daya Tarik Wisata lain yang berada di dalam kawasan dan antar kawasan.
Manajemen Ruang	Tata	Pembagian zona terhadap Daya Tarik Wisata. <ol style="list-style-type: none"> 1. Zona inti adalah daerah dimana objek berada dan sekaligus sebagai zona konservasi. 2. Pengembangan fasilitas tambahan diluar dari zona inti.

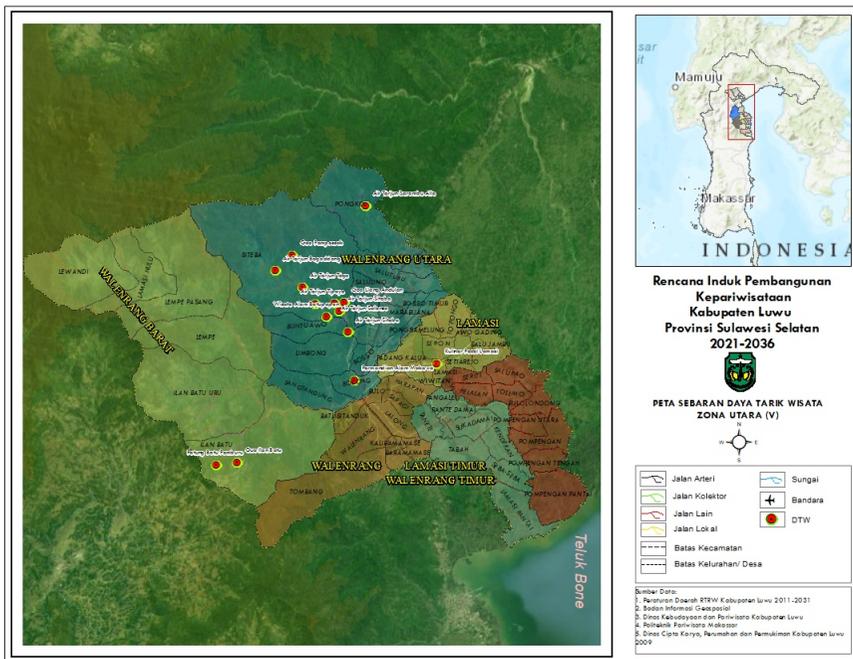
10.1.5 Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona Utara

Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona Utara merupakan kawasan pariwisata kabupaten Luwu yang meliputi kecamatan Walenrang, kecamatan Walenrang Timur, kecamatan Utara, kecamatan Walenrang Barat, kecamatan Lamasi dan kecamatan Lamasi Timur. Karakteristik wilayah dari kecamatan pada zona ini yang didominasi oleh daerah dengan ketinggian antara 0-250 mdpl pada kawasan di wilayah kecamatan Lamasi dan Lamasi Timur sampai dengan ketinggian 0-2.500 mdpl pada daerah dataran tinggi di wilayah kecamatan Walenrang Barat.

Kondisi geografis wilayah pada kawasan pengembangan pariwisata ini mempengaruhi jenis daya tarik dan atraksi wisata yang dimiliki yang terdiri dari daya tarik wisata alam berupa air terjun, goa, sungai, pantai, geologi dan panorama, potensi wisata sejarah dan budaya. Selain itu, posisi kawasan yang berbatasan langsung dengan kabupaten Luwu Utara dan kota Palopo, juga mempengaruhi pengembangan fasilitas pariwisata pada kawasan ini.

Sebagai wilayah kecamatan yang menjadi akses utama pengunjung dari kota Makassar ke kabupaten luwu utara dan Luwu Timur melalui kabupaten Luwu dan kota Palopo, juga sebagai akses jalur darat perjalanan dari kabupaten luwu ke kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara melalui jalur Batusitanduk. Selain itu, kawasan ini juga merupakan jalur perlintasan utama trans Sulawesi serta kondisi geografis wilayah yang didominasi oleh variasi pantai dan pegunungan, maka kawasan pengembangan pariwisata daerah ini membutuhkan infrastruktur aksesibilitas serta fasilitas wisata alam yang lebih baik, khususnya dalam mendorong perwujudan kawasan wisata Walenrang-Lamasi (Walmas) sehingga menarik minat wisatawan untuk singgah dan berkunjung ke kabupaten Luwu.

Gambar 10.6
Peta KPPD Zona Utara



Sumber : Data Olahan, 2021

KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KPPD ZONA UTARA



Daya Tarik Wisata	Permandian alam Bonto Tolle, Kawasan Desa Lamasi Pantai, Lo'ko Pa'kapanan (Illanbatu), Wisata Alam Batupapan, Permandian Alam Batiok, Sungai Makun, Permandian Sungai Lomasi, Air Terjun Toga Tipayo, Permandian alam Makawa, Liang Andulan, Goa Pompessak, Sarambu Ala, Air Terjun Andulan, Sarambu Ma'gandang, Air Terjun Waisuun, Kawasan Bukit desa Se'pon, Desa Wisata Seriti, dan Kawasan Sungai dan Muara Salu Taretti
Tema Pengembangan	Pengembangan Wisata Alam, Minat Khusus wisata agro dan wisata Pedesaan, Wisata Sejarah dan Budaya
Komponen Pengembangan	Jabaran
Atraksi Wisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan DTW Alam 2. Pengembangan DTW Sejarah dan Budaya 3. Pengembangan DTW Minat Khusus Agrowisata dan Wisata Pedesaan
Fasilitas Wisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan fasilitas makan minum dan fasilitas penunjang di kawasan Agrowisata dan Wisata Pedesaan. 2. Pengembangan fasilitas rekreasi wisata terintegrasi di kawasan wisata desa Siteba 3. Pengembangan fasilitas rekreasi wisata terintegrasi di kawasan Pantai 4. Pengembangan <i>Homestay</i> dan sarana akomodasi lainnya 5. Pengembangan Sistem Informasi, Guiding, Interpretasi, serta <i>Tourist Information Centre</i>. 6. Pengembangan fasilitas ATM
Aksesibilitas	Pengembangan jalur dan moda transportasi ke Daya Tarik Wisata lain yang berada di dalam kawasan dan

antar kawasan.

Manajemen Tata Ruang	Pembagian zona terhadap Daya Tarik Wisata. 1. Zona inti adalah daerah dimana objek berada dan sekaligus sebagai zona konservasi. 2. Pengembangan fasilitas tambahan diluar dari zona inti.
----------------------	--

10.3 Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD)

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) kabupaten Luwu ditentukan dengan potensi dan kriteria spesifik sebagai berikut:

- a. Memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
- b. Memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
- c. Memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun khususnya nasional;
- d. Memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
- e. Memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
- f. Memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- g. Memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
- h. Memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
- i. Memiliki kekhususan dari wilayah;
- j. Berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial daerah, provinsi dan/ atau nasional; dan
- k. Memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.

Rencana pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) kabupaten Luwu juga dibagi berdasarkan kelompok wilayah administratif dan karakter paket wisata dengan pertimbangan arah perjalanan wisata yang efektif dan efisien dengan tetap menikmati beberapa jenis daya tarik wisata dalam tiap paket perwilayahan yang dikembangkan, dengan tetap mempertimbangkan kondisi aksesibilitas dan karakter budaya yang ada di kabupaten Luwu.

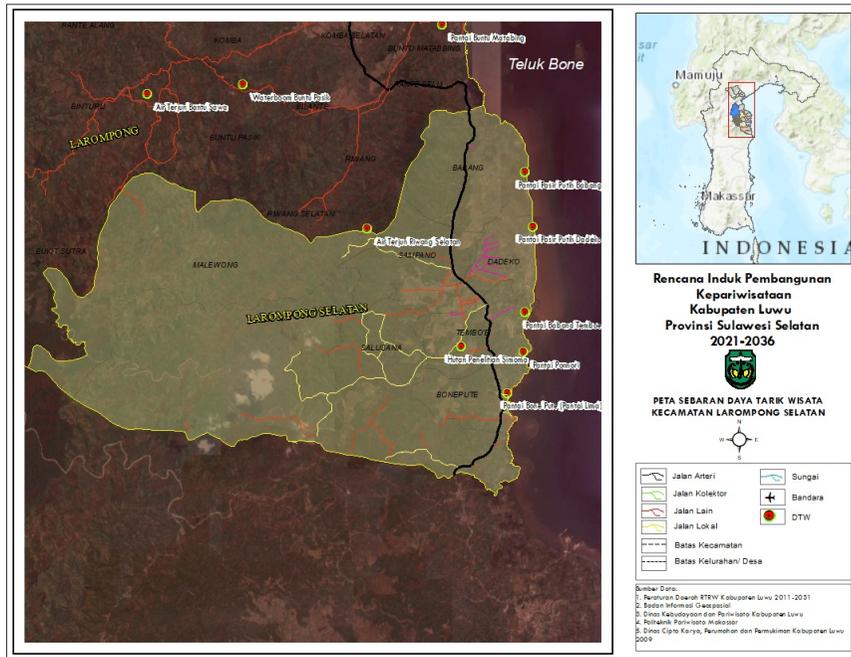
Berdasarkan pengertian, kriteria dan pertimbangan-pertimbangan karakter wilayah tersebut, maka Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) kabupaten Luwu meliputi:

1. KSPD Larompong Selatan dan Sekitarnya

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Larompong Selatan dan sekitarnya, dengan luas wilayah kecamatan adalah 131 km², yang terdiri dari 10 buah desa/ kelurahan, yaitu La'loa, Batu Lappa, Bonepute, Tembo'e, Salusana, Dadeko, Sampano, Malewong, Babang, dan Gandang Batu. Kawasan ini terletak pada ketinggian antara 0-750 mdpl.

Jumlah penduduk pada kecamatan Larompong Selatan pada tahun 2020 tercatat sebanyak 17.777 jiwa, dengan populasi tertinggi terdapat di desa Sampano yang mencapai 2.627 jiwa dan jumlah penduduk terkecil pada kawasan ini terdapat di desa Gandang Batu yang hanya sebanyak 577 jiwa.

Gambar 10.7
Peta KSPD Larompong Selatan dan Sekitarnya



Sumber : Data Olahan, 2021

Sarana transportasi antar wilayah dalam kawasan ini sebagian besar telah dapat diakses kendaraan umum dengan trayek tetap, dan masih terdapat dua buah wilayah yang belum diakses dengan angkutan umum, yaitu akses ke Malewong dan Gandang Batu.

Kondisi akses jalan dalam kawasan kecamatan Bontocani pada tahun 2020 menunjukkan bahwa sebagian besar jalan akses antar wilayah dalam kawasan dengan permukaan jalan aspal dan beton sehingga dapat diakses dengan baik dan aman sepanjang tahun, serta masih terdapat akses jalan dalam kondisi pengerasan batu/ kerikil yaitu di Malewong. Kawasan ini merupakan salah satu wilayah penghasil produk pertanian berupa sayur-sayuran, dan buah-buahan, serta hasil perkebunan.

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Larompong Selatan dan sekitarnya merupakan kawasan strategis dengan tema unggulan aktivitas dan atraksi wisata yang didominasi oleh pantai, hutan mangrove, hutan penelitian, panorama, serta tinggalan sejarah dan budaya.

Daya tarik utama dari kawasan ini adalah Pantai Bonepute, Pantai Pannori, Hutan penelitian Simoma, Kawasan SJ *Park* dan Hutan Mangrove Pantai Babana Tembo'E. Kondisi potensi wisata pada Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Larompong Selatan dan sekitarnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10.1
Kondisi Aktual Daya Tarik Wisata KSPD Larompong Selatan dan Sekitarnya

No	Nama DTW	Atraksi	Kondisi Aktual
DTW Alam			
1	Pantai Bonepute	1. Panorama pantai 2. Rekreasi keluarga	Potensial
2	Pantai Pannori/ Ponnori	1. Panorama pantai 2. Rekreasi keluarga	Potensial
3	Hutan Penelitian Simoma	Wisata edukasi (flora dan fauna)	Potensial
4	Pantai Babana Tembo'E	1. Hutan Mangrove 2. Panorama pantai 3. Rekreasi keluarga	Potensial
DTW Buatan dan Minat Khusus			
5	Kawasan SJ <i>Park</i>	1. Minat khusus 2. Rekreasi keluarga	Baik

Sumber : Data Olahan, 2021

Kondisi aktual Daya Tarik Wisata di KSPD Larompong Selatan dan sekitarnya bervariasi, dari 5 daya tarik dan atraksi wisata yang ada, terdapat 4 buah daya tarik termasuk “Potensial” untuk dikembangkan, tidak ada daya tarik masih termasuk “kurang”, dan 1 buah daya tarik termasuk dalam kategori “Baik”.

2. KSPD Larompong dan Sekitarnya

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Larompong dan sekitarnya, dengan luas wilayah kecamatan adalah 225,25 km², yang terdiri dari 13 buah desa/ kelurahan, yaitu Riwang, Rante Belu, Buntu Matabbing, Komba, Bilante, Binturu, Bukit Sutra, Rante Alang, Lumaring, Larompong, Riwang Selatan, Buntu Pasik dan Komba Selatan. Kawasan ini terletak pada ketinggian antara 0-750 mdpl.

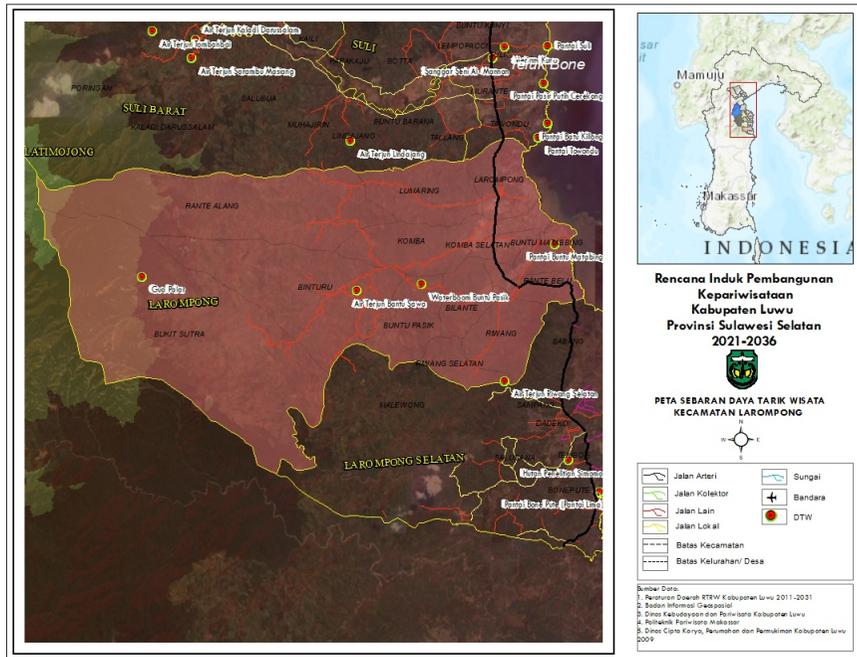
Jumlah penduduk pada kecamatan Larompong pada tahun 2020 tercatat sebanyak 22.348 jiwa, dengan populasi tertinggi terdapat di Larompong yang mencapai 3.750 jiwa dan jumlah penduduk terkecil pada kawasan ini terdapat di Riwang Selatan yang hanya sebanyak 422 jiwa.

Sarana transportasi antar wilayah dalam kawasan ini secara keseluruhan telah dapat diakses dengan kendaraan umum tanpa trayek tetap, yaitu di Riwang, Buntu Matabbing, Bilante, Bukit Sutra, Rante Alang, Lumaring, Riwang Selatan, dan Buntu Pasik. Sementara untuk di wilayah Rante Belu, Komba, Binturu, Larompong, dan Komba Selatan sudah dapat diakses oleh kendaraan umum dengan trayek tetap.

Kondisi akses jalan dalam kawasan kecamatan Larompong pada tahun 2020 menunjukkan bahwa sebahagian besar jalan akses antar wilayah dalam kawasan dengan permukaan aspal dan beton yang dapat dilalui sepanjang tahun yaitu di Rante Belu, Buntu Matabbing, Komba, Bilante, Binturu, Lumaring, Larompong, dan Komba Selatan sehingga dapat diakses dengan baik dan aman sepanjang tahun. Untuk wilayah Riwang, Bukit Sutra, Rante Alang, Riwang Selatan, dan Buntu Pasik masih dengan akses jalan dalam kondisi pengerasan berupa kerikil dan batu. Kawasan ini merupakan salah satu wilayah penghasil produk pertanian berupa sayur-sayuran, dan buah-buahan, serta hasil perkebunan.

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Larompong dan sekitarnya merupakan kawasan strategis dengan tema unggulan aktivitas dan atraksi wisata yang didominasi oleh pantai, air terjun, goa serta tinggalan sejarah dan budaya.

Gambar 10.8
Peta KSPD Larompong dan Sekitarnya



Sumber : Data Olahan, 2021

Daya tarik utama dari kawasan ini adalah Air Terjun Buntu Sawa, Pantai Buntu Mata'bing, dan Goa Palar. Kondisi daya dukung lingkungan pada kawasan ini sangat memungkinkan untuk dikembangkan wisata ekologi berbasis tirta. Kondisi potensi wisata pada Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Larompong dan sekitarnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10.2
Kondisi Aktual Daya Tarik Wisata KSPD Larompong dan Sekitarnya

No	Nama DTW	Atraksi	Kondisi Aktual
DTW Alam			
1	Air Terjun Buntu Sawa	1. Wisata tirta 2. Panorama alam	Potensial
2	Pantai Buntu Mata'bing	1. Panorama pantai 2. Rekreasi keluarga	Baik
3	Goa Palar	1. Panorama alam 2. Wisata edukasi	Potensial
DTW Buatan dan Minat Khusus			
4	Waterboom Buntu Pasik	1. Wisata Tirta 2. Rekreasi Keluarga	Baik

Sumber : Data Olahan, 2021

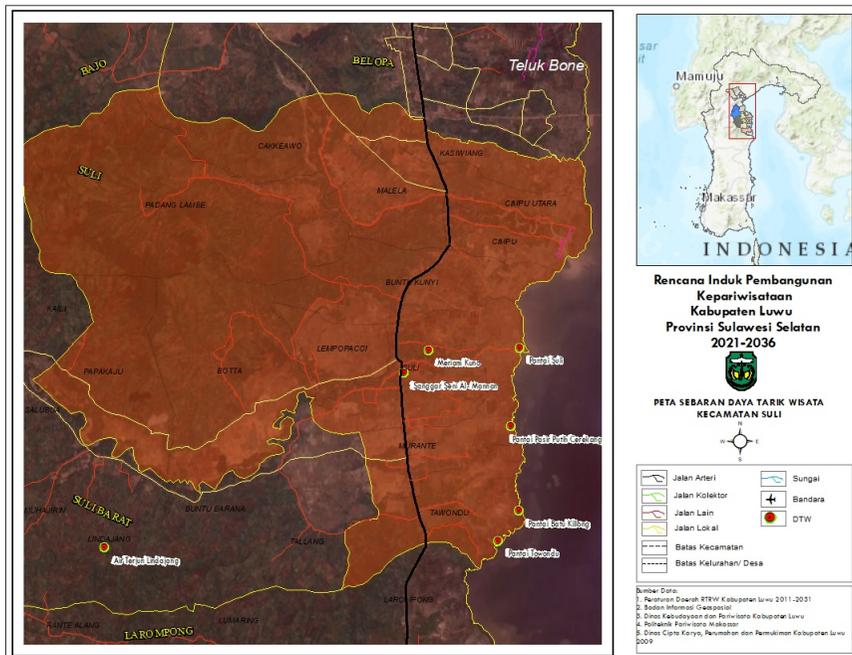
Kondisi aktual Daya Tarik Wisata di KSPD Larompong dan sekitarnya bervariasi, dari 4 daya tarik dan atraksi wisata yang ada, terdapat 2 buah daya tarik termasuk "Potensial" untuk dikembangkan, dan 2 buah daya tarik masih termasuk kategori "Baik".

3. KSPD Suli dan Sekitarnya

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Suli dan sekitarnya, dengan luas wilayah kecamatan adalah 81,75 km², yang terdiri dari 13 buah desa/ kelurahan, yaitu Tawondu, Murante, Suli, Buntu Kunyi, Lempopacci, Botta, Padang Lambe, Cakkeawo, Malela, Cimpu, Kasiwiang, Papakaju, dan Cimpu Utara. Kawasan ini terletak pada ketinggian antara 0-750 mdpl.

Jumlah penduduk pada kecamatan Suli pada tahun 2020 tercatat sebanyak 21.272 jiwa, dengan populasi tertinggi terdapat di Suli yang mencapai 4.717 jiwa dan jumlah penduduk terkecil pada kawasan ini terdapat di Papakaju yang hanya sebanyak 693 jiwa.

Gambar 10.9
Peta KSPD Suli dan Sekitarnya



Sumber : Data Olahan, 2021

Sarana transportasi antar desa dalam kawasan ini sebahagian besar telah dapat diakses dengan kendaraan umum dengan trayek tetap, yaitu di Murante, Suli, Buntu Kunyi, Lempopacci, Botta, Kasiwiang. Untuk wilayah Tawondu, Padang Lambe, Malela, Cimpu, Papakaju, dan Cimpu Utara juga sudah dapat diakses dengan angkutan umum dengan trayek tidak tetap, dan masih terdapat satu buah wilayah yang belum diakses dengan angkutan umum, yaitu akses ke Cakkeawo.

Akses pada KSPD Suli juga memiliki dua moda akses transportasi yaitu melalui darat dan air. Akses melalui darat dapat dilalui untuk jalur ke Murante, Suli, Buntu Kunyi, Lempopacci, Botta, dan Kasiwiang. Sedangkan untuk akses jalur melalui air dilakukan untuk akses ke Tawondu, Padang Lambe, Malela, Cimpu, Papakaju, dan Cimpu Utara. Sedangkan untuk jalur akses ke Cakkeawo dapat ditempuh melalui darat dan air.

Kondisi akses jalan dalam kawasan kecamatan Suli pada tahun 2020 menunjukkan bahwa sebahagian besar jalan akses antar desa dalam kawasan dengan permukaan jalan dari aspal dan beton, yaitu di Tawondu, Suli, Buntu Kunyi, Botta, Padang Lambe, Malela, Cimpu, Kasiwiang, dan Papakaju sehingga dapat diakses dengan baik dan aman sepanjang tahun, serta masih terdapat akses jalan dalam

kondisi pengerasan kerikil dan batu yaitu di Murante, Lempopacci, Cakkeawo, dan Cimpu Utara. Kawasan ini merupakan salah satu wilayah penghasil produk pertanian berupa sayur-sayuran, buah-buahan, serta hasil perkebunan.

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Suli dan sekitarnya merupakan kawasan strategis dengan tema unggulan aktivitas dan atraksi wisata yang didominasi oleh pantai dan hutan mangrove serta tinggalkan sejarah dan budaya. Daya tarik utama dari kawasan ini adalah kawasan cagar budaya Meriam Kuno, Pantai Batu Killong, Hutan Mangrove Pulangasa Towondu, Pantai Morante dan Pantai Suli. Kondisi potensi wisata pada Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Suli dan sekitarnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10.3
Kondisi Aktual Daya Tarik Wisata KSPD Suli dan Sekitarnya

No	Nama DTW	Atraksi	Kondisi Aktual
DTW Alam			
1	Pantai Batu Killong	1. Panorama pantai 2. Rekreasi keluarga	Potensial
2	Hutan Mangrove Pulangasa Towondu	1. Hutan Mangrove 2. Rekreasi keluarga 3. Wisata Edukasi	Potensial
3	Pantai Morante	1. Panorama pantai 2. Rekreasi keluarga	Potensial
4	Pantai Suli	1. Panorama pantai 2. Rekreasi keluarga	Potensial;
5	Pantai Pasir putih Cerekang	1. Panorama pantai 2. Rekreasi keluarga	Potensial
DTW Sejarah dan Budaya			
6	Kawasan Cagar Budaya Meriam Kuno	Cagar budaya	Kurang

Sumber : Data Olahan, 2021

Kondisi aktual Daya Tarik Wisata di KSPD Suli dan sekitarnya bervariasi, dari 6 buah daya tarik dan atraksi wisata yang ada, 5 buah daya tarik wisata dalam kategori “Potensial” dan 1 buah daya tarik wisata dalam kategori “kurang”.

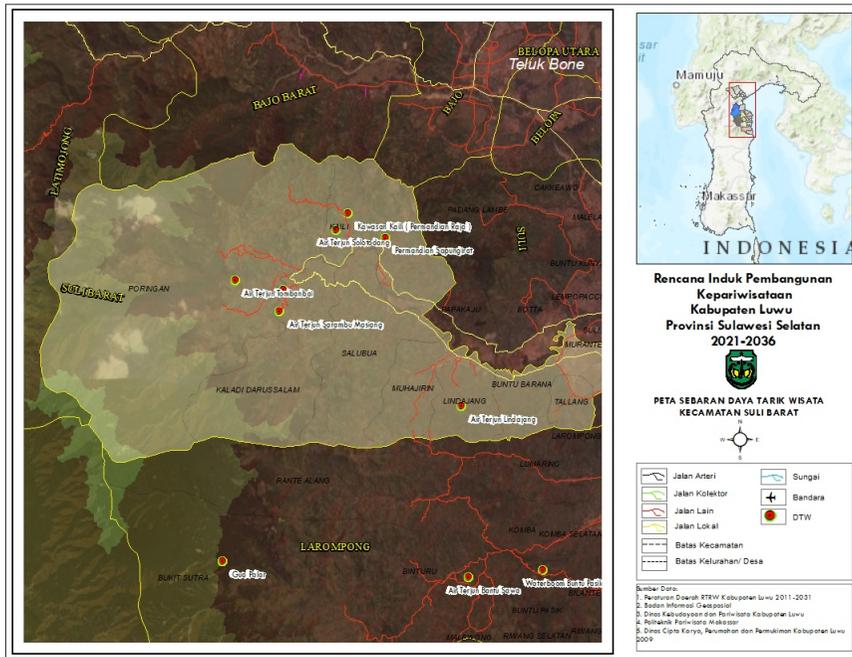
4. KSPD Suli Barat dan Sekitarnya

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Suli Barat dan sekitarnya, dengan luas wilayah kecamatan adalah 153,5 km², yang terdiri dari 8 buah desa/ kelurahan, yaitu Poringan, Kaili, Salubua, Lindajang, Buntu Barana, Kaladi Darussalam, Muhajirin, dan Tallang. Kawasan ini terletak pada ketinggian antara 0-2.000 mdpl.

Jumlah penduduk pada kecamatan Suli Barat pada tahun 2020 tercatat sebanyak 10.016 jiwa, dengan populasi tertinggi terdapat di Salubua yang mencapai 2.001 jiwa dan jumlah penduduk terkecil pada kawasan ini terdapat di Tallang yang hanya sebanyak 592 jiwa.

Sarana transportasi antar desa dalam kawasan ini sebahagian besar telah dapat diakses kendaraan umum dengan trayek tetap, yaitu di Kaili, Salubua, Lindajang, Buntu Barana, dan Muhajirin. Wilayah lainnya juga sudah dapat diakses angkutan umum dengan trayek tidak tetap, yaitu di Poringan, Kaladi Darussalam, dan Tallang.

Gambar 10.10
Peta KSPD Suli Barat dan Sekitarnya



Sumber : Data Olahan, 2021

Kondisi akses jalan dalam kawasan kecamatan Suli Barat pada tahun 2020 menunjukkan bahwa sebahagian besar jalan akses antar wilayah dalam kawasan dengan permukaan jalan dalam kondisi pengerasan dari batu dan kerikil, yaitu di Poringan, Kaili, Salubua, dan Tallang. Pada wilayah Lindajang dan Buntu Barana akses jalan sudah terbuat dari aspal dan beton sehingga dapat diakses dengan baik dan aman sepanjang tahun, serta masih terdapat akses jalan yang permukaannya berupa tanah yaitu di Kaladi Darussalam. Kawasan ini merupakan salah satu wilayah penghasil produk pertanian berupa sayur-sayuran, tanaman biofarmaka, buah-buahan, serta hasil perkebunan.

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Suli Barat dan sekitarnya merupakan kawasan strategis dengan tema unggulan aktivitas dan atraksi wisata yang didominasi oleh air terjun, sungai, permandian alam, serta tinggalan sejarah dan budaya. Daya tarik utama dari kawasan ini adalah Air Terjun Salotodang, Sarambu Masiang, Air terjun Tombanbai, Permandian alam Sapuangirat, Air Terjun Lindajang, Sarambu Paburru, Sarambu Daun Banga, Air Terjun Bollae, Sarambu Biqucu, Sarambu Balendo, Sarambu Pong Ma'ga, Sungai Likuraja, dan kuburan Jarra.

Kondisi potensi wisata pada Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Suli Barat dan sekitarnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10.4
Kondisi Aktual Daya Tarik Wisata KSPD Suli Barat dan Sekitarnya

No	Nama DTW	Atraksi	Kondisi Aktual
DTW Alam			
1	Air Terjun Salotodang	1. Wisata tirta 2. Panorama alam	Potensial
1	Sarambu Masiang	1. Wisata tirta 2. Panorama alam	Potensial

No	Nama DTW	Atraksi	Kondisi Aktual
2	Air Terjun Tombanbai	1. Wisata tirta 2. Panorama Alam	Potensial
3	Permandian alam Sapuangirat	1. Wisata tirta 2. Rekreasi Keluarga	Potensial
DTW Alam			
4	Air Terjun Lindajang	1. Wisata tirta 2. Panorama alam	Potensial
5	Sarambu Paburru	1. Wisata tirta 2. Panorama alam	Potensial
6	Sarambu Daun Banga	1. Wisata tirta 2. Panorama alam	Potensial
7	Air Terjun Bollae	1. Wisata tirta 2. Panorama alam	Potensial
8	Sarambu Biqcu	1. Wisata tirta 2. Panorama alam	Potensial
9	Sarambu Balendo	1. Wisata tirta 2. Panorama alam	Potensial
10	Sarambu Pong Ma'ga	1. Wisata tirta 2. Panorama alam	Potensial
11	Sungai Likuraja	1. Wisata tirta 2. Panorama alam	Potensial
12	Air Terjun Salotodang	1. Wisata tirta 2. Panorama alam	Potensial
DTW Sejarah dan Budaya			
13	Kuburan Jarra	1. Situs Sejarah 2. Cagar Budaya	Kurang

Sumber : Data Olahan, 2021

Kondisi aktual Daya Tarik Wisata di KSPD Suli Barat dan sekitarnya bervariasi, dari 13 buah daya tarik dan atraksi wisata yang ada, terdapat 12 buah daya tarik termasuk "Potensial" untuk dikembangkan, 1 buah daya tarik masih termasuk "kurang", dan tidak ada daya tarik termasuk dalam kategori "Baik".

5. KSPD Belopa dan Sekitarnya

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Belopa dan sekitarnya, dengan luas wilayah kecamatan adalah 59,26 km², yang terdiri dari 9 buah desa/ kelurahan, yaitu Balubu, Pasamai, Senga Selatan, Senga, Belopa, Balo-Balo, Kurrusumanga, Tanamanai, dan Tampumia Radda. Kawasan ini terletak pada ketinggian antara 0-500 mdpl.

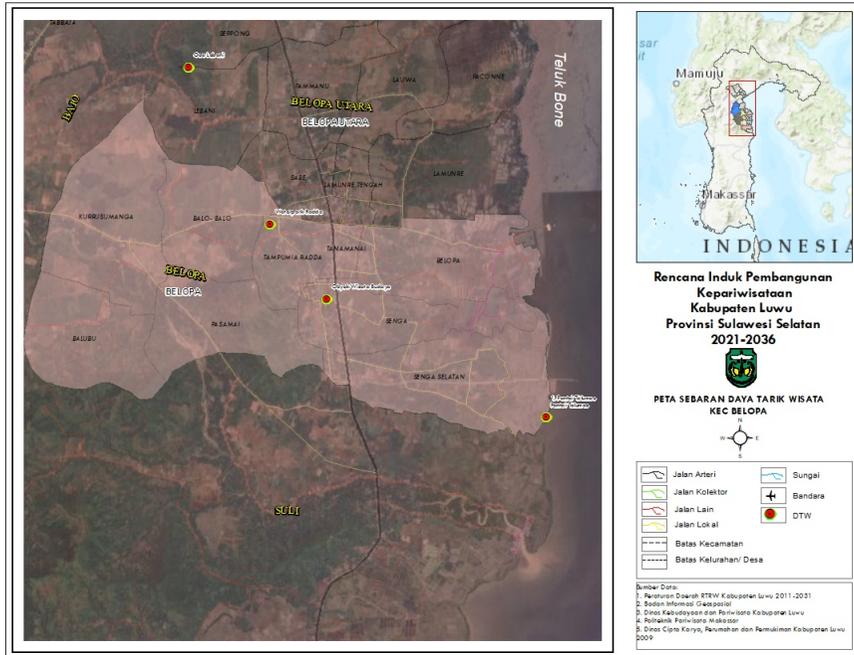
Jumlah penduduk pada kecamatan Belopa pada tahun 2020 tercatat sebanyak 19.277 jiwa, dengan populasi tertinggi terdapat di Senga Selatan yang mencapai 3.894 jiwa dan jumlah penduduk terkecil pada kawasan ini terdapat di Balubu yang hanya sebanyak 665 jiwa.

Sarana transportasi antar desa dalam kawasan ini sebahagian besar telah dapat diakses dengan kendaraan umum tanpa trayek tetap, yaitu di Balubu, Pasamai, Senga, Belopa, dan Kurrusumanga. Wilayah yang dapat diakses kendaraan umum dengan trayek tetap terdapat di Senga Selatan, Balo-Balo, Tanamanai, dan Tampumia Radda.

Sebagai kawasan yang sekaligus sebagai ibukota kabupaten Luwu, kondisi akses jalan dalam kawasan kecamatan Belopa pada tahun 2020 menunjukkan bahwa seluruh jalan akses antar wilayah dalam kawasan dengan permukaan jalan dari aspal

dan beton sehingga dapat diakses dengan baik dan aman sepanjang tahun. Kawasan ini merupakan salah satu wilayah penghasil produk pertanian berupa sayur-sayuran, buah-buahan, serta hasil perkebunan.

Gambar 10.11
Peta KSPD Belopa dan Sekitarnya



Sumber : Data Olahan, 2021

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Belopa dan sekitarnya merupakan kawasan strategis dengan tema unggulan aktivitas dan atraksi wisata yang didominasi oleh pantai, bentang alam pesisir, serta tinggalan sejarah dan budaya. Daya tarik utama dari kawasan ini adalah Bubun Parani, Kawasan Taman Hijau Andi Benni, Museum Opu Daeng Risaju, Kawasan Terpadu Pariwisata Pelabuhan Belopa (Museum, Kuliner, dan Seni Pertunjukan), dan Pantai Talumae. Kondisi potensi wisata pada Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Belopa dan sekitarnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10.5
Kondisi Aktual Daya Tarik Wisata KSPD Belopa dan Sekitarnya

No	Nama DTW	Atraksi	Kondisi Aktual
DTW Alam			
1	Pantai Talumae	1. Panorama pantai 2. Rekreasi keluarga	Potensial
DTW Sejarah dan Budaya			
2	Bubun Parani	1. Mata air 2. Cagar Budaya	Kurang
DTW Buatan dan Minat Khusus			
3	Taman Hijau Andi Benni	1. Rekreasi keluarga 2. Wisata perkotaan	Potensial

Sumber : Data Olahan, 2021

Kondisi aktual Daya Tarik Wisata di KSPD Belopa dan sekitarnya bervariasi, dari 3 daya tarik dan atraksi wisata yang ada, terdapat 2 buah daya tarik termasuk “Potensial” untuk dikembangkan, 1 buah daya tarik masih termasuk “kurang”, dan tidak ada daya tarik termasuk dalam kategori “Baik”.

6. KSPD Belopa Utara dan Sekitarnya

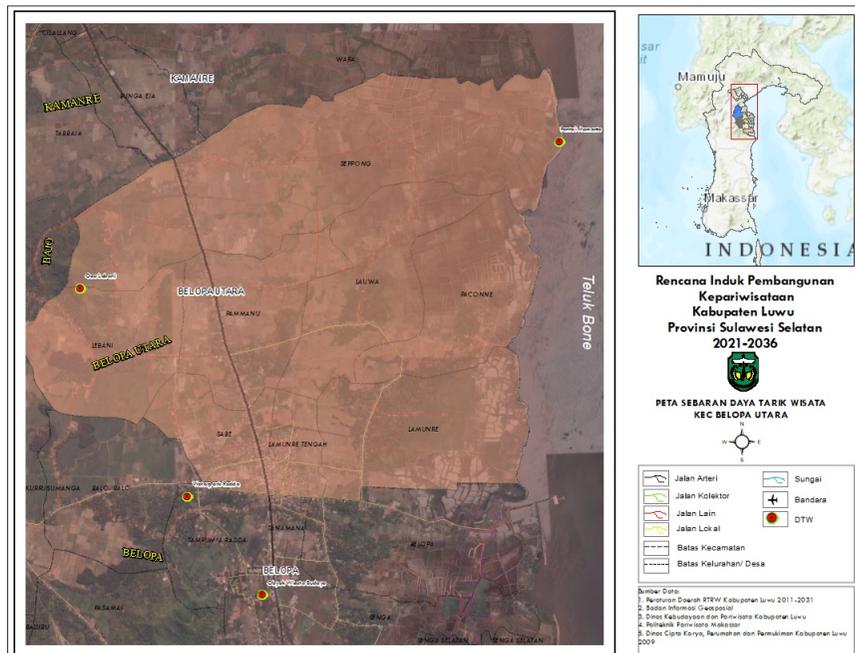
Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Belopa Utara dan sekitarnya, dengan luas wilayah kecamatan adalah 50,88 km², yang terdiri dari 8 buah desa/kelurahan, yaitu Lebani, Pammanu, Lamunre, Lauwa, Paconne, Seppong, Sabe, dan Lamunre Tengah. Kawasan ini terletak pada ketinggian antara 0-250 mdpl.

Jumlah penduduk pada kecamatan Belopa Utara pada tahun 2020 tercatat sebanyak 18.435 jiwa, dengan populasi tertinggi terdapat di Sabe yang mencapai 4.383 jiwa dan jumlah penduduk terkecil pada kawasan ini terdapat di Paconne yang hanya sebanyak 856 jiwa.

Sarana transportasi antar wilayah dalam kawasan ini sebahagian besar telah dapat diakses dengan kendaraan umum tanpa trayek tetap, yaitu di Lebani, Lamunre, Lauwa, Paconne, Sabe, dan Lamunre Tengah. Wilayah sudah diakses kendaraan umum dengan trayek tetap, hanya di wilayah Pammanu dan Seppong, .

Kondisi akses jalan dalam kawasan kecamatan Belopa Utara pada tahun 2020 menunjukkan bahwa seluruh jalan akses antar wilayah dalam kawasan dengan permukaan jalan aspal/ beton yang dapat dilalui sepanjang tahun dengan aman. Kawasan ini merupakan salah satu wilayah penghasil produk pertanian berupa sayur-sayuran, buah-buahan, serta hasil perkebunan.

Gambar 10.12
Peta KSPD Belopa Utara dan Sekitarnya



Sumber : Data Olahan, 2021

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Belopa Utara dan sekitarnya merupakan kawasan strategis dengan tema unggulan aktivitas dan atraksi wisata yang didominasi oleh pantai serta tinggalan sejarah dan budaya. Daya tarik utama dari kawasan ini adalah Pantai Mamonta, dan Situs Buntu Lebani. Kondisi potensi wisata

pada Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Belopa Utara dan sekitarnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10.6
Kondisi Aktual Daya Tarik Wisata KSPD Belopa Utara dan Sekitarnya

No	Nama DTW	Atraksi	Kondisi Aktual
DTW Alam			
1	Pantai Mamonta	1. Panorama pantai 2. Rekreasi keluarga	Potensial
DTW Sejarah dan Budaya			
2	Situs Buntu Lebani	1. Panorama alam 2. Situs Purbakala	Potensial

Sumber : Data Olahan, 2021

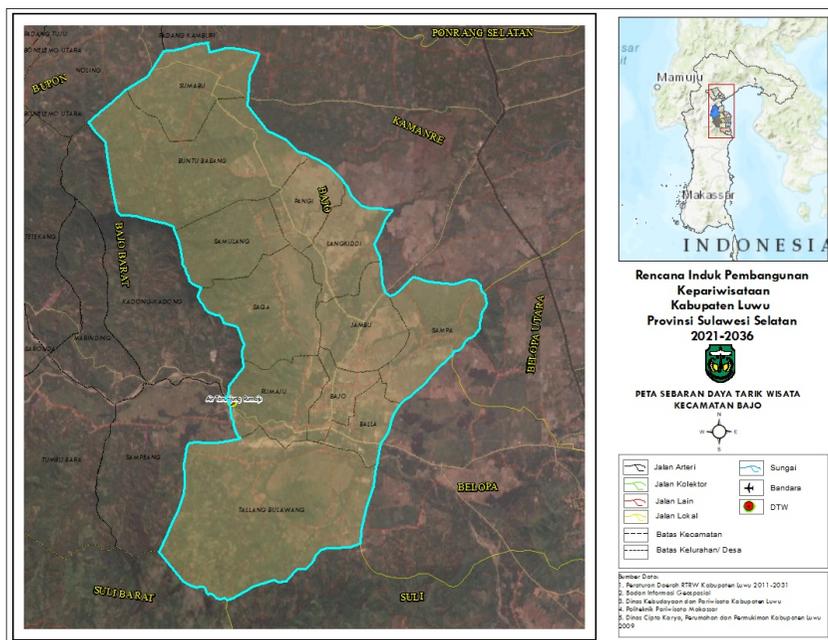
Kondisi aktual Daya Tarik Wisata di KSPD Belopa Utara dan sekitarnya menunjukkan bahwa, dari 2 daya tarik dan atraksi wisata yang ada, secara keseluruhan termasuk “Potensial” untuk dikembangkan.

7. KSPD Bajo dan Sekitarnya

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Bajo dan sekitarnya, dengan luas wilayah kecamatan adalah 79,47 km², yang terdiri dari 12 buah desa/ kelurahan, yaitu Tallang Bulawang, Balla, Sampa, Bajo, Rumaju, Saga, Jambu, Pangi, Sumabu, Samulang, Buntu Babang, dan Langkiddi. Kawasan ini terletak pada ketinggian antara 0-750 mdpl .

Jumlah penduduk pada kecamatan Bajo pada tahun 2020 tercatat sebanyak 16.329 jiwa, dengan populasi tertinggi terdapat di Bajo yang mencapai 2.263 jiwa dan jumlah penduduk terkecil pada kawasan ini terdapat di Samulang yang hanya sebanyak 529 jiwa. Sarana transportasi antar desa dalam kawasan ini seluruhnya telah dapat diakses kendaraan umum dengan trayek tetap.

Gambar 10.13
Peta KSPD Bajo dan Sekitarnya



Sumber : Data Olahan, 2021

Kondisi akses jalan dalam kawasan kecamatan Bajo pada tahun 2020 menunjukkan bahwa sebahagian besar jalan akses antar wilayah dalam kawasan dengan permukaan jalan dari aspal dan beton, yaitu di Balla, Sampa, Bajo, Rumaju, Jambu, Pangi, Samulang, dan Langkiddi sehingga dapat diakses dengan baik dan aman sepanjang tahun, serta terdapat akses jalan dalam kondisi pengerasan batu dan kerikil yaitu di Tallang Bulawang, Saga, Sumabu, dan Buntu Babang. Kawasan ini merupakan salah satu wilayah penghasil produk pertanian berupa sayur-sayuran, tanaman biofarmaka, buah-buahan, serta hasil perkebunan.

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Bajo dan sekitarnya merupakan kawasan strategis dengan tema unggulan aktivitas dan atraksi wisata yang didominasi oleh bentang alam bendungan, sungai serta tinggalan sejarah dan budaya. Daya tarik utama dari kawasan ini adalah Kawasan Bendung Tomatope, dan Benteng Rumaju.

Kondisi potensi wisata pada Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Bajo dan sekitarnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10.7
Kondisi Aktual Daya Tarik Wisata KSPD Bajo dan Sekitarnya

No	Nama DTW	Atraksi	Kondisi Aktual
DTW Sejarah dan Budaya			
1	Benteng Rumaju	1. Panorama alam 2. Situs Sejarah	Kurang
DTW Buatan dan Minat Khusus			
2	Bendung Tomatope	1. Panorama alam 2. Rekreasi keluarga	Baik

Sumber : Data Olahan, 2021

Kondisi aktual Daya Tarik Wisata di KSPD Bajo dan sekitarnya bervariasi, dari 2 daya tarik dan atraksi wisata yang ada, tdk ada daya tarik termasuk “Potensial” untuk dikembangkan, 1 buah daya tarik masih termasuk “kurang”, dan 1 buah daya tarik termasuk dalam kategori “Baik”.

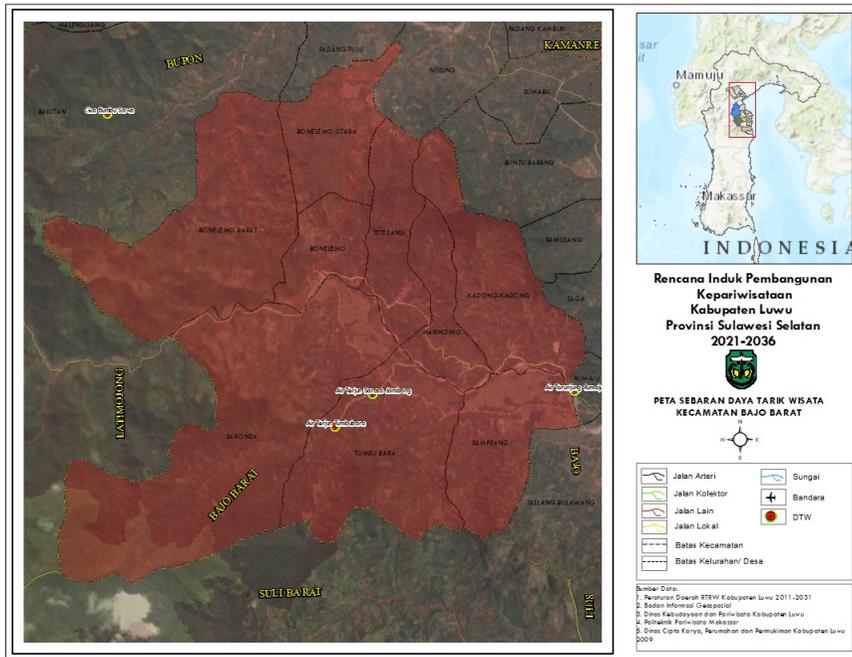
8. KSPD Bajo Barat dan Sekitarnya

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Bajo Barat dan sekitarnya, dengan luas wilayah kecamatan adalah 66,30 km², yang terdiri dari 9 buah desa/ kelurahan, yaitu Saronda, Tumbu Bara Sampeang, Kadong-Kadong, Marinding, Tetekang, Bonelemo Barat, Bonelemo, dan Bonelemo Utara. Kawasan ini terletak pada ketinggian antara 0-1.750 mdpl.

Jumlah penduduk pada kecamatan Bajo Barat pada tahun 2020 tercatat sebanyak 10.136 jiwa, dengan populasi tertinggi terdapat di Sampeang yang mencapai 1.614 jiwa dan jumlah penduduk terkecil pada kawasan ini terdapat di Bonelemo Barat yang hanya sebanyak 584 jiwa.

Sarana transportasi antar wilayah dalam kawasan ini sebahagian besar tidak terdapat transportasi angkutan umum. Wilayah yang telah dapat diakses kendaraan umum dengan trayek tetap adalah di Saronda, Tumbu Bara dan Sampeang.

Gambar 10.14
Peta KSPD Bajo Barat dan Sekitarnya



Sumber : Data Olahan, 2021

Kondisi akses jalan dalam kawasan kecamatan Bajo Barat pada tahun 2020 menunjukkan bahwa sebahagian besar jalan akses antar wilayah dalam kawasan dengan permukaan dari aspal dan beton sehingga dapat diakses dengan baik dan aman sepanjang tahun, kecuali pada wilayah Bonelemo Barat dan Bonelemo Utara yang masih memiliki akses jalan dalam kondisi pengerasan batu dan kerikil. Kawasan ini merupakan salah satu wilayah penghasil produk pertanian berupa sayur-sayuran, tanaman biofarmaka, buah-buahan, serta hasil perkebunan.

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Bajo Barat dan sekitarnya merupakan kawasan strategis dengan tema unggulan aktivitas dan atraksi wisata yang didominasi oleh air terjun, sungai, desa wisata, serta tinggalan sejarah dan budaya

Daya tarik utama dari kawasan ini adalah Air Terjun Tumbubara, Desa Bonelemo, Permandian Batu Alang, Salu Suso, dan Saruran Toke. Kondisi potensi wisata pada Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Bajo Barat dan sekitarnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10.8
Kondisi Aktual Daya Tarik Wisata KSPD Bajo Barat dan Sekitarnya

No	Nama DTW	Atraksi	Kondisi Aktual
DTW Alam			
1	Air Terjun Tumbubara	1. Wisata tirta 2. Panorama alam	Potensial
2	Permandian Batu Alang	1. Wisata tirta 2. Panorama alam	Kurang
3	Salu Suso	1. Wisata tirta 2. Panorama alam	Kurang
4	Saruran Toke	1. Wisata tirta 2. Panorama alam	Potensial

No	Nama DTW	Atraksi	Kondisi Aktual
		3. Rafting/ River Tubing	
DTW Buatan			
5	Desa Bonelemo	Desa wisata berbasis edukasi	Potensial

Sumber : Data Olahan, 2021

Kondisi aktual Daya Tarik Wisata di KSPD Bajo Barat dan sekitarnya bervariasi, dari 5 daya tarik dan atraksi wisata yang ada, terdapat 3 buah daya tarik termasuk “Potensial” untuk dikembangkan, dan 2 buah daya tarik masih termasuk “kurang”.

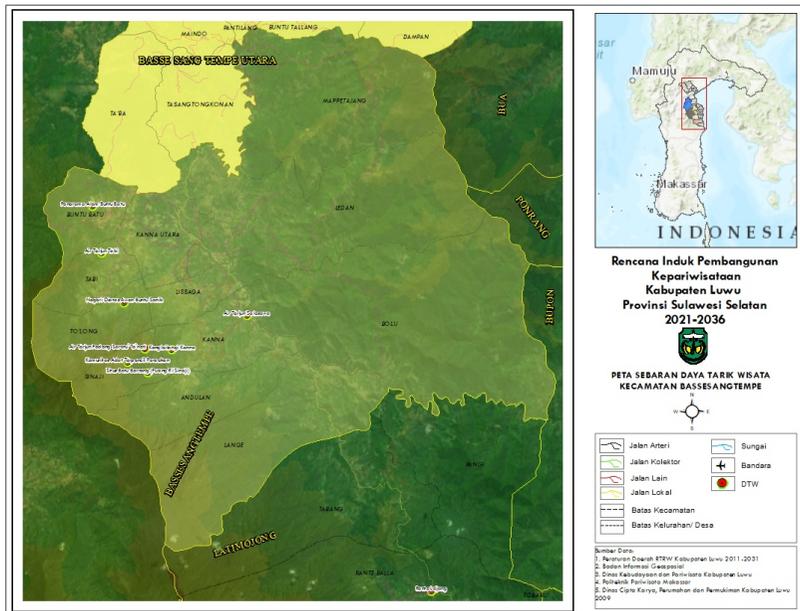
9. KSPD Bassesangtempe dan Sekitarnya

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Bassesangtempe dan sekitarnya, dengan luas wilayah kecamatan adalah 275,77 km², yang terdiri dari 12 buah desa/kelurahan, yaitu Bolu, Lange, Andulan, Sinaji, Kanna, Ledan, Lissaga, To'long, Tabi, Kanna Utara, Buntu Batu, dan Mappetajang. Kawasan ini terletak pada ketinggian antara 250-3.250 mdpl.

Jumlah penduduk pada kecamatan Bassesangtempe pada tahun 2020 tercatat sebanyak 5.778 jiwa, dengan populasi tertinggi terdapat di Kanna Utara yang mencapai 931 jiwa dan jumlah penduduk terkecil pada kawasan ini terdapat di Andulan yang hanya sebanyak 258 jiwa.

Sarana transportasi antar desa dalam kawasan ini sebahagian besar telah dapat diakses dengan kendaraan umum tanpa trayek tetap. Hanya di wilayah Sinaji yang terdapat akses kendaraan umum dengan trayek tetap. Kondisi akses jalan dalam kawasan kecamatan Bassesangtempe pada tahun 2020 menunjukkan bahwa seluruh jalan akses antar wilayah dalam kawasan dengan permukaan jalan tanah yang dapat dilalui sepanjang tahun kecuali pada musim penghujan dan atau kondisi tertentu seperti banjir. Kawasan ini merupakan salah satu wilayah penghasil produk pertanian berupa sayur-sayuran, buah-buahan, serta hasil perkebunan.

Gambar 10.15
Peta KSPD Bassesangtempe dan Sekitarnya



Sumber : Data Olahan, 2021

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Basesangtempe dan sekitarnya merupakan kawasan strategis dengan tema unggulan aktivitas dan atraksi wisata yang didominasi oleh air terjun, panorama serta tinggalan sejarah dan budaya. Daya tarik utama dari kawasan ini adalah Kawasan cagar budaya Batu Borrong (*Puang Ri Sinaji*), Komunitas adat terpencil Peraokan, Air terjun Podong Saratu', Air terjun Topangangnga; Air terjun To Bettu; Air terjun To Ballan, To'noti, Kawasan Situs Erong ri Langi, Panorama alam Buntu Sanik, Panorama alam Buntu Batu, Air terjun Tabi, Air terjun Pollok Tondok, Agrowisata buah desa Mappetajang, dan Kawasan Adat Kongleilangi Kanna.

Kondisi potensi wisata pada Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Basesangtempe dan sekitarnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10.9

Kondisi Aktual Daya Tarik Wisata KSPD Basesangtempe dan Sekitarnya

No	Nama DTW	Atraksi	Kondisi Aktual
DTW Alam			
1	Air terjun Podong Saratu'	1. Wisata tirta 2. Panorama alam	Potensial
2	Air terjun Topangangnga	1. Wisata tirta 2. Panorama alam	Potensial
3	Air terjun To Bettu	1. Wisata tirta 2. Panorama alam	Potensial
4	Air terjun To Ballan	1. Wisata tirta 2. Panorama alam	Potensial
5	Panorama Alam Buntu Sanik	3. Panorama Alam 1. Wisata minat khusus	Potensial
6	Panorama Alam Buntu Batu	1. Panorama Alam 2. Wisata minat khusus	Potensial
7	Air Terjun Tabi	1. Wisata tirta 2. Panorama alam	Potensial
DTW Alam			
8	Air Terjun Pollok Tondok	1. Wisata tirta 2. Panorama alam	Potensial
DTW Sejarah dan Budaya			
9	Upacara Penguburan Mayat	Ritual budaya	Potensial
10	Liang Andulan	1. Panorama alam 2. Situs Purbakala	Potensial
11	Lo'ko Pa'kaparan (Illanbatu)	1. Panorama alam 2. Situs Purbakala	Potensial
12	Kawasan cagar budaya Batu Borrong (<i>Puang Ri Sinaji</i>)	1. Panorama alam 2. Situs Purbakala	Potensial
13	Komunitas adat terpencil Peraokan	1. Tradisi budaya 2. Komunitas adat	Kurang
14	Kawasan Adat Kongleilangi Kanna	1. Tradisi budaya 2. Komunitas adat	Kurang
15	Situs Erong Rilangi	1. Panorama alam 2. Situs sejarah	Kurang
DTW Buatan dan Minat Khusus			
16	Kawasan Puang Ri Sinaji	1. <i>Adventure</i> 2. Panorama 3. Trecking	Potensial

Sumber : Data Olahan, 2021

Kondisi aktual Daya Tarik Wisata di KSPD Bassesangtempe dan sekitarnya bervariasi, dari 16 daya tarik dan atraksi wisata yang ada, terdapat 13 buah daya tarik termasuk “Potensial” untuk dikembangkan, 3 buah daya tarik masih termasuk “kurang”, dan tidak ada daya tarik termasuk dalam kategori “Baik”.

10. KSPD Latimojong dan Sekitarnya

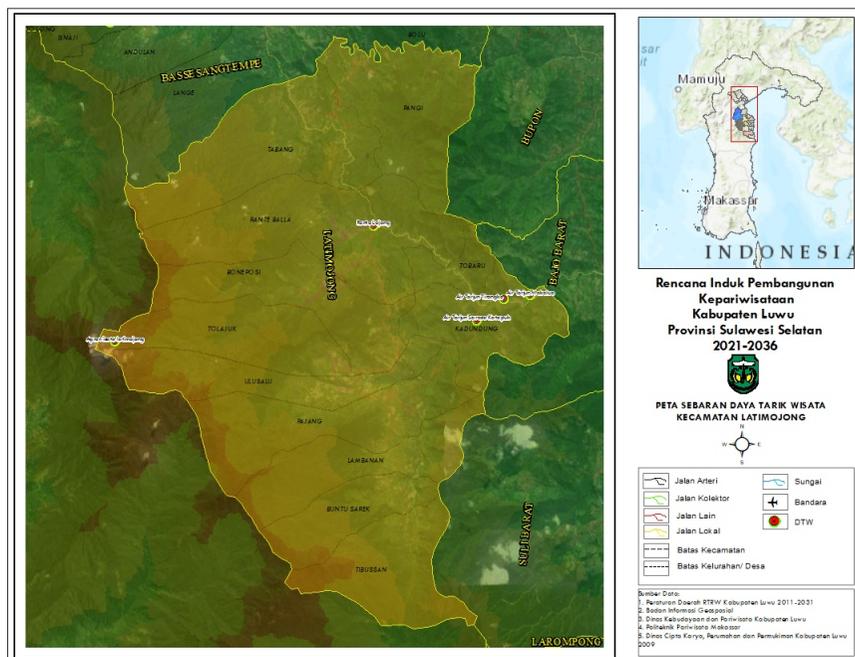
Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Latimojong dan sekitarnya, dengan luas wilayah kecamatan adalah 467,75 km², yang terdiri dari 12 buah desa/ kelurahan, yaitu Lambanan, Buntu Sarek, Pajang, Kadundung, Tobaru, Ulusalu, Boneposi, Rante Balla, Pangi, Tabang, Tibussan, dan Tolajuk. Kawasan ini terletak pada ketinggian antara 0-3.500 mdpl.

Jumlah penduduk pada kecamatan Latimojong pada tahun 2020 tercatat sebanyak 5.924 jiwa, dengan populasi tertinggi terdapat di Ulusalu yang mencapai 844 jiwa dan jumlah penduduk terkecil pada kawasan ini terdapat di Tobaru yang hanya sebanyak 125 jiwa.

Sarana transportasi antar wilayah dalam kawasan ini sebagian besar belum dapat diakses dengan kendaraan umum. Terdapat tiga buah wilayah yang sudah dapat diakses kendaraan umum dengan trayek tetap, yaitu di Kadundung, Tobaru, dan Rante Balla.

Kondisi akses jalan dalam kawasan kecamatan Latimojong pada tahun 2020 menunjukkan bahwa sebagian besar jalan akses antar wilayah dalam kawasan dengan permukaan jalan tanah dan hanya di wilayah Tobaru yang memiliki jalan akses dengan permukaan pengerasan batu dan kerikil yang dapat dilalui sepanjang tahun kecuali pada musim penghujan dan atau kondisi tertentu seperti banjir. Kawasan ini merupakan salah satu wilayah penghasil produk pertanian berupa sayur-sayuran, tanaman biofarmaka, buah-buahan, serta hasil perkebunan.

Gambar 10.16
Peta KSPD Latimojong dan Sekitarnya



Sumber : Data Olahan, 2021

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Latimojong dan sekitarnya merupakan kawasan strategis dengan tema unggulan aktivitas dan atraksi wisata yang didominasi oleh bentang alam dataran tinggi, serta tinggalan sejarah dan budaya. Daya tarik utama dari kawasan ini adalah Kawasan adventure Latimojong, Air Terjun Sarasa Katapuk, dan Wisata Rante Lajang. Kondisi potensi wisata pada Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Latimojong dan sekitarnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10.10
Kondisi Aktual Daya Tarik Wisata KSPD Latimojong dan Sekitarnya

No	Nama DTW	Atraksi	Kondisi Aktual
DTW Alam			
1	Air Terjun Sarasa Katapuk	1. Wisata tirta 2. Panorama alam	Potensial
2	Wisata Rante Lajang	1. Panorama Alam 2. Wisata minat khusus	Baik
DTW Buatan dan Minat Khusus			
3	Kawasan Latimojong	1. <i>Adventure</i> 2. Panorama alam 3. Rafting 4. Trecking 5. <i>Climbing</i> 6. Olahraga dirgantara	Potensial

Sumber : Data Olahan, 2021

Kondisi aktual Daya Tarik Wisata di KSPD Latimojong dan sekitarnya bervariasi, dari 3 daya tarik dan atraksi wisata yang ada, terdapat 2 buah daya tarik termasuk “Potensial” untuk dikembangkan, 1 buah daya tarik masih termasuk “kurang”, dan tidak ada daya tarik termasuk dalam kategori “Baik”.

11. KSPD Bassesangtempe Utara dan Sekitarnya

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Bassesangtempe Utara dan sekitarnya, dengan luas wilayah kecamatan adalah 119,31 km², yang terdiri dari 12 buah desa/ kelurahan, yaitu Tasangtongkonan, Buntu Tallang, Dampan, Tede, Pantilang, Maindo, Salu Bua Uraso Karatuan, Bonglo, Barana, dan Ta'ba. Kawasan ini terletak pada ketinggian antara 250-1.500 mdpl.

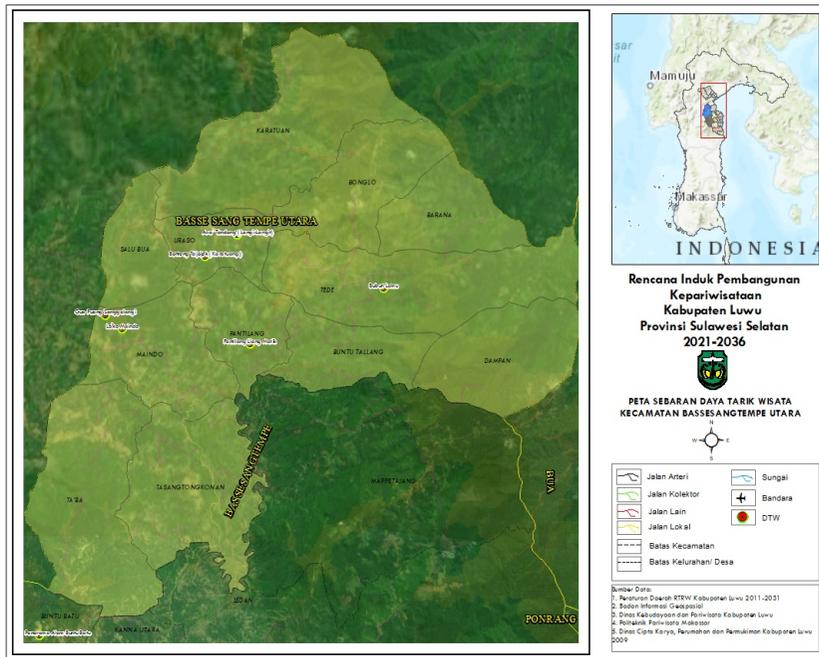
Jumlah penduduk pada kecamatan Bassesangtempe Utara pada tahun 2020 tercatat sebanyak 7.523 jiwa, dengan populasi tertinggi terdapat di Maindo yang mencapai 1.064 jiwa dan jumlah penduduk terkecil pada kawasan ini terdapat di Buntu Tallang yang hanya sebanyak 258 jiwa.

Sarana transportasi antar wilayah dalam kawasan ini, terdapat 4 wilayah yang belum diakses dengan kendaraan umum, yaitu di Buntu Tallang, Dampan, Salu Bua, dan Uraso. Wilayah yang sudah dapat diakses angkutan umum dengan trayek tetap, terdapat di Karatuan, Bonglo, dan Barana. Sedangkan wilayah lainnya yaitu di Tasangtongkonan, Tede, Pantilang, Maindo, dan Ta'ba merupakan wilayah yang sudah dapat diakses dengan angkutan umum tanpa trayek tetap.

Kondisi akses jalan dalam kawasan kecamatan Bassesangtempe Utara pada tahun 2020 menunjukkan bahwa sebagian besar jalan akses antar wilayah dalam kawasan dengan permukaan tanah sehingga dapat diakses sepanjang tahun, namun pada musim hujan atau kondisi tertentu seperti banjir. Akses jalan pada wilayah Uraso merupakan satu-satunya wilayah dalam kawasan ini yang telah memiliki akses jalan dengan permukaan pengerasan berupa batu/ kerikil. Kawasan ini merupakan salah

satu wilayah penghasil produk pertanian berupa sayur-sayuran, tanaman biofarmaka, buah-buahan, serta hasil perkebunan.

Gambar 10.17
Peta KSPD Basesangtempe Utara dan Sekitarnya



Sumber : Data Olahan, 2021

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Basesangtempe Utara dan sekitarnya merupakan kawasan strategis dengan tema unggulan aktivitas dan atraksi wisata yang didominasi oleh potensi geologi, bentang alam dataran tinggi, serta tinggalan sejarah dan budaya

Daya tarik utama dari kawasan ini adalah Kawasan cagar budaya Ayam Puang Ritede, kawasan cagar budaya Bubun Lamu, kawasan cagar budaya Benteng Tajajok, kawasan cagar budaya Awa'tondong, kawasan cagar budaya Pantilang, kawasan cagar budaya Loko Maindo, Air Terjun Salosawa, kawasan adat /upacara perkawinan dan upacara penguburan, dan Situs Batu Borrong. Kondisi potensi wisata pada Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Barebbo dan sekitarnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10.11
Kondisi Aktual Daya Tarik Wisata KSPD Basesangtempe Utara dan Sekitarnya

No	Nama DTW	Atraksi	Kondisi Aktual
DTW Alam			
1	Air Terjun Salo Sawa	1. Wisata tirta 2. Panorama alam	Potensial
DTW Buatan dan Minat Khusus			
2	Situs Batu Borrong	1. Panorama alam 2. Situs Purbakala	Potensial
3	Kawasan Cagar Budaya Ayam Puang Ritede	1. Panorama alam 2. Cagar Budaya	Potensial
4	Kawasan Cagar Budaya Bubun Lamu	1. Panorama alam 2. Cagar Budaya	Kurang

No	Nama DTW	Atraksi	Kondisi Aktual
5	Kawasan Cagar Budaya Benteng Tajajok	1. Panorama alam 2. Cagar Budaya	Kurang
6	Kawasan Cagar Budaya Awa'tondong	1. Panorama alam 2. Cagar Budaya	Kurang
7	Kawasan Cagar Budaya Pantilang	1. Panorama alam 2. Cagar Budaya	Kurang
8	Kawasan Cagar Budaya Loko Maindo	1. Panorama alam 2. Cagar Budaya	Kurang

Sumber : Data Olahan, 2021

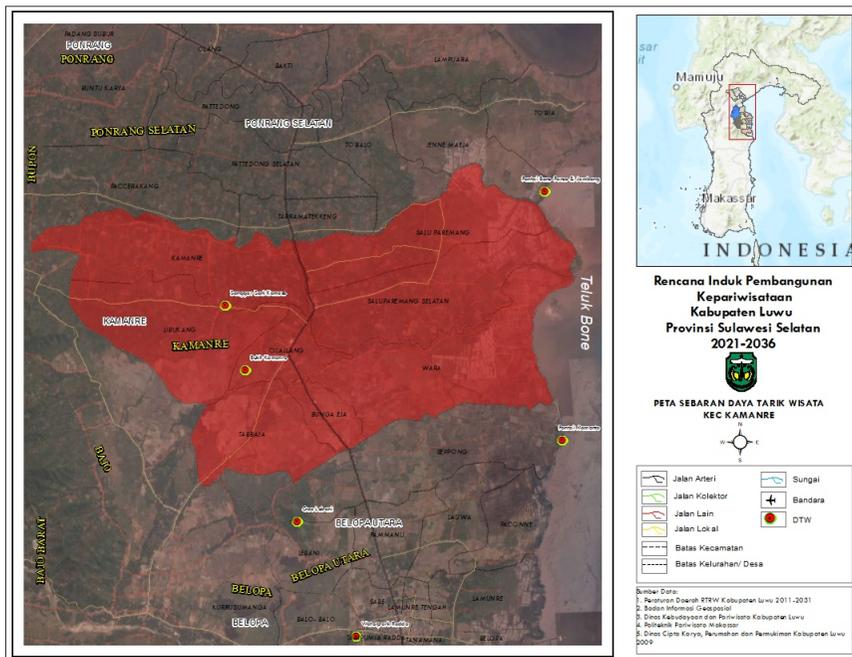
Kondisi aktual Daya Tarik Wisata di KSPD Basesangtempe Utara dan sekitarnya bervariasi, dari 8 daya tarik dan atraksi wisata yang ada, terdapat 3 buah daya tarik termasuk “Potensial” untuk dikembangkan, 5 buah daya tarik masih termasuk “kurang”, dan tidak ada daya tarik termasuk dalam kategori “Baik”.

12. KSPD Kamanre dan Sekitarnya

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Kamanre dan sekitarnya, dengan luas wilayah kecamatan adalah 66,66 km², yang terdiri dari 8 buah desa/ kelurahan, yaitu Tabbaja, Libukang, Kamanre, Cilallang, Wara, Saluparewang, Bunga Eja, dan Saluparewang Selatan. Kawasan ini terletak pada ketinggian antara 0-250 mdpl.

Jumlah penduduk pada kecamatan Kamanre pada tahun 2020 tercatat sebanyak 11.967 jiwa, dengan populasi tertinggi terdapat di Cilallang yang mencapai 2.046 jiwa dan jumlah penduduk terkecil pada kawasan ini terdapat di Bunga Eja yang hanya sebanyak 1.037 jiwa.

Gambar 10.18
Peta KSPD Kamanre dan Sekitarnya



Sumber : Data Olahan, 2021

Sarana transportasi antar wilayah dalam kawasan ini sebahagian besar telah dapat diakses dengan kendaraan umum tanpa trayek tetap, yaitu di Tabbaja, Wara, Salupareman, dan Salupareman Selatan. Terdapat dua buah wilayah yang sudah diakses angkutan umum dengan trayek tetap, yaitu di Cilallang dan Bunga Eja. Untuk wilayah Libukan dan Kamanre belum diakses oleh kendaraan umum.

Kondisi akses jalan dalam kawasan kecamatan Kamanre pada tahun 2020 menunjukkan bahwa sebahagian besar jalan akses antar wilayah dalam kawasan dengan permukaan jalan pengerasan batu/ kerikil yang dapat dilalui sepanjang tahun kecuali pada musim penghujan dan atau kondisi tertentu seperti banjir. Terdapat akses dengan permukaan jalan dari aspal dan beton, yaitu di Cilallang dan Bunga sehingga dapat diakses dengan baik dan aman sepanjang tahun. Kawasan ini merupakan salah satu wilayah penghasil produk pertanian berupa sayur-sayuran, buah-buahan, dan perkebunan.

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Kamanre dan sekitarnya merupakan kawasan strategis dengan tema unggulan aktivitas dan atraksi wisata yang didominasi oleh bentang alam, serta tinggalan sejarah dan budaya. Daya tarik utama dari kawasan ini adalah kawasan cagar budaya Bukit Kamanre. Kondisi potensi wisata pada Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Kamanre dan sekitarnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10.12
Kondisi Aktual Daya Tarik Wisata KSPD Kamanre dan Sekitarnya

No	Nama DTW	Atraksi	Kondisi Aktual
DTW Sejarah dan Budaya			
1	Kawasan Cagar Budaya Bukit Kamanre	1. Panorama alam 2. Cagar Budaya	Potensial

Sumber : Data Olahan, 2021

Kondisi aktual Daya Tarik Wisata di KSPD Kamanre dan sekitarnya hanya terdiri dari 1 daya tarik dan atraksi wisata yang ada, dan termasuk dalam kategori “Potensial” untuk dikembangkan.

13. KSPD Ponrang dan Sekitarnya

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Ponrang dan sekitarnya, dengan luas wilayah kecamatan adalah 107,09 km², yang terdiri dari 10 buah desa/ kelurahan, yaitu Padang Subur, Padang Sappa, Tumale, Muladimeng, Buntu Kamiri, Buntu Nanna, Tirowali, Tampa, Mario, dan Parekaju. Kawasan ini terletak pada ketinggian 110 mdpl di Patangkai sampai dengan ketinggian antara 0-1.250 mdpl.

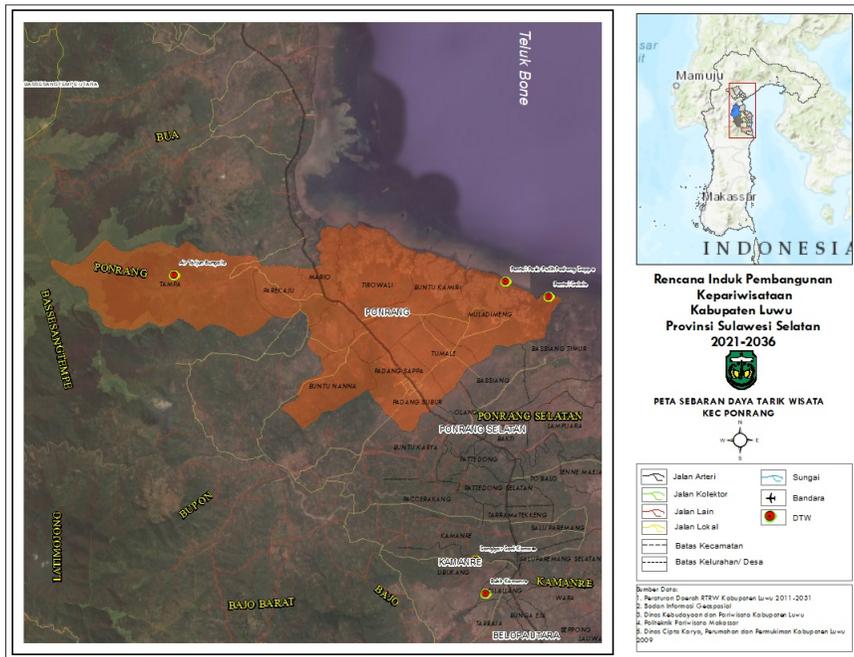
Jumlah penduduk pada kecamatan Ponrang pada tahun 2020 tercatat sebanyak 27.605 jiwa, dengan populasi tertinggi terdapat di Padang Subur yang mencapai 5.633 jiwa dan jumlah penduduk terkecil pada kawasan ini terdapat di Tampa yang hanya sebanyak 932 jiwa.

Sarana transportasi antar wilayah dalam kawasan ini secara umum telah dapat diakses kendaraan umum dengan trayek tetap, yaitu di Padang Subur, Padang Sappa, Tumale, Buntu Kamiri, Tirowali, dan Mario. Untuk transportasi di Muladimeng, Buntu Nanna, Tampa, dan Parekaju juga telah dapat diakses dengan kendaraan umum tanpa trayek tetap.

Kondisi akses jalan dalam kawasan kecamatan Ponrang pada tahun 2020 menunjukkan bahwa sebahagian besar jalan akses antar desa/ kelurahan dalam kawasan dengan permukaan jalan aspal/beton sehingga dapat diakses dengan baik dan aman sepanjang tahun, kecuali di wilayah Tampa yang masih memiliki kondisi jalan dengan permukaan pengerasan dari batu/ kerikil. Kawasan ini merupakan salah

satu wilayah penghasil produk pertanian berupa sayur-sayuran, buah-buahan, serta hasil perkebunan .

Gambar 10.19
Peta KSPD Pongrang dan Sekitarnya



Sumber : Data Olahan, 2021

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Pongrang dan sekitarnya merupakan kawasan strategis dengan tema unggulan aktivitas dan atraksi wisata yang didominasi oleh air terjun dan bentang alam dataran tinggi, serta tinggalan sejarah dan budaya Daya tarik utama dari kawasan ini adalah Air Terjun Bungalo, dan Air Terjun Papakaju.

Kondisi potensi wisata pada Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Pongrang dan sekitarnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10.13
Kondisi Aktual Daya Tarik Wisata KSPD Pongrang dan Sekitarnya

No	Nama DTW	Atraksi	Kondisi Aktual
DTW Alam			
1	Air Terjun Bungalo	1. Wisata tirta 2. Panorama alam	Potensial
2	Air Terjun Papakaju	1. Wisata tirta 2. Panorama alam	Potensial

Sumber : Data Olahan, 2021

Kondisi aktual Daya Tarik Wisata di KSPD Pongrang dan sekitarnya terdiri dari 2 daya tarik dan atraksi wisata yang ada, secara keseluruhan daya tarik termasuk kategori “Potensial” untuk dikembangkan. Kondisi alam yang sangat potensial di wilayah ini sangat memungkinkan dalam pengembangan wisata buatan berbasis ekologi dengan memanfaatkan kawasan pertanian dan perkebunan, dan geologi lainnya.

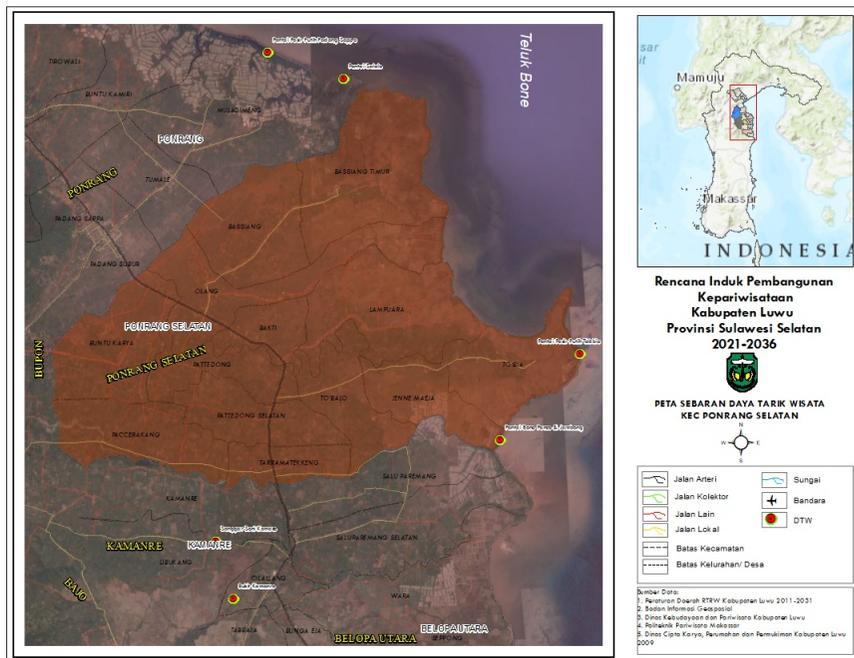
14. KSPD Ponrang Selatan dan Sekitarnya

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Ponrang Selatan dan sekitarnya, dengan luas wilayah kecamatan adalah 94,89 km², yang terdiri dari 13 buah desa/ kelurahan, yaitu Paccerrakkang, Pattedong To'balo, Jenne Maeja, Lampuara, Bakti, Olang, Buntu Karya, Bassiang, Tarramatekkeng, Pattedong Selatan, To'bia, dan Bassiang Timur. Kawasan ini terletak pada ketinggian antara 0-250 mdpl.

Jumlah penduduk pada kecamatan Ponrang Selatan pada tahun 2020 tercatat sebanyak 25.467 jiwa, dengan populasi tertinggi terdapat di Olang yang mencapai 3.171 jiwa dan jumlah penduduk terkecil pada kawasan ini terdapat di Pattedong yang hanya sebanyak 984 jiwa.

Sarana transportasi antar desa/ kelurahan dalam kawasan ini secara keseluruhan telah dapat diakses kendaraan umum dengan trayek tetap. Kondisi akses jalan dalam kawasan kecamatan Ponrang Selatan pada tahun 2020 menunjukkan bahwa sebahagian besar jalan akses antar desa/ kelurahan dalam kawasan dengan permukaan jalan dari aspal dan beton, sehingga dapat diakses dengan baik dan aman sepanjang tahun, kecuali di wilayah Paccerrakkang yang masih terdapat akses jalan dalam kondisi pengerasan batu/ kerikil . Kawasan ini merupakan salah satu wilayah penghasil produk pertanian berupa sayur-sayuran, buah-buahan, serta hasil perkebunan .

Gambar 10.20
Peta KSPD Ponrang Selatan dan Sekitarnya



Sumber : Data Olahan, 2021

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Ponrang Selatan dan sekitarnya merupakan kawasan strategis dengan tema unggulan aktivitas dan atraksi wisata yang didominasi oleh pantai serta tinggalan sejarah dan budaya. Daya tarik utama dari kawasan ini adalah Pantai Bone Pance, Pantai Bone Jambong, dan Pantai Salolo.

Kondisi potensi wisata pada Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Ponrang Selatan dan sekitarnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10.14
Kondisi Aktual Daya Tarik Wisata KSPD Ponrang Selatan dan Sekitarnya

No	Nama DTW	Atraksi	Kondisi Aktual
DTW Alam			
1	Pantai Bone Pance	1. Panorama pantai 2. Rekreasi keluarga	Potensial
2	Pantai Bone Jambong	1. Panorama pantai 2. Rekreasi keluarga	Potensial
3	Pantai Salolo	1. Panorama pantai 2. Rekreasi keluarga	Potensial

Sumber : Data Olahan, 2021

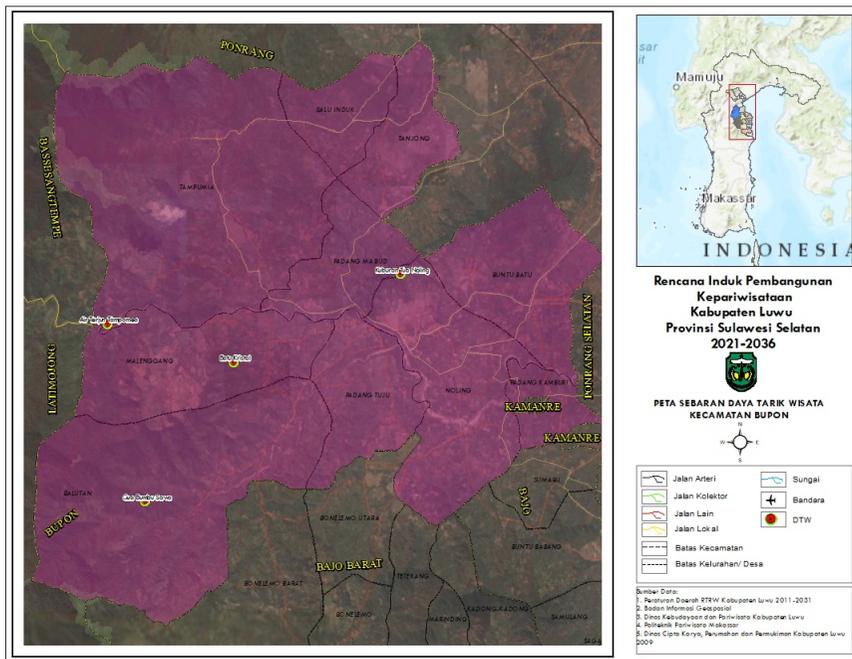
Kondisi aktual Daya Tarik Wisata di KSPD Ponrang Selatan dan sekitarnya terdiri dari 3 daya tarik dan atraksi wisata yang ada, dan secara keseluruhan termasuk kategori “Potensial” untuk dikembangkan.

15. KSPD Bupon dan Sekitarnya

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Bupon dan sekitarnya, dengan luas wilayah kecamatan adalah 192,34 km2, yang terdiri dari 10 buah desa/ kelurahan, yaitu Balutan, Padang Tuju, Noling, Padang Kamburi, Buntu Batu, Tanjong, Padang Ma’bud, Malenggang, Tampunia, dan Salu Induk. Kawasan ini terletak pada ketinggian antara 0-1.250 mdpl .

Jumlah penduduk pada kecamatan Bupon pada tahun 2020 tercatat sebanyak 15.456 jiwa, dengan populasi tertinggi terdapat di Noling yang mencapai 5.138 jiwa dan jumlah penduduk terkecil pada kawasan ini terdapat di Padang Kamburi yang hanya sebanyak 442 jiwa.

Gambar 10.21
Peta KSPD Bupon dan Sekitarnya



Sumber : Data Olahan, 2021

Sarana transportasi antar desa/ kelurahan dalam kawasan ini, terdapat 5 wilayah yang telah dapat diakses kendaraan umum dengan trayek tetap, yaitu di Noling, Buntu Batu, Tanjong, Tampumia, dan Salu Induk. Untuk wilayah lainnya, yaitu di Balutan, Padang Tuju, Padang Kamburi, Padang Ma'bud, dan Malenggang juga telah dapat diakses dengan kendaraan umum tanpa trayek tetap.

Kondisi akses jalan dalam kawasan kecamatan Ponrang Selatan pada tahun 2020 menunjukkan bahwa sebahagian besar jalan akses antar desa/ kelurahan dalam kawasan dengan permukaan jalan pengerasan batu/ kerikil, kecuali pada wilayah Noling dan Buntu Batu yang telah memiliki akses jalan dengan permukaan dari aspal dan beton, sehingga dapat diakses dengan baik dan aman sepanjang tahun. Kawasan ini merupakan salah satu wilayah penghasil produk pertanian berupa sayur-sayuran, buah-buahan, serta hasil perkebunan.

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Bupon dan sekitarnya merupakan kawasan strategis dengan tema unggulan aktivitas dan atraksi wisata yang didominasi oleh air terjun, bentang alam, serta tinggalan sejarah dan budaya. Daya tarik utama dari kawasan ini adalah kawasan cagar budaya Kuburan Tua Noling, Air Terjun Arung Tobo Tampumea, dan Air terjun Bilante.

Kondisi potensi wisata pada Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Bupon dan sekitarnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10.15
Kondisi Aktual Daya Tarik Wisata KSPD Bupon dan Sekitarnya

No	Nama DTW	Atraksi	Kondisi Aktual
DTW Alam			
1	Air Terjun Arung Tobo Tampumea	1. Wisata tirta 2. Panorama alam	Potensial
2	Air Terjun Bilante	1. Wisata tirta 2. Panorama alam	Potensial
DTW Sejarah dan Budaya			
3	Kawasan Cagar Budaya Kuburan Tua Noling	1. Cagar Budaya	Kurang

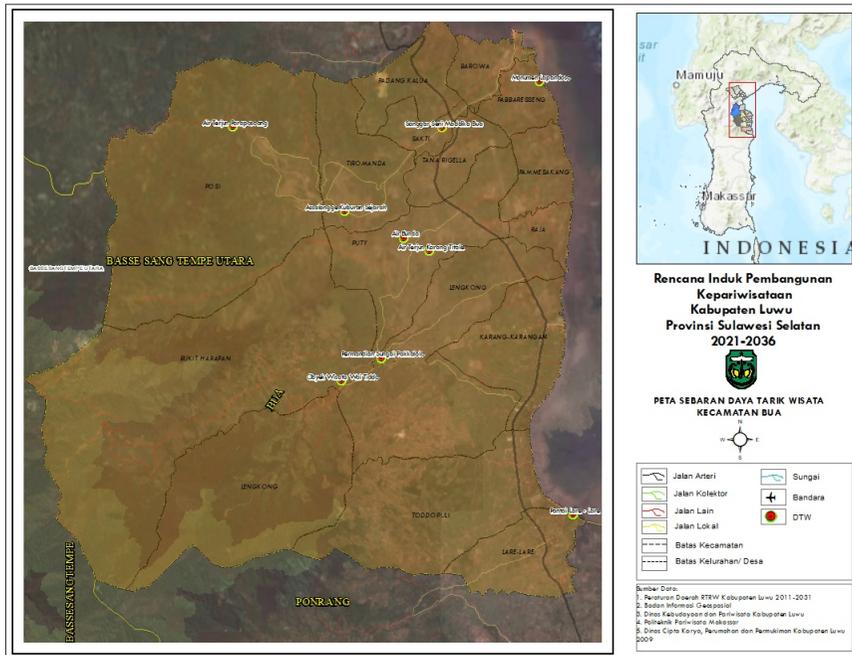
Sumber : Data Olahan, 2021

Kondisi aktual Daya Tarik Wisata di KSPD Bupon dan sekitarnya, dari 3 daya tarik dan atraksi wisata yang ada, terdapat 2 buah daya tarik termasuk “Potensial” untuk dikembangkan dan 1 buah daya tarik/ atraksi wisata termasuk “kurang”.

16. KSPD Bua dan Sekitarnya

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Bua dan sekitarnya, dengan luas wilayah kecamatan adalah 204,01 km², yang terdiri dari 15 buah desa/ kelurahan, yaitu Lare-Lare, Karang-Karangan, Lengkong, Raja, Pammesakeng, Bukit Harapan, Puty, Posi, Tiromanda, Tana Rigella, Sakti, Barowa, Padang Kalua, Toddopuli, dan Pabbaresseng. Kawasan ini terletak pada ketinggian antara 0-1.500 mdpl .

Gambar 10.22
Peta KSPD Bua dan Sekitarnya



Sumber : Data Olahan, 2021

Jumlah penduduk pada kecamatan Bua pada tahun 2020 tercatat sebanyak 32.810 jiwa, dengan populasi tertinggi terdapat di Puty yang mencapai 4.047 jiwa dan jumlah penduduk terkecil pada kawasan ini terdapat di Bukit Harapan yang hanya sebanyak 963 jiwa. Sarana transportasi antar desa/ kelurahan dalam kawasan ini sebahagian besar telah dapat diakses kendaraan umum dengan trayek tetap, dan masih terdapat beberapa wilayah yang dapat diakses dengan angkutan umum tanpa trayek tetap, yaitu akses ke Raja, Pammesakang, Bukit Harapan, Posi, Tiromanda, Barowa, dan Pabbaresseng.

Kondisi akses jalan dalam kawasan kecamatan Bua pada tahun 2020 menunjukkan bahwa secara keseluruhan jalan akses antar desa/ kelurahan dalam kawasan dengan permukaan jalan dari aspal dan beton, sehingga dapat diakses dengan baik dan aman sepanjang tahun. Kawasan ini merupakan salah satu wilayah penghasil produk pertanian berupa sayur-sayuran, buah-buahan, serta hasil perkebunan.

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Bua dan sekitarnya merupakan kawasan strategis dengan tema unggulan aktivitas dan atraksi wisata yang didominasi oleh air terjun, sungai, pantai, permandian alam, bentang alam dataran tinggi, agro wisata serta tinggalan sejarah dan budaya

Daya tarik utama dari kawasan ini adalah kawasan cagar budaya Lapandoso, Makam Maddika Bua Tandipau, Bubun Datu, Air Terjun Puraposoang, Air terjun Karang Titale, Pantai Lare-Lare, Permandian alam Pakalolo, Wisata Alam Garungga dan Permandian alam Wai Tiddo.

Kondisi potensi wisata pada Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Bua dan sekitarnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10.16
Kondisi Aktual Daya Tarik Wisata KSPD Bua dan Sekitarnya

No	Nama DTW	Atraksi	Kondisi Aktual
DTW Alam			
1	Air Terjun Puraposoang	1. Wisata tirta 2. Panorama alam	Potensial
2	Air Terjun Karang Titala	1. Wisata tirta 2. Panorama alam	Potensial
3	Pantai Lare-Lare	1. Panorama pantai 2. Rekreasi keluarga	Potensial
4	Permandian alam Pakalolo	1. Wisata tirta 2. Panorama alam	Potensial
5	Wisata Alam Garungga	1. Wisata tirta 2. Panorama alam	Potensial
6	Permandian Alam Wai Tiddo	1. Wisata tirta 2. Panorama alam	Baik
DTW Alam			
7	Makam Maddika Bua Tandipau	1. Situs Sejarah 2. Cagar Budaya	Kurang

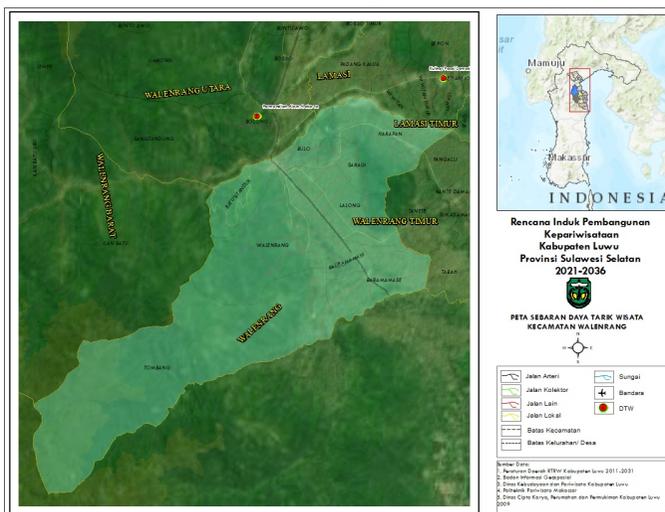
Sumber : Data Olahan, 2021

Kondisi aktual Daya Tarik Wisata di KSPD Bua dan sekitarnya bervariasi, dari 7 daya tarik dan atraksi wisata yang ada, terdapat 5 buah daya tarik termasuk “Potensial” untuk dikembangkan, 1 buah daya tarik masih termasuk “kurang”, dan 1 buah daya tarik termasuk dalam kategori “Baik”.

17. KSPD Walenrang dan Sekitarnya

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Walenrang dan sekitarnya, dengan luas wilayah kecamatan adalah 94,60 km², yang terdiri dari 9 buah desa/ kelurahan, yaitu Tombang, Baramamase, Harapan, Saragi, Bulu, Lalong, Walenrang, Batusitanduk, dan Kalibamamase. Kawasan ini terletak pada ketinggian antara 0-500 mdpl.

Gambar 10.23
Peta KSPD Walenrang dan Sekitarnya



Sumber : Data Olahan, 2021

Jumlah penduduk pada kecamatan Walenrang pada tahun 2020 tercatat sebanyak 18.324 jiwa, dengan populasi tertinggi terdapat di Lalong yang mencapai 2.885 jiwa dan jumlah penduduk terkecil pada kawasan ini terdapat di Saragi yang hanya sebanyak 1.047 jiwa.

Sarana transportasi antar wilayah dalam kawasan ini sebahagian besar telah dapat diakses dengan kendaraan umum tanpa trayek tetap, yaitu di Tombang, Harapan, Saragi, Bulu, Walenrang, dan Kalibamamase. Wilayah yang diakses angkutan umum dengan trayek tetap, yaitu di Baramamase, Lalong, dan Batusitanduk.

Kondisi akses jalan dalam kawasan kecamatan Walenrang pada tahun 2020 menunjukkan bahwa sebahagian besar jalan akses antar desa/ kelurahan dalam kawasan dengan permukaan jalan dari aspal dan beton sehingga dapat diakses dengan baik dan aman sepanjang tahun, serta masih terdapat akses jalan dalam kondisi pengerasan batu/ kerikil yaitu di Walenrang, dan Kalibamamase. Kawasan ini merupakan salah satu wilayah penghasil produk pertanian berupa sayur-sayuran, buah-buahan, serta hasil perkebunan.

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Walenrang dan sekitarnya merupakan kawasan strategis dengan tema unggulan aktivitas dan atraksi wisata yang didominasi oleh permandian alam serta tinggalan sejarah dan budaya. Daya tarik utama dari kawasan ini adalah Permandian alam Bonto Tolle. Kondisi potensi wisata pada Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Walenrang dan sekitarnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10.17
Kondisi Aktual Daya Tarik Wisata KSPD Walenrang dan Sekitarnya

No	Nama DTW	Atraksi	Kondisi Aktual
DTW Alam			
1	Permandian Alam Bonto Tolle	1. Wisata tirta 2. Panorama alam	Potensial

Sumber : Data Olahan, 2021

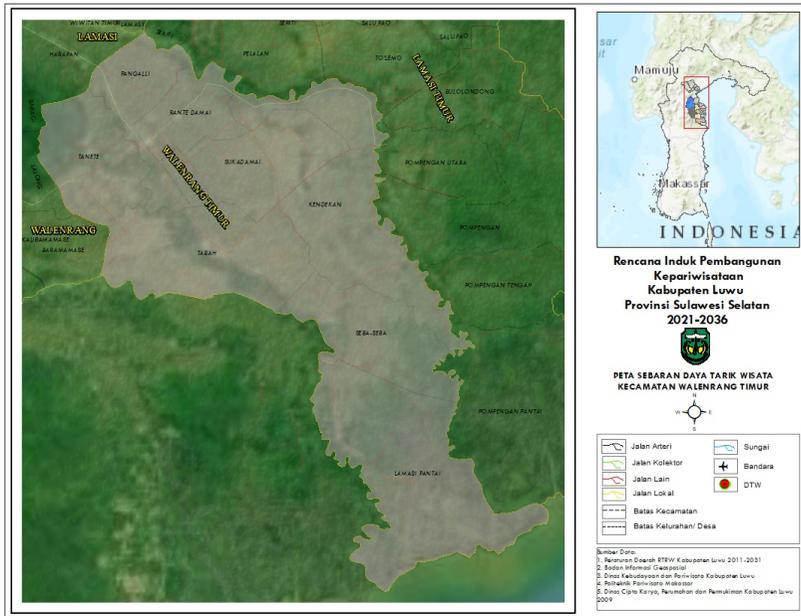
Kondisi aktual Daya Tarik Wisata di KSPD Walenrang dan sekitarnya hanya 1 daya tarik dan atraksi wisata yang ada, dan termasuk kategori “Potensial” untuk dikembangkan.

18. KSPD Walenrang Timur dan Sekitarnya

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Walenrang dan sekitarnya, dengan luas wilayah kecamatan adalah 63,65 km², yang terdiri dari 8 buah desa/ kelurahan, yaitu Tabah, Lamasi Pantai, Seba-Seba, Kendekan, Sukadamai, Rante Damai, Pangalli dan Tanete. Kawasan ini terletak pada ketinggian antara 0-500 mdpl.

Jumlah penduduk pada kecamatan Walenrang Timur pada tahun 2020 tercatat sebanyak 5.762 jiwa, dengan populasi tertinggi terdapat di Tabah yang mencapai 2.830 jiwa dan jumlah penduduk terkecil pada kawasan ini terdapat di Pangalli yang hanya sebanyak 1.555 jiwa.

Gambar 10.24
Peta KSPD Walenrang Timur dan Sekitarnya



Sumber : Data Olahan, 2021

Sarana transportasi antar wilayah dalam kawasan ini sebahagian besar telah dapat diakses kendaraan umum dengan trayek tetap. Masih terdapat wilayah yang diakses dengan angkutan umum trayek tetap, yaitu di Tanete, dan untuk wilayah Kendekan belum terdapat akses angkutan umum..

Kondisi akses jalan dalam kawasan kecamatan Walenrang Timur pada tahun 2020 menunjukkan bahwa sebahagian besar jalan akses antar desa/ kelurahan dalam kawasan dengan permukaan jalan dari aspal dan beton sehingga dapat diakses dengan baik dan aman sepanjang tahun, serta masih terdapat akses jalan dalam kondisi pengerasan batu/ kerikil yaitu di Kendekan, Sukadamai, Rantai Damai dan Pangalli. Kawasan ini merupakan salah satu wilayah penghasil produk pertanian berupa sayur-sayuran, buah-buahan, serta hasil perkebunan.

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Walenrang Timur dan sekitarnya merupakan kawasan strategis dengan tema unggulan aktivitas dan atraksi wisata yang didominasi oleh pantai dan desa wisata serta tinggalan sejarah dan budaya. Daya tarik utama dari kawasan ini adalah Kawasan desa Lamasi Pantai. Kondisi potensi wisata pada Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Walenrang Timur dan sekitarnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10.18
Kondisi Aktual Daya Tarik Wisata KSPD Walenrang Timur dan Sekitarnya

No	Nama DTW	Atraksi	Kondisi Aktual
DTW Alam			
1	Kawasan Desa Lamasi Pantai	1. Minat Khusus 2. Panorama alam	Potensial

Sumber : Data Olahan, 2021

- 2019 Tim Penyusun/ Penyusunan Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisata Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat
- 2019 Tenaga Ahli Pembuatan Master Plan Obyek Wisata Kabupaten
Jeneponto
- 2020 Koordinator Bidang Riset dan Pengembangan Data/ Badan Promosi
Pariwisata Daerah Sulawesi Selatan
- 2020 Pengolah Data/ Penelitian Prodi Destinasi: Pemetaan Risiko Bencana
pada Daya
Tarik Wisata di Provinsi Sulawesi Selatan
- 2020 Tim Survei/ Penelitian Prodi Perjalanan: Kesiapan Lembaga Pendidikan
Pariwisata dalam Menerapkan *E-commerce*.
- 2020 Fasilitator dan Pendamping/ Dispar Kota Makassar: Kelompok Sadar
Wisata
Kota Makassar (11 KSW).
- 2020 Tim Konsultan: Pemetaan Potensi sebagai Desa Wisata Kabupaten
Takalar (Desa
Popo Kecamatan Galesong Selatan)
- 2021 Tim Konsultan: Pemetaan Potensi sebagai Desa Wisata Kabupaten
Enrekang (Desa Kadingeh Kecamatan Baraka: Desa Langda
Kecamatan Buntu Batu)

Jasman, ST., M.Si., ahli dibidang perencanaan destinasi.